



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Faculty of
Economics
and Business

LAPORAN PENELITIAN

EVALUASI PROSES BISNIS & DAMPAK EKONOMI PUSAT LOGISTIK BERIKAT INDONESIA

Kusdhianto Setiawan, Ph.D. | Luluk Lusiantoro, Ph.D. | Gumilang Aryo Sahadewo, Ph.D.

LAPORAN PENELITIAN

EVALUASI PROSES BISNIS & DAMPAK EKONOMI PUSAT LOGISTIK BERIKAT INDONESIA

PENELITI:

Kusdhianto Setiawan, Ph.D. | Luluk Lusiantoro, Ph.D. | Gumilang Aryo Sahadewo, Ph.D.

ASISTEN PENELITI:

Ipuk Widayanti, S.E | Rizka Isnaini Husna, S.E
Zulfikar Fikri Amin., B.Com. | Damas Pandya Janottama

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	01 – 05
Bab 1: Pendahuluan	06 – 08
Bab 2: Landasan Teori & Tinjauan Pustaka	09 – 19
Profil Pusat Logistik Berikat	10
Efektivitas Pusat Logistik Berikat: <i>Importance-Performance Analysis</i>	13
Kontribusi dan Dampak PLB terhadap Perekonomian	15



Bab 3: Metode Penelitian 20 – 33


Desain penelitian	21
Metode Pengumpulan Data	23
Metode Analisis Data	26

Bab 4: Hasil Penelitian 34 – 126

Tujuan Penelitian I: Efektivitas Proses Bisnis PLB	43
Tujuan Penelitian II: Evaluasi Kontribusi dan Dampak PLB Terhadap Perekonomian	87
<i>Showcase</i> Industri Manufaktur dan Pertambangan Migas	112



Bab 5: Kesimpulan dan Saran	127 – 130
Daftar Pustaka	131 – 133
Lampiran	134 – 138



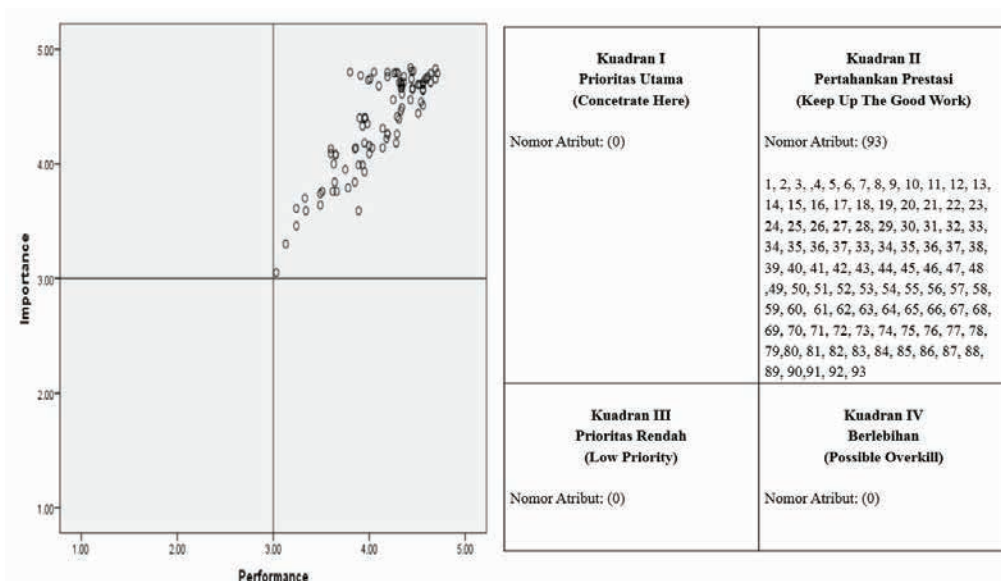
Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proses bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB) serta mengevaluasi dampak dan kontribusi PLB terhadap perekonomian Indonesia. Hasil survei terhadap operator dan pengguna PLB menunjukkan bahwa secara umum proses bisnis PLB dinilai efektif dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dengan kata lain, program PLB telah dinilai *on the right track*. Penelitian ini meneguhkan kembali peran PLB sebagai sebuah alternatif pengelolaan logistik yang transparan dan bebas dari pungli, serta terintegrasi langsung dengan pihak bea cukai. PLB memberikan manfaat yang besar, seperti penangguhan bea masuk sampai dengan 3 tahun yang memberikan fleksibilitas pengeluaran barang secara parsial yang dapat membantu arus kas pengguna, penurunan *dwelling time* secara signifikan, serta penyelesaian kegiatan cukai secara lebih efisien. Namun demikian, perbaikan secara berkelanjutan dapat dilakukan ke depan terutama pada beberapa aspek yang dinilai penting oleh pengguna PLB namun kinerjanya masih perlu ditingkatkan, seperti aspek layanan terkait kepemilikan barang dalam PLB serta fasilitas ekspor yang berpotensi memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Harmonisasi dan sosialisasi regulasi terkait PLB juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat logistik di Asia Pasifik.

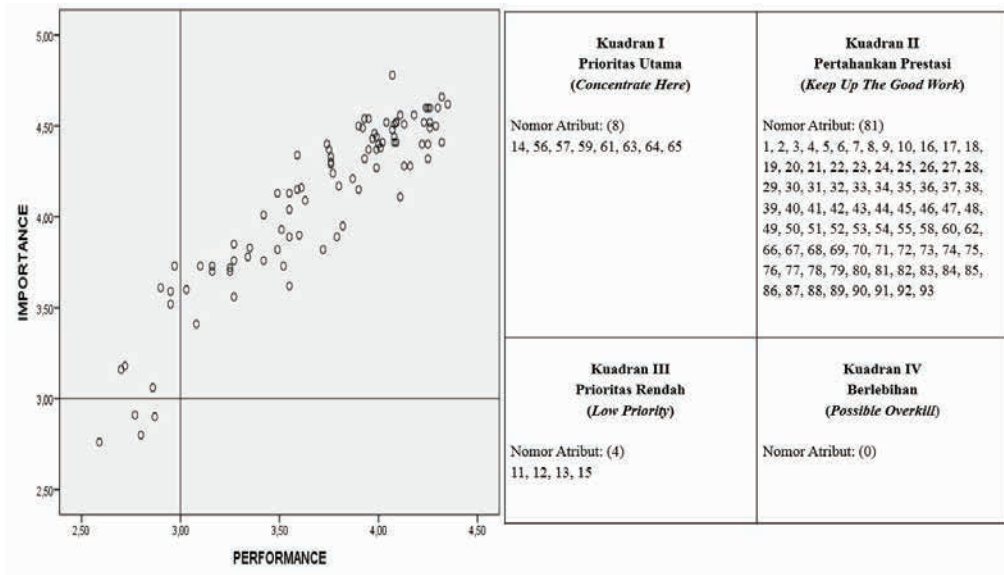
Untuk mengevaluasi proses bisnis PLB penelitian ini menggunakan *Importance Performance Analysis* yang telah dikembangkan oleh Martilla dan James (1977). Tim peneliti menyusun 93 item

pertanyaan yang diklasifikasikan ke dalam 10 dimensi yang secara komprehensif dapat mengukur efektivitas kinerja PLB. Analisis IPA diaplikasikan ke dalam respon operator PLB dan juga respon klien PLB. Berdasarkan hasil analisis, operator PLB menganggap baik tingkat kepentingan maupun tingkat kinerja seluruh item dalam kuesioner lebih dari angka 3 yang berarti menurut operator 93 item kuesioner penting/sangat penting akan tetapi kinerjanya juga baik/sangat baik (lihat Gambar A.1). Sedikit berbeda dengan respon operator, respon klien PLB menunjukkan 8 item dari 93 item kuesioner masih perlu menjadi prioritas utama karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerjanya rendah (lihat Gambar A.2). Adapun 8 item tersebut adalah:

1. Item nomor 14: barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh pemasok diluar daerah pabean
2. Item nomor 56: konsolidasi barang tujuan ekspor
3. Item nomor 57: penyediaan barang tujuan ekspor
4. Item nomor 59: *maintenance* pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (*painting*)
5. Item nomor 61: pemberian label berbahasa Indonesia
6. Item nomor 63: pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai
7. Item nomor 64: lelang barang modal asal luar daerah pabean
8. Item nomor 65: pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean



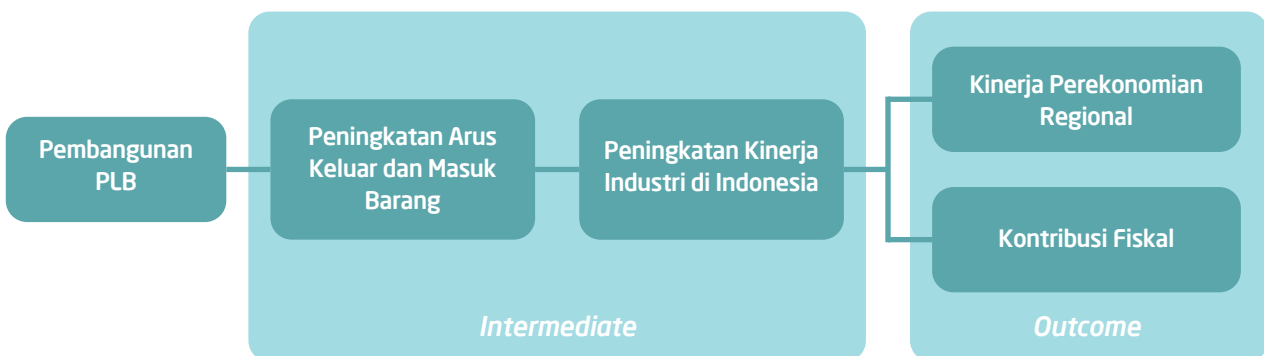
Gambar A.1. Matriks IPA Overall Operator PLB X,Y=3



Gambar A.2. Matriks IPA Overall Klien PLB X,Y=3

Untuk mengevaluasi kontribusi dan dampak PLB terhadap perekonomian, penelitian ini akan menggunakan metode evaluasi dampak. Tim peneliti menyusun sebuah teori perubahan dalam menjelaskan bagaimana PLB dapat berdampak pada perekonomian (lihat Gambar A.3). Pertama, pembangunan PLB beserta berbagai fasilitasnya akan meningkatkan arus keluar dan masuk barang ke Indonesia. Meningkatnya impor terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri akan meningkatkan *output* sehingga terjadi

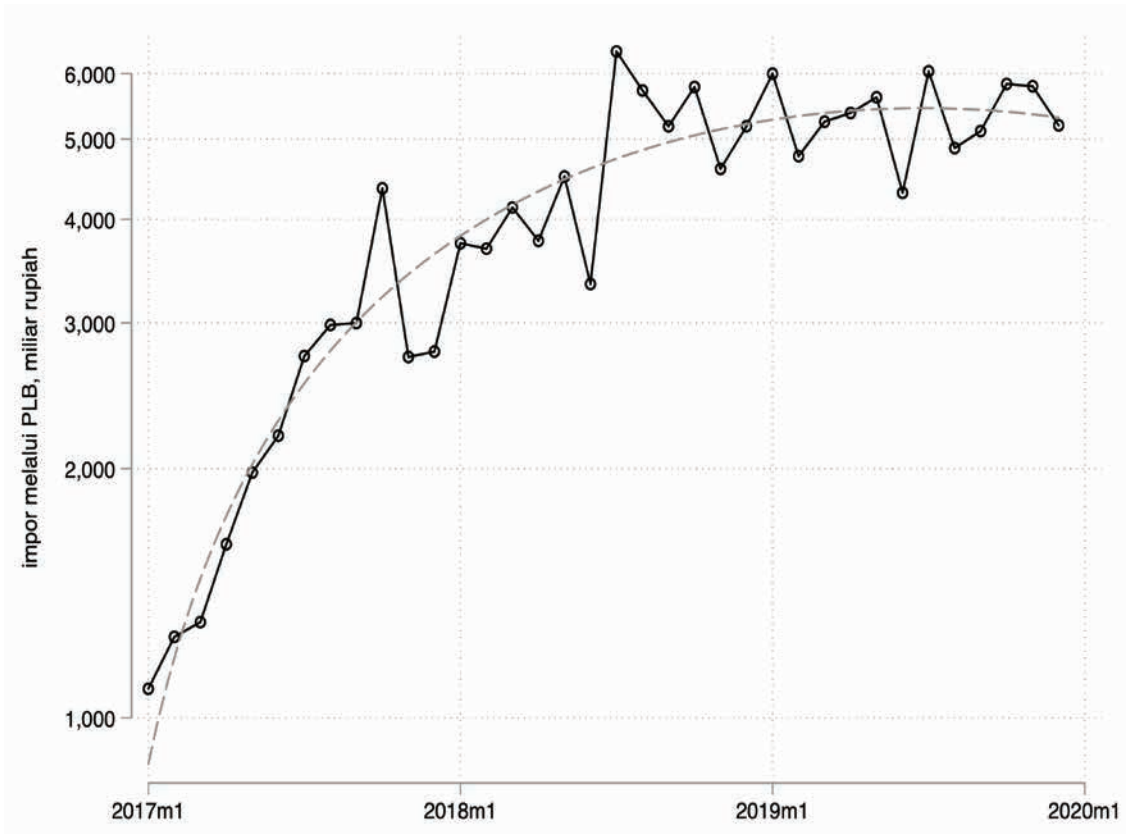
peningkatan kinerja industri. Peningkatan kinerja industri secara menyeluruh akan mendorong perekonomian daerah dimana industri tersebut berada. Selain itu, meningkatnya impor untuk memenuhi kebutuhan industri akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak dalam rangka impor. Berdasarkan teori perubahan tersebut, peneliti akan mengestimasi dampak pembangunan PLB terhadap arus keluar masuk barang, kinerja industri, perekonomian regional, dan kontribusi fiskal.



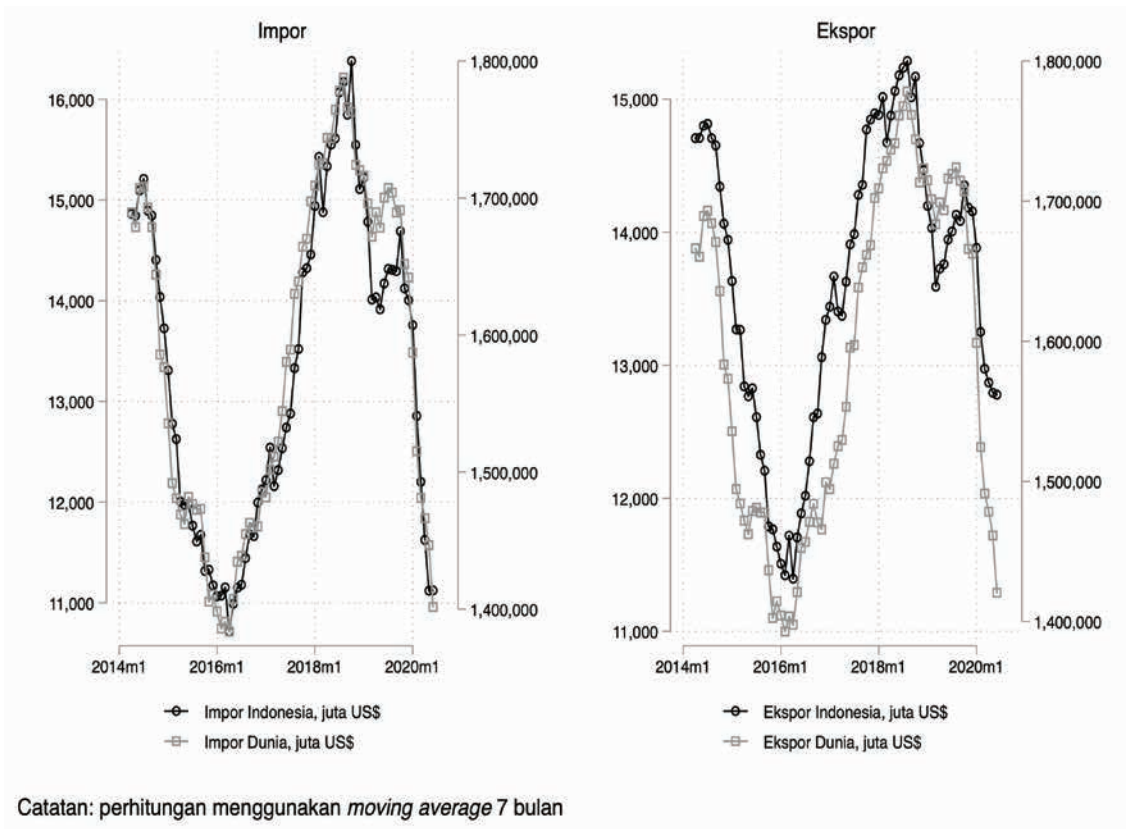
Gambar A.3. Teori Perubahan Evaluasi Dampak PLB terhadap perekonomian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PLB terbukti mempengaruhi arus keluar-masuk barang. Tren impor (lihat Gambar A.4) dan ekspor meningkat cukup signifikan sejak PLB berdiri tahun 2016. Selain itu, pertumbuhan devisa impor melalui PLB lebih tinggi dibandingkan melalui TPB. Akan tetapi, terjadi perlambatan pertumbuhan impor dan ekspor pada

tahun 2019 karena disrupsi perang dagang AS dan Cina. Dampak perang dagang terhadap Indonesia cukup besar karena Indonesia cukup terintegrasi dengan rantai pasokan dan rantai nilai secara global (lihat Gambar A.5). Temuan ini menggarisbawahi bahwa PLB merupakan intervensi yang tepat untuk meningkatkan performa perdagangan Indonesia.



Gambar A.4. Tren Impor Melalui PLB
 Sumber: diolah dari data DJBC



Catatan: perhitungan menggunakan *moving average* 7 bulan

Gambar A.5. Perbandingan Ekspor-Impor Indonesia dengan Dunia
 Sumber: diolah dari data BPS dan CEIC

PLB juga terbukti mendorong kinerja industri di Indonesia dengan (1) mempermudah akses bahan baku dan bahan penolong dari luar negeri untuk lebih dari 60% responden industri klien; (2) meningkatkan ketepatan waktu pengiriman bahan baku dan penolong untuk lebih dari 60% responden industri klien; (3) menurunkan biaya logistik terutama biaya komunikasi, pengelolaan sediaan, dan biaya material *handling*; (4) meningkatkan *output* dan keberdayasaingan untuk lebih

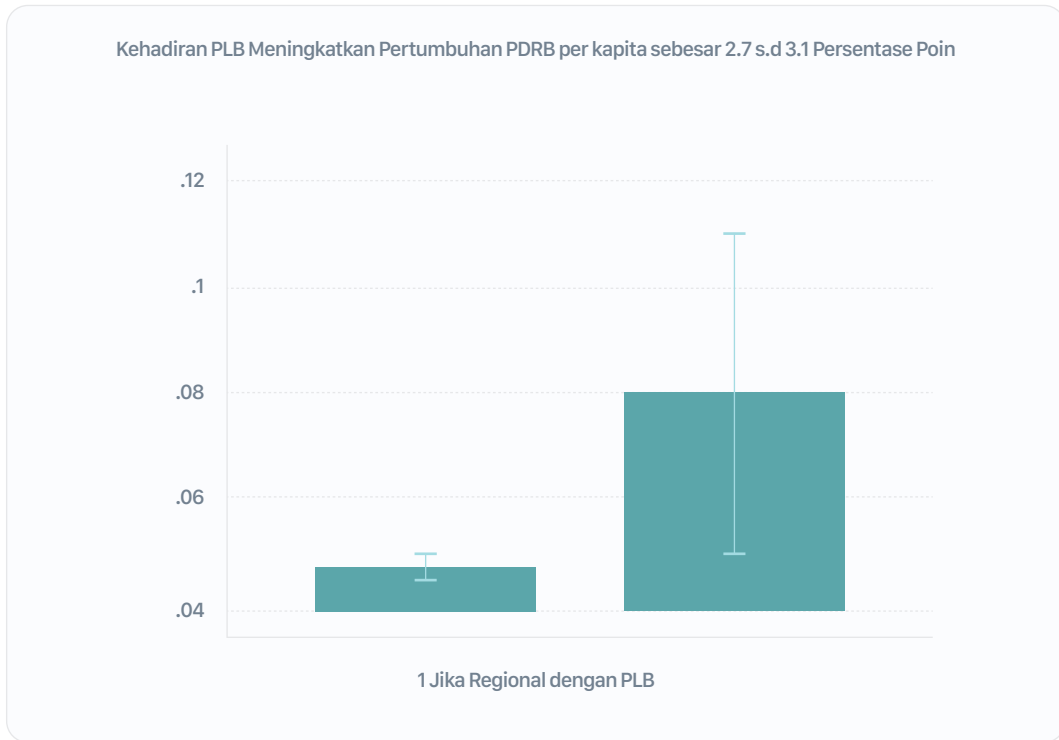
dari 40% responden industri klien. Dampak-dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar dan perusahaan swasta nasional-asing, namun juga perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. Secara umum, hasil analisis tim peneliti menunjukkan bahwa industri yang menikmati PLB memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sebesar 23,4% dan ekspor lebih tinggi sebesar 26,2% (lihat Gambar A.6) dibandingkan industri yang tidak menikmati PLB.



Gambar A.6. Dampak PLB terhadap Ekspor dan Impor Industri
Sumber: diolah dari Bank Indonesia

Kehadiran PLB memiliki dampak positif terhadap perekonomian regional dengan meningkatnya pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 2,7 sampai dengan 3,1 poin persentase (lihat Gambar A.7). Hasil ini selaras dengan studi World Economic Forum, Bain & Company, dan Bank Dunia (2013) yang menunjukkan

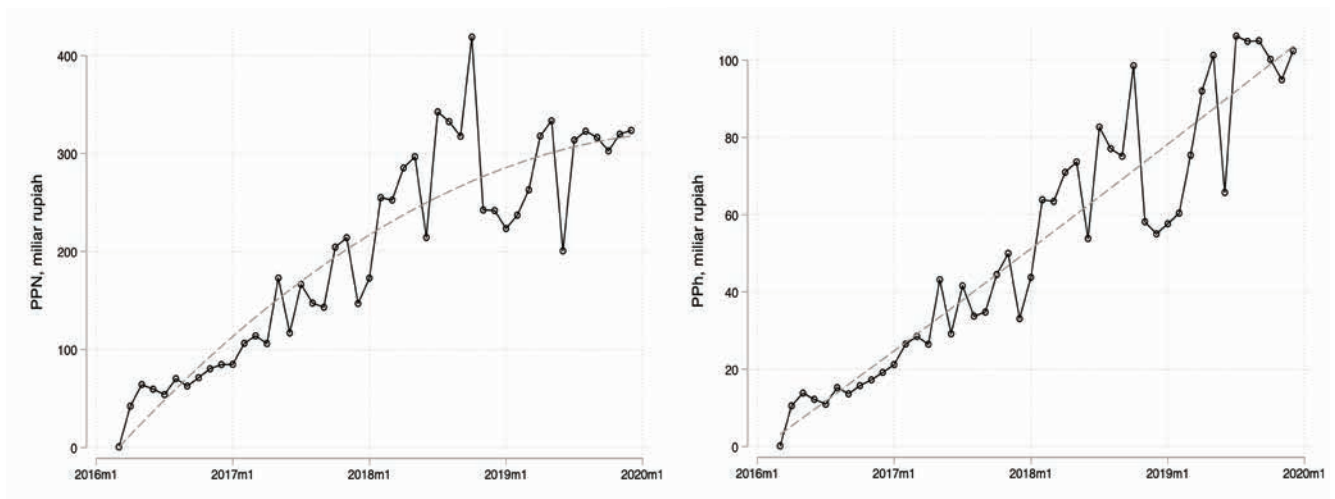
bahwa pengurangan hambatan rantai pasokan meningkatkan PDB sekitar 5%. Sementara itu, daerah yang memiliki PLB memiliki pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi sebesar 14,2-15,9 poin persentase.



Gambar A.7. Dampak PLB terhadap Perekonomian Regional
 Sumber: diolah dari data CEIC

PLB juga berkontribusi pada fiskal negara. Penerimaan negara dari pajak dalam rangka impor (PDRI) yang dibayarkan dari arus barang keluar PLB seperti PPN dan PPh mengalami peningkatan setelah adanya PLB

(lihat Gambar A.8). Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya PLB telah memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia.



Gambar A.8. Tren Penerimaan PPN dan PPh dari Arus Barang Keluar PLB
 Sumber: diolah dari data DJBC



BAB 1 PENDAHULUAN

06 – 08



Pendahuluan

Latar Belakang

Daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas saat ini tercermin dari biaya logistik nasional. Survei LPI memberikan gambaran kinerja logistik menyeluruh suatu negara yang mencakup prosedur kepabeanan, biaya logistik, kualitas infrastruktur dalam melacak pengiriman, dan ketepatan waktu sampai ke tujuan serta kompetensi industri logistik nasional (World Bank, 2018). Berdasarkan laporan *Logistic Performance Index* (LPI) yang dikeluarkan World Bank, peringkat Indonesia pada tahun 2018 berada di urutan ke-46 dengan skor 3,15. Secara historis, peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang berada di urutan ke-63. Peningkatan LPI masih belum mencerminkan daya saing produk Indonesia di kancah regional melihat negara-negara ASEAN juga masih berada di atas Indonesia. Hanya Filipina dan Kamboja yang berada di bawah Indonesia dengan peringkat 60 dan 98. Negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam terus melesat untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas logistiknya.

Isu peningkatan daya saing Indonesia dalam perdagangan bebas ini mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Hal tersebut menyusul kekecewaan Jokowi terhadap masa tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang masih terbilang lama. Masa bongkar muat yang lama tentu dapat membuat rantai pasokan bahan baku dan bahan penolong yang berasal dari luar negeri terhambat. Biaya pengadaan dan biaya penyimpanan bahan baku juga dapat meningkat. Masih tingginya ongkos logistik ini juga dapat berdampak pada rantai pasokan produksi yang

tidak efisien dan berdaya saing rendah.

Kekecewaan Presiden Joko Widodo pun langsung dijawab dengan pembuatan terobosan di bidang logistik berupa kebijakan pemberian insentif untuk pengembangan kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Kebijakan PLB menjadi salah satu poin kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam paket Kebijakan Ekonomi Volume II pada bulan September 2015. PLB diharapkan dapat meningkatkan keefektifan biaya logistik dan transportasi serta mampu mendorong pertumbuhan industri domestik terutama industri kecil dan menengah, serta meningkatkan ketertarikan investor asing dan lokal untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik.

PLB merupakan bentuk Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di dalam negeri untuk barang impor terutama bahan baku dan bahan penolong yang berlokasi di kawasan industri dengan insentif berupa penundaan bea masuk dan pajak serta diberlakukan peraturan kepabeanan barang. Insentif melalui fasilitas PLB memberikan banyak keuntungan bagi pelaku industri di Indonesia. Data dari Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menunjukkan bahwa hingga Juli 2020, 128 perusahaan telah terdaftar sebagai PLB yang tersebar di 177 lokasi di Indonesia. Fasilitas PLB yang berupa penangguhan pajak impor dan pembayaran bea masuk, waktu pengiriman logistik yang singkat, masa penyimpanan sampai dengan tiga tahun, serta pengurangan biaya penyimpanan (*overtime cost*) menjadi keuntungan yang ditawarkan bagi para pelaku industri dari sisi perputaran bahan baku.

“Kebijakan PLB dapat memberikan dampak positif bagi industri-industri tersebut terutama dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.”

Berbagai tawaran keuntungan yang menarik menjadi harapan PLB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi dan efisiensi proses bisnis. Hal ini juga dapat menekan panjangnya rantai pasok di dalam negeri dan mengoptimalkan fungsi pelabuhan sebagai salah satu simpul logistik nasional. Dengan bantuan tersebut, dunia industri terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM) diharapkan menjadi lebih kompetitif. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian tahun 2019, jumlah IKM di dalam negeri mencapai 4,4 juta unit usaha yang menyerap 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi 65% dari sektor industri secara keseluruhan. Kontribusi IKM terhadap ekspor nasional mencapai US\$ 3,35 miliar sepanjang Januari hingga September 2019. Angka tersebut naik hampir 10% di periode yang sama tahun 2018. Besarnya kontribusi IKM tentu harus dioptimalkan dengan menarik investor asing dan domestik dan efisiensi rantai pasokan. Kebijakan PLB dapat memberikan dampak positif bagi industri-industri tersebut terutama dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Rumusan Masalah

PLB merupakan tempat penumbang barang bagi pemasok asing dan domestik. Keberadaan PLB dianggap telah memudahkan para pelaku usaha impor dan ekspor melalui berbagai fasilitas baik fiskal, seperti insentif penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) maupun non-fiskal, seperti pengurangan *dwelling time* dan peningkatan akses industri manufaktur terhadap pasokan bahan baku maupun penolong. Namun, dalam perjalanannya, perhatian terkait efektivitas proses bisnis dan dampak ekonomi dari


Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proses bisnis PLB semenjak berdirinya lembaga tersebut, serta mengevaluasi kontribusi dan dampak PLB terhadap perekonomian Indonesia. Efektivitas proses bisnis PLB dievaluasi menggunakan *Importance-Performance Analysis* (IPA). Kinerja PLB terhadap perekonomian Indonesia dievaluasi menggunakan statistik deskriptif antar waktu. Sementara itu, kontribusi PLB terhadap perekonomian Indonesia dievaluasi dengan analisis arus keluar-masuk barang, kinerja industri regional, dan kontribusi fiskal menggunakan metode evaluasi dampak seperti *pre-post* dan *simple difference*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peta kinerja PLB dan rekomendasi terkait aspek-aspek pelayanan PLB yang masih perlu ditingkatkan ke depan. Selain itu, evaluasi dampak ekonomi PLB diharapkan dapat memberikan bukti empiris pengaruh adanya kebijakan PLB pada perekonomian regional dan nasional sehingga dapat menjadi bahan evaluasi PLB untuk perbaikan di masa yang akan datang.

pendirian PLB di Indonesia semakin meningkat. Sementara itu, proses bisnis dan dampak ekonomi dari PLB masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Untuk itu, kajian evaluasi PLB perlu dilakukan untuk menilai efektivitas proses bisnis PLB dalam memberikan pelayanan bagi pelaku industri. Kajian evaluasi juga diperlukan untuk menilai kontribusi dan dampak PLB terhadap perekonomian Indonesia.

Tujuan Penelitian

a. Mengevaluasi efektivitas proses bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB).

b. Mengevaluasi kontribusi dan dampak Pusat Logistik Berikat (PLB) terhadap perekonomian Indonesia.

A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, featuring large pipes, walkways, and a tall chimney stack against a clear blue sky. The image is overlaid with a semi-transparent white gradient.

BAB 2

LANDASAN TEORI & TINJAUAN PUSTAKA

09 – 19

Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Profil Pusat Logistik Berikat

Pusat logistik berikat (PLB) merupakan tempat penimbunan barang (TPB) domestik maupun asing yang diciptakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat untuk meningkatkan daya saing logistik nasional dengan menekan biaya logistik melalui pengurangan *dwelling time* dan penangguhan bea dan cukai. PLB diciptakan sebagai jawaban atas

permasalahan logistik yang ada di Indonesia, serta untuk mengangkat industri kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Hingga Juli 2020, tercatat 128 perusahaan telah terdaftar sebagai PLB yang tersebar di 177 lokasi yang di seluruh Indonesia (Database PLB, 2020). Cakupan penimbunan komoditas PLB pun beragam, seperti bahan baku manufaktur, bahan pembantu manufaktur, barang kena cukai minuman mengandung etil alkohol (BKC MMEA), dan barang jadi non MMEA.

“PLB diciptakan sebagai jawaban atas permasalahan logistik yang ada di Indonesia, serta untuk mengangkat industri kecil dan menengah yang ada di Indonesia.”

► Model Bisnis

PLB bukanlah semata-mata jasa *warehousing* dan perizinan bea dan cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 272/PMK.04/2015, terdapat 18 kegiatan yang dapat dilakukan di dalam PLB dan dapat disediakan oleh pengusaha PLB maupun jasa outsource dan barang dari dalam dan luar kepabeanan tersebut dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu. Ke-18 kegiatan tersebut antara lain:

1. Pengemasan atau pengemasan kembali;
2. Penyortiran;
3. Standardisasi (*Quality Control*);
4. Penggabungan (*Kitting*);
5. Pengepakan;
6. Penyetelan;
7. Konsolidasi barang tujuan ekspor;
8. Penyediaan barang tujuan ekspor;
9. Pemasangan kembali dan/atau perbaikan;
10. Maintenance pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (*painting*);
11. Pembauran (*blending*);
12. Pemberian label berbahasa Indonesia;
13. Pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai (BKC);
14. Lelang barang modal asal luar daerah pabean;
15. Pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean;
16. Pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan;
17. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh instansi teknis terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor; dan/atau
18. Kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

► Fasilitas

Berbedanya fasilitas dan jasa yang disediakan oleh PLB dan organisasi non-PLB tentunya menarik klien yang berbeda pula. Dengan insentif fiskal dan penimbunan barang yang lebih fleksibel dibandingkan organisasi non-PLB, PLB menarik para pengguna dari sektor industri bahan baku manufaktur, bahan pembantu manufaktur, BKC MMEA, dan BKC non-MMEA.

Sedangkan organisasi non-PLB menarik sektor industri seperti otomotif, manufaktur, dan migas. Tabel 2.1 menunjukkan perbedaan klien dan layanan yang disediakan oleh organisasi PLB dan organisasi non-PLB. Tabel 2.2 menunjukkan perbedaan antara PLB dengan jenis TPB lainnya.

Tabel 2.1. Perbedaan Organisasi PLB dan Organisasi non-PLB

Bagian Pelayanan			
No	Pembanding	PLB	Non-PLB
1	Kepemilikan Barang	Kepemilikan sendiri, Konsinyasi, atau Titipan	Kepemilikan barang bebas
2	Masa Timbun	Lebih dari 3 Tahun	Lebih dari 30 hari barang bebas PLBI 08 September 2020
3	Jangka Waktu Izin	Seumur hidup sampai dicabut	5 tahun atau berakhir masa penguasaan
4	Kegiatan	Penimbunan & kegiatan sederhana	Penimbunan, distribusi, transportasi
5	Nilai Pabean	Digunakan NP saat pengeluaran	Digunakan NP saat pengeluaran
6	Ketentuan Pembatasan	Belum diberlakukan saat pemasukan	Belum diberlakukan saat pemasukan
7	<i>Certificate of Origin</i>	Diterima & bisa pengeluaran parsial	Diterima dan satu kali pengeluaran
8	Pengenaan Fiskal saat Pengeluaran	Bea Masuk- Pajak Impor	Bea Masuk dan Pajak Impor
9	Penyelesaian Fasilitas <i>Masterlist</i>	Penyelesaian sewa BOP Migas – <i>Cost Recovery</i>	Tidak ada
10	Izin untuk Beberapa Lokasi	Dimiliki badan hukum sama	Tidak ada
11	Bentuk Skep	<i>Customized</i> , Tematik, KPI	Standard
12	Pembayaran Bea Masuk	Dokumen berkala dan Pembayaran ditunda *)	Langsung diberlakukan
13	Asal dan Tujuan Barang	Asal: Fleksibel Tujuan: Fleksibel "one to many, many to one, many to many"	Asal: Luar dan Dalam Negeri (khusus ekspor) Tujuan: Fleksibel
Bagian Klien			
1	Klien	Barang yang ditimbulk dalam PLB kebanyakan berupa bahan baku industri manufaktur seperti: bahan baku makanan, Biji kopi, lada, gula, biji coklat, suku cadang kendaraan bermotor, biji kakao, daun teh, cangkang sawit, <i>crude palm oil</i> (CPO), <i>crude palm kernel oil</i> (CPKO), <i>crude palm kernel olein</i> (CPKL), <i>refined bleached deodorized palm oil</i> (RBDPO), <i>palm fatty acid distillate</i> (PFAD), <i>rbd olein</i> , <i>rbd stearin</i> , <i>palm methyl ester</i> (fame, biodiesel), <i>palm based fatty acid</i> , kapas, benang dan bahan baku lainnya.	Pertambangan, migas, pembangkit listrik & konstruksi, otomotif, manufaktur, perkebunan dan produk farmasi.

Sumber: dirangkum dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011

Tabel 2.2. Perbandingan antar Tempat Penampungan Barang

Fasilitas	Pusat Logistik Berikat (PLB)	Gudang Berikat (GB)	Kawasan Berikat (KB)	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil & Menengah (IKM)
Penangguhan Bea Masuk	✓	✓	✓	✓	✓
Pembebasan Bea Masuk	✗	✗	✗	✓	✓
Pembebasan Cukai	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak Dipungut Pajak Impor	✓	✓	✓	✓	✓
Pembebasan Pajak Impor	✗	✗	✗	✗	✗
Tidak Dipungut Pajak Lokal	✗	✗	✗	✗	✗
Pengawasan dan Pengelolaan Barang	✓	✗	✗	✗	✗

Sumber: dirangkum dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011

Perbedaan paling terlihat pada pengawasan barang masuk dan keluar. Keberadaan PLB membawa konsep *custom* artinya mengutamakan rasa saling percaya antara regulator dan PLB terhadap barang masuk dan keluar PLB menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi dan informasi. Bentuk pengawasan berupa IT *Inventory*, CCTV, dan IT *Management System*.

► Peraturan

PLB didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dilakukan oleh PLB dideskripsikan melalui PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. Kegiatan tersebut ditindaklanjuti dan diperdalam melalui Perdirjen BC Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat. Untuk pemindahan barang dari Pabean ke PLB diatur melalui Perdirjen BC

Nomor PER-02/BC/2016 terkait penggunaan BC 1.6. Sedangkan pemasukan barang kedalam negeri dari PLB diatur menggunakan Perdirjen BC Nomor PER-03/BC/2016 terkait penggunaan BC 2.8. Penggunaan gudang berikat dan PLB diatur dalam PMK 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat. Dan penggunaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor diatur dalam PMK 160/PMK.04/2018 & 161/PMK.04/2018 Perdirjen 04/BC/2019 & 03/BC/2019 tentang KITE.

Efektivitas Pusat Logistik Berikat

► Importance-Performance Analysis

Martilla dan James (1977) memperkenalkan teknik *Importance-Performance Analysis* (IPA) untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan produk dan servis spesifik. *Importance-Performance Analysis* (IPA) menganalisis kepentingan dan peringkat kinerja atribut untuk mengidentifikasi atribut yang paling menonjol bagi konsumen atas sebuah layanan (Douglas *et al.*, 2006). Metode IPA memberikan ukuran seberapa baik suatu layanan dapat memenuhi kebutuhan konsumennya (Joseph dan Joseph, 1997). Dengan demikian, IPA memungkinkan praktisi untuk mengevaluasi strategi layanan yang ada, mengidentifikasi area prioritas untuk perbaikan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif (Feng *et al.*, 2014). IPA juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi penggunaan

sumber daya organisasi yang lebih efisien (O'Neil dan Palmer, 2004).

Metode *Importance-Performance Analysis* (IPA) ini digunakan secara umum oleh banyak proyek penelitian di berbagai bidang karena mudah diaplikasikan dan diinterpretasikan (Frauman dan Banks, 2011). Proyek penelitian yang menggunakan metode ini termasuk beberapa proyek sanitasi (Yavas dan Shemwell 2001), manajemen pendidikan (Alberly dan Mihalik 1989; Padlee, *et al.*, 2020), manajemen industri (Hansen dan Bush 1999), pemasaran internal (Novatorov, 1997), kualitas layanan (Hudson dan Shephard, 1998), *large sporting event* (Camachoa, *et al.*, 2020), dan manajemen pariwisata (Bruyere, Rodriguez, dan Vaske 2002; Uysal, Howard, dan Jamrozy 1991; Ogunmokuna, *et al.*, 2020)

► Interpretasi atas Importance-Performance Analysis

Importance Performance Analysis (IPA) adalah teknik analisis grafis yang menghasilkan matriks kepentingan-kinerja (*importance-performance*) dua dimensi (lihat Gambar 2.1). Matriks ini berasal dari proses yang terdiri dari empat langkah berikut (Martilla dan James (1977):

1. Mengidentifikasi atribut yang akan diukur.
2. Memisahkan ukuran kepentingan dan ukuran kinerja.
3. Memposisikan sumbu vertikal pada skor rata-rata kepentingan dan sumbu horizontal pada skor rata-rata kinerja.
4. Menganalisis matriks kepentingan-kinerja.



Sumber: Martila dan James (1977)

Gambar 2.1. Matriks *Importance-Performance Analysis*

Pengoperasian metode IPA ini didasarkan pada hasil dari *mean gap* antara kepentingan (*importance*) dan kinerja (*performance*). Setiap atribut ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kuadran, I, II, III atau IV (lihat Gambar 2.1). Kuadran pertama merupakan prioritas utama yang perlu konsentrasi lebih dalam (*concentrate here*). Kuadran ini menunjukkan kinerja yang rendah pada atribut-atribut yang dinilai sangat penting oleh responden, sehingga perbaikan perlu segera dilakukan dan diprioritaskan. Douglas dkk. (2006) berpendapat bahwa kuadran pertama ini adalah kuadran yang paling penting dari perspektif manajerial. Kuadran kedua, pertahankan kerja yang sudah baik (*keep up the good work*), mewakili kinerja tinggi pada atribut-atribut yang

sangat penting sehingga menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan saat ini perlu dipertahankan. Kuadran ketiga, prioritas rendah (*low priority*), menunjukkan tingkat kepentingan yang rendah dan kinerja yang rendah. Kuadran ini menunjukkan bahwa atribut-atribut ini hanya memerlukan sedikit perhatian dan tidak mendesak untuk dilakukan perbaikan. Terakhir, kemungkinan berlebihan (*possible overkill*) merepresentasikan kinerja tinggi pada atribut yang dinilai responden tidak begitu penting, sehingga sumber daya yang telah tercurah untuk mencapai kinerja atribut-atribut tersebut dapat dialokasikan pada hal-hal lain dengan prioritas yang lebih besar.

Kontribusi dan Dampak PLB terhadap Perekonomian

► Penelitian tentang Dampak Kebijakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat kontribusi dan dampak PLB terhadap perekonomian Indonesia, peneliti perlu mengestimasi dampak adanya kebijakan PLB terhadap berbagai indikator ekonomi. Penelitian mengenai dampak

kebijakan terhadap indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi (*growth regression*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut (lihat Tabel 2.3):

Tabel 2.3. Penelitian mengenai *Growth Regression*

No	Penulis, Judul	Spesifikasi Model	Hasil
1	Besley and Burgess (2004) <i>Can Labor Regulation Hinder Economic Performance? Evidence from India</i>	OLS, OLS on matched differences, 2SLS - Y_{st} adalah log variabel <i>outcome</i> pada negara bagian s waktu t (utama: log total <i>output</i> manufaktur formal dan informal per kapita) - R_{st} adalah ukuran regulasi (lag 1 periode untuk menangkap gap antara waktu berlaku dengan implementasi) - X_{st} variabel eksogen lainnya (log populasi, log kapasitas listrik per kapita, log pengeluaran pembangunan per kapita, kelompok politik) - α_s adalah <i>state fixed effect</i> - β_t adalah <i>year fixed effect</i>	Penelitian ini menemukan bahwa negara bagian yang mengamandemen UU Perselisihan Industrial ke arah pro-pekerja mengalami penurunan <i>output</i> , lapangan kerja, investasi, dan produktivitas dalam manufaktur formal. Sebaliknya, <i>output</i> di manufaktur informal meningkat.
2	Rajan and Zingales (1998) <i>Financial Dependence and Growth</i>	Instrumental variable Variabel dependen: rata-rata tahunan pertumbuhan nilai tambah riil industri j di negara k dalam kurun waktu 1980-1990. Variabel independen: indikator negara, indikator industri, proporsi industri j terhadap manufaktur negara k 1980, dan interaksi antara external dependence industri j dengan financial dependence negara k . - Proksi untuk <i>financial development</i> : (1) rasio kredit domestik ditambah kapitalisasi pasar modal terhadap GDP (2) standar akuntansi dlm negara. - Proksi untuk <i>external finance dependence</i> : ketergantungan perusahaan di AS terhadap pendanaan eksternal	Perkembangan sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, paling tidak dengan mengurangi biaya pendanaan eksternal bagi perusahaan yang bergantung secara finansial.
3	La Porta, Lopez-De-Silanes, dan Shleifer (2002) <i>Government Ownership of Banks</i>	OLS Variabel dependen: rata-rata tahunan pertumbuhan GDP per kapita dari tahun 1960-1995 Variabel independen: GB70 (kepemilikan negara atas bank tahun 1970), <i>latitude</i> , log GDP per kapita tahun 1960, rata-rata lama sekolah, kredit privat per GDP tahun 1960 dan <i>dummy regional</i> . Ditambah: <i>dummy</i> inflasi tinggi tahun 1970-1995; atau <i>black market premium</i> tahun 1960-an; atau indeks intervensi pemerintah dalam ekonomi tahun 1975; atau tingkat margin pajak untuk level pendapatan tinggi tahun 1975; atau transfer dan subsidi per GDP tahun 1975; atau badan usaha negara dalam indeks ekonomi tahun 1975.	Kepemilikan negara atas bank yang tinggi pada tahun 1970 berhubungan dengan perlambatan perkembangan sektor keuangan dan rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita serta produktivitas negara.

No	Penulis, Judul	Spesifikasi Model	Hasil
4	Lee, (1993) <i>International Trade, Distortions, and Long-Run Economic Growth</i>	Instrumental Variable Variabel dependen: pertumbuhan GDP riil tahunan per kapita tahun 1960-85 Variabel independen: Log riil GDP per kapita, log pendaftaran sekolah sekunder, log rasio investasi domestik riil terhadap GDP riil, interaksi keterbukaan perdagangan bebas dengan log (1 + tarif impor barang intermediari dan kapital tertimbang), interaksi keterbukaan perdagangan bebas dengan log (1+ <i>black market premium</i>), dan <i>dummy</i> Sub-Sahara Afrika.	Penelitian ini menemukan distorsi perdagangan yang diukur dengan tingkat tarif dan <i>black market premium</i> , yang diinteraksikan dengan estimasi proporsi impor perdagangan bebas, memiliki dampak negatif signifikan pada pertumbuhan pendapatan per kapita antar negara.

Namun, penelitian-penelitian terdahulu yang mengestimasi dampak atau pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut (Rodrik 2012):

- 1. Robustness atau sensitivitas hasil estimasi terhadap spesifikasi model.** Penelitian yang dilakukan oleh Levine dan Renelt (1992) mencatat bahwa *growth regression* secara general tidak robust terhadap berbagai variasi variabel. Sala-i-Martin, Doppelhofer, dan Miller (2004) mencoba mengatasi hal tersebut menggunakan *Bayesian averaging of OLS estimates*.
- 2. Outliers.** Penelitian Easterly (2004) menemukan bahwa dampak dari kebijakan tidak ditemukan dalam *growth regression* karena mereka didorong oleh *outliers* yang merepresentasikan kebijakan yang sangat buruk.
- 3. Endogenitas.** Ketika suatu kebijakan tidak dilaksanakan secara acak dan kebijakan tersebut digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, permasalahan endogenitas akan timbul. Mengasumsikan bahwa kebijakan pemerintah adalah eksogen dan acak akan menghasilkan kesimpulan yang tidak valid atau bias. Beberapa literatur mikro

ekonomi mengenai evaluasi kebijakan lebih menunjukkan kesadaran terhadap bias yang ditimbulkan oleh endogenitas kebijakan seperti penelitian Rosenzweig and Wolpin (1986). Solusi yang biasa digunakan adalah *Instrumental Variable* (IV) dan *randomized controlled trials*. Akan tetapi, kedua metode tersebut tidak menjanjikan untuk diterapkan untuk penelitian dengan unit analisis negara. Oleh karena itu, penting untuk membangun intuisi bagaimana interpretasi mengarah ketika kebijakan bersifat endogen.

Selain tiga kekurangan di atas, kelemahan lainnya adalah parameter *heterogeneity*, *omitted variables*, *model uncertainty*, dan *measurement error*. Sepanjang intervensi kebijakan tidak acak dan kebijakan tersebut merespon variabel yang tidak terobservasi, estimasi dampak kebijakan terhadap performa ekonomi tidak akan memberikan informasi mengenai efektivitas kebijakan pemerintah yang dijalankan (Rodrik, 2012). Karena kelemahan-kelemahan *growth regression* tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode evaluasi dampak yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

► Metode Evaluasi Dampak

1. Konsep Kontrafaktual

Sebelum membahas berbagai metode evaluasi dampak, kita perlu memahami konsep – konsep dalam proses melakukan evaluasi dampak. Salah satu konsep penting evaluasi dampak adalah kontrafaktual. Kontrafaktual adalah situasi yang terjadi pada hasil atau *outcome* kelompok yang berpartisipasi dalam program (kelompok perlakuan/*treatment group*), seandainya tidak ada program (Gertler *et al.* 2016). Akan tetapi, kita tidak mungkin dapat mengobservasi satu unit yang sama pada dua keadaan yang berbeda (dengan atau tanpa

program) secara bersamaan. Karena kita tidak dapat mengobservasi kontrafaktual, yang dapat kita lakukan adalah mengestimasi.

Untuk mengestimasi kontrafaktual, kita membutuhkan kelompok pembanding atau *comparison group* yang tidak menerima program tetapi memiliki karakteristik yang secara rata – rata sama dengan kelompok perlakuan. Dengan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok perlakuan, diasumsikan kelompok pembanding dapat merespon program

dengan cara yang sama dengan kelompok perlakuan ketika diberi program maupun tidak diberi program. Jika kelompok pembanding tidak akurat mengestimasi

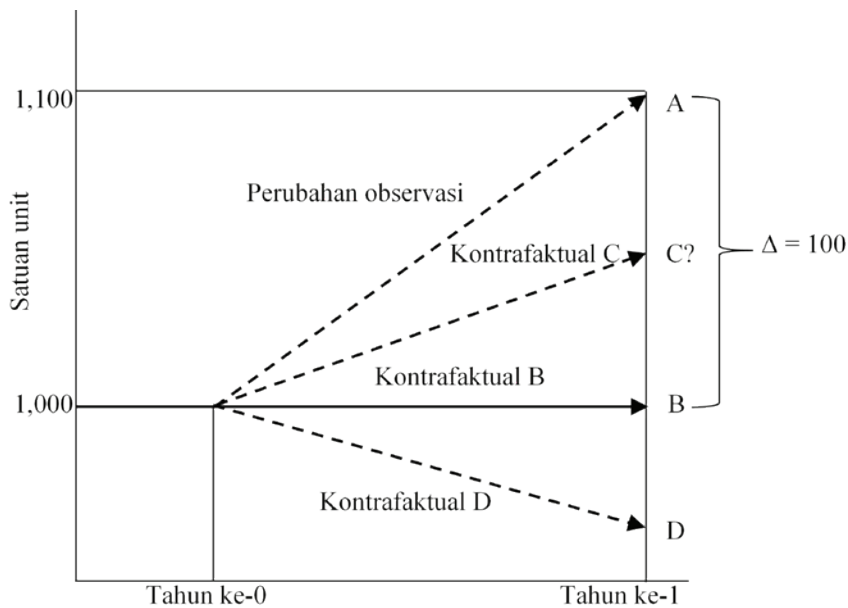
kontrafaktual yang sesungguhnya, estimasi dampak dari program akan tidak valid atau dalam istilah statistik disebut bias.

2. Metode *Pre-and-post (before-and-after)*

Metode *before-and-after* adalah metode evaluasi dampak yang membandingkan *outcome* dari individu/kelompok yang sama sebelum dan sesudah intervensi program. Metode ini mengasumsikan bahwa program adalah satu – satunya faktor yang mempengaruhi *outcome* sepanjang periode waktu. Kontrafaktual dari metode ini adalah *baseline outcome* atau keadaan individu/kelompok sebelum adanya program. Kelebihan metode ini adalah tidak memerlukan informasi mengenai individu/kelompok yang tidak berpartisipasi dalam program (Pomeranz 2017). Sedangkan kekurangan metode ini adalah terdapat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi *outcome* sepanjang periode waktu sehingga kita tidak dapat menghitung dampak sebenarnya dari program

hanya dengan membuat perbandingan *before-and-after*. Sebagai contoh, sebelum adanya program *outcome* dari kelompok perlakuan adalah 1,000 satuan unit (lihat Gambar 2.2). Setahun setelah menerima program *outcome* dari kelompok perlakuan menjadi 1,100 satuan unit (titik A). Dengan menggunakan metode *before-and-after*, kita dapat menyimpulkan bahwa program meningkatkan *outcome* dari kelompok perlakuan sebesar 100 satuan unit (B – A). Akan tetapi, misalkan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-1 terdapat faktor di luar program yang meningkatkan (titik C) atau mengurangi *outcome* awal kelompok perlakuan (titik D), maka kita tidak dapat melihat dampak program hanya dengan mengurangi *outcome* sebelum program dengan setelah program.

Gambar 2.2. Ilustrasi Metode *Before-and-After*



Sumber: Gertler et al. (2016)

3. Metode *With-and-without (simple difference)*

Metode *simple difference* menghitung dampak program dengan membandingkan situasi setelah adanya program pada kelompok yang berpartisipasi dalam program dengan kelompok yang tidak berpartisipasi dalam program (kelompok pembanding). Metode ini mengasumsikan kelompok pembanding memiliki karakteristik yang sama atau identik dengan kelompok yang berpartisipasi dalam program. Kontrafaktual dari metode ini adalah pihak yang tidak berpartisipasi dalam

program atau kelompok pembanding.

Metode ini tidak membutuhkan data situasi sebelum adanya program (Pomeranz 2017). Sayangnya, apabila kelompok perlakuan dan kelompok pembanding ternyata memiliki karakteristik yang berbeda sebelum adanya program, metode ini akan menghasilkan estimasi yang bias dan *underestimate/overestimate* dampak sebenarnya dari program. Hal ini sering disebut dengan masalah *selection bias*.

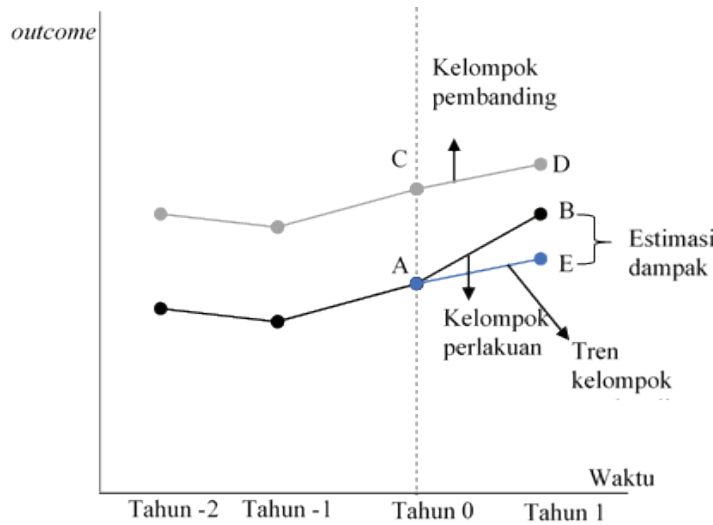
4. Metode *Difference-in-Differences*

Metode *difference-in-differences* (DD) membandingkan perubahan *outcome* antar waktu antara populasi yang berpartisipasi dalam program (kelompok perlakuan) dengan populasi yang tidak berpartisipasi dalam program (kelompok pembanding). Metode ini menggabungkan dua metode sebelumnya yaitu metode *before-and-after* dan *simple difference*. Kontrafaktual dari metode ini adalah perubahan *outcome* untuk kelompok pembanding dengan mengasumsikan *common trend*, artinya *outcome* dari kelompok

perlakuan akan bergerak secara bersama – sama dengan *outcome* kelompok pembanding tanpa adanya program.

Untuk mengestimasi dampak, metode ini menghitung selisih antara perbedaan *outcome* kelompok perlakuan sebelum dan sesudah program (B – A) dengan perbedaan *outcome* kelompok pembanding sebelum dan sesudah adanya program (D – C) (lihat Gambar 2.3 dan Tabel 2.4).

Gambar 2.3. Ilustrasi Metode *Difference-in-Difference*



Sumber: Gertler et al. (2016)

Tabel 2.4. Estimasi Dampak Metode *Difference-in-Difference*

	Setelah	Sebelum	Selisih/Perbedaan
Kelompok perlakuan	B	A	B – A
Kelompok pembanding	D	C	D – C
Selisih/perbedaan	B – D	A – C	DD impact = (B – A) – (D – C)

Sumber: Gertler et al. (2016)

Dalam notasi regresi multivariat, estimator DD direpresentasikan dengan interaksi antara kelompok perlakuan dengan periode setelah program (lihat Persamaan 1). Y_{it} adalah variabel dependen utama untuk individu i pada periode t , T_i adalah variabel biner bernilai

1 jika individu i berpartisipasi dalam program dan $post_t$ adalah variabel biner bernilai 1 jika periode terjadinya program. β_3 adalah estimator DD dan ϵ_{it} adalah error term.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 T_i + \beta_2 post_t + \beta_3 T_i * post_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Kelebihan metode ini adalah dapat mengontrol faktor yang mempengaruhi kelompok perlakuan dan pembanding secara sama, baik yang konstan maupun berubah antar waktu (Pomeranz, 2017). Akan tetapi, sama halnya dengan dua metode sebelumnya, metode ini juga memiliki kelemahan yaitu akan sulit mengasumsikan bahwa kedua kelompok akan

berkembang dengan pola yang sama tanpa adanya program. Jika terdapat faktor yang secara tidak proporsional mempengaruhi salah satu dari kedua kelompok, bersamaan ketika kelompok perlakuan menerima program, dan tidak diperhitungkan dalam estimasi, hasil estimasi dampak program akan menjadi tidak valid atau bias.



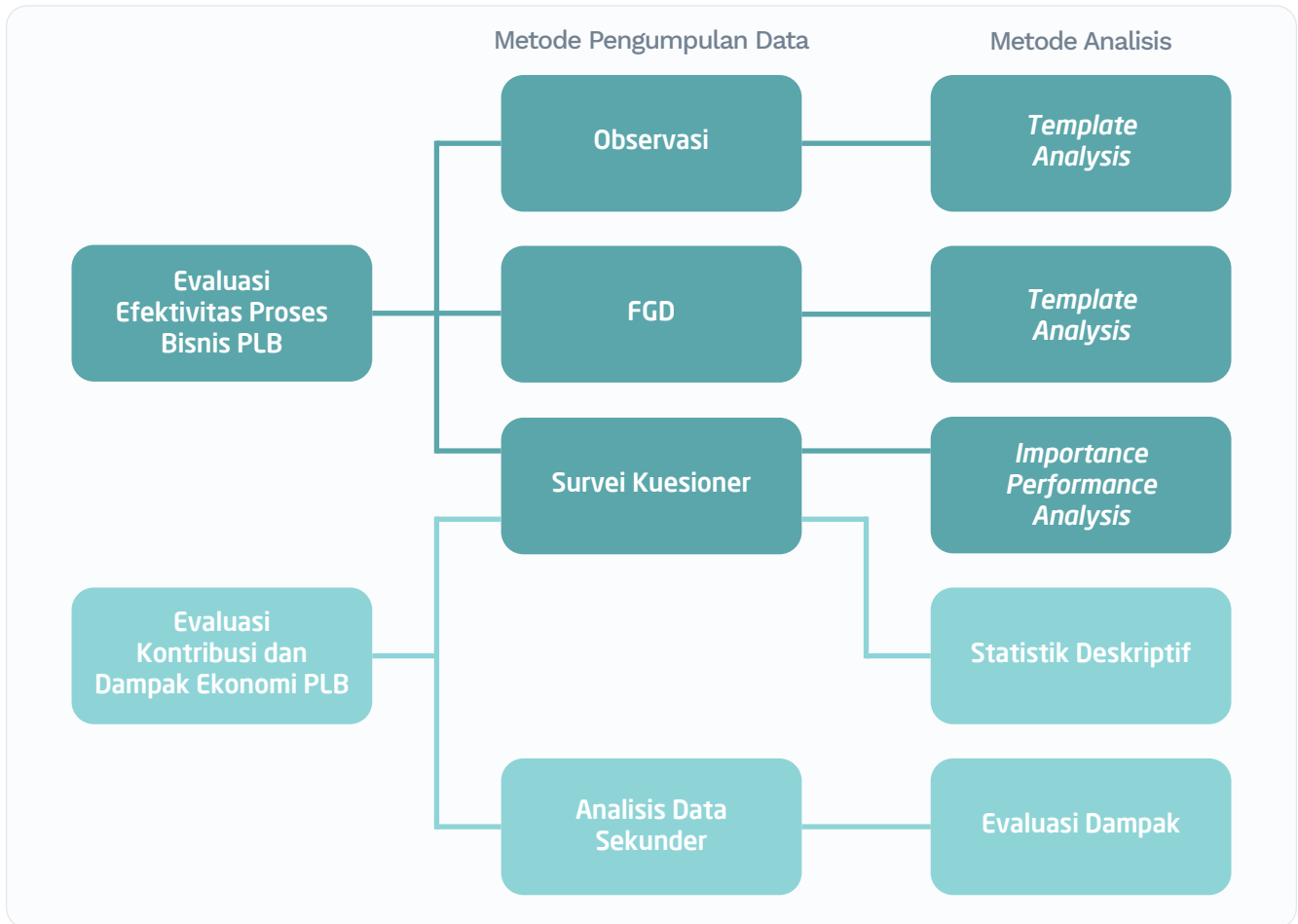


BAB 3 METODE PENELITIAN

20 – 33

Metode Penelitian

Desain Penelitian



Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

Desain penelitian merupakan pendekatan metode dan rancangan teknis untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian (Cooper dan Schindler, 2014). Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama adalah mengevaluasi efektivitas proses bisnis

Pusat Logistik Berikat (PLB) terhadap penyediaan pelayanan dan tujuan penelitian kedua adalah mengevaluasi kontribusi dan dampak Pusat Logistik Berikat (PLB) terhadap perekonomian Indonesia.

► Tujuan Penelitian I: Efektivitas Proses Bisnis PLB

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian pertama, peneliti menggunakan survei sebagai pendekatan utama, didukung dengan *focus group discussion* (FGD) dan observasi. Neuman (2014) menjelaskan survei adalah teknik pengumpulan data ilmu sosial yang paling banyak digunakan. Survei memiliki banyak kegunaan dan memiliki banyak bentuk alternatif seperti wawancara telepon, jajak pendapat melalui internet, dan berbagai jenis kuesioner. Survei dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk

mendapatkan data yang baik. Penelitian survei tumbuh dalam pendekatan positivis pada ilmu sosial. Seperti yang dikatakan Groves (1996: 389), “survei menghasilkan informasi yang secara inheren bersifat statistik. Survei adalah “*quantitative beasts*”.

Sebagian besar survei mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, dan perilaku mereka di masa lalu atau saat ini. Dengan demikian, survei tepat digunakan ketika kita ingin mempelajari keyakinan atau perilaku individu.

Kebanyakan survei menanyakan sejumlah pertanyaan sekaligus untuk mengukur berbagai variabel. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi deskriptif yang komprehensif terkait suatu fenomena tertentu. Karakteristik pendekatan survei ini sejalan

2. Populasi dan Sampel

Pengertian populasi menurut Sekaran dan Bogie (2017) adalah sekumpulan objek yang memiliki kesamaan karakteristik dan ciri-ciri dalam satu atau beberapa hal sehingga dapat membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi merupakan jumlah keseluruhan elemen yang akan diteliti (Cooper & Schindler, 2014). Namun, penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan anggota populasi, karena untuk menggeneralisasikannya cukup diwakili oleh sebagian anggota populasi yang disebut sampel (Cooper & Schindler, 2006).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PLB yang ada di Indonesia yang berjumlah 128 PLB. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Cooper & Schindler, 2014). Sekaran dan Bogie (2016) juga mengatakan bahwa tujuan dari teknik *purposive sampling* adalah untuk memilih unit spesifik yang paling relevan dengan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui *Focus Group Discussion* dengan para pengurus Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI), asosiasi resmi yang menaungi para operator PLB di seluruh Indonesia. FGD

dengan tujuan penelitian pertama, dimana peneliti berupaya untuk memahami sejauh mana PLB telah menyediakan layanan yang sesuai dengan tujuan didirikannya dengan menjangkau perspektif operator maupun pengguna layanan PLB.

tersebut menyepakati bahwa akses data dan keterwakilan kontribusi PLB terhadap nilai transaksi ekspor dan impor menjadi kriteria utama sampel yang akan diambil.

Hasil FGD tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa PLB yang terdaftar sebagai anggota PPLBI menyumbangkan mayoritas (lebih dari 50%) nilai transaksi ekspor dan impor yang melalui PLB di seluruh Indonesia. Hasil tersebut juga dikonfirmasi dengan data arus dan nilai keluar-masuk barang dari Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan data tersebut, peneliti menggunakan 54 PLB anggota PPLBI sebagai *sampling frame* yang dinilai telah mewakili sebagian besar PLB yang ada di Indonesia.

Peneliti kemudian meminta 54 PLB tersebut untuk mengisi kuesioner secara daring dan membantu menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh tiga klien di masing-masing PLB. Survei tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu dua minggu. Pada akhir periode survei, peneliti berhasil mendapatkan 40 PLB dan 41 klien PLB yang mengisi kuesioner dengan lengkap dan valid untuk dianalisis.

► Tujuan Penelitian II: Kontribusi PLB terhadap Perekonomian Indonesia

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ke-dua, peneliti menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan ekonometrika.

2. Populasi dan Sampel

a. Evaluasi terhadap Arus Barang Keluar dan Masuk dan Kontribusi Fiskal

Untuk evaluasi terhadap arus keluar masuk barang, populasi penelitian adalah seluruh jenis industri berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2 digit. Namun, karena ketersediaan data, tidak semua industri digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Industri

Untuk evaluasi terhadap kinerja industri, peneliti menggunakan dua data, yaitu data primer dari survei

klien PLB dan data sekunder dari berbagai sumber meliputi Bank Indonesia dan basis data CEIC yang disediakan oleh Macroeconomic Dashboard FEB UGM. Populasi data primer adalah seluruh klien PLB, dengan sampel 41 klien PLB yang mengisi kuesioner. Populasi data sekunder adalah semua jenis industri manufaktur berdasarkan KBLI 2 digit. Namun demikian, tidak semua industri manufaktur dapat menjadi sampel karena terdapat data ekspor-impor yang hilang seperti industri minuman, pengolahan tembakau, pakaian jadi, dan pencetakan.

c. Evaluasi terhadap kinerja perekonomian regional

Dalam evaluasi dampak PLB terhadap perekonomian regional, populasi adalah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Akan tetapi, tidak semua kabupaten digunakan sebagai sampel karena kabupaten tersebut merupakan kabupaten pemekaran. Kabupaten yang

dikeluarkan dalam sampel antara lain Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), Pesisir Barat (Lampung), Pangandaran (Jawa Barat), Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan (Sulawesi Tenggara), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Sorong (Papua Barat).

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data *cross-sectional*. Menurut Cooper dan Schindler (2014), data *cross-sectional* adalah data yang dikumpulkan dalam satu titik waktu tertentu. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sekaran dan Bogie (2016) menjelaskan, data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber data pihak pertama yang mengalami peristiwa secara langsung atau individu yang memiliki informasi. Menurut Cooper dan Schindler (2014), data primer adalah data yang diperoleh secara orisinil, langsung, dan

tanpa adanya interpretasi atau penyaringan dari pihak kedua. Dalam penelitian ini, data primer diambil dengan instrumen berupa kuesioner, FGD, dan observasi lapangan.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah tersedia atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari CEIC, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.

► Tujuan Penelitian I

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan satu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Kuesioner dapat diberikan secara pribadi, disuratkan kepada responden, atau disebarkan secara elektronik (Sekaran, 2006). Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan instrumen yang didapatkan dari peraturan kementerian keuangan (PMK) 2015, sistem logistik nasional, kuesioner LPI 2018, hasil FGD dengan pengurus PPLBI, hasil FGD dengan operator PLB, dan hasil FGD dengan regulator PLB.

Item-item yang didapatkan dari berbagai sumber yang kredibel tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 10 dimensi fasilitas atau layanan yang sebaiknya ada dalam PLB. Sepuluh dimensi tersebut adalah (rincian item dalam setiap dimensi dapat dilihat pada Lampiran 1):

1. Fasilitas Fiskal (7 item pertanyaan)
2. Jangka Waktu Penimbunan (3 item pertanyaan)
3. Status Kepemilikan Barang (5 item pertanyaan)
4. Fasilitas Pemasukan (6 item pertanyaan)
5. Fleksibilitas Pengeluaran (2 item pertanyaan)
6. Infrastruktur (16 item pertanyaan)
7. *Self-Managed Bonded* (8 item pertanyaan)
8. Penyelesaian Impor Sementara (2 item pertanyaan)
9. Logistik Sederhana (21 item pertanyaan)
10. *Ease of Doing Business* (23 item pertanyaan).

Proses pengumpulan data melalui kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara daring dengan *Google form*. Kuesioner penelitian disebarkan kepada operator dan klien PLB. Adapun uji validitas item kuesioner dalam penelitian ini dilakukan uji *face validity*. *Face validity* bertujuan untuk melihat apakah indikator-indikator tersebut secara tampilan sudah sesuai mengukur apa yang akan diukur (Neuman, 2014). Validitas muka dalam penelitian ini dilakukan dengan memastikan detail item-item pertanyaan dalam kuesioner apakah sudah dapat mengukur konstruk-konstruk penelitian. Adapun uji validitas muka dalam penelitian ini ditempuh melalui *cross check and compare* antara kuesioner penelitian dengan literatur, laporan *Logistic Performance Index*, *Focus Group Discussion* (FGD) peraturan pemerintah dan evaluasi dari para ahli yang merupakan peneliti senior FEB UGM. Selain itu juga dilakukan *pilot survey* yang ditujukan kepada operator PLB dimana tidak ada masukkan maupun tambahan atas kuesioner

Menurut Ghazali (2006), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data telah menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengujian konsistensi internal digunakan dalam

melihat reliabilitas instrumen pengukuran yang ada (Cooper dan Schindler, 2014). Dalam melakukan pengujian ini nilai *cronbach's alpha* haruslah minimal 0.7 sesuai dengan Hair *et al* (2014). Untuk mengukur keandalan/reliabilitas kuesioner dilakukan uji *cronbach's*

2. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) sering digunakan sebagai pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data dari sekelompok individu yang dipilih dengan sengaja daripada dari sampel yang mewakili secara statistik dari populasi yang lebih luas (Nyumba, Tobias O., *et al.*, 2017).

Focus Group Discussion (FGD) banyak digunakan dalam penelitian konservasi tidak seperti beberapa teknik lain yang relatif kurang dikenal seperti Teknik Kelompok Nominal (Hugé & Mukherjee, dalam persiapan) dan metodologi Q (Zabala & Mukherjee, 2017). Popularitas metode ini terkait erat dengan kebangkitan penelitian partisipatif, terutama "eksperimen aktif dengan kelompok fokus" dalam ilmu sosial akademik selama tahun 1980-an (Morgan, 2002). Teknik tersebut muncul sebagai pendekatan pengumpulan data kualitatif dan strategi penghubung untuk penelitian ilmiah dan pengetahuan lokal (Cornwall & Jewkes, 1995).

FGD dianggap sebagai alternatif metode yang "hemat biaya" dan "menjanjikan" dalam penelitian partisipatif (Morgan, 1996) yang menawarkan platform untuk paradigma atau pandangan dari sudut pandang

3. Observasi

Seperti halnya *Focus Group Discussion*, observasi lapangan dilakukan sebagai pendekatan kualitatif. Dalam riset ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran akan skala operasi dan kegiatan yang dilaksanakan didalam PLB (Sekaran dan Bougie, 2016). Observasi lapangan dilakukan di 5 operator PLB yang berbeda dimana 3 diantaranya berada di Jakarta dan 2 yang lainnya di Surabaya atas permintaan stakeholder. Kegiatan observasi yang dilaksanakan dalam riset ini bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan tidak tersembunyi (*unconcealed*) (Sekaran dan Bougie, 2016). Dikarenakan observasi dalam riset ini bertujuan untuk memahami segala bentuk proses yang berjalan di dalam PLB sehingga proses observasi ini bersifat tentatif dan tidak terstruktur (*unstructured*). Observasi ini bersifat tidak tersembunyi (*unconcealed*) dikarenakan proses ini

alpha atas seluruh item kuesioner. Adapun hasil uji *cronbach's alpha* pada data penelitian ini menunjukkan nilai 0,975 yang berarti 93 item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini sangat *reliable* atau konsisten.

yang berbeda-beda (Guba & Lincoln, 1994; Orr, 1992). Sosiolog dan psikolog telah menggunakan metode ini sejak tahun 1940-an (misalnya Merton & Kendall, 1946; Merton, Fiske & Kendall 1956). Namun, popularitas dan aplikasinya telah tumbuh di berbagai disiplin ilmu termasuk pendidikan (Flores & Alonso, 1995) komunikasi dan studi media (Lunt & Livingstone, 1996), sosiologi (Morgan, 1996), penelitian feminis (Wilkinson, 1998, 1999), penelitian kesehatan (Wilkinson, 1998) dan penelitian pemasaran (Morgan, Krueger, & King, 1998; Szybillo & Berger 1979).

Diskusi kelompok terfokus terkadang dianggap identik dengan wawancara, terutama semi-terstruktur "satu-ke-satu" dan "wawancara kelompok" (Parker & Titter, 2006). Persamaan antara teknik ini berkaitan dengan kecenderungan untuk mengungkap persepsi dan nilai orang (misalnya Hargreaves, 1967; Lacey, 1970; Mac an Ghail, 1994; Sewell, 1997; Skeggs, 1997).

Dalam riset ini, FGD telah berjalan selama 10 sesi pertemuan dengan 3 responden utama, yaitu operator PLB, regulator, dan pengguna PLB. Peserta yang mengikuti FGD ini terdiri dari 21 operator PLB, 14 regulator, dan 2 klien PLB.

berjalan dengan mengirimkan izin formal dan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari instansi yang terkait.

Dalam proses observasi, interview direkam dalam bentuk audio recording, catatan lapangan (*field notes*), dan *visual recording* dilakukan sebagai metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif menggunakan ketiga metode tersebut dianggap lazim dan banyak digunakan dalam riset berbasis kualitatif (Neuman, 2014). Kelebihan dari dilaksanakannya observasi dalam riset ini adalah para peneliti dapat mendapatkan data langsung dari lingkup operasional PLB secara natural. Sehingga data yang didapatkan lugas dan natural sebagaimana mestinya dalam kegiatan sehari-hari dalam PLB (Sekaran dan Bougie, 2016).

► Tujuan Penelitian II

1. Data

Data yang digunakan dalam evaluasi dampak PLB terhadap perekonomian adalah data primer yang diperoleh dari survei klien PLB dan data sekunder dari berbagai sumber sebagai berikut.

a. Evaluasi terhadap arus barang keluar dan masuk

Data nilai devisa ekspor dan impor untuk Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan PLB per pelabuhan, per industri berdasarkan KBLI 2 digit, dalam bulanan dari 2017-2020 yang diperoleh dari DJBC.

b. Evaluasi terhadap kinerja industri

Data primer yang diperoleh dari survei 41 klien PLB yang ditambah dengan data ekspor, impor, dan nilai tambah industri berdasarkan KBLI 2 digit dari tahun 2010-2018 yang diperoleh dari CEIC dan Bank Indonesia.

c. Evaluasi terhadap kinerja perekonomian regional

- Data PDRB sektoral tingkat kabupaten dari tahun 2010-2018 yang diperoleh dari CEIC.
- Data PDRB sektoral tingkat provinsi tahun tingkat provinsi kuartalan dari kuartal I 2010 sampai kuartal II 2020 yang diperoleh dari CEIC.
- Data PDRB pengeluaran tingkat provinsi kuartalan

dari kuartal 1 2010 sampai kuartal 2 2020 yang diperoleh dari CEIC.

- Data anggota PLB yang diperoleh dari PPLBI.
- Berbagai data variabel tingkat kabupaten dan provinsi dengan detail sebagai berikut: Data proyeksi populasi provinsi dan kabupaten tahunan dari tahun 2010 - 2019 yang diperoleh dari BPS; Data rata-rata lama sekolah tingkat provinsi dan kabupaten tahunan dari 2010-2019 yang diperoleh dari BPS; Data DAU, DAK, DBH tingkat provinsi dan kabupaten tahunan dari 2010-2018 yang diperoleh dari DJPK; ketersediaan listrik tingkat provinsi tahun 2011 - 2018 yang diperoleh dari BPS; Indeks Pembangunan Manusia tingkat provinsi dan kabupaten tahunan dari 2010-2019 yang diperoleh dari BPS.

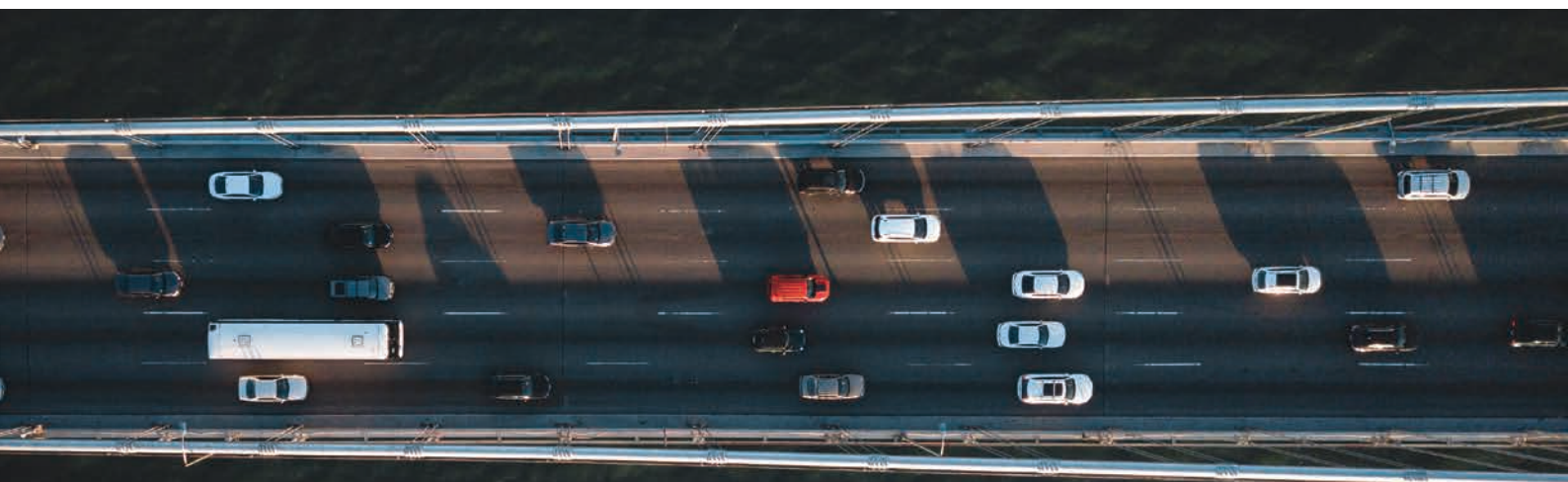
d. Evaluasi terhadap kontribusi fiskal

Data nilai bea masuk, PPH impor, PPN impor yang melalui PLB per pelabuhan, per industri berdasarkan KBLI 2 digit, dalam bulanan dari 2016-2020 yang diperoleh dari DJBC.

Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah abduktif dengan *mixed method* atau gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Strategi abduktif digunakan dalam penelitian ini dengan teori dan tinjauan pustaka yang dikembangkan dengan berbagai metode pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), kuesioner, dan observasi. Untuk

melengkapi analisis, data sekunder juga dihimpun melalui berbagai cara seperti mengirimkan permohonan data kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia (DJBC), menghimpun data dari berbagai penyedia data kredibel diantaranya CEIC, Bank Indonesia, BPS, dan laporan-laporan yang dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.



Metode Analisis Data

► Tujuan Penelitian I

1. Importance-Performance Analysis (IPA)

Dikembangkan oleh Martilla dan James (1977), IPA menganalisis kepentingan dan peringkat kinerja atribut untuk mengidentifikasi atribut yang paling menonjol bagi konsumen atas sebuah layanan (Douglas *et al.*, 2006). Dalam analisis, IPA memberikan ukuran seberapa baik kinerja suatu layanan memenuhi kepentingan konsumennya (Joseph dan Joseph, 1997). Dengan IPA, memungkinkan peneliti maupun praktisi untuk mengevaluasi strategi layanan yang ada, mengidentifikasi area prioritas untuk perbaikan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif (Feng *et al.*, 2014), dan juga IPA dapat memberikan rekomendasi penggunaan sumber daya organisasi agar lebih lebih efisien (O'Neil dan Palmer, 2004). Instrumen yang digunakan pada metode Importance-Performance Analysis dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 93 item pertanyaan.

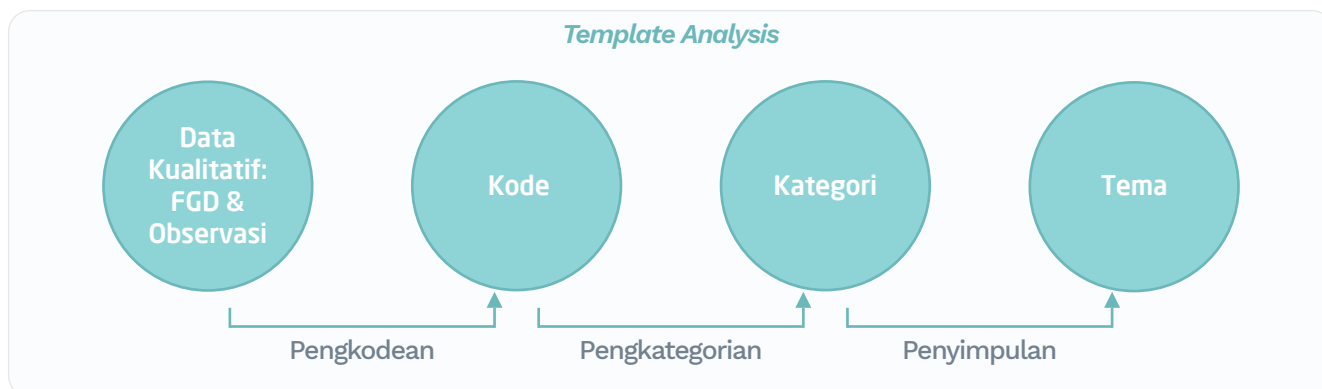
Dalam proses pengolahan data kuesioner, para peneliti menghadapi beberapa permasalahan yang tentunya telah teratasi seperti pemilahan data *redundant*, data yang tidak lengkap, proses *coding* responden dan kategorisasi baik secara menyeluruh maupun dalam bentuk per-industri, proses *compare and contrast* data hasil olahan, serta pemilahan matriks IPA secara keseluruhan. Proses pemilahan data *redundant* dilaksanakan demi mendapatkan hasil yang akurat dan benar sedangkan data yang tidak lengkap akan disaring atau dilengkapi dengan data *redundant* yang didapatkan ketika responden mengirimkan *input* ganda (mengirimkan lebih dari 1 perwakilan). Proses koding dan kategorisasi dilakukan agar proses analisa secara menyeluruh dan per industri dapat dilakukan secara sistematis dan lebih mudah. Setelah data diolah data yang didapatkan dibandingkan untuk melihat tingkat kepentingan dan kinerja yang telah dinilai, baik dari pihak operator maupun klien yang kemudian dibandingkan kembali untuk melihat apakah atribut penilaian dari kedua belah pihak sudah sejalan. Setelah data tersebut dibandingkan, matriks IPA pun dibuat satu per satu dan diinterpretasikan untuk melihat *item* yang

mana yang perlu diperbaiki ataupun dipertahankan.

Analisis data IPA dilakukan dalam dua bentuk yakni analisis keseluruhan industri (*overall industry*) dan analisis IPA masing-masing industri pada 11 industri. Dalam interpretasi kuadran IPA peneliti menggunakan dua dasar, yakni sumbu $X, Y = \text{rata-rata}$ dan sumbu $X, Y = 3$. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya skala data yang digunakan pada analisis IPA adalah skala likert 1-5. Nilai 3 pada likert kinerja diartikan sebagai "cukup baik" dan pada likert kepentingan diartikan "cukup penting" dengan demikian peneliti menganalisis kuadran pada sumbu $X, Y = 3$ untuk mengetahui apakah masih terdapat item yang baik kepentingan maupun kinerjanya di bawah 3 yakni item dengan skor 2 atau 1 yang maknanya kinerja item tersebut kurang baik (2) atau tidak baik (1) dan kepentingan item dengan skor 2 atau 1 bermakna kurang penting (2) atau tidak penting (1).

Selanjutnya peneliti melakukan pemeringkatan atas 11 industri berdasarkan berbagai aspek dalam data IPA untuk mengetahui industri apa yang paling efektif menurut *Importance-Performance Analysis* (IPA). Pertama, peringkat industri didasarkan pada kinerja operator PLB yang direspon oleh operator maupun klien. Dengan mengidentifikasi peringkat jenis ini peneliti dapat mengetahui tingkat kepercayaan diri operator PLB atas kinerja mereka dan tingkat penilaian klien. Kedua, peringkat industri didasarkan pada skor IPA rata-rata dimana pada pemeringkatan jenis ini peneliti dapat mengetahui bagaimana posisi industri berdasarkan skor kinerja dan skor kepentingan. Ketiga, pemeringkatan industri didasarkan letak item pada kuadran IPA, dimana semakin banyak item yg terletak pada kuadran 2 (*keep up the good work*) maka semakin baik keefektifan industri tersebut. Keempat, pemeringkatan didasarkan pada jumlah item *overlap* dan *mismatch*, dimana dengan pemeringkatan jenis ini peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian respon operator dan respon klien, semakin banyak item *overlap* maka keefektifan industri tersebut semakin baik.

2. Focus Group Discussion (FGD)



Gambar 3.2. Analisis Tematik FGD
Sumber: King, 2012.

Dari seluruh data yang didapatkan melalui FGD, peneliti selanjutnya adalah melakukan pengkodean dan menggunakan *template analysis*. *Template Analysis* merupakan salah satu teknik analisis tematik yang dapat dilakukan dengan mengolah data tekstual yang memberikan keleluasaan struktur pengkodean (King, 2012).

Langkah pertama dalam *template analysis* adalah pengkodean data sebagai proses pelabelan teks dengan kode yang sesuai. Kode adalah cara

mendefinisikan sebuah data dari analisis yang dilakukan (Gibbs, 2007). Hasilnya akan muncul kode berupa kata atau frasa. Selanjutnya, pengkategorian dari kode-kode diperlukan untuk mencari kesamaan atau perbedaan antar kode (Costa, 2019). Hasilnya akan muncul kategori-kategori yang menggambarkan kesamaan atau perbedaan kode. Di akhir, kategori tadi akan disimpulkan menjadi sebuah tema besar dari keseluruhan data yang ada.

a. Pelaksanaan FGD

Peneliti bersama beberapa pihak telah melaksanakan FGD sebanyak sepuluh kali untuk menggali informasi

yang relevan terkait evaluasi PLB. Berikut rincian pelaksanaan FGD yang telah dilakukan:

Tabel 3.1. Pelaksanaan Focus Group Discussion

No.	Hari, tanggal	Peserta
1.	Selasa, 8 September 2020	Pengurus PPLBI
2.	Rabu, 16 September 2020	Operator PLB
3.	Kamis, 17 September 2020	Operator PLB
4.	Rabu, 23 September 2020	Badan Karantina Kementerian Pertanian
5.	Kamis, 24 September 2020	Dirjen Bea dan Cukai
6.	Selasa, 06 Oktober 2020	Kementerian Perdagangan
7.	Kamis, 08 Oktober 2020	KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok
8.	Senin, 12 Oktober 2020	Otoritas Bandara Internasional Ngurah Rai
9.	Senin, 2 November 2020	Klien 1
10.	Selasa, 3 November 2020	Klien 2

b. Pengkodean Kode-Kode Data

Setiap pembicaraan yang disampaikan peserta selama FGD ditranskripsi dan dicatat untuk dilakukan selanjutnya pengkodean. Menurut, Saldana (2009) pengkodean berarti cara memperoleh kata atau frasa

dengan melihat fakta yang menonjol dan esensi fakta dari sejumlah kumpulan bahasa atau data verbal. Berikut contoh pengkodean yang dilakukan pada data FGD:

Tabel 3.2. Cuplikan Pengkodean FGD

No	Narasumber	Data FGD	Kode
1	Operator PLB	<i>“Saya masih ingat sekali pak ee ketika PLB 7 ee dapet undangan ee sama focus group discussion juga dengan beacukai diundang terkait dengan berbicara tentang menjadikan Indonesia jadi pusat hub ya, hub setidaknya untuk area regionnya Asia Pasifik Pak. Jadi tujuan secara big picture nya, simpel pak memang menjadikan Indonesia hub untuk ee Asia Pasifik pak market Asia Pasifik, simpelnya seperti itu. Jadi tujuan utamanya PLB itu”</i>	Tujuan utama PLB sederhana yaitu Indonesia sebagai Hub Asia Pasifik
2	Operator PLB	<i>“Mereka sudah ada, mungkin Singapore sudah menyadari mereka memiliki sumberdaya dan sebagainya salah satu yang mereka bisa manfaatkan adalah apa ee menjadi operator logistik, dalam hal ini ya mereka menjadi konektor antar setiap negara pada saat apa tau lah misalnya dari Amerika Serikat bawa cargo”</i>	Singapura menjadi konektor logistik antar negara
3	Operator PLB	<i>“Tercermin dari adanya peraturan menteri keuangannya mereka bahwa gudang itu bukan menjadi salah satu faktor penentu yang menjadi barang yang masuk itu kena pajak atau tidak gitu dan itu ada peraturannya walaupun misalnya ada OECD ada transfer pricing, ada transfer”</i>	Peraturan Menteri Keuangan Singapura menjadi penentu objek barang masuk kena pajak atau tidak
4	Operator PLB	<i>“Dia bisa mengeluarkan peraturan pengecualian bahwa setiap cargo yang masuk tidak menjadi subjek pajak pendapatan, nah itu yang di Indonesia tuh tidak ada ketegasan hal tersebut.”</i>	Indonesia tidak ada ketegasan terkait subjek pajak pendapatan
5	Operator PLB	<i>“Kemudian kemudahan juga, kalau Saya masuk berusaha masuk ke apa bea cukainya singapore itu cukup lewat websitenya mereka itu sudah, kitanya pengusaha asing mau menaruh disitu tanpa ada kehadiran mereka, itu tidak perlu langung datang ke bea cukai singapore dan sebagainya”</i>	Sistem website Singapura mengakomodir pengusaha untuk tidak perlu datang ke kantor bea cukai

c. Pengkategorian Kode-Kode Data

Menurut, Costa (2019) pengkategorian dari kode-kode diperlukan untuk mencari kesamaan atau perbedaan antar kode. Dengan menganalisis dan menyortir kode ke

dalam kategori, tema yang konsisten dan menyeluruh akan ditemukan. Berikut contoh kategorisasi dari kode data:

Tabel 3.3. Cuplikan Pengkategorian Kode

Kode	Kode
<ul style="list-style-type: none"> - PLB sebagai partner Bea Cukai untuk pengawasan ekspor-impor - PLB memiliki keamanan dan keterbukaan tinggi - Penggunaan <i>warehouse management system</i> oleh PLB - Penggunaan e-seal oleh PLB - PLB memberikan keterbukaan kepada Bea Cukai atas seluruh aktivitas operator - Pemeriksaan bea cukai ada di wilayah AP1 - Pengawasan di PLB lebih baik untuk menanggulangi barang ilegal - Proses pengawasan belum sepenuhnya elektronik 	<p>Pengawasan PLB kegiatan ekspor-impor</p>
<ul style="list-style-type: none"> - PLB mampu menekan <i>cost logistic</i> dari sebelumnya tertahan di Singapura - PLB bisa menekan risiko masuknya penyakit dari hub sebelumnya - PLB bisa memberikan <i>dwelling time</i> yang lebih rendah - PLB menurunkan biaya logistik industri manufaktur 	<p>Keunggulan PLB</p>

3. Observasi: Transkripsi, Coding, Labeling, Template Analysis, Nigel King

Seperti FGD, data kualitatif yang dikumpulkan dari kegiatan observasi yang berupa rekaman audio diolah menjadi transkripsi yang kemudian diolah menggunakan *template analysis*. Hal ini dilakukan agar data kualitatif tekstual tersebut dapat diolah menggunakan struktur pengkodean analisa *template* (Brooks dan King, 2014).

Proses pengkodean dilakukan dengan cara memberikan label pada kutipan teks transkripsi dengan kode yang sesuai. Kode tersebut berbentuk kata atau frasa yang kemudian dikategorikan menurut persamaan

atau perbedaan tema didalamnya (Costa, 2019). Kategori tersebut kemudian akan disimpulkan dalam tema besar. Berikut langkah pengumpulan data dan analisis observasi yang dilakukan dalam riset ini:

a. Pelaksanaan Observasi

Setelah mendapatkan izin formal, observasi dilaksanakan sebanyak lima kali terhadap lima institusi operator PLB yang berbeda. Berikut rincian tanggal pelaksanaan observasi PLB yang dilaksanakan:

Tabel 3.4. Pelaksanaan Observasi Lapangan

No.	Hari, tanggal	Peserta	Peserta
1.	Selasa, 22 September 2020	Operator PLB 1	Makanan
2.	Rabu, 23 September 2020	Operator PLB 2	Mesin dan Peralatan
3.	Rabu, 23 September 2020	Operator PLB 3	Minuman Mengandung Etil Alkohol
4.	Kamis, 24 September 2020	Operator PLB 4	Minuman Mengandung Etil Alkohol
5.	Jum'at, 25 September 2020	Operator PLB 5	Transportasi dan Konstruksi

b. Pengkodean data kualitatif

Setiap pembicaraan di dalam observasi di rekam dan dicatat kedalam transkripsi yang kemudian dikodekan demi mendapatkan kode atau frasa dengan melihat

fakta dan intisari dari kumpulan data verbal yang ditranskripsikan (Saldana, 2009). Berikut contoh pengkodean yang dilakukan dalam analisis data observasi:

Tabel 3.5. Cuplikan Pengkodean FGD

No	Narasumber	Data FGD	Kode
1	PLB 2	<i>“Kalau dengan plb, dwelling time sangat terasa sekali, sangat terasa. Karena apa, PLB itu hanya butuh waktu satu hari, ya to, bahkan kapal tiba saja itu barang sudah bisa kita masukkan PLB. maksimal dua hari, itu sudah paling maksimal itu.”</i>	Dwelling time di PLB sangatlah terminimalisir karena barang yang datang langsung dimasukkan ke dalam PLB
2	PLB 2	<i>“Ndak ada sih, ndak ada, no!, nah disini lah kaitannya, kita ini dengan bea cukai sudah diberi trust atau kepercayaan bahkan bea cukai ini sudah tidak mengawasi kita lagi nih, ya kan, semua diserahkan kepada PLB nih, sistem yang bekerja di PLB sekarang, bukan manpower yang bekerja ya, disitu sudah bisa mengurangi kontak kita dengan pihak terkait bea cukai itu yang sangat... eh, suatu kelebihan yang ada di PLB kan gitu. Seperti itu”</i>	PLB bersih dari pungli dan mafia pelabuhan.
3	PLB 2	<i>“Justru kalau di PLB itu ndak kayak clearance pada umumnya karena tidak ada kontak person antara kita dan dengan adanya sistem yang terintegrasi, sekarang sudah pakai sistem by sistem itu malah, ndak ini, kalau bicara pungli sudah ndak ada”</i>	PLB bersih dari pungli dan mafia pelabuhan.
4	PLB 2	<i>“Ya nomernya kan sudah ada itu HS-nya berapa. Ya udah dibikin mandatory. dikasih kunci disitu. Supaya barang itu tidak lagi bisa keluar di BC2.0 dua kosong”</i>	Regulasi yang sudah dibuat sudah baik namun perlu dipatenkan agar tidak ada celah dalam sistemnya

c. Pengkategorian Kode-Kode Data

Kode yang telah dibuat kemudian dimasukkan kedalam kategori kategori untuk mencari persamaan dan perbedaan tema yang ada dalam data observasi

tersebut (Costa, 2019). Dari kode yang telah dikelompokkan akan ditemukan tema yang konsisten dan menyeluruh dari data kualitatif yang telah dikumpulkan. Berikut contoh kategorisasi data:

Tabel 3.6. Cuplikan Pengkategorian Kode Observasi

Kode	Kode
<ul style="list-style-type: none"> - PLB bersih dari pungli dan mafia pelabuhan. - Keberadaan <i>system</i> yang terintegrasi menjaga integritas bisnis. - Sudah tidak ada penarikan dana informal dalam kegiatan operasional PLB dan bea cukai. - Tidak ada penarikan dana Informal di PLB dikarenakan PLB ditargetkan menjadi Kawasan bebas korupsi oleh bea cukai. 	<p>Tidak ada penarikan dana Informal di PLB</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Penangguhan biaya masuk selama 3 tahun, kemandirian PLB dari bea cukai menjadi manfaat bagi para mitra PLB. - <i>Dwelling time</i> di PLB sangatlah terminimalisir karena barang yang datang langsung dimasukkan kedalam PLB. - Peningkatan efisiensi yang sangat baik dalam kegiatan penyelesaian dokumen ekspor impor. - Pengeluaran secara parsial untuk menjaga <i>cashflow</i> klien. 	<p>Manfaat utilisasi PLB</p>

► Tujuan Penelitian II

1. Teknik Analisis dan Spesifikasi Model

Untuk mengevaluasi kontribusi dan dampak PLB terhadap perekonomian, penelitian ini akan menggunakan metode evaluasi dampak. Dalam menjelaskan bagaimana PLB dapat berdampak pada kinerja perekonomian, peneliti menyusun sebuah teori perubahan (Lihat Gambar 3.3). Pertama, pembangunan PLB beserta berbagai fasilitasnya akan meningkatkan arus keluar dan masuk barang ke Indonesia. Meningkatnya impor terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri akan meningkatkan

output sehingga terjadi peningkatan kinerja industri. Peningkatan kinerja industri secara menyeluruh akan mendorong perekonomian daerah dimana industri tersebut berada. Selain itu, meningkatnya impor untuk memenuhi kebutuhan industri akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak dalam rangka impor. Dengan teori perubahan tersebut, peneliti akan mengestimasi dampak pembangunan PLB terhadap arus keluar masuk barang, kinerja industri, perekonomian regional, dan kontribusi fiskal.



Gambar 3.3. Teori Perubahan Evaluasi Dampak PLB terhadap Perekonomian

1. Estimasi Dampak PLB terhadap Nilai Tambah Industri, Ekspor, dan Impor

Spesifikasi model yang akan digunakan untuk mengestimasi dampak PLB terhadap nilai tambah industri, ekspor, dan impor adalah:

$$Y_{ist} = \alpha + \beta PLB_i + \gamma PLBOperasi_{it} + \Gamma X_{it} + \mu_i + \delta_t + u_{ist} \quad (3.1)$$

Keterangan:

- Y adalah ekspor, impor, dan nilai tambah.
- PLB adalah indikator biner bernilai 1 jika terdapat PLB di kabupaten, 0 sebaliknya.
- $PLBOperasi$ adalah indikator biner bernilai 1 jika PLB telah mulai beroperasi, 0 sebaliknya.
- X adalah vektor variabel penjelas.
- μ adalah industri *fixed effects* untuk mengendalikan faktor-faktor spesifik di industri manufaktur yang tidak berubah antar waktu.
- δ adalah time *fixed effects* untuk mengendalikan faktor-faktor spesifik di tahun tertentu.
- u adalah *idiosyncratic shocks* untuk setiap industri manufaktur.

2. Estimasi Dampak PLB terhadap Perekonomian Regional

Sebelum memulai estimasi dampak PLB terhadap perekonomian regional, penelitian ini akan membandingkan tren pertumbuhan PDRB per kapita agregat antara kabupaten yang terdapat PLB dengan kabupaten tanpa PLB. Apabila tren pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten tanpa PLB tidak jauh berbeda dengan kabupaten dengan PLB, maka kabupaten tanpa PLB merupakan kontrafaktual yang valid untuk kabupaten dengan PLB. Dapat dilihat pada Gambar 3.4., tren pertumbuhan PDRB per kapita relatif paralel antara kabupaten dengan PLB dan kabupaten tanpa PLB dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Tren paralel tetap bertahan bahkan setelah PLB mulai beroperasi pada tahun 2016 dan 2017. Tren mulai berubah pada tahun 2018 dimana kabupaten dengan PLB memiliki tren meningkat, sedangkan kabupaten tanpa PLB mengalami tren menurun. Hal tersebut diduga terjadi salah satunya karena adanya PLB. Oleh karena itu, estimasi dampak PLB terhadap perekonomian regional adalah selisih pertumbuhan

PDRB per kapita kabupaten dengan PLB dan tanpa PLB pada tahun 2018.

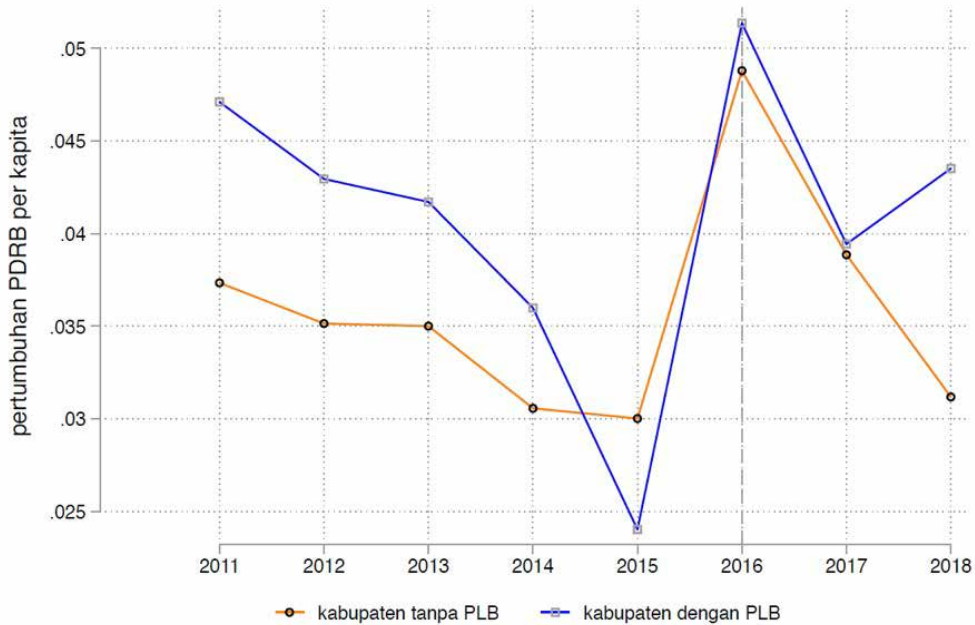
Spesifikasi model yang akan digunakan untuk mengestimasi dampak PLB terhadap perekonomian regional adalah:

$$gpdrb_{ist} = \alpha + \beta PLB_i + \gamma PLBOperasi_{it} + \Gamma X_{it} + \mu_i + \rho_s + \delta_t + u_{ist} \quad (3.2)$$

Keterangan:

- $gpdrb$ adalah tingkat pertumbuhan PDRB per kapita.
- PLB adalah indikator biner bernilai 1 jika terdapat PLB di kabupaten, dan bernilai 0 jika sebaliknya.
- $PLBOperasi$ adalah indikator biner bernilai 1 jika PLB telah mulai beroperasi, dan bernilai 0 jika sebaliknya.
- X adalah vektor variabel penjelas antara lain pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU), pertumbuhan Dana Bagi Hasil (DBH), pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK), pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan populasi, indikator biner *landlocked*, serta PDRB di tahun 2010.
- μ adalah kabupaten *fixed effects* untuk mengendalikan faktor-faktor spesifik di kabupaten yang tidak berubah antar waktu.
- ρ adalah provinsi *fixed effects* untuk mengendalikan faktor-faktor spesifik di provinsi yang tidak berubah antar waktu.
- δ adalah time *fixed effects* untuk mengendalikan faktor-faktor spesifik di tahun tertentu.
- u adalah *idiosyncratic shocks* untuk setiap kabupaten.

Model di atas akan diestimasi menggunakan metode *difference-in-differences* yang membandingkan tren antara unit yang mendapatkan perlakuan (PLB) dan unit yang tidak mendapatkan perlakuan (non-PLB). Model di atas telah mengakomodasi perbedaan waktu berdirinya PLB sejak tahun 2016. Sebagai catatan, hasil di atas menjelaskan dampak di antara kabupaten dengan PLB. Model di atas tidak bisa mengidentifikasi dampak PLB terhadap kabupaten-kabupaten lain yang industrinya menggunakan layanan PLB.



Gambar 3.4. Perbandingan Tren Pertumbuhan PDRB Kabupaten dengan dan tanpa PLB

Sumber: diolah dari CEIC

3. Estimasi Dampak PLB terhadap Pertumbuhan Jangka Panjang

Data regional yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti ini untuk mengestimasi dampak PLB terhadap pertumbuhan regional jangka panjang. Metode estimasi menggunakan konsep *simple difference* dengan membandingkan kabupaten dengan PLB dan kabupaten tanpa PLB. Spesifikasi model yang digunakan adalah:

$$gpd_{it} = \alpha + \beta PLB_i + \gamma X_{it} + \mu_i + \rho_s + u_{ist} \quad (3.3)$$

Keterangan:

- gpd_{it} adalah tingkat pertumbuhan PDRB per kapita.
- PLB adalah indikator biner bernilai 1 jika terdapat PLB di kabupaten, dan bernilai 0 jika sebaliknya.

- X adalah vektor variabel penjelas antara lain pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU), pertumbuhan Dana Bagi Hasil (DBH), pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK), pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan populasi, indikator biner *landlocked*, serta PDRB di tahun 2010.
- μ adalah kabupaten *fixed effects* untuk mengendalikan faktor-faktor spesifik di kabupaten yang tidak berubah antar waktu.
- ρ adalah provinsi *fixed effects* untuk mengendalikan faktor-faktor spesifik di provinsi yang tidak berubah antar waktu.
- u adalah *idiosyncratic shocks* untuk setiap kabupaten.



BAB 4 HASIL PENELITIAN

34 - 126

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah jenis umum dari statistik sederhana yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan pola dasar dalam data (Neuman, 2014). Perhatian utama dari statistik deskriptif adalah menyajikan informasi dalam bentuk yang nyaman, dapat digunakan, dan dapat dimengerti (Runyon dan Harber dalam Neuman, 2014). Dalam penelitian ini statistik deskriptif dipaparkan untuk menjelaskan karakteristik responden baik operator maupun klien PLB. Karakteristik yang dimaksud meliputi lokasi perusahaan, status penanaman modal, industri responden, struktur

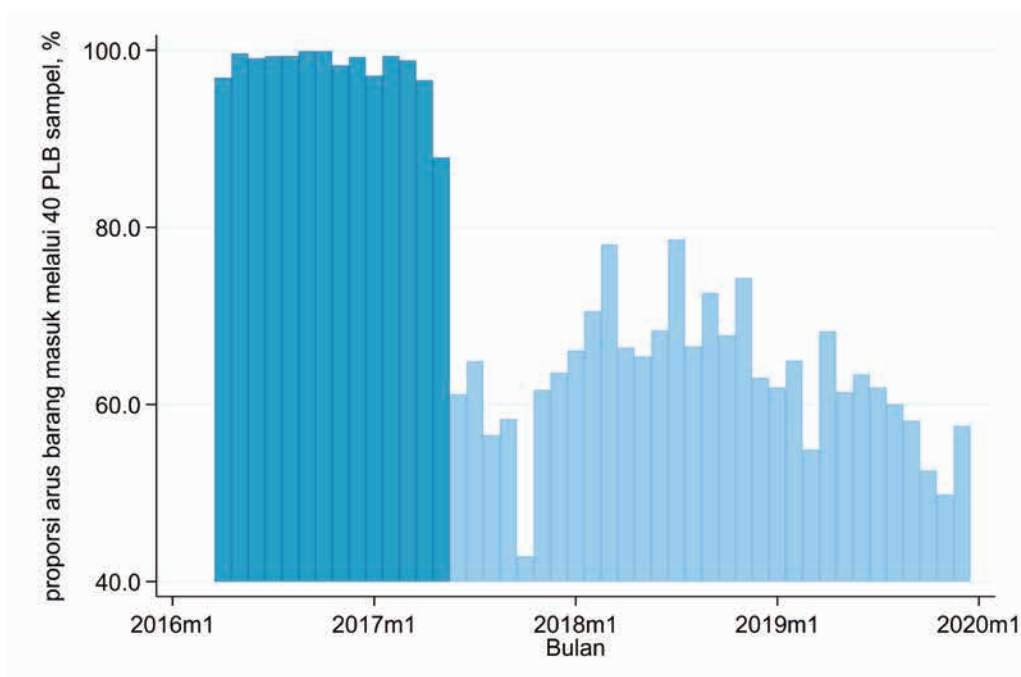
permodalan, keanggotaan asosiasi, ukuran perusahaan, presentase *input* dalam negeri, presentase *input* luar negeri, layanan PLB yang digunakan, jumlah layanan PLB yang digunakan, nama PLB yang digunakan, hak milik barang, persentase biaya untuk PLB dari total biaya logistik, persentase biaya PLB dari total biaya operasional, jumlah ekspor sebelum dan setelah menjadi klien PLB, jumlah pekerja terampil dan tidak terampil, jumlah pekerja musiman, dan jumlah pekerja paruh waktu.

► Statistik Deskriptif Operator PLB

Pada awalnya, terdapat 56 operator Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menjadi responden dalam penelitian ini. Akan tetapi setelah dilakukan pembersihan, terdapat *redundancy* data sehingga dari jumlah tersebut mengerucut menjadi 40 responden. Dari 40 responden PLB, 25 PLB mengirimkan klien untuk mengisi survei, sedangkan 15 PLB tidak mengirimkan hasil survei klien. Meskipun hanya 40 PLB, mayoritas arus barang masuk telah melalui 40 PLB sampel survei tersebut. Arus barang masuk melalui 40 operator PLB meliputi 98% dari total arus barang masuk di tahun 2016–2017 (lihat Gambar 4.1.1). Tahun selanjutnya, arus barang masuk

melalui 40 operator PLB meliputi 64% dari total arus barang masuk sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel PLB yang diperoleh cukup representatif.

Dari total 40 responden perusahaan operator PLB, lokasi operator PLB tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagian perusahaan tidak hanya memiliki 1 lokasi PLB, melainkan 2 hingga 3 lokasi perusahaan. Tabel 4.1 menjelaskan lokasi pertama operator PLB, Tabel 4.2 menjelaskan lokasi kedua operator PLB, dan Tabel 4.3 menjelaskan lokasi ketiga operator PLB.



Gambar 4.1.1 Proporsi Arus Barang Masuk melalui 40 PLB Sampel

Sumber: diolah dari DJBC

Pada lokasi pertama terdapat 40 operator PLB yang beroperasi di 7 provinsi, 15 kabupaten, dan 22 kecamatan. Pada masing-masing kecamatan terdapat 1 hingga 2 operator PLB. Pada lokasi kedua terdapat 15 operator PLB yang beroperasi di 7 provinsi, 10 kabupaten dan 13 kecamatan. Sama dengan lokasi pertama, pada masing-masing kecamatann terdapat 1 hingga 2 operator PLB. Lokasi ketiga menampung 10 operator PLB yang beroperasi di 7 provinsi, 7 kabupaten dan 10 kecamatan. Berbeda dengan dua lokasi sebelumnya,

pada lokasi ketiga hanya terdapat 1 operator PLB pada setiap kecamatan. Secara umum data ini menunjukkan bahwa sebaran sampel PLB telah mencakup provinsi-provinsi yang strategis yang selama ini menjadi pintu keluar dan masuk barang dari dan ke Indonesia. Pada faktanya, tidak semua provinsi mempunyai PLB karena belum tersedianya fasilitas kepelabuhan dan PLB yang memadai. Ditambah lagi, sebagian lokasi dinilai kurang strategis sebagai simpul logistik.

Tabel 4.1. Lokasi Pertama Operator PLB per Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Observasi	Persentase
Bali	Badung	Kuta	1	2.5
Banten	Kota Cilegon	Ciwandan	1	2.5
		Grogol	2	5
	Tangerang	Pakuhaji	2	5
	Tangerang Selatan	Pamulang	1	2.5
DKI Jakarta	Jakarta Barat	Palmerah	1	2.5
	Jakarta Timur	Cakung	5	12.5
		Makasar	1	2.5
	Jakarta Utara	Cilincing	8	20
Jawa Barat	Bekasi	Tanjung Priok	3	7.5
		Cikarang Barat	2	5
		Cikarang Selatan	2	5
		Cikarang Utara	2	5
		Serang Baru	1	2.5
	Tarumajaya	1	2.5	
	Karawang	Ciampel	1	2.5
	Kota Bandung	Kiaracondong	1	2.5
	Subang	Cibogo	1	2.5
	Jawa Timur	Lamongan	Paciran	1
Surabaya		Asemrowo	1	2.5
Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	Penajam	1	2.5
Lampung	Bandar Lampung	Sukabumi	1	2.5
Total			40	100

Tabel 4.2. Lokasi Kedua Operator PLB Per Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Observasi	Persentase	
DKI Jakarta	Jakarta Timur	Cakung	1	6.67	
	Jakarta Utara	Cilincing	2	13.33	
		Penjaringan	1	6.67	
Jawa Barat	Bekasi	Cibitung	1	6.67	
Jawa Tengah	Semarang	Semarang	1	6.67	
Jawa Timur	Mojokerto	Ngoro	1	6.67	
		Sidoarjo	Taman	1	6.67
		Surabaya	Asemrowo	1	6.67
		Margomulyo	1	6.67	
		Rungkut	1	6.67	
Lampung	Lampung Selatan	Katibung	1	6.67	
Papua Barat	Sorong	Aimas	1	6.67	
Sumatera Utara	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	2	13.33	
Total			15	100	

Tabel 4.3. Lokasi Ketiga Operator PLB Per Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Observasi	Persentase
Banten	Serang	Bojonegara	1	10
		Rangkas Bitung	1	10
Jawa Barat	Bekasi	Cibitung	1	10
		Cikarang	1	10
Jawa Timur	Surabaya	Romo Kalisari	1	10
		Tanjung Perak	1	10
Kalimantan Timur	Balikpapan	Somber	1	10
Kepulauan Bangka Belitung	Pangkep	Pangkal Balam	1	10
Riau	Dumai	Sei Sembilan	1	10
Sulawesi Utara	Makassar	Biringkanaya	1	10
Total			10	100

Karakteristik operator PLB seperti lokasi kawasan industri, status penanaman modal, kepemilikan modal, status keanggotaan API (Asosiasi Pengusaha Industri) dan ukuran perusahaan ditunjukkan oleh Tabel 4.4. Pada lokasi pertama PLB, sebesar 57,5% operator PLB berada di luar kawasan industri dan sisanya 42,5% berada di dalam kawasan industri. Pada lokasi kedua 53,33% operator PLB berada di luar kawasan industri dan 46,67% operator PLB berada di

dalam kawasan industri. Lokasi ketiga operator PLB memiliki presentase luar kawasan industri yang lebih tinggi dibandingkan lokasi pertama dan kedua yakni 60% sedangkan 40% sisanya berada di dalam kawasan industri. Secara umum PLB yang berada di kawasan industri berpotensi membantu para pengguna PLB untuk mengurangi biaya transportasi dari PLB menuju fasilitas produksi yang juga terletak di kawasan industri yang sama.

Terkait status penanaman modal operator PLB, sebesar 67,5% operator PLB berstatus penanaman modal dalam negeri (PMDN), 27,5% operator PLB memiliki status penanaman modal asing (PMA) dan sisanya 5% operator PLB berstatus penanaman modal non-fasilitas. Adapun kepemilikan modal operator PLB terbagi kedalam 4 kategori. Sebesar 62,5% operator PLB dimiliki oleh perusahaan swasta nasional, 12,5% operator PLB dimiliki pemerintah pusat, 12,5% dimiliki asing dan sisanya 12,5% dimiliki perusahaan swasta nasional asing. Data ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional masih mendominasi pengelolaan PLB di Indonesia. Status keanggotaan API operator PLB didominasi oleh anggota asosiasi industri dengan presentase sebesar 52,5% sedangkan sisanya sebesar 47,5% operator PLB yang menjadi responden dalam penelitian ini bukan merupakan anggota dari asosiasi industri. Profil ini mengindikasikan bahwa asosiasi industri memiliki peran yang penting bagi para operator PLB. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan penelitian ini yang melibatkan peran

asosiasi seperti PPLBI dalam proses penentuan sampel dan penyediaan akses langsung ke para operator PLB beserta klien mereka.

Operator PLB sebagai responden dalam penelitian ini memiliki ukuran perusahaan dari kecil hingga besar. Mayoritas operator PLB merupakan perusahaan berukuran besar dengan presentase sebesar 60%, berukuran sedang dengan presentase sebesar 37,5%, dan hanya sebagian kecil yakni 2,5% responden operator PLB dalam penelitian ini yang merupakan perusahaan kecil. Dominasi perusahaan besar ini mengindikasikan cakupan operasi PLB yang mayoritas melayani industri-industri dengan berskala besar. Namun demikian, profil ini juga menunjukkan bahwa peran serta perusahaan kecil dan menengah dalam PLB masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan salah satu komitmen pemerintah untuk mendorong daya saing IKM di kancah domestik maupun internasional.

Tabel 4.4. Karakteristik Operator PLB

Karakteristik	N	Proporsi (%)
Lokasi PLB 1		
Di luar kawasan industri	23	57.50
Di dalam kawasan industri	17	42.50
Lokasi PLB 2		
Di luar kawasan industri	8	53.33
Di dalam kawasan industri	7	46.67
Lokasi PLB 3		
Di luar kawasan industri	6	60.00
Di dalam kawasan industri	4	40.00
Status Penanaman Modal		
Penanaman modal dalam negeri (PMDN)	27	67.50
Penanaman modal asing (PMA)	11	27.50
Non-fasilitas	2	5.00
Kepemilikan Modal		
Pemerintah Pusat	5	12.50
Swasta Nasional	25	62.50
Asing	5	12.50
Swasta Nasional, Asing	5	12.50
Keanggotaan API		
Bukan Anggota Asosiasi Industri	19	47.50
Anggota Asosiasi Industri	21	52.50
Ukuran Perusahaan		
Kecil (5-19 pekerja)	1	2.50
Menengah (20-99 pekerja)	15	37.50
Besar (100 atau lebih pekerja)	24	60.00

Karakteristik operator PLB lainnya meliputi informasi awal PLB dan rerata penambahan perusahaan pengguna, industri pengguna, importir, eksportir, dan penggunaan lahan ditunjukkan pada Tabel 4.5. Pada awalnya, rata-rata jumlah pengguna PLB sebanyak 6 perusahaan. Pada tahun-tahun selanjutnya, terdapat penambahan pengguna PLB sebanyak 9 perusahaan secara rata-rata, lebih besar dibandingkan jumlah awal pengguna PLB. Untuk industri pengguna PLB, rata-rata industri pengguna PLB pada awal PLB berdiri sebanyak 3 industri. Setelah PLB berjalan, terdapat penambahan industri pengguna PLB sebanyak 6 industri per tahun. Untuk jumlah importir, pada awalnya terdapat rata-rata

5 importir pengguna PLB. Pada tahun-tahun berikutnya, terdapat penambahan importir pengguna PLB sebanyak 9 perusahaan secara rata-rata. Diluar angka tersebut terdapat rata-rata 2 perusahaan yang ditolak oleh PLB setiap tahunnya. Untuk eksportir, rata-rata eksportir pengguna PLB pada awal PLB berdiri sebanyak 1 eksportir. Setelah PLB berjalan, terdapat penambahan eksportir pengguna PLB sebanyak 2 eksportir per tahun. Pertambahan pengguna, industri, importir, dan eksportir pengguna PLB yang selalu positif menunjukkan bahwa PLB berhasil menarik minat para pengusaha, importir, dan eksportir untuk menggunakan PLB.

Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Karakteristik Operator PLB

Variabel	N	Rerata	Std. Dev.	Min	Maks
Perusahaan pengguna					
Jumlah perusahaan pengguna awal PLB berdiri	36	6.167	8.269	0	36
Rerata penambahan perusahaan pengguna PLB per tahun	36	9.264	16.269	0	79
Industri Pengguna					
Jumlah industri pengguna awal PLB berdiri	36	3.972	6.847	1	36
Rerata penambahan industri pengguna PLB per tahun	36	6.009	15.893	0	79
Importir					
Jumlah importir awal PLB berdiri	36	5.583	7.153	0	35
Rerata penambahan importir yang menggunakan PLB per tahun	36	9.167	16.173	0	79
Jumlah importir yang ditolak sejak PLB berdiri	36	2.028	3.468	0	16
Eksportir					
Jumlah eksportir awal PLB berdiri	36	1.778	5.909	0	35
Rerata penambahan eksportir yang menggunakan PLB per tahun	36	2.722	8.416	0	50
Penggunaan Lahan					
Rerata tingkat penggunaan lahan sejak awal PLB berdiri	36	1478.883	4533.289	0	25000

► Statistik Deskriptif Klien PLB

Pada awalnya, penelitian ini berhasil menjangkau 53 klien PLB sebagai responden. Akan tetapi setelah dilakukan

pembersihan, terdapat *redundancy* data sehingga dari jumlah tersebut mengerucut menjadi 41 responden.

Tabel 4.6. Lokasi Klien PLB per Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Observasi	Persentase	
Bali	Gianyar	Ubud	1	2.44	
Banten	Cilegon	Grogol	1	2.44	
		Kota Tangerang	Jatiuwung	1	2.44
		Pajang	Benda	1	2.44
	Tangerang	Cikupa	1	2.44	
		Pagedangan	1	2.44	
		Tigaraksa	1	2.44	
	Tangerang Selatan	Setu	2	4.88	
DKI Jakarta	Jakarta Barat	Cengkareng	2	4.88	
		Kebon Jeruk	2	4.88	
	Jakarta Selatan	Cilandak	4	9.76	
		Kebayoran Baru	1	2.44	
		Warung Buncit	1	2.44	
	Jakarta Timur	Cakung	2	4.88	
		Pulogadung	1	2.44	
Jakarta Utara	Penjaringan	2	4.88		
	Tanjung Priok	3	7.32		
Jawa Barat	Karawang	Ciampel	1	2.44	
		Klari	1	2.44	
		Teluk Jambe Timur	1	2.44	
	Purwakarta	Babakan Cikao	1	2.44	
	Sentul	Babakan Madang	1	2.44	
	Bekasi	Cikarang Selatan	2	4.88	
	Bogor	Bogor Selatan	1	2.44	
	Jawa Tengah	Karanganyar	Jaten	1	2.44
Sukoharjo		Grogol	1	2.44	
Jawa Timur	Gresik	Manyar	1	2.44	
Lampung	Bandar Lampung	Tanjung Karang Timur	1	2.44	
Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Nuha	1	2.44	
Sumatera Utara	Mandailing Natal	Panyabungan	1	2.44	
Total			41	100	

Lokasi klien PLB tersebar di 9 provinsi, 21 kabupaten dan 30 kecamatan. Mayoritas berlokasi di Provinsi DKI Jakarta (43,9%), disusul oleh Banten (19,5%), dan Jawa Barat (19,5%) (lihat Tabel 4.6). Selain ketiga provinsi tersebut, perusahaan pengguna PLB lainnya tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara,

Lampung, dan Sulawesi Selatan. Data ini menunjukkan bahwa pengguna PLB telah tersebar lebih luas ke lebih banyak provinsi di Indonesia dibandingkan dengan sebaran lokasi operator PLB. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak dari PLB tidak hanya terpusat di satu lokasi tertentu.

Tabel 4.7. Karakteristik Klien PLB

Karakteristik	N	Proporsi (%)
Kode industri perusahaan		
Makanan	1	2,44
Garmen	1	2,44
Tekstil	7	17,07
Mesin dan peralatan	4	9,76
Kimia	4	9,76
Elektronik	1	2,44
Metal dan produk metal	4	9,76
Manufaktur lainnya	7	17,07
Transportasi dan Konstruksi	1	2,44
Minyak dan gas	1	2,44
Non-manufaktur lainnya	10	24,39
Lokasi		
Di luar kawasan industri	28	68,29
Di dalam kawasan industri	13	31,71
Status Penanaman Modal		
Penanaman modal dalam negeri (PMDN)	18	43,90
Penanaman modal asing (PMA)	20	48,78
Non-fasilitas	2	4,88
Penanaman modal dalam negeri (PMDN), Penanaman modal asing (PMA)	1	2,44
Kepemilikan Modal		
Swasta Nasional	20	48,78
Asing	17	41,46
Swasta Nasional, Asing	4	9,76
Keanggotaan API		
Bukan Anggota Asosiasi Industri	21	51,22
Anggota Asosiasi Industri	20	48,78
Ukuran Perusahaan		
Kecil (5-19 pekerja)	8	19,51
Menengah (20-99 pekerja)	10	24,39
Besar (100 atau lebih pekerja)	23	56,10

Sebagian besar responden berada di luar kawasan industri (lihat Tabel 4.7). Klien PLB berasal dari 11 industri diantaranya industri makanan, garmen, tekstil, mesin dan peralatan, kimia, elektronik, metal dan produk metal, manufaktur lainnya, transportasi dan konstruksi, minyak dan gas dan industri non-manufaktur lainnya. Fakta bahwa mayoritas klien berasal dari industri manufaktur telah sejalan dengan salah satu tujuan utama PLB untuk memfasilitasi kemudahan proses bisnis industri manufaktur di Indonesia.

Klien PLB memiliki status penanaman modal yang beragam, mayoritas klien atau sebesar 48,78% berstatus penanaman modal asing (PMA). Sebesar 43,9% klien PLB berstatus penanaman modal dalam

negeri (PMDN). Sebesar 4,88% klien PLB berstatus non-fasilitas dan sisanya sebesar 2,44% klien PLB berstatus penanaman modal campuran PMDN dan PMA. Kepemilikan modal perusahaan klien PLB didominasi swasta nasional yakni sebesar 48,78%. Sebesar 41,46% perusahaan klien PLB dimiliki oleh asing dan sisanya 9,76% dimiliki oleh swasta nasional, asing.

Mayoritas perusahaan klien PLB atau sebesar 51,22% bukan merupakan anggota asosiasi industri sedangkan sisanya 48,78% klien PLB merupakan anggota asosiasi industri. Adapun ukuran perusahaan klien PLB responden penelitian ini didominasi oleh perusahaan berukuran besar yakni sebesar 56,10%, 24,39% diantara responden klien PLB berukuran sedang, dan sisanya 19,51% berukuran kecil.

Tabel 4.8. Pemanfaatan Layanan PLB

	Satu PLB, %	Dua PLB, %
Jumlah PLB yang dimanfaatkan	87.2	12.8
Jenis PLB, %	PLB Pertama	PLB Kedua
PLB <i>Supporting Industry</i>	76.92	83.33
PLB Hub Kargo udara	0	0
PLB <i>Floating Storage</i>	15.38	16.67
PLB Bahan Pokok	7.69	0
Hak Milik Barang, %	PLB Pertama	PLB Kedua
Milik Perusahaan yang dititipkan	82.05	66.67
Milik PLB	2.56	0
Konsinyasi	15.38	33.33

Tabel 4.8 menjelaskan pemanfaatan layanan PLB oleh klien PLB. Responden klien PLB memanfaatkan satu hingga dua PLB. Sebesar 87,2% responden hanya memanfaatkan satu PLB dan sisanya 12,8% responden menggunakan dua PLB. Mayoritas klien PLB memanfaatkan PLB *supporting industry*. Sisanya memanfaatkan PLB *floating storage* dan bahan pokok. Tidak ada klien PLB yang memanfaatkan PLB hub kargo udara. Adapun hak milik barang klien baik pada PLB pertama maupun PLB ke-dua didominasi oleh hak milik perusahaan yang dititipkan. Pada PLB pertama sebesar 2,56% hak milik barang dimiliki oleh PLB dan sisanya 15,38% memiliki status hak milik konsinyasi. Pada PLB

kedua hak milik barang konsinyasi sebesar 33,33% dan tidak ada hak milik barang yang dimiliki PLB.

Sebagian besar pengguna PLB adalah perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri (lihat Tabel 4.9). Mereka memiliki rata-rata persentase biaya pemanfaatan PLB terhadap total biaya logistik dan biaya operasional berturut-turut sebesar 29,4% dan 20,5%. Responden memiliki nilai rata-rata ekspor yang sedikit lebih tinggi setelah menggunakan PLB. Walaupun demikian, data ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekspor masih perlu ditingkatkan ke depan.

Tabel 4.9. Deskriptif Statistik Karakteristik Klien PLB

Variabel	N	Rerata	Std. Dev.	Min	Maks
Proporsi <i>input</i> dari dalam negeri (%)	41	38.098	31.103	0	100
Proporsi <i>input</i> dari luar negeri (%)	41	60.927	30.5	0	100
Proporsi biaya penggunaan PLB terhadap total biaya logistik (%)	39	29.41	28.299	0	100
Proporsi biaya penggunaan PLB terhadap total biaya operasional (%)	39	20.462	25.169	0	100
Rerata ekspor sebelum menggunakan PLB (miliar rupiah)	38	12.42	43	0	200
Rerata ekspor setelah menggunakan PLB (miliar rupiah)	38	14.3	49.78	0	250

Tujuan Penelitian I: Efektivitas Proses Bisnis PLB

► Importance-Performance Analysis

Dalam penelitian ini item kuesioner IPA terdiri dari 10 dimensi dengan total item pertanyaan berjumlah 93 item (lihat Tabel 4.10). Skor kepentingan (*importance*) item IPA ditentukan berdasar skala likert 1-5. Skor 1 artinya sangat tidak penting, skor 2 artinya tidak penting,

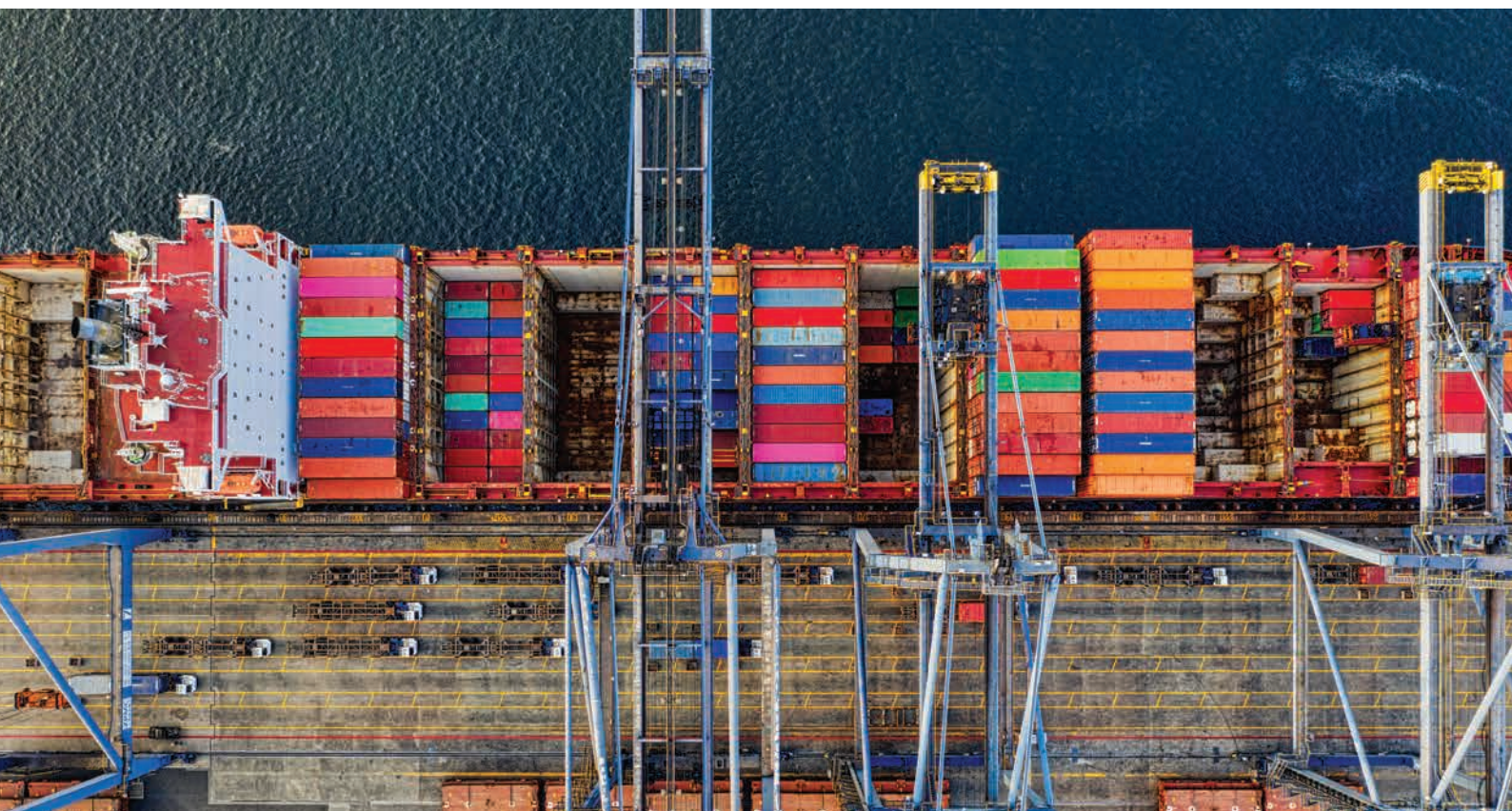
skor 3 artinya netral, skor 4 artinya penting, skor 5 artinya sangat penting. Skor kinerja (*performance*) juga ditentukan berdasarkan skala likert 1-5. Skor 1 artinya sangat tidak baik, 2 artinya tidak baik, 3 artinya netral, 4 artinya baik, dan 5 artinya sangat baik.

Tabel 4.10. Item Kuesioner IPA

No.	Dimensi	No. Item	Item
1	Fasilitas Fiskal	1	[Penangguhan bea masuk]
		2	[Pembebasan pajak impor (PPN, PPh, impor)]
		3	[Pembebasan PPN atas pemasukan dalam negeri]
		4	[Transparansi prosedur kepabeanan]
		5	[Penarikan dana informal terkait kegiatan logistik]
		6	Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan badan bea cukai/ <i>custom agencies</i>]
		7	[Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan broker bea cukai]
2	Jangka Waktu Penimbunan	8	[Jangka waktu penimpunan barang paling lama 3 (tiga) tahun]
		9	[Perpanjangan waktu penimbunan]
		10	[Karakteristik barang yang dapat ditimbun sesuai dengan peruntukan PLB]
3	Status Kepemilikan Barang	11	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh penyelenggaraan PLB]
		12	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh pengusaha PLB]
		13	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh PDPLB]
		14	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh pemasok (<i>supplier</i>) di luar daerah pabean]
4	Fasilitas Pemasukan	15	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh orang atau badan lainnya]
		16	[Dapat menimbun barang impor maupun ekspor]
		17	[Pemasukan barang dari luar negeri dan dalam negeri]
		18	[Penangguhan ketentuan pembatasan jumlah barang]
		19	[Kewajiban pembongkaran (<i>stripping</i>) dari peti kemas]
		20	[Pemasukan dan pengiriman produk impor sesuai jadwal]
		21	[Pemasukan dan pengiriman produk ekspor sesuai jadwal]
5	Fleksibilitas Pengeluaran	22	[Fleksibilitas pengeluaran barang secara parsial]
		23	[Pengenaaan pungutan pajak maupun bea masuk sesuai pengeluaran barang]
6	Infrastruktur	24	[Lokasi PLB dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya]
		25	[Luas PLB memiliki batasan yang jelas]
		26	[Memiliki tempat untuk pemeriksaan fisik atas barang impor dan/atau barang ekspor;]
		27	[Memiliki tempat untuk melakukan penimbunan, pemuatan, pembongkaran, pemasukan, dan pengeluaran barang ke dan dari luar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean]
		28	[Memiliki tempat atau area transit untuk barang]
		29	[Memiliki tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan penimbunan barang]
		30	Memiliki sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)]
		31	[Memiliki Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (<i>IT-based inventory</i>) dalam pengelolaan barang]

No.	Dimensi	No. Item	Item
6	Infrastruktur	32	[Memiliki pencatatan secara <i>realtime</i> dan <i>online</i> ;]
		33	[Memiliki Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara <i>realtime</i> dan <i>online</i>]
		34	[Memiliki data rekaman CCTV paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;]
		35	[Kualitas infrastruktur terkait transportasi]
		36	[Penggunaan IT dalam proses administrasi kepabeanan]
		37	[Kehandalan layanan administrasi berbasis IT]
		38	[Optimalisasi pemanfaatan lahan yang disyaratkan dalam aturan pendirian PLB.]
		39	[Peraturan luas lahan minimal sebagai syarat pendirian PLB.]
		7	Self-Managed Bonded
41	[Memiliki sistem Pengendalian Internal yang terhubung dengan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (<i>IT-based inventory</i>)]		
42	[Monitoring aktivitas berdasarkan manajemen risiko]		
43	[Pemberitahuan Pabean melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)]		
44	[Pengemasan atau pengepakan kembali]		
45	[Pembatasan jenis barang yang dapat ditampung dan dikelola oleh PLB.]		
46	[Pengelolaan PLB oleh perusahaan jasa logistik.]		
47	[Fokus pada tujuan awal diinisiasinya program PLB.]		
8	Penyelesaian Import Sementara	48	[Pemasukan barang <i>cost recovery</i> ke PLB]
		49	[Menyelesaikan kewajiban ekspor untuk impor sementara]
9	Logistik Sederhana	50	[Pengemasan atau pengemasan kembali]
		51	[Penyortiran]
		52	[Standardisasi (<i>quality control</i>)]
		53	[Penggabungan (<i>kitting</i>)]
		54	[Pengepakan]
		55	[Penyetelan]
		56	[Konsolidasi barang tujuan ekspor]
		57	[Penyediaan barang tujuan ekspor]
		58	[Pemasangan kembali dan/ atau perbaikan]
		59	[Maintenance pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (<i>painting</i>)]
		60	[Pembauran (<i>blending</i>)]
		61	[Pemberian label berbahasa Indonesia]
		62	[Pemasangan kembali dan/atau perbaikan]
		63	[Pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai]
		64	[Lelang barang modal asal luar daerah pabean]
		65	[Pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean]
		66	[Pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/ atau ekspor]
		67	[Kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal]
		68	[Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan operator gudang dan operator distribusi]
		69	[Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan Freight Forwarder]
70	[Evaluasikan kompetensi dan kualitas jasa badan pengecekan standar dan kualitas]		

No.	Dimensi	No. Item	Item
10	Ease of doing Business	71	[Perbaikan prosedur perizinan kepabeanaan dari PLB]
		72	[Perbaikan prosedur perizinan dari Badan Bea Cukai]
		73	[Perbaikan kualitas infrastruktur telekomunikasi/IT PLB]
		74	[Perbaikan regulasi perusahaan mengenai kegiatan logistik dari PLB]
		75	[Informasi berkala dan cukup mengenai pergantian regulasi pemerintah yang berlaku]
		76	[Kemudahan dalam pengelolaan administrasi kepabeanaan]
		77	[Menjadi hub logistik di Asia Pasifik]
		78	[Mempunyai layanan tersatandar internasional]
		79	[Penerapan teknologi pergudangan]
		80	[Kemudahan penyimpanan barang berstatus entitas asing]
		81	[Kemudahan pengelolaan logistik barang milik sendiri]
		82	[Kemudahan pengelolaan logistik barang titipan]
		83	[Kemudahan pengelolaan logistik barang konsinyasi]
		84	[Transparansi laporan administrasi kepabeanaan]
		85	[Kemudahan proses perizinan untuk menjadi anggota PLB]
		86	[Kemudahan pelayanan perizinan]
		87	[kemudahan pelayanan kegiatan operasional]
		88	[kemudahan kepabeanaan dan cukai lainnya]
		89	[Sinkronisasi antar peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan operasional PLB.]
		90	[Sosialisasi peraturan-peraturan baru yang mengatur kegiatan operasional PLB.]
		91	[Pemahaman yang menyeluruh dan sama antar pemangku kepentingan atas peraturan-peraturan terkait PLB.]
		92	[Kerumitan proses pelengkapan dokumen ekspor/impor.]
		93	[Penurunan <i>dwelling time</i> .]



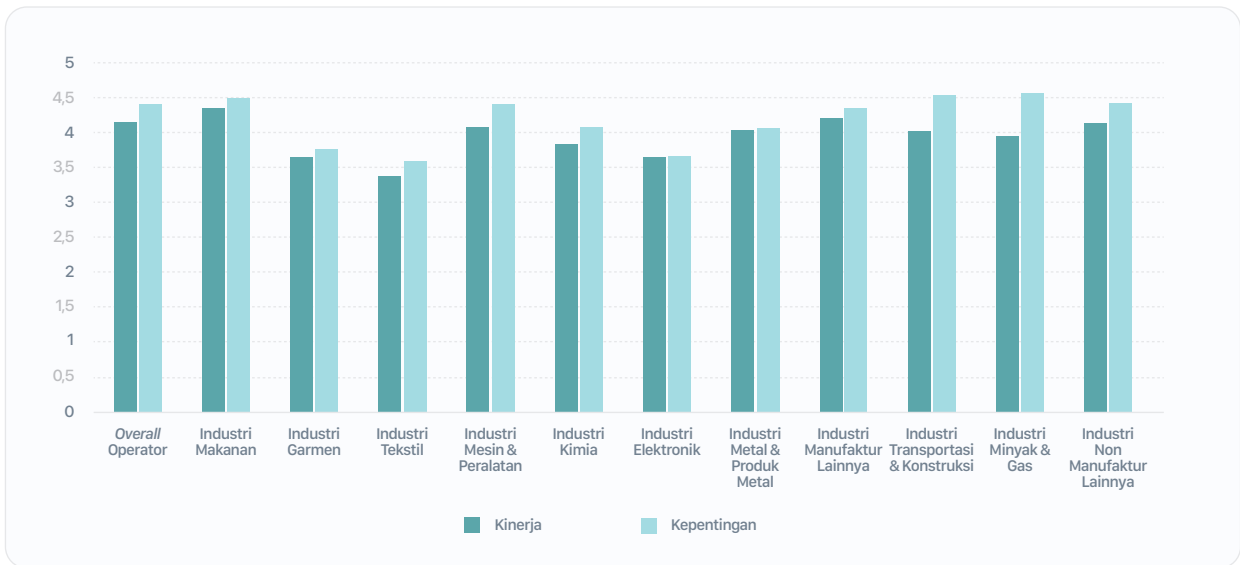
1. Importance-Performance Analysis (IPA)

Overall Data

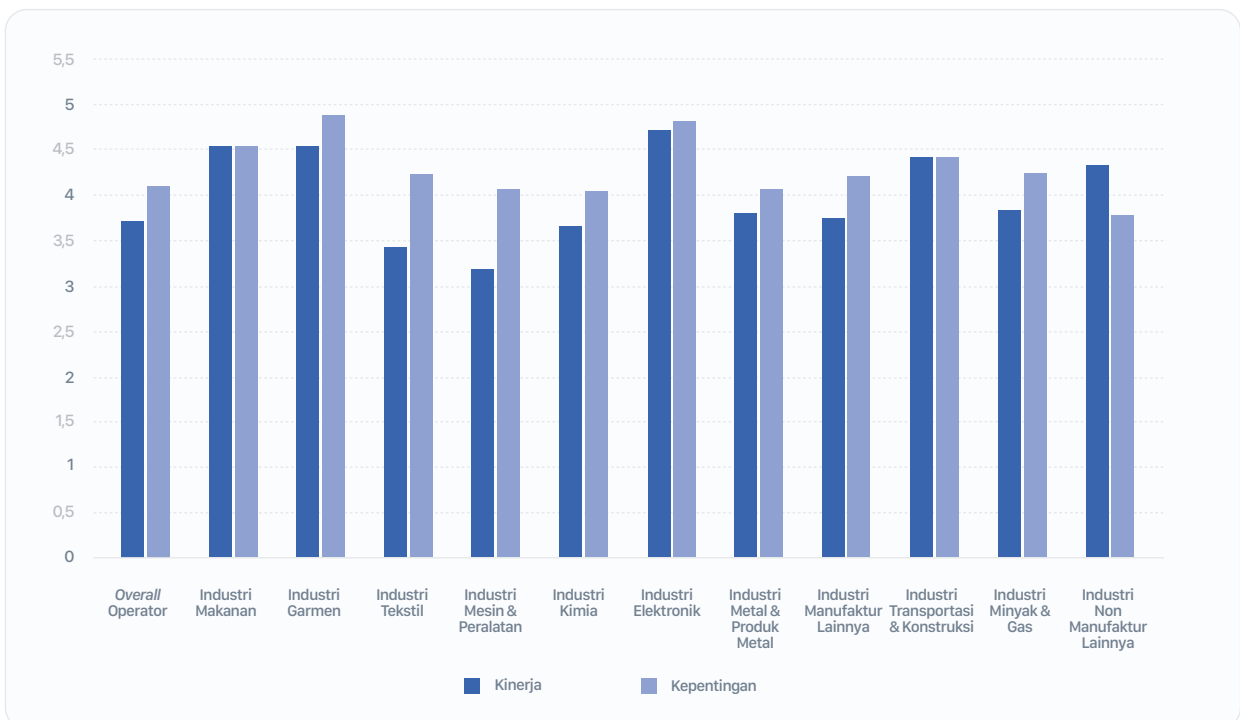
Matriks IPA operator dan klien disusun berdasarkan skor rata-rata (lihat Gambar 4.1 dan Gambar 4.2) yang menjelaskan bahwa masing-masing industri memiliki nilai rata-rata yang berbeda disebabkan karena respon dan jumlah responden pada setiap industri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, walaupun pemetaan kinerja dengan nilai rata-rata itu penting untuk setiap industri, patokan utama yang sebaiknya dilihat oleh

semua industri adalah nilai $X_i Y_i = 3$ yang sifatnya universal untuk semua industri. Nilai $X_i Y_i$ = nilai rata-rata sebaiknya digunakan untuk melihat item-item kinerja yang sudah di atas rata-rata atau dibawah rata-rata. Namun demikian, nilai di atas rata-rata tidak selalu bisa dikatakan baik jika nilai rata-ratanya masih di bawah 3. Demikian juga nilai di bawah rata-rata tidak selalu berarti buruk, karena bisa jadi nilainya sudah di atas 3.

Gambar 4.1. Skor Rata-rata Operator



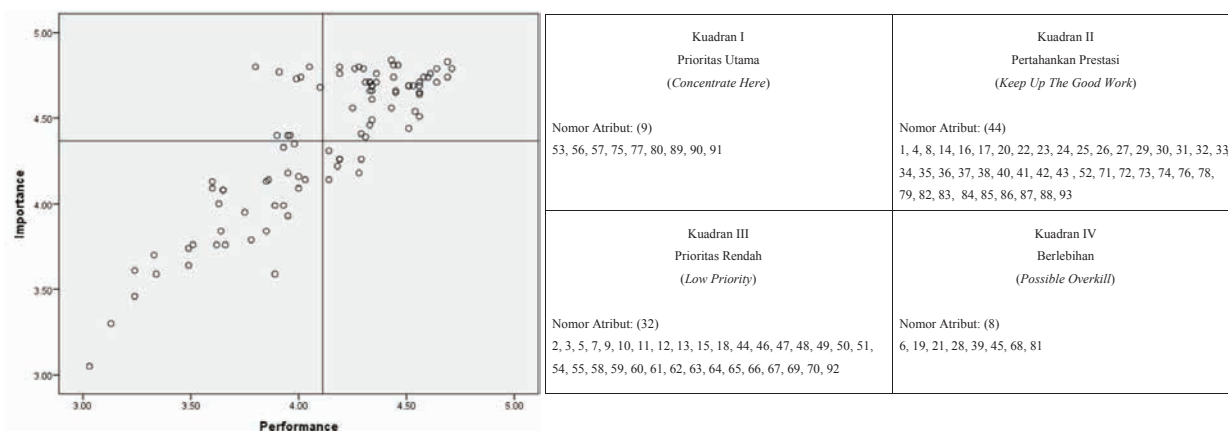
Gambar 4.2. Skor Rata-rata Klien



Gambar 4.3 menunjukkan matriks IPA secara umum berdasarkan penilaian operator, dengan nilai rata-rata kinerja sebagai sumbu X dan nilai rata-rata kepentingan sebagai sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 9 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) dimana item yang masuk dalam kuadran I tersebut perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 9 item tersebut rendah. Adapun 9 item tersebut antara lain item nomor 53, 56, 57, 75, 77, 80, 89, 90 dan 91. Mayoritas item yakni sejumlah 44 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang

berarti bahwa bahwa 44 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks *overall* industri ini juga masih banyak item yang masuk ke kuadran III (*low priority*) sejumlah 32 item. Hal ini menunjukkan bahwa 32 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya. Sebanyak 8 item masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang berarti bahwa 8 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga berlebihan.

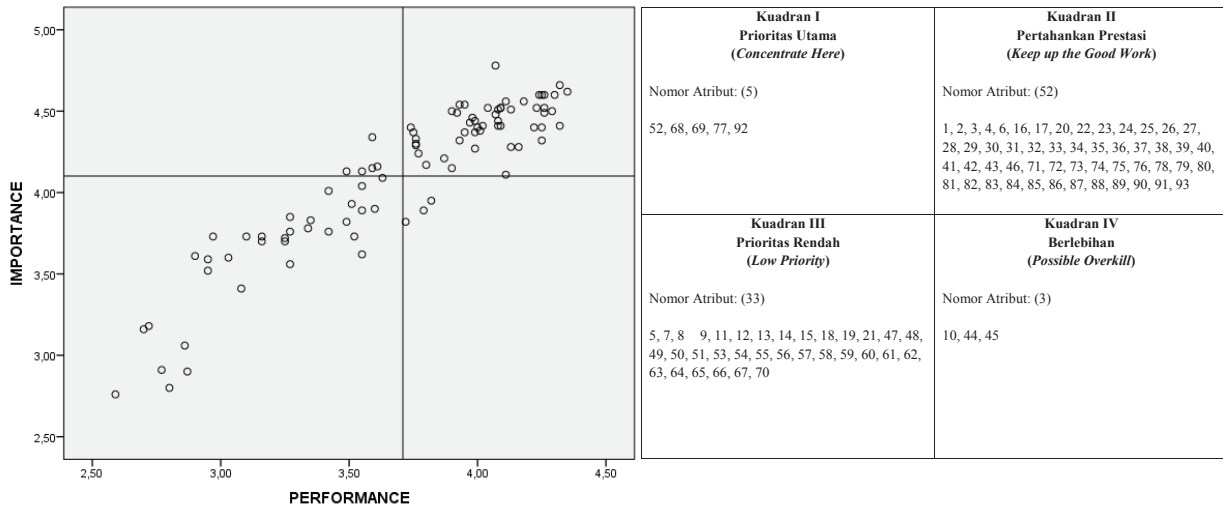
Gambar 4.3. Matriks *Importance-Performance Analysis (IPA) Overall Operator PLB (X,Y= Rata-rata)*



Gambar 4.4 menjelaskan matriks IPA pada *overall* data klien PLB, dengan nilai rata-rata tingkat kinerja sebagai sumbu X dan nilai rata-rata tingkat kepentingan sebagai sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 5 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*), yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 5 item tersebut rendah. Adapun 5 item tersebut antara lain item nomor 52, 68, 69, 77 dan 92. Mayoritas item yakni sejumlah 52 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang

yang berarti bahwa 52 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks *overall* industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 33 item, hal ini menjelaskan bahwa 33 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Sebanyak 8 item masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang berarti bahwa 3 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga berlebihan.

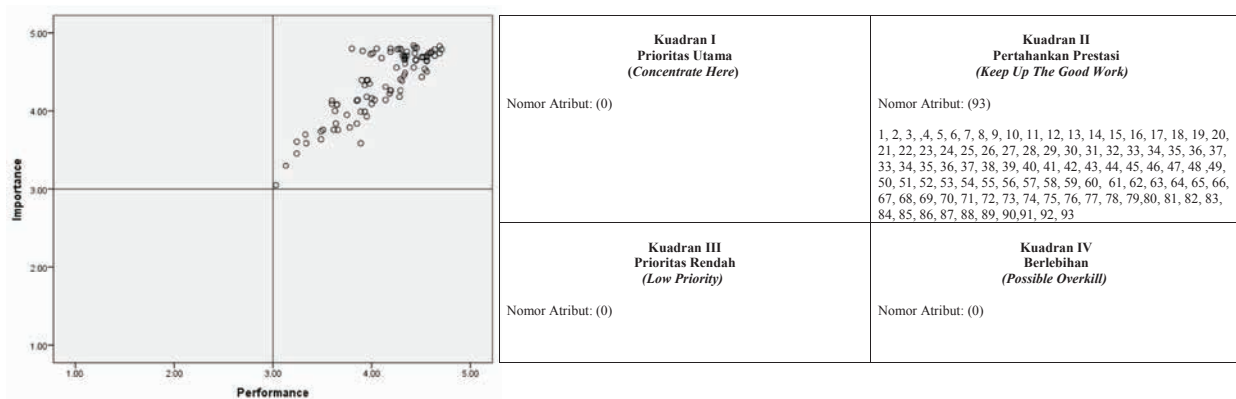
Gambar 4.4. Matriks *Importance-Performance Analysis (IPA) Overall Klien PLB (X,Y= Rata-rata)*



Gambar 4.5 menunjukkan matriks IPA untuk overall data operator PLB, engan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Matriks IPA tersebut menunjukkan bahwa seluruh item (93 item) yang dievaluasi dalam penelitian ini telah terkonsentrasi di

kuadran II (*keep up the good work*). Hasil ini mengindikasikan bahwa berdasarkan perspektif operator, secara umum, PLB sudah berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya (*on the right track*).

Gambar 4.5. Matriks *Importance-Performance Analysis (IPA) Overall Operator PLB (X,Y= 3)*

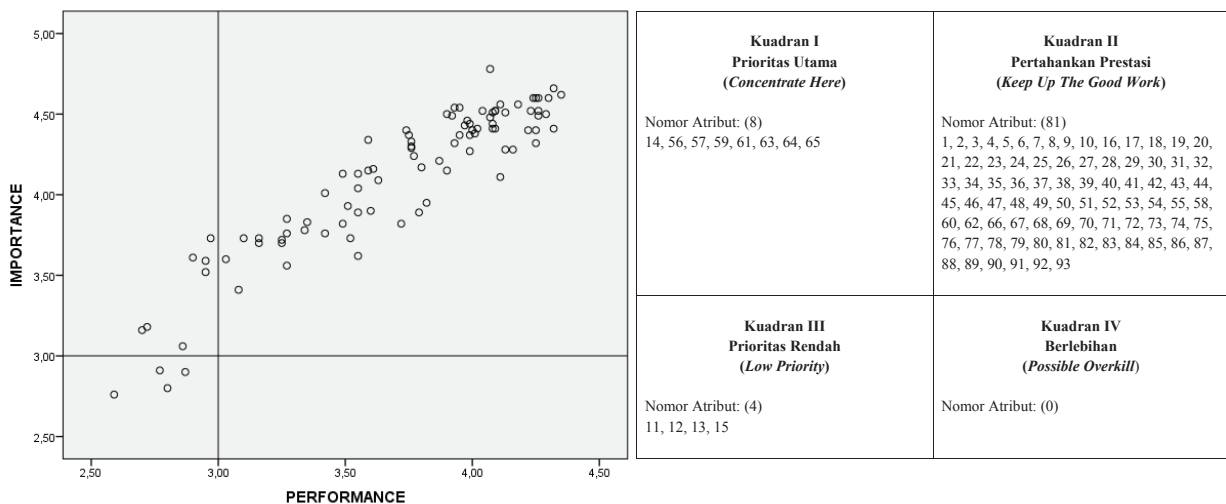


Gambar 4.6 menjelaskan matriks IPA pada overall data klien PLB, dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Matriks tersebut menunjukkan bahwa terdapat 8 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*), dimana item-item tersebut perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi, namun tingkat kinerjanya rendah. Mayoritas item, yakni sejumlah 81 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*), yang berarti bahwa 81 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerjanya yang tinggi pula. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan penilaian klien, layanan PLB sudah sesuai dengan tujuan pendiriannya atau bisa dikatakan *on the right track*. Pada matriks overall industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 4 item, yang berarti bahwa 4 item tersebut memiliki nilai tingkat

kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang rendah (dibawah 3). Tidak ada item yang masuk pada kuadran IV.

Adapun 8 item yang terkonsentrasi di kuadran I dan perlu mendapatkan prioritas perbaikan berdasarkan matriks IPA tersebut adalah item nomor 14 (barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh pemasok di luar daerah pabean), nomor 56 (konsolidasi barang tujuan ekspor), 57 (penyediaan barang tujuan ekspor), nomor 59 (*maintenance* pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan), nomor 61 (pemberian label berbahasa Indonesia), nomor 63 (pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas barang kena cukai), nomor 64 (lelang barang modal asal luar daerah pabean) dan nomor 65 (pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean).

Gambar 4.6. Matriks Importance-Performance Analysis (IPA) Overall Klien PLB (X,Y= 3)

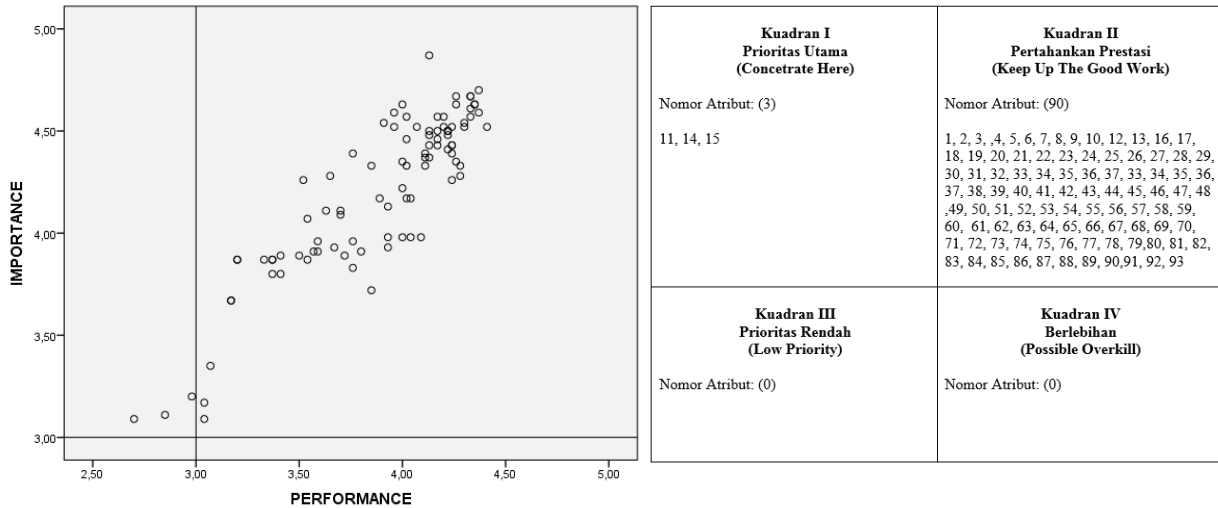


2. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien PLB Industri Besar

IPA klien PLB industri besar dilakukan untuk mengetahui respon klien dengan skala industri besar atas efektivitas operator PLB. Gambar 4.7 menunjukkan matriks IPA pada klien PLB industri besar dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 3 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) sehingga perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang

tinggi akan tetapi tingkat kinerja 3 item tersebut rendah. Namun demikian, mayoritas item (90 item) layanan PLB telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*), yang berarti bahwa secara umum kinerja PLB dinilai baik dan *on the right track*. Pada matriks klien industri besar ini tidak ada item yang memasuki kuadran III (*low priority*) dan kuadran IV (*possible overkill*).

Gambar 4.7. Matriks *Importance-Performance Analysis (IPA)* Klien PLB Industri Besar (X,Y= 3)



Klien PLB dari industri besar, yakni industri dengan jumlah pekerja lebih dari 100 pekerja, merespon positif atas kinerja layanan PLB. Sejumlah 90 item masuk dalam kuadran II yang artinya 90 item tersebut sudah baik dan harus dipertahankan kinerjanya. Adapun 3 item yang lainnya masuk dalam kuadran I yang artinya 3 item tersebut harus dijadikan prioritas utama. Tiga item yang dimaksud adalah item nomor 11 (barang yang

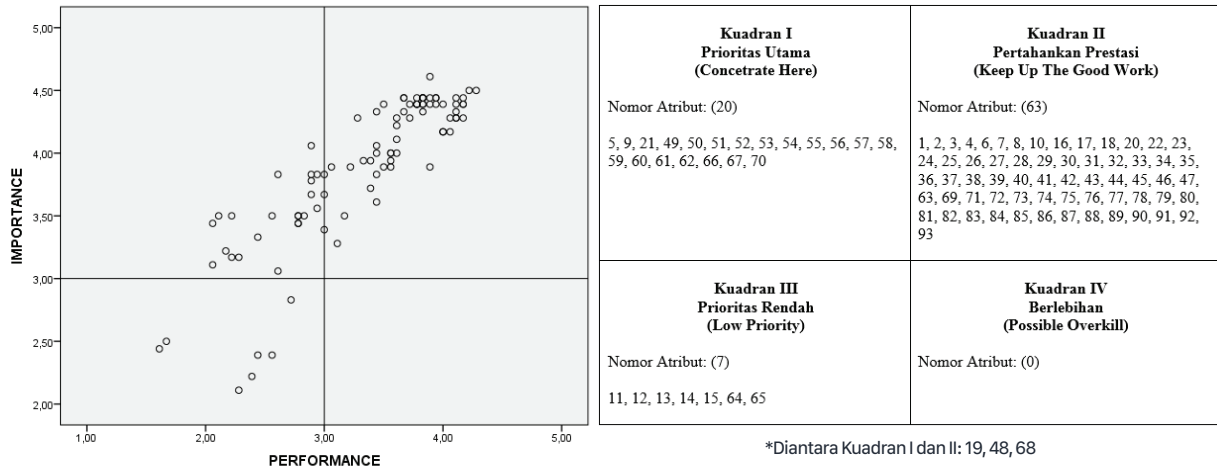
ditimbun dapat dimiliki klien PLB), nomor 14 (barang yang ditimbun dapat dimiliki pemasok (suplier) di luar daerah pabean), dan nomor 15 (barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh orang atau badan lainnya). Mayoritas item (90 item) yang terletak pada kuadran II ini menunjukkan bahwa menurut klien PLB dari industri besar kinerja PLB atas pelayanan yang diberikan sudah efektif.

3. *Importance-Performance Analysis (IPA)* Klien PLB Industri Kecil dan Menengah

IPA klien PLB industri kecil dan menengah dilakukan untuk mengetahui respon klien dengan skala industri kecil dan menengah atas efektivitas operator PLB. Gambar 4.8 menunjukkan matriks IPA klien PLB industri kecil dan menengah, dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 20 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 20 item tersebut masih rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 63 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang berarti bahwa secara umum PLB telah dinilai *on the right track* dalam mendukung proses bisnis IKM. Selain itu, pada matriks

klien industri kecil dan menengah ini juga masih ada item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 7 item. Hal ini berarti bahwa 7 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah (kurang dari 3). Tidak ada item yang masuk pada kuadran IV. Namun, terdapat 3 item lain yang masuk dalam kuadran antara dikarenakan letak item yg berada tepat di sumbu Y pemisah kuadran I dan II. Tiga item tersebut antara lain item nomor 19 (kewajiban pembongkaran (*stripping*) dari peti kemas), 48 (Pemasukan barang *cost recovery* ke PLB), dan 68 (evaluasi kompetensi dan kualitas layanan operator gudang dan operator distribusi).

Gambar 4.8. Matriks *Importance-Performance Analysis* (IPA) Klien PLB Industri Kecil dan



Walaupun mayoritas item telah masuk ke kuadran II, klien PLB dari industri kecil dan menengah, yakni industri dengan jumlah pekerja kurang dari 100 pekerja, merespon kurang baik atas kinerja layanan PLB. Dengan kata lain, klien PLB dari industri kecil dan menengah menilai kinerja pelayanan PLB kurang efektif dan masih perlu meningkatkan kinerja 20 item yang masuk dalam kuadran I (prioritas utama/*concentrate here*). Dua puluh item tersebut adalah item nomor 5 (penarikan dana informal terkait kegiatan logistik), nomor 9 (perpanjangan waktu penimbunan), nomor 21 (pemasukan dan pengiriman produk ekspor sesuai jadwal), nomor 49 (menyelesaikan kewajiban ekspor untuk impor sementara), nomor 50 (pengemasan atau pengemasan kembali), nomor 51 (penyortiran), nomor 52 (standarisasi/*quality control*), nomor 53 (penggabungan/*kitting*), nomor 54 (pengemasan), nomor 55 (penyetelan), nomor 56 (konsolidasi barang tujuan

ekspor), nomor 57 (penyediaan barang tujuan ekspor), nomor 58 (pemasangan kembali dan atau perbaikan), nomor 59 (*maintenance* pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan), nomor 60 (pembauran/*blending*), nomor 61 (pemberian label berbahasa indonesia), nomor 62 (pemasangan lembali dan atau perbaikan), nomor 66 (pemeriksaan dari lembaga atau instansi terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/atau ekspor), nomor 67 (kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal), dan nomor 70 (evaluasi kompetensi dan kualitas jasa badan pengecekan standar dan kualitas). Temuan-temuan ini sejalan dengan hasil FGD baik dengan operator maupun regulator PLB yang mengungkapkan bahwa peran PLB untuk mendukung daya saing IKM memang masih perlu ditingkatkan.

4. Importance-Performance Analysis (IPA) Industri

Dalam penelitian ini terdapat 11 industri responden baik operator maupun klien yang berpartisipasi. Ke-11 industri tersebut antara lain: industri makanan, garmen, tekstil, mesin dan peralatan, kimia, elektronik, metal dan produk metal, manufaktur lainnya, transportasi dan konstruksi, minyak dan gas, dan industri non-manufaktur lainnya. Analisis IPA industri penting dilakukan mengingat masing-masing industri memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga agregasi IPA *overall* data tidak dapat menjelaskan keberagaman tersebut. Sebagaimana analisis IPA *overall* data, analisis IPA industri juga menggunakan dua nilai sebagai sumbu X dan sumbu Y, yakni nilai rata-rata dan nilai tengah (3).

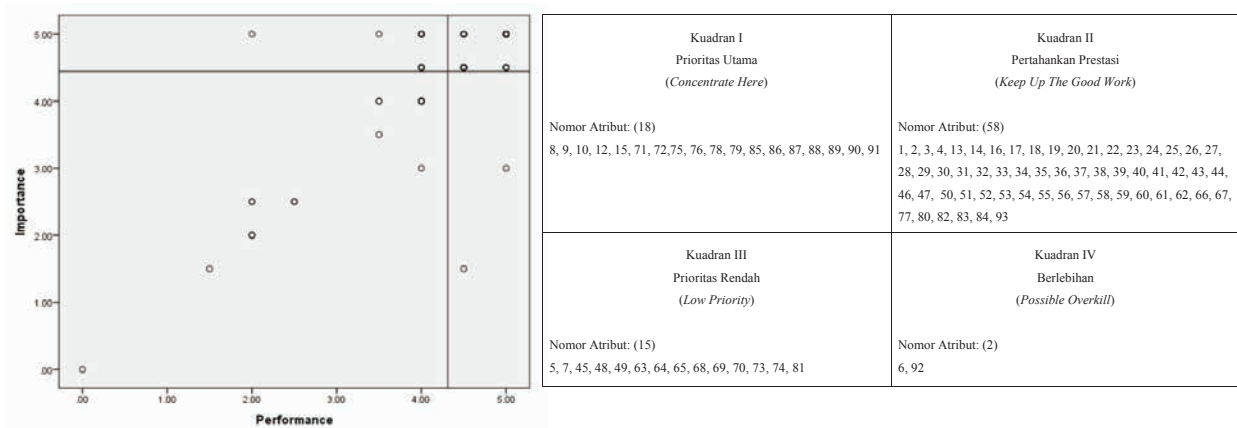
Namun demikian, perlu dicatat bahwa hasil analisis IPA pada level industri ini tidak serta merta dapat digeneralisasi ke seluruh populasi di setiap industri. Hal ini karena tidak banyak jumlah responden yang mewakili setiap industri. Jumlah responden juga tidak sama antar satu industri dan industri lainnya. Oleh karena itu, perbandingan dan pemeringkatan kinerja antar industri dalam penelitian ini bersifat indikatif alih-alih konklusif.

Gambar 4.9 mengilustrasikan matriks IPA industri makanan berdasarkan perspektif operator PLB (dua responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 18 item

yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 18 item tersebut rendah. Adapun 18 item tersebut antara lain item nomor 8, 9, 10, 12, 15, 71, 72,75, 76, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, dan 91 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 58 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*), yang berarti bahwa 58 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang

tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 15 item, yang menjelaskan bahwa 15 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Sebanyak 2 item masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*), yang berarti bahwa 2 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi.

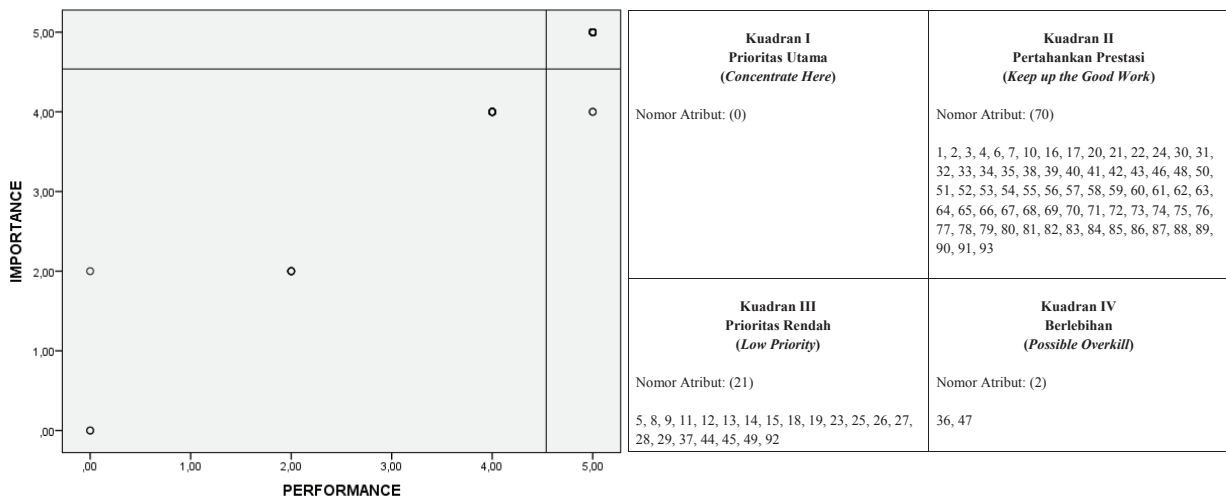
Gambar 4.9. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Makanan X,Y= Rata-rata



Gambar 4.10 mengilustrasikan matriks IPA berdasarkan perspektif klien industri makanan (satu responden), dengan nilai rata-rata sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 70 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*), yang berarti bahwa 70 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks

industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 21 item yang menjelaskan bahwa 21 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Sebanyak 2 item masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*), yang berarti 2 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi.

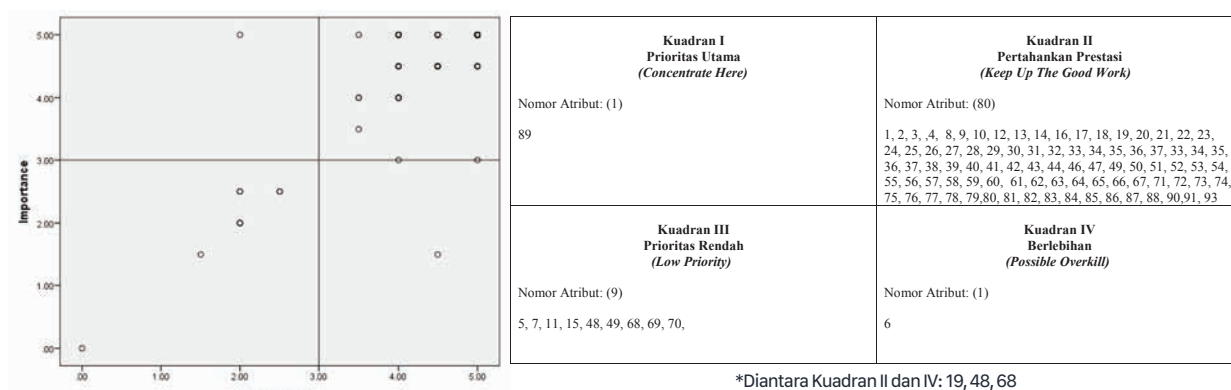
Gambar 4.10. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Makanan X,Y= Rata-rata



Gambar 4.11 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri makanan (dua responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 1 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 89 (lihat Tabel 4.10) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja item nomor 89 tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 80 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 80 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang

tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 9 item, hal ini menjelaskan bahwa 9 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Sementara item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 1 item yang maknanya 1 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah akan tetapi nilai tingkat kinerja tinggi sehingga berlebihan.

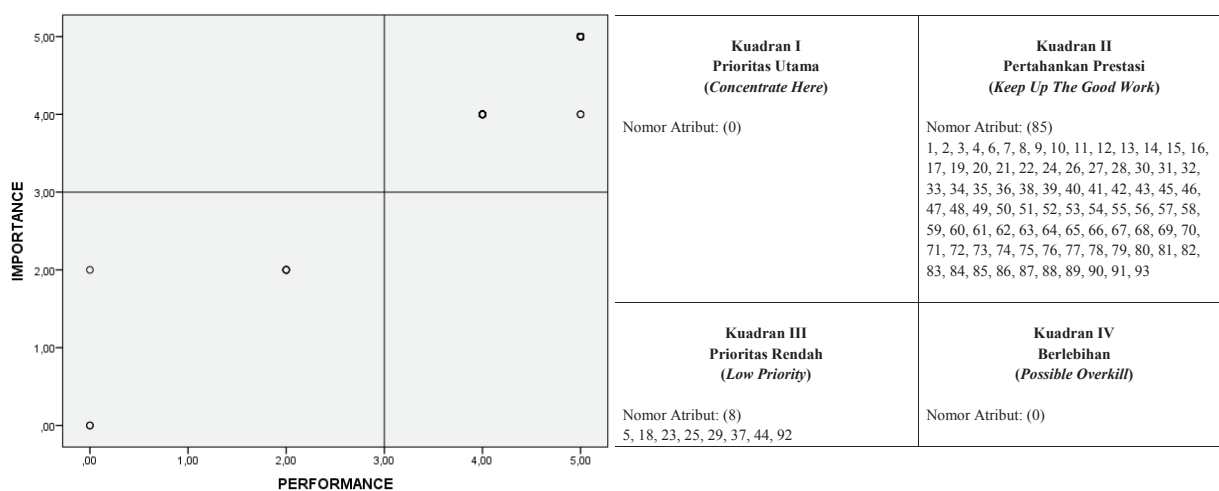
Gambar 4.11. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Makanan X,Y= 3



Gambar 4.12 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri makanan (satu responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 85 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 85 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat

kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 8 item, hal ini menjelaskan bahwa 8 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Tidak ada item yang masuk pada kuadran IV.

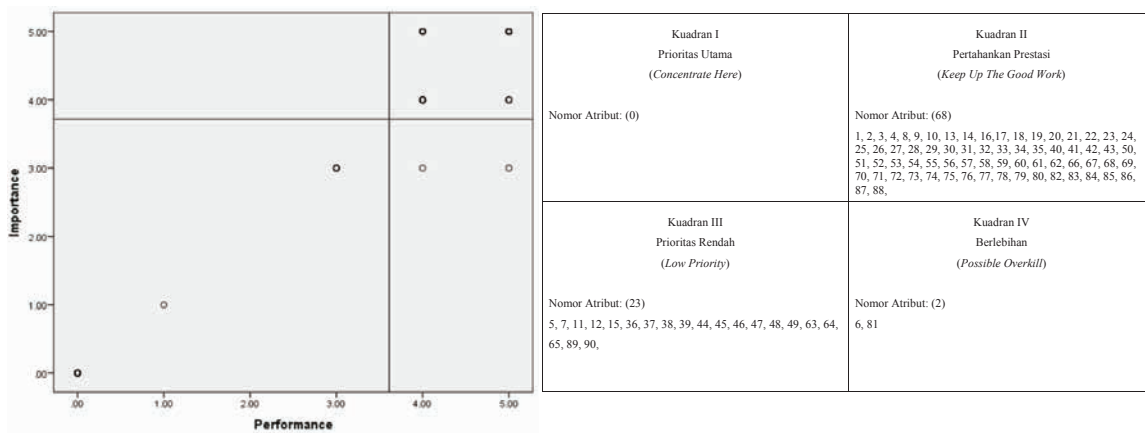
Gambar 4.12. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Makanan X,Y= 3



Gambar 4.13 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri garmen (satu responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 68 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini berarti bahwa 68 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini

juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 23 item, hal ini berarti bahwa 23 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sementara item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 2 item yang maknanya 2 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah akan tetapi nilai tingkat kinerja tinggi sehingga berlebihan.

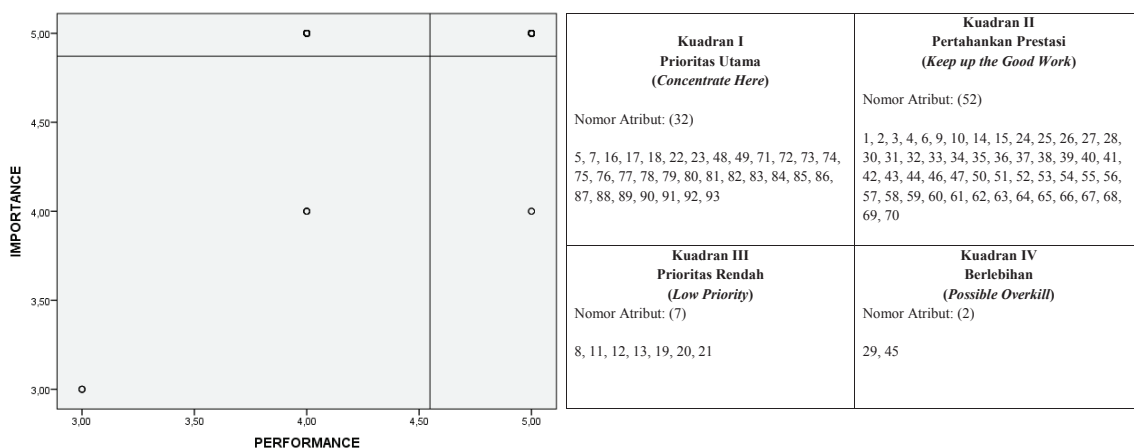
Gambar 4.13. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Garmen X,Y= Rata-rata



Gambar 4.14 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri garmen (satu responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 32 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 32 item tersebut rendah. Adapun 32 item tersebut antara lain item nomor 5, 7, 16, 17, 18, 22, 23, 48, 49, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 dan 93 (lihat Tabel 4.10). Pada matriks IPA tersebut Mayoritas item yakni sejumlah 52 item telah masuk pada kuadran

II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 52 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 7 item, hal ini menjelaskan bahwa 7 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sementara item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 2 item yang maknanya 2 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah akan tetapi nilai tingkat kinerja tinggi sehingga berlebihan.

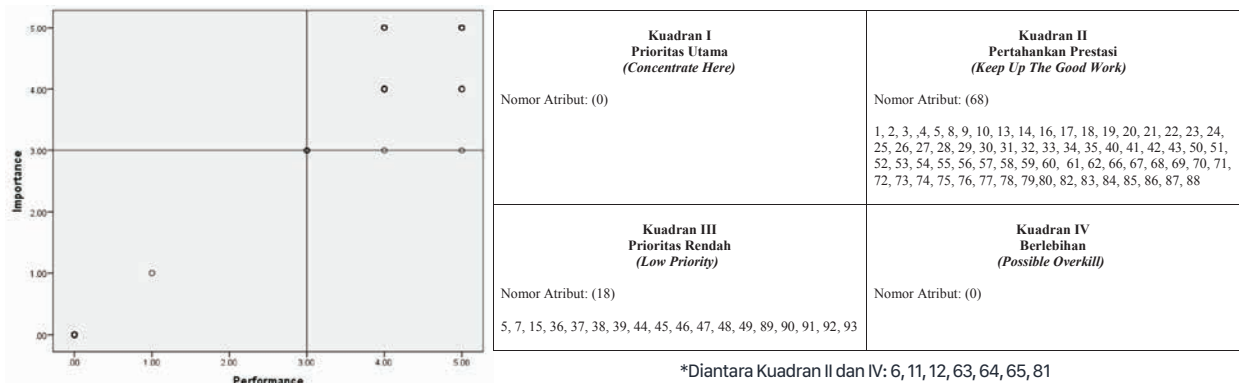
Gambar 4.14. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Garmen X,Y= Rata-rata



Gambar 4.15 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri garmen (satu responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 68 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang berarti bahwa 68 item tersebut memiliki nilai

tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 18 item, hal ini menjelaskan bahwa 18 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Tidak ada item yang masuk pada kuadran IV.

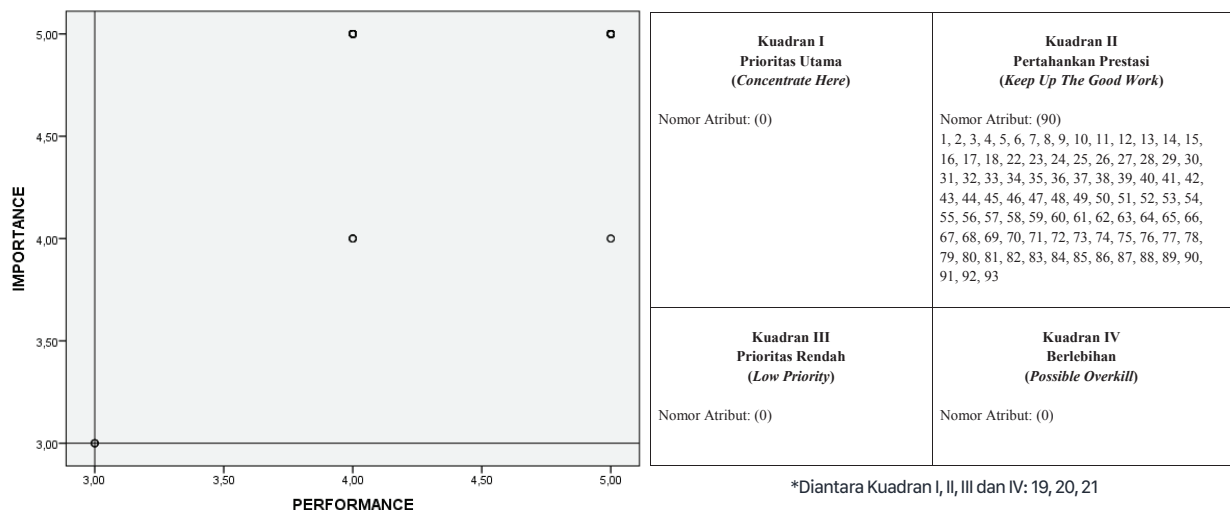
Gambar 4.15. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Garmen X,Y= 3



Gambar 4.16 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri garmen (satu responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut seluruh item (93) telah memasuki kuadran II

(*keep up the good work*) yang berarti nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja semua item pada industri garmen telah diatas nilai netral (3).

Gambar 4.16. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Garmen X,Y= 3



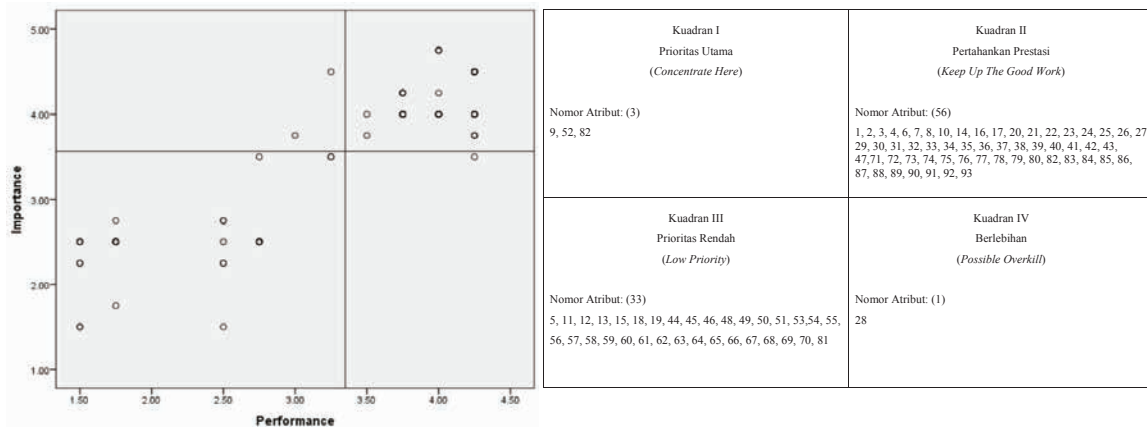
Gambar 4.17 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri tekstil (empat responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 3 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu

menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 3 item tersebut rendah. Tiga item tersebut antara lain item nomor 9, 52, dan 92 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 56 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang berarti bahwa 56 item

tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 33 item, hal ini menjelaskan bahwa 33 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih

rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sementara item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 1 item yang berarti bahwa 1 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi.

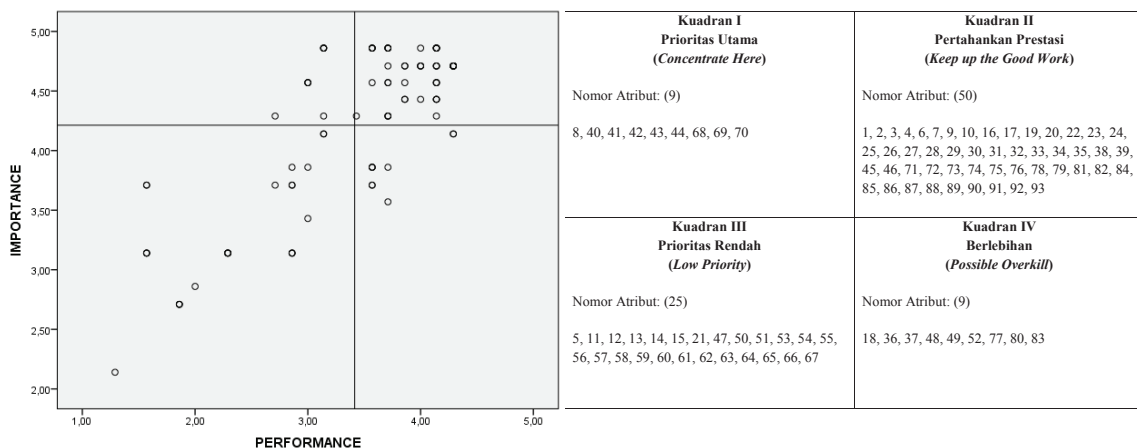
Gambar 4.17. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Tekstil X,Y= Rata-rata



Gambar 4.18 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri tekstil (tujuh responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 9 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 9 item tersebut rendah. Adapun 9 item tersebut antara lain item nomor 8, 40, 41, 42, 43, 44, 68, 69, dan 70 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 50 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 50

item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 25 item, hal ini menjelaskan bahwa 33 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sementara item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 9 item yang maknanya 9 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah akan tetapi nilai tingkat kinerja tinggi sehingga berlebihan.

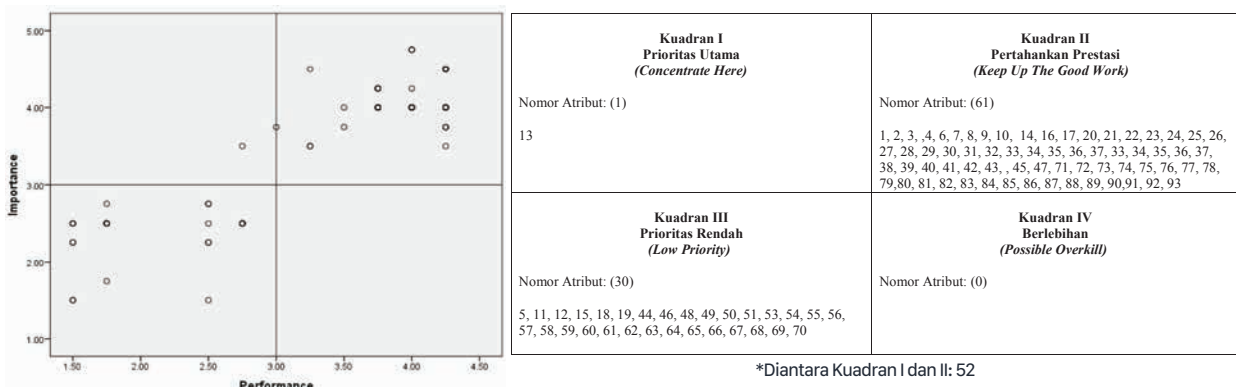
Gambar 4.18. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Tekstil X,Y= Rata-rata



Gambar 4.19 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri tekstil (empat responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 1 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 13 (lihat Tabel 4.10) yang berarti item tersebut harus menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 1 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 61 item telah

masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang menjelaskan bahwa 61 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 30 item, yang menjelaskan bahwa 30 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Tidak ada item yang masuk pada kuadran IV.

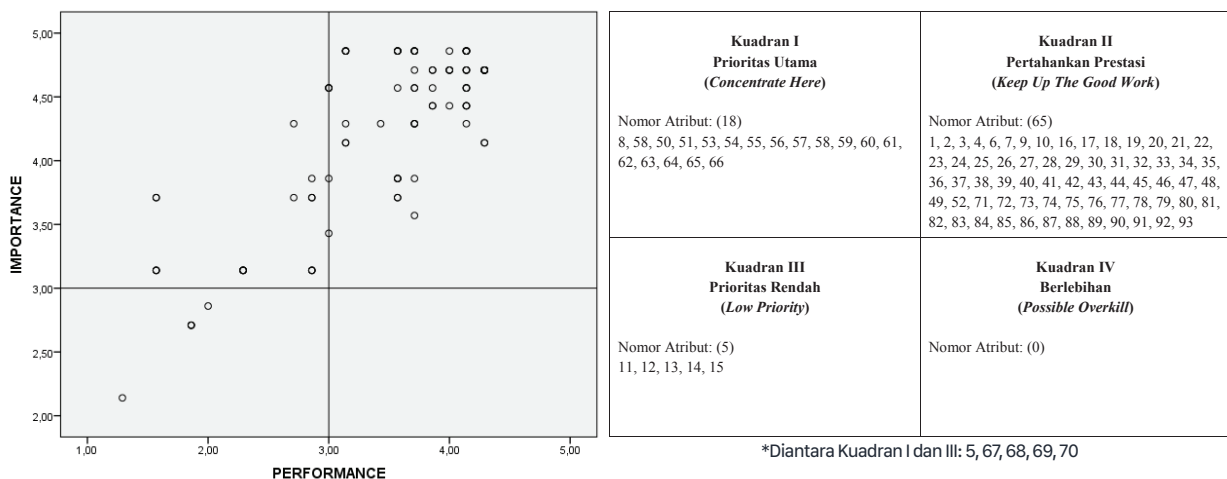
Gambar 4.19. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Tekstil X,Y= 3



Gambar 4.20 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri tekstil (tujuh responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 18 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) dimana item yang masuk dalam kuadran I tersebut harus menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 18 item tersebut rendah. Adapun 18 item tersebut antara lain item nomor 8, 58, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dan 66 (lihat Tabel

4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 65 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 65 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 5 item, hal ini menjelaskan bahwa 5 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai netral (3). Tidak ada item yang masuk pada kuadran IV.

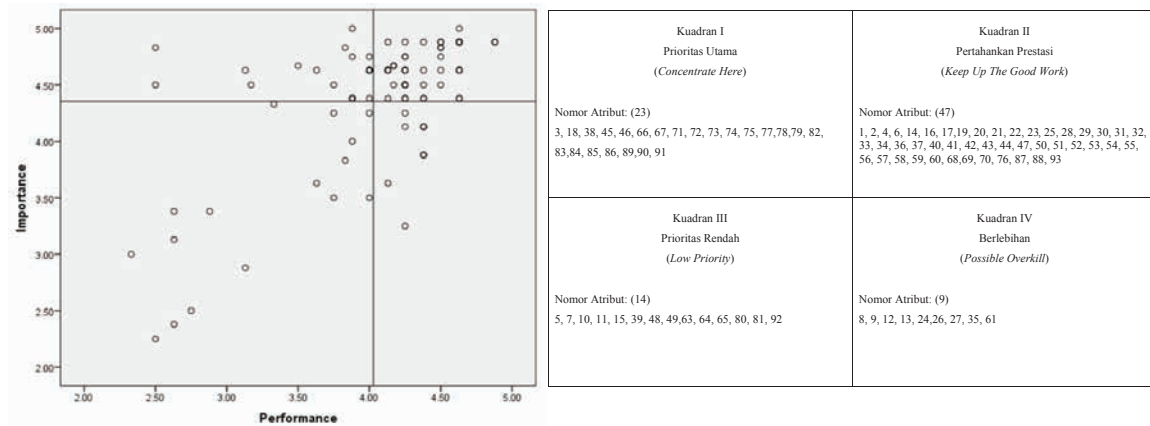
Gambar 4.20. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Tekstil X,Y=3



Gambar 4.21 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri mesin dan peralatan (empat responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 23 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 23 item tersebut rendah. Adapun 23 item tersebut antara lain item nomor 3, 18, 38, 45, 46, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90 dan 91 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 47 item telah masuk pada

kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 47 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 14 item, yang menjelaskan bahwa 14 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Adapun item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 9 item yang maknanya 9 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga berlebihan.

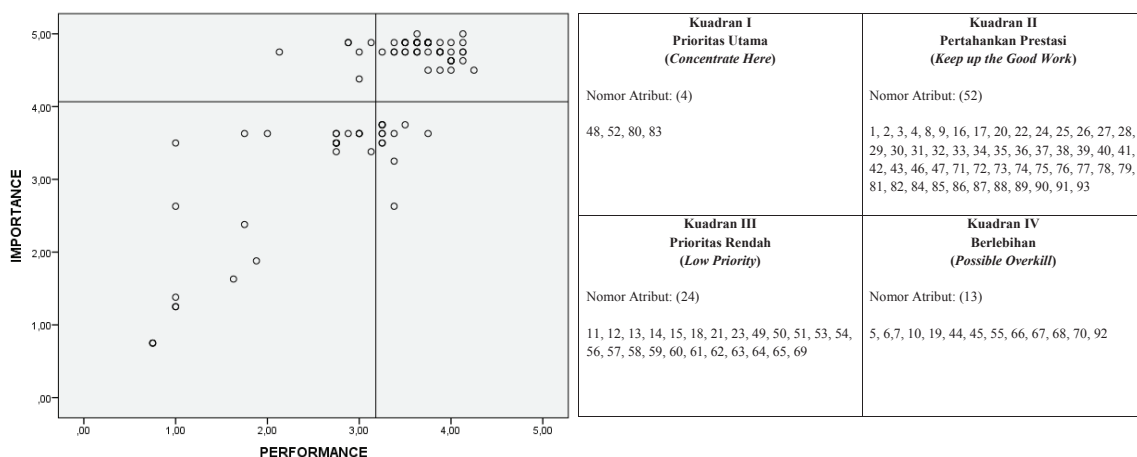
Gambar 4.21. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Mesin dan Peralatan X,Y= Rata-rata



Gambar 4.22 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri mesin dan peralatan (empat responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 4 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 4 item tersebut rendah. Adapun 4 item tersebut antara lain item nomor 48, 52, 80 dan 83 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 52 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna

bahwa 52 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 24 item, yang menjelaskan bahwa 24 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Adapun item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 13 item yang maknanya 13 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga berlebihan.

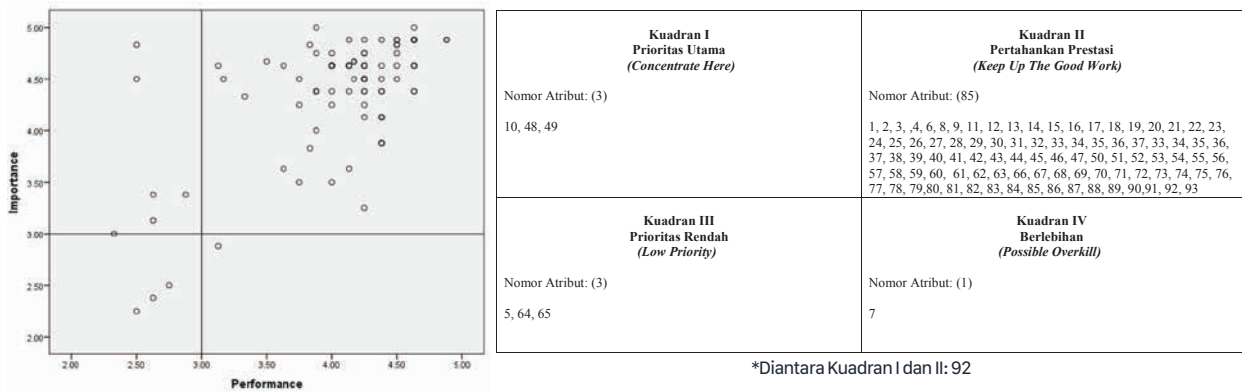
Gambar 4.22. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Mesin dan Peralatan X,Y= Rata-rata



Gambar 4.23 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri mesin dan peralatan (empat responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 3 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 3 item tersebut rendah. Adapun 3 item tersebut antara lain item nomor 10, 48, dan 49 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 85 item telah masuk

pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 85 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 3 item, yang menjelaskan bahwa 3 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Terdapat 1 item yang masuk pada kuadran IV (*possible overkill*).

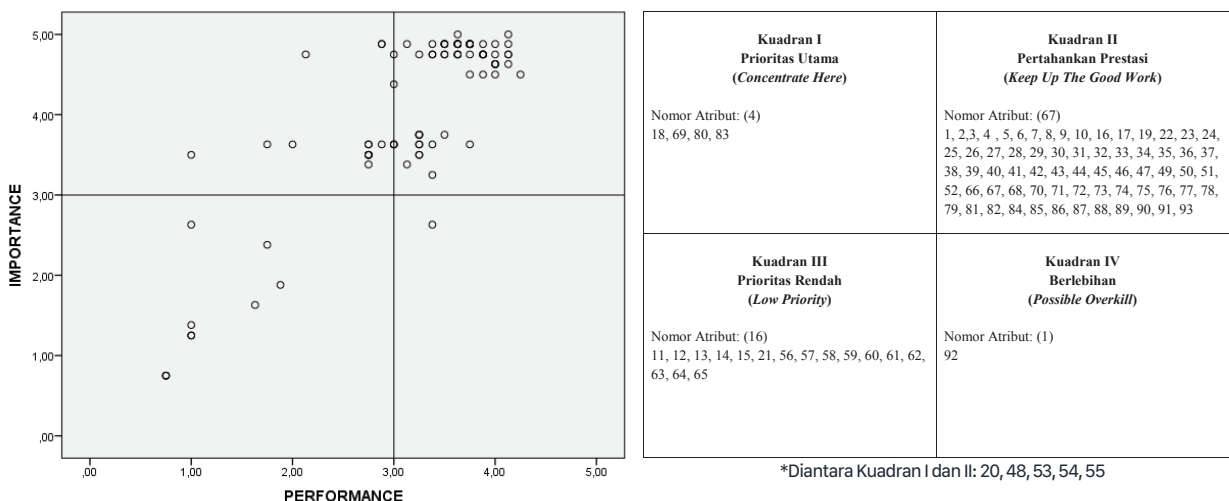
Gambar 4.23. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Mesin dan Peralatan X,Y= 3



Gambar 4.24 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri mesin dan peralatan (empat responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 4 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 4 item tersebut rendah. Adapun 4 item tersebut antara lain item nomor 18, 69, 80, dan 83 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 67 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini

bermakna bahwa 67 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 16 item, yang menjelaskan bahwa 16 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai netral (3). Terdapat 1 item yang masuk pada kuadran IV (*possible overkill*) yang berarti bahwa 1 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi.

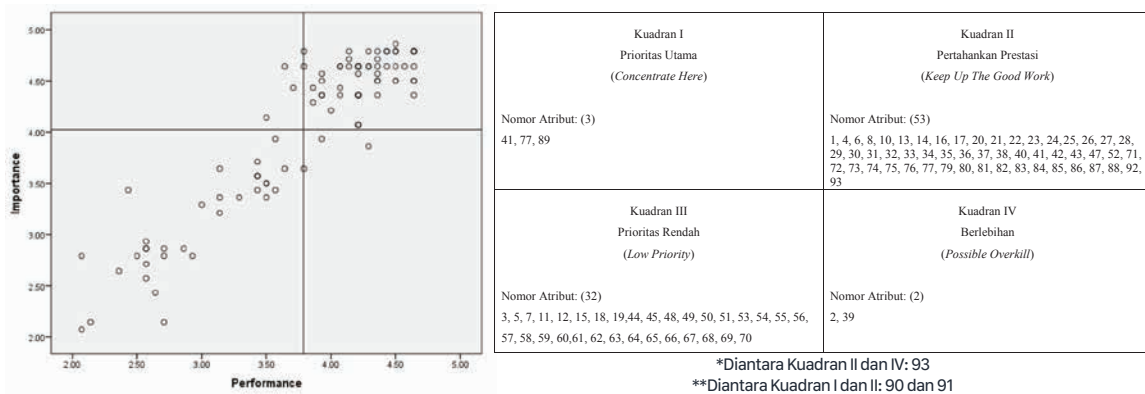
Gambar 4.24. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Mesin dan Peralatan X,Y= 3



Gambar 4.25 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri kimia (tujuh responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 3 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 3 item tersebut rendah. Adapun ketiga item tersebut antara lain item nomor 41, 77 dan 89 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 53 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini

bermakna bahwa 53 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 32 item yang menjelaskan bahwa 32 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Adapun item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 2 item yang berarti 2 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi.

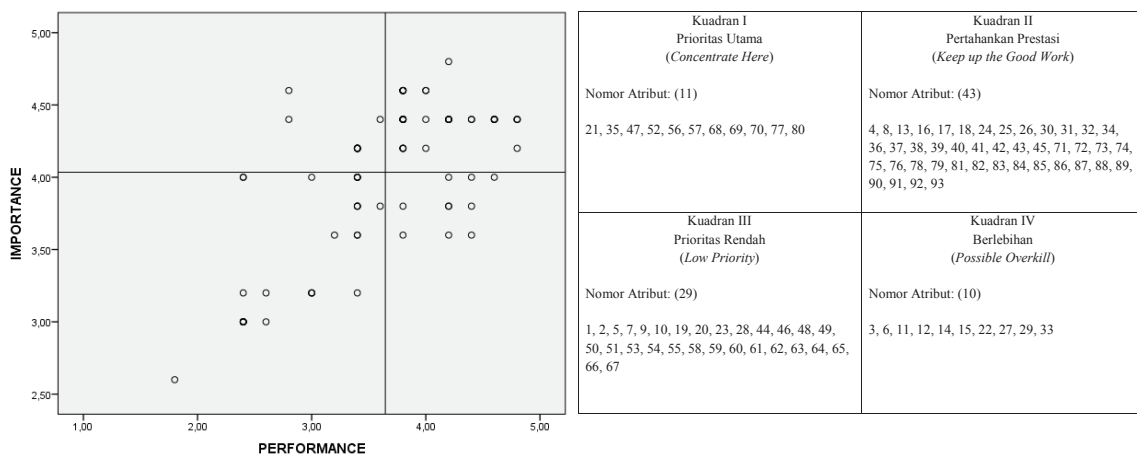
Gambar 4.25. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Kimia X,Y= Rata-rata



Gambar 4.26 menjelaskan matriks IPA pada klien PLB industri kimia (empat responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 11 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 11 item tersebut rendah. Adapun 11 item tersebut antara lain item nomor 21, 35, 47, 52, 56, 57, 68, 69, 70, 77 dan 80 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 43 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang berarti

bahwa 43 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 29 item yang menjelaskan bahwa 29 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Adapun item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) berjumlah 10 item yang maknanya 10 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi

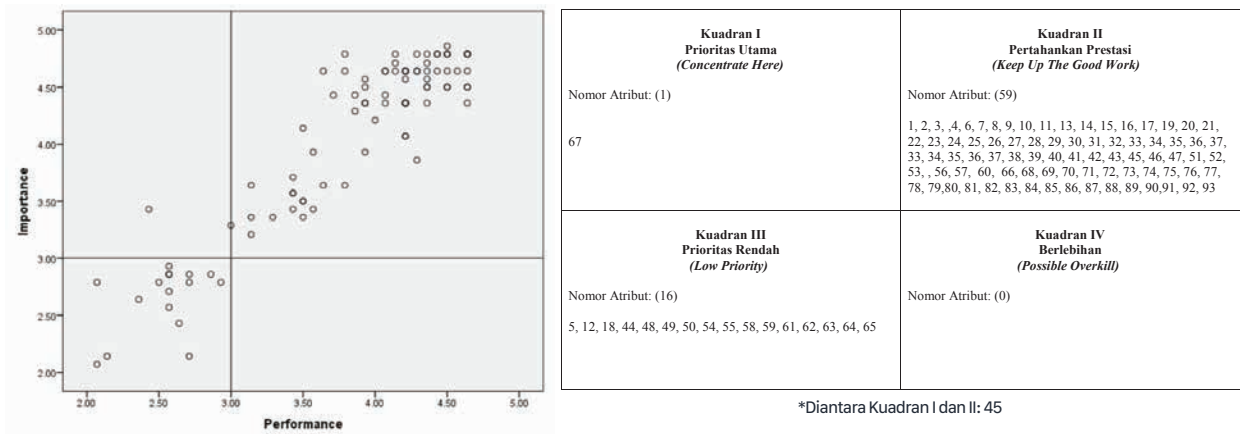
Gambar 4.26. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Kimia X,Y= Rata-rata



Gambar 4.27 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri kimia (tujuh responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 1 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 67 (lihat Tabel 4.10) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 1 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 59 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini

bermakna bahwa 59 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga masih banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 16 item yang menjelaskan bahwa 16 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

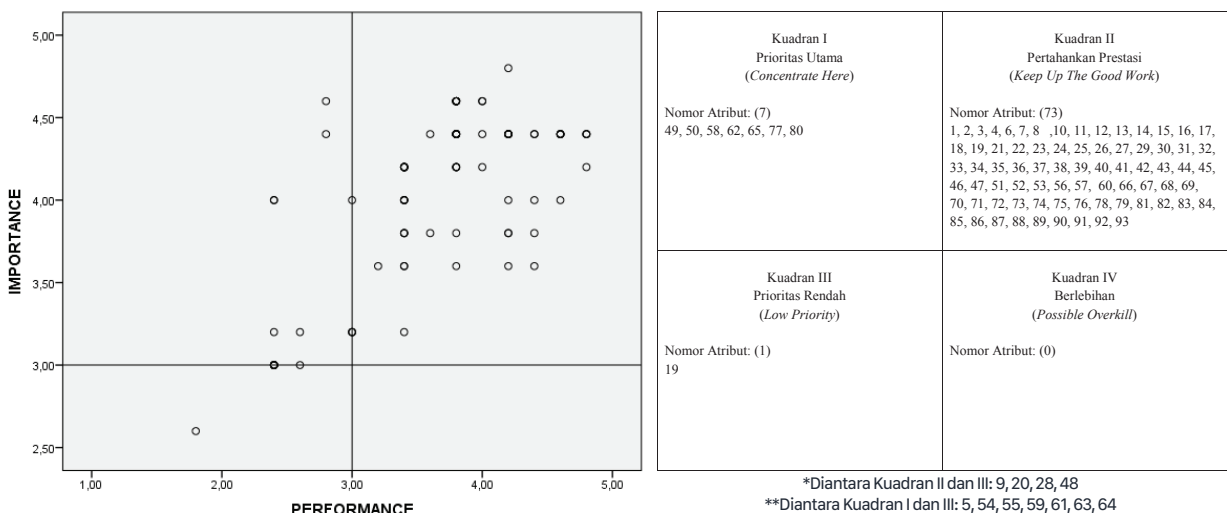
Gambar 4.27. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Kimia X,Y= 3



Gambar 4.28 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri kimia (empat responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 7 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 7 item tersebut rendah. Adapun 7 item tersebut antara lain item nomor 49, 50, 58, 62, 65, 77 dan 80 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 73 item telah masuk pada kuadran II

(*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 73 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga tidak banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 1 item, hal ini menjelaskan bahwa 1 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

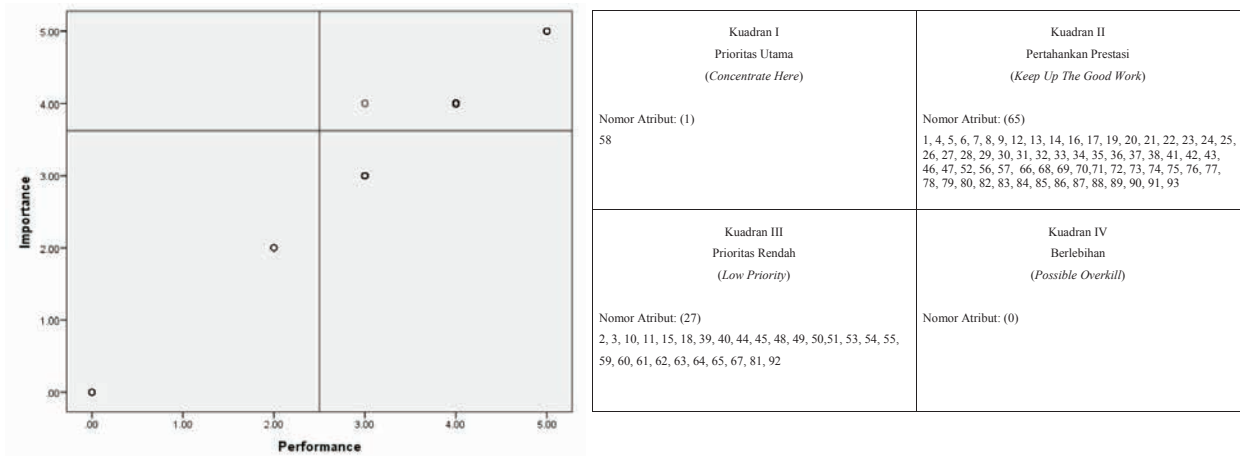
Gambar 4.28. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Kimia X,Y= 3



Gambar 4.29 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri elektronik (satu responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 9 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 14, 56, 57, 77, 80, 83, 89, 91, dan 92 (lihat Tabel 4.10) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 1 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 65 item

telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 65 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 27 item, hal ini menjelaskan bahwa 27 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

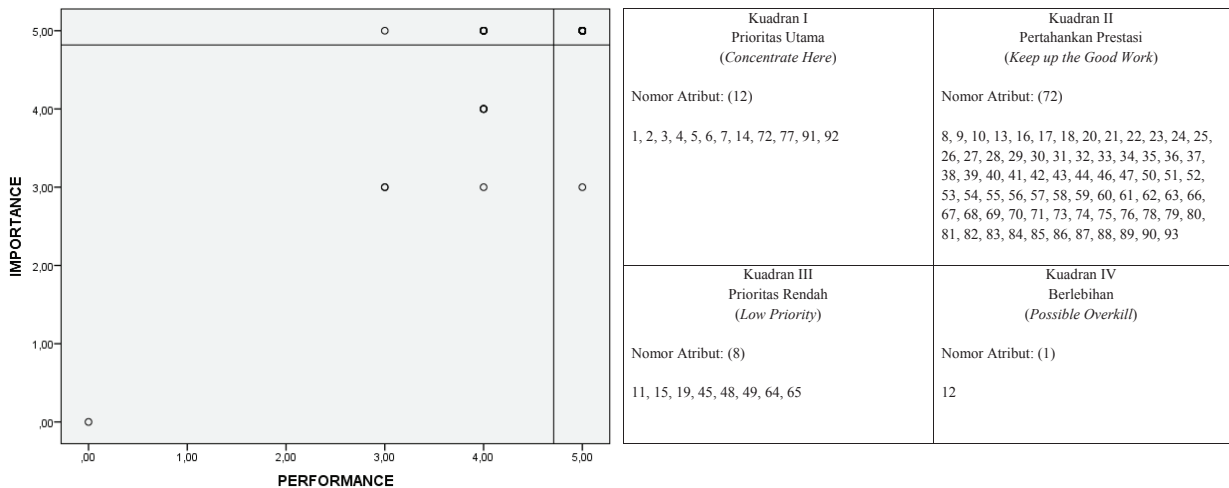
Gambar 4.29. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Elektronik X,Y= Rata-rata



Gambar 4.30 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri elektronik (satu responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 12 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 72, 77, 91 dan 92 (lihat Tabel 4.10) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 12 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni

sejumlah 72 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang berarti bahwa 72 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 8 item yang menjelaskan bahwa 8 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 1 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

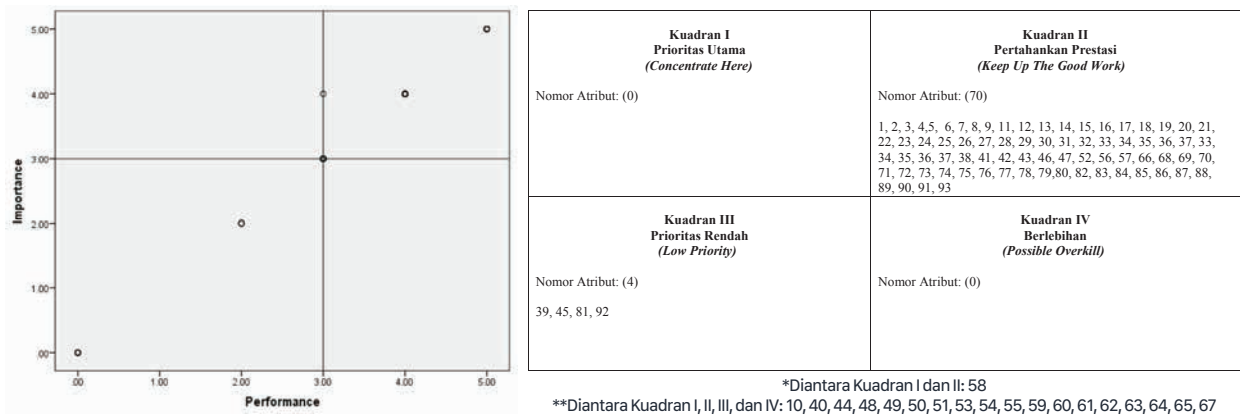
Gambar 4.30. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Elektronik X,Y= Rata-rata



Gambar 4.31 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri elektronik (satu responden) dengan nilai tiga (3) sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 70 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 70 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat

kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga tidak banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 4 item, yang menjelaskan bahwa 4 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

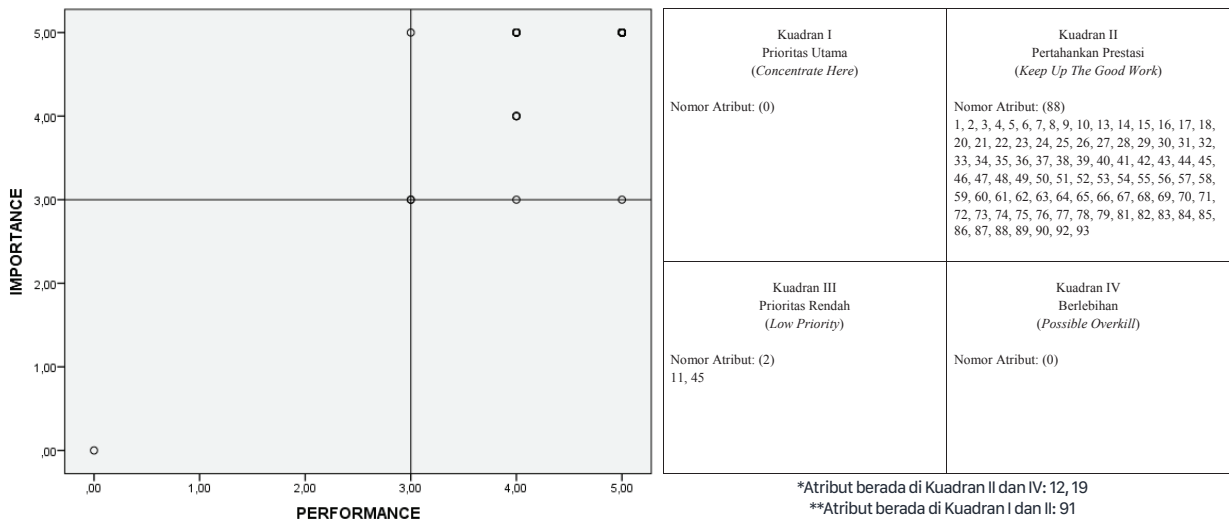
Gambar 4.31. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Elektronik X,Y= 3



Gambar 4.32 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri elektronik (satu responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 88 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang berarti bahwa 88 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja

yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga tidak banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 2 item, yang menjelaskan bahwa 2 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

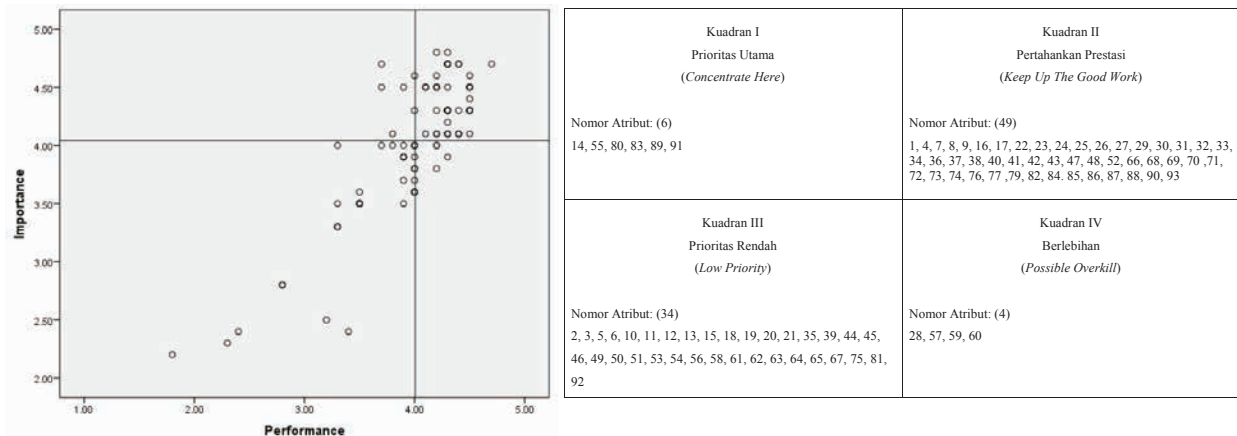
Gambar 4.32. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Elektronik X,Y= 3



Gambar 4.33 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri metal dan produk metal (lima responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 6 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 14, 55, 80, 83, 89 dan 91 (lihat Tabel 4.10) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 6 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 49

item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 49 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 34 item, hal ini menjelaskan bahwa 34 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 4 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

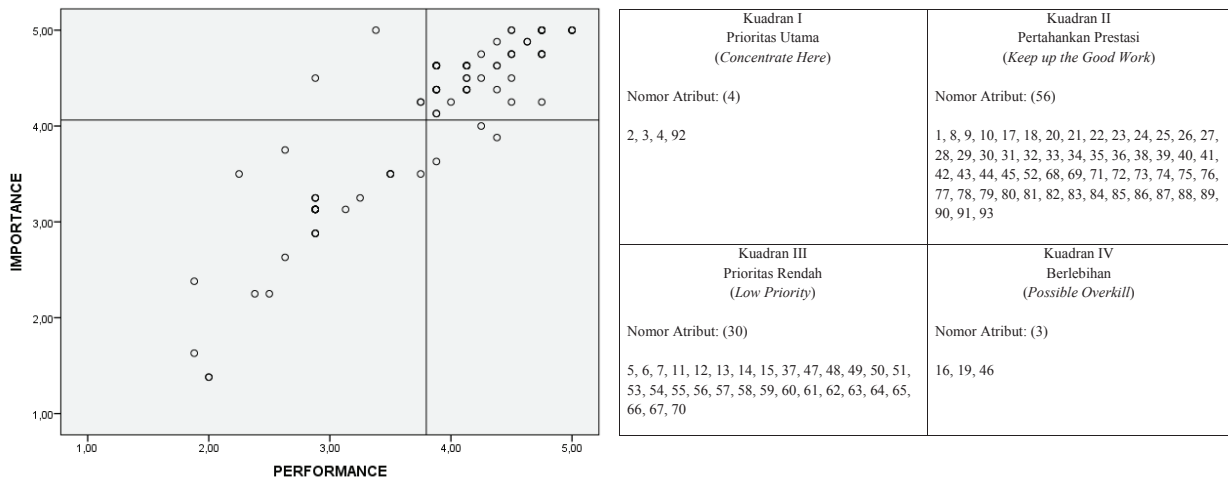
Gambar 4.33. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Metal dan Produk Metal X,Y= Rata-rata



Gambar 4.34 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri metal dan produk metal (empat responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 4 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 2, 3, 4 dan 92 yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 4 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 56 item telah masuk

pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 56 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 30 item, yang menjelaskan bahwa 30 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 3 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

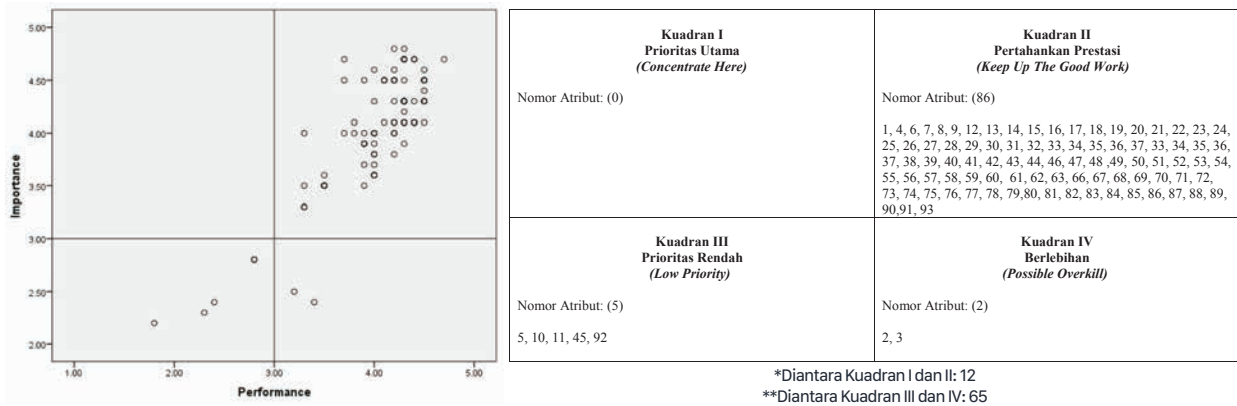
Gambar 4.34. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Metal dan Produk Metal X,Y= Rata-rata



Gambar 4.35 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri metal dan produk metal (lima responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 86 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 86 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang

tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga tidak banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 5 item, yang menjelaskan bahwa 5 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 2 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

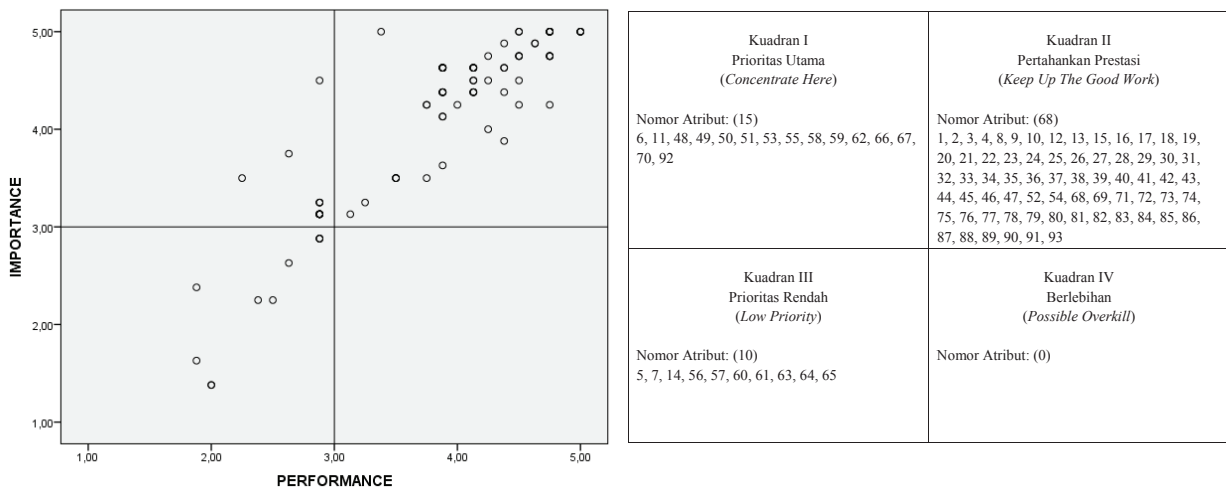
Gambar 4.35. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Metal dan Produk Metal X,Y= 3



Gambar 4.36 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri metal dan produk metal (empat responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Terdapat 15 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 6, 11, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 62, 66, 67, 70 dan 92 (lihat Tabel 4.10) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 15 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 68 item telah masuk pada kuadran II (*keep up*

the good work) yang bermakna bahwa 68 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga tidak banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 10 item, yang menjelaskan bahwa 10 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai 3. Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

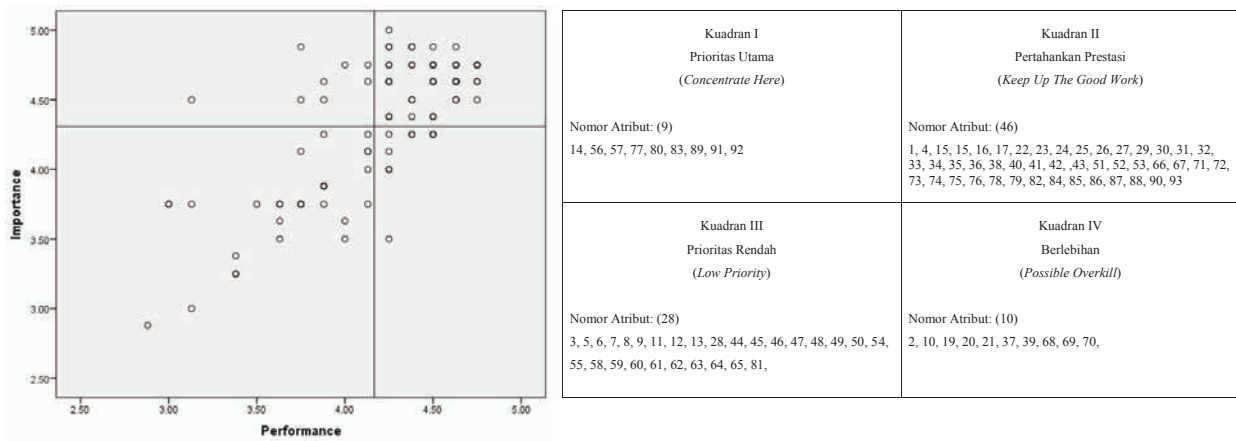
Gambar 4.36. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Metal dan Produk Metal X,Y= 3



Gambar 4.37 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri manufaktur lainnya (delapan responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 9 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 14, 56, 57, 77, 80, 83, 89, 91 dan 92 yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 9 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni

sejumlah 46 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 46 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 28 item, yang menjelaskan bahwa 28 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 10 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

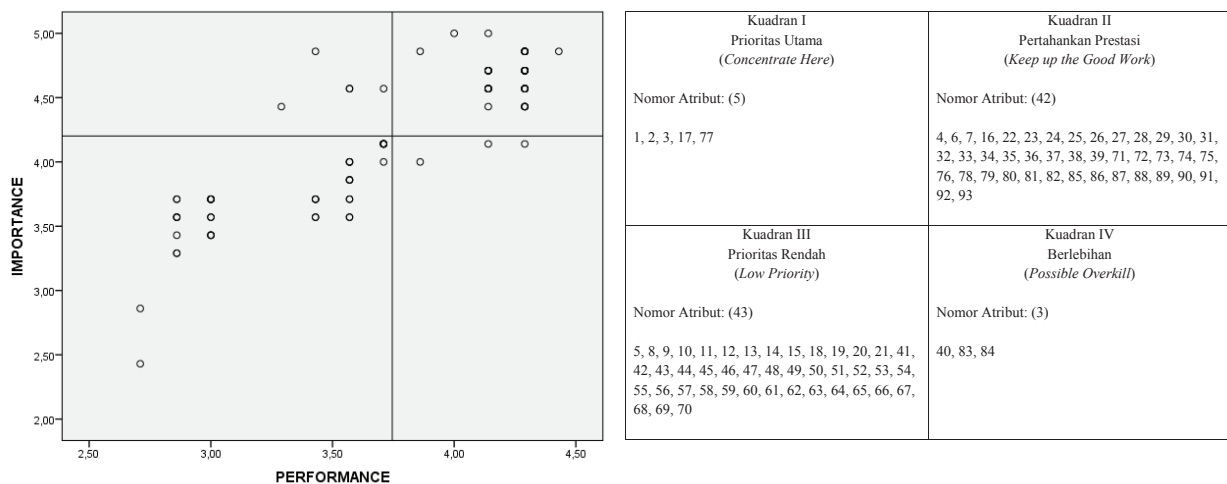
Gambar 4.37. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Manufaktur Lainnya X,Y= Rata-rata



Gambar 4.38 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri manufaktur lainnya (tujuh responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 5 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yaitu item nomor 1, 2, 3, 17 dan 77 (lihat Tabel 4.10) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 5 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 42 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good*

work) yang bermakna bahwa 42 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 43 item, yang menjelaskan bahwa 43 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 3 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang berarti bahwa 3 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi.

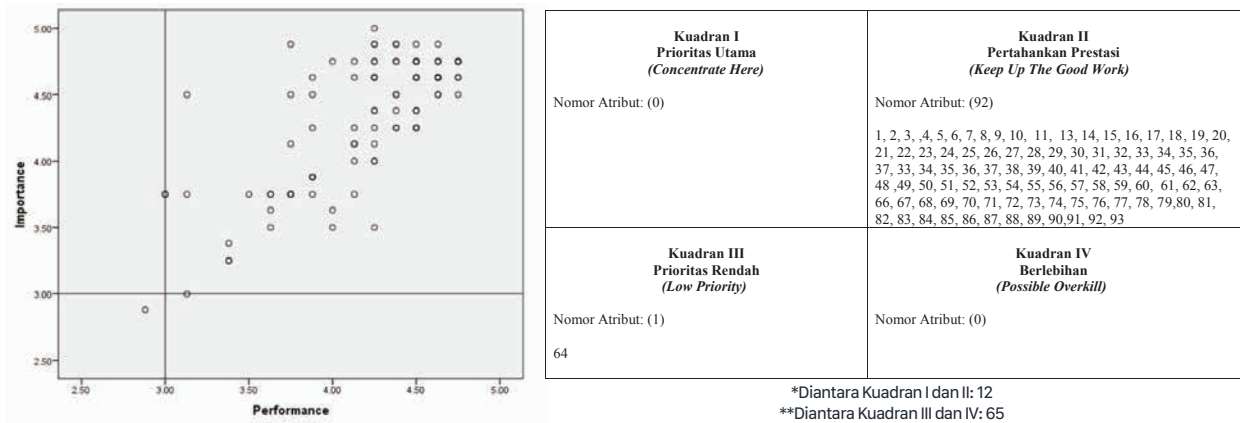
Gambar 4.38. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Manufaktur Lainnya X,Y = Rata-rata



Gambar 4.39 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri manufaktur lainnya (delapan responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 92 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 92 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang

tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini hanya sedikit item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 1 item, yang menjelaskan bahwa 1 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

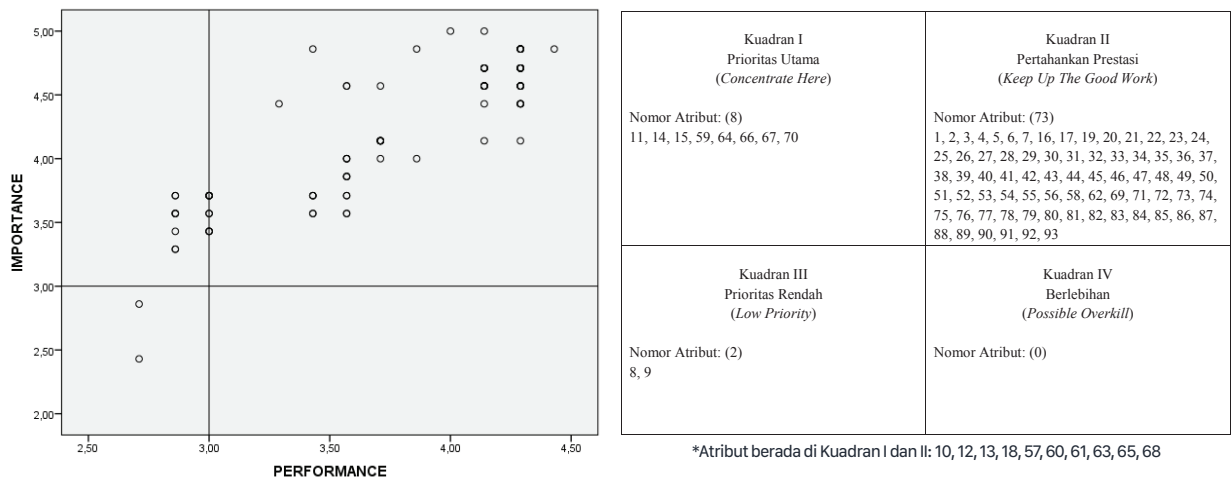
Gambar 4.39 Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Manufaktur Lainnya X,Y= 3



Gambar 4.40 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri manufaktur lainnya (tujuh responden) dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 8 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) dimana item yang masuk dalam kuadran I tersebut harus menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 8 item tersebut rendah. Mayoritas item yakni sejumlah 73 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 73 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini hanya

sedikit item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 2 item, yang menjelaskan bahwa 2 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*). Dalam matriks IPA industri ini juga terdapat item yang masuk dalam kuadran antara, yaitu item nomor 10, 12, 13, 18, 57, 60, 61, 63, 65 dan 68 (lihat Tabel 4.10) masuk diantara kuadran I dan II yang berarti 10 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan nilai tingkat kinerja sehingga dapat ditarik kesimpulan item-item ini masuk dalam kategori prioritas utama (*concentrate here*).

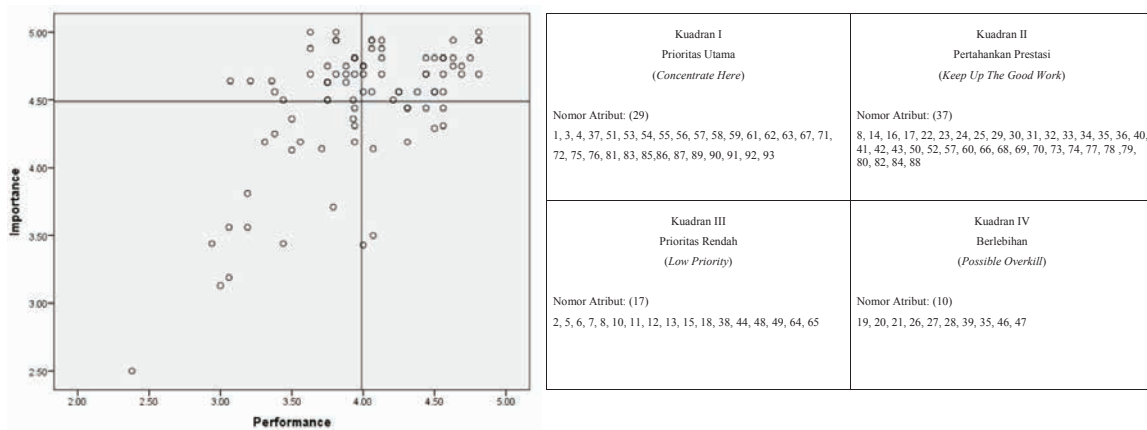
Gambar 4.40. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Manufaktur Lainnya X,Y= 3



Gambar 4.41 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri transportasi dan konstruksi (delapan responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 29 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 29 item tersebut rendah. Adapun 17 item tersebut antara lain item nomor 1, 3, 4, 37, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 75, 76, 81, 83, 85,86, 87, 89, 90, 91, 92,

dan 93 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah 37 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 37 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 17 item, yang menjelaskan bahwa 17 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 10 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

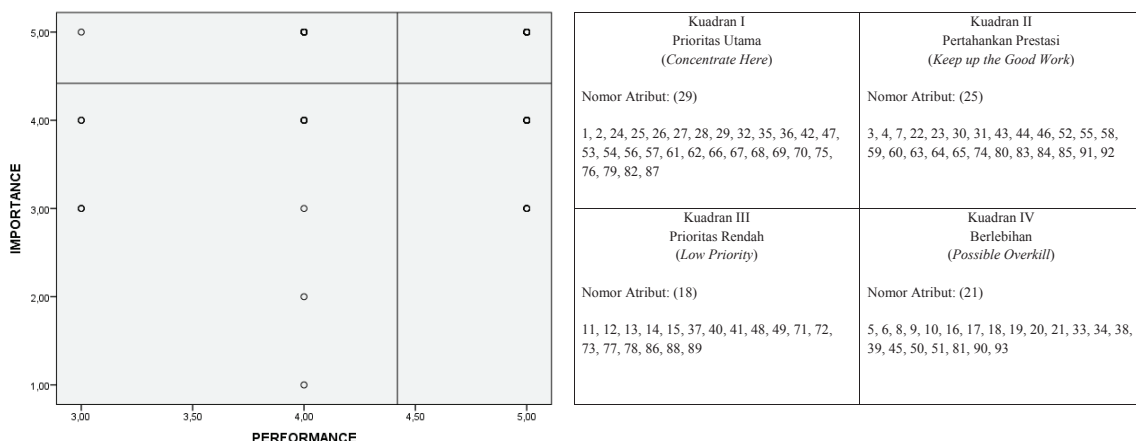
Gambar 4.41. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Transportasi dan Konstruksi X,Y= Rata-rata



Gambar 4.42 menjelaskan matriks IPA pada klien PLB industri transportasi dan konstruksi (satu responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 29 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 29 item tersebut rendah. Adapun 29 item tersebut antara lain item nomor 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 42, 47, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 79, 82, dan 87 (lihat Tabel 4.10). Mayoritas item yakni sejumlah

25 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 25 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 18 item, yang menjelaskan bahwa 18 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Terdapat 21 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang berarti bahwa 21 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kerjanya tinggi sehingga berlebihan.

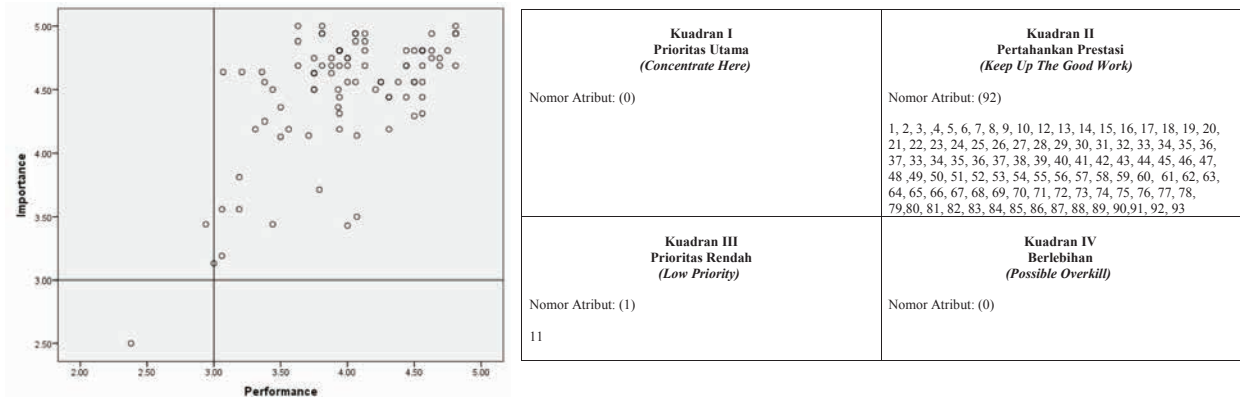
Gambar 4.42. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Transportasi dan Konstruksi X,Y= Rata-rata



Gambar 4.43 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri transportasi dan konstruksi (delapan responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 92 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 92 item tersebut memiliki nilai tingkat

kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini hanya sedikit item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 1 item, yang menjelaskan bahwa 1 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai netral (3). Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

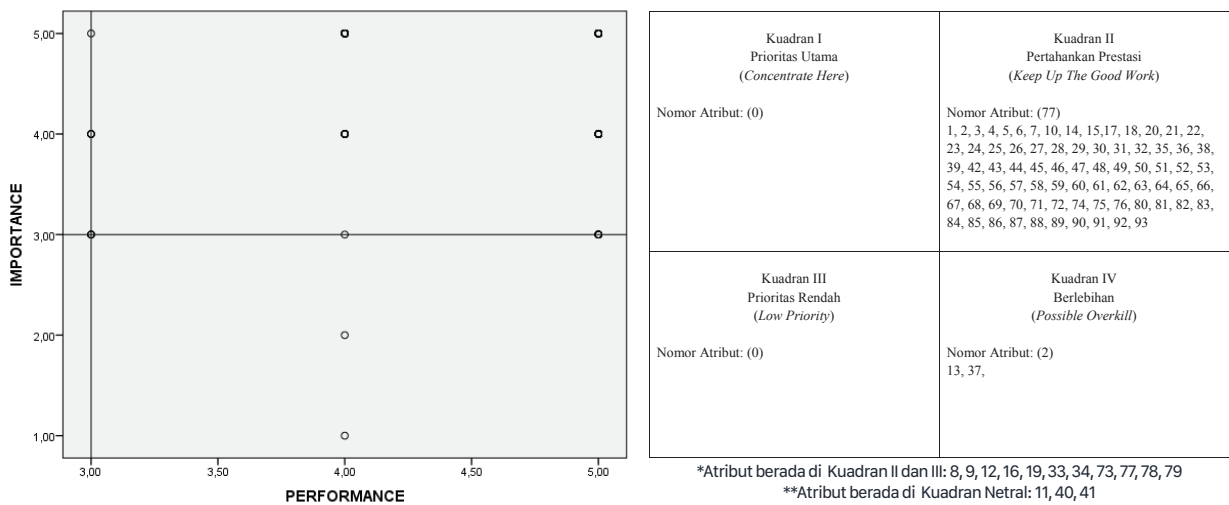
Gambar 4.43. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Transportasi dan Konstruksi X,Y= 3



Gambar 4.44 menjelaskan matriks IPA pada klien PLB industri transportasi dan konstruksi (satu responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 77 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 77 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi

dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini hanya sedikit item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 1 item, yang menjelaskan bahwa 1 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai netral (3). Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

Gambar 4.44. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Transportasi dan Konstruksi X,Y= 3



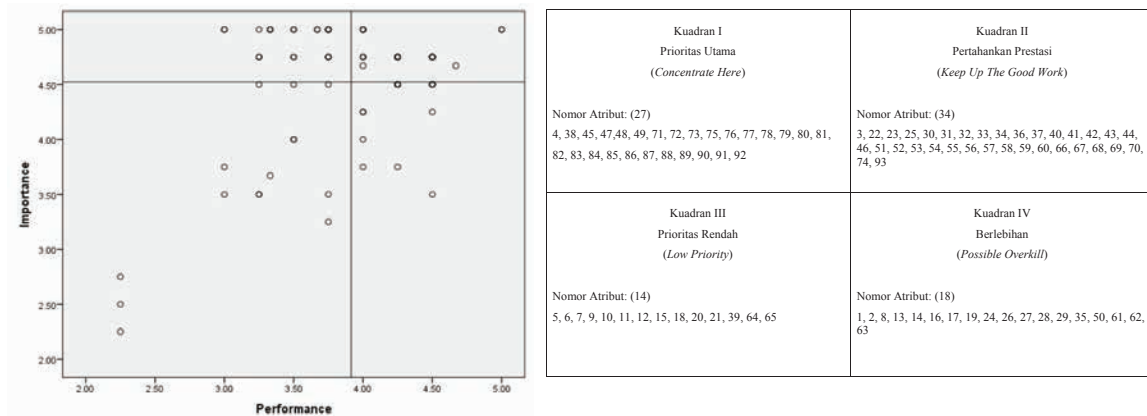
Gambar 4.45 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri minyak dan gas (empat responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada

matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 27 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 27

item tersebut rendah. Adapun 27 item tersebut antara lain item nomor 4, 38, 45, 47,48, 49, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 dan 92 (lihat Tabel 4.10). Dalam kuadran II terdapat sejumlah 34 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 34 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*)

sejumlah 14 item, yang menjelaskan bahwa 14 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Berbeda dengan industri lain pada industri minyak dan gas terdapat 18 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang artinya 18 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga efektivitas item-item ini berlebihan.

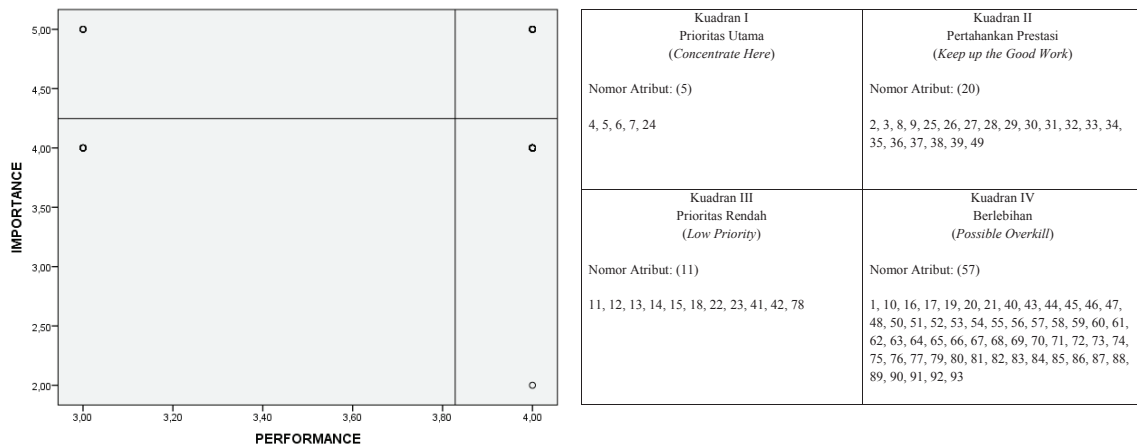
Gambar 4.45. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Minyak dan Gas X,Y= Rata-rata



Gambar 4.46 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri minyak dan gas (satu responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 5 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 5 item tersebut rendah. Adapun 5 item tersebut antara lain item nomor 4, 5, 6, 7, dan 24 (lihat Tabel 4.10). Sejumlah 20 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 20 item tersebut memiliki

nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 11 item, yang menjelaskan bahwa 11 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Berbeda dengan industri lain pada industri minyak dan gas terdapat 57 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang artinya 57 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga efektivitas item-item ini berlebihan.

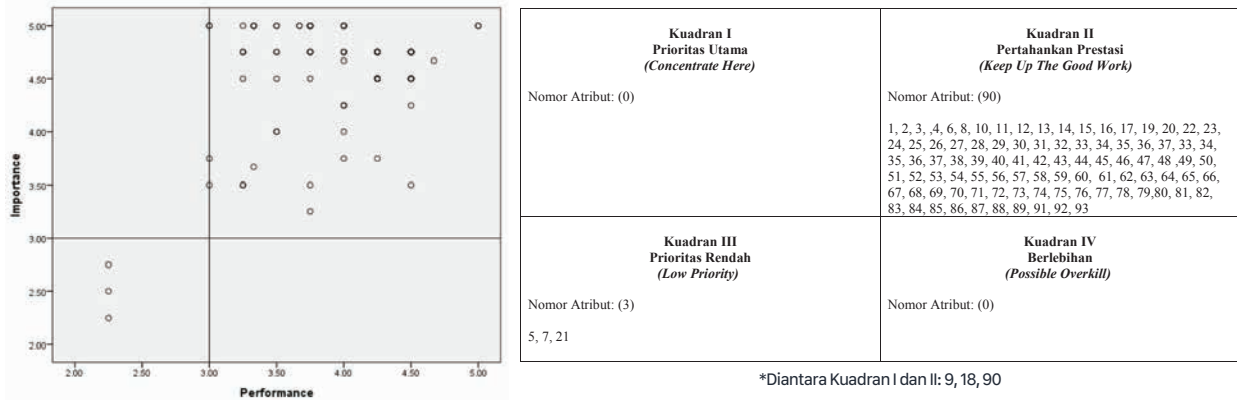
Gambar 4.46 Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Minyak dan Gas X,Y= Rata-rata



Gambar 4.47 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri minyak dan gas (empat responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 90 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 90 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai

tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini hanya sedikit item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 3 item, yang menjelaskan bahwa 3 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tiga (3). Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

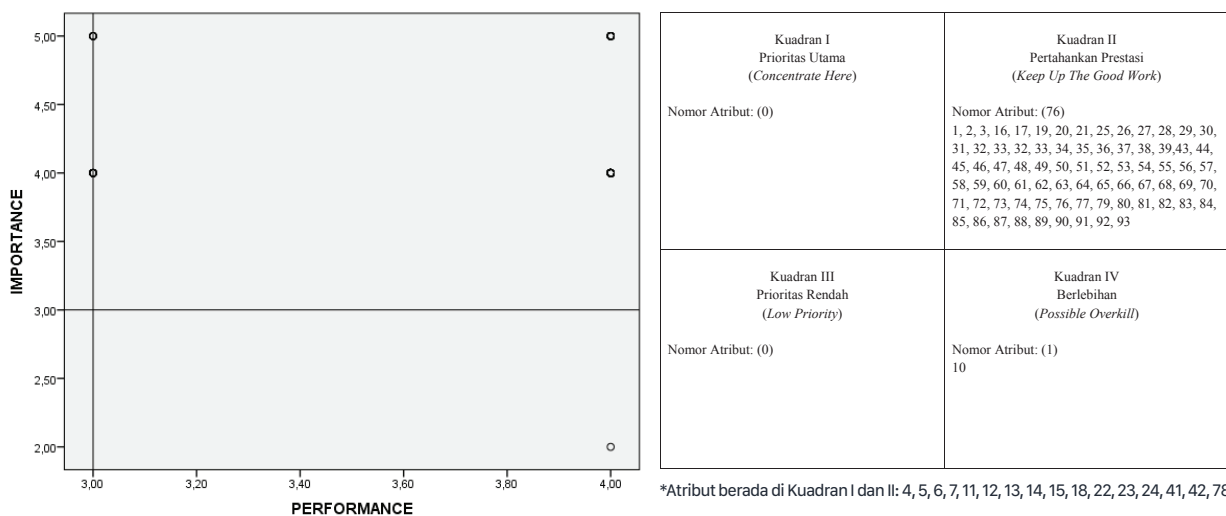
Gambar 4.47. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Minyak dan Gas X,Y= 3



Gambar 4.48 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri minyak dan gas (satu responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 76 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 76 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai

tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini tidak ada item yang memasuki kuadran III (*low priority*). Terdapat 1 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*). Adapun item yang masuk diantara kuadran I dan II berjumlah 3 item yang berarti 3 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan nilai tingkat kinerja sehingga dapat ditarik kesimpulan item-item ini masuk dalam kategori prioritas utama.

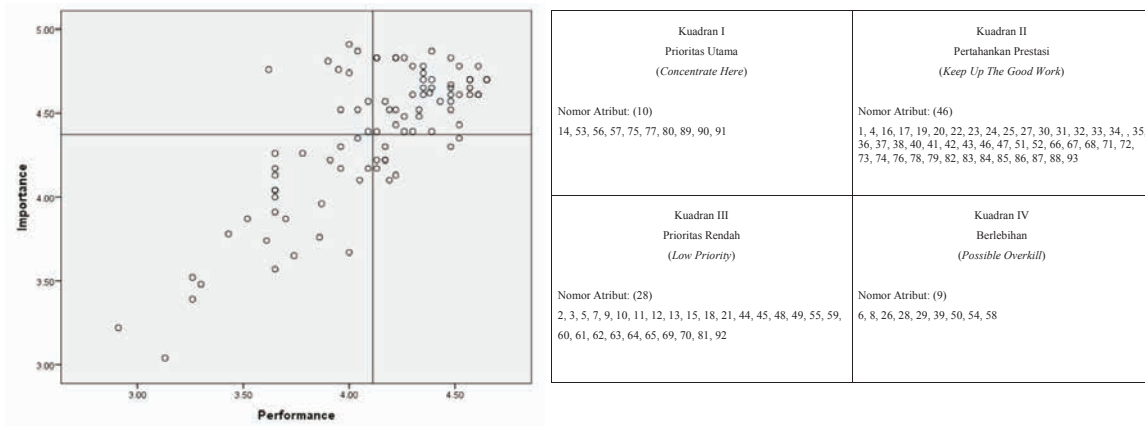
Gambar 4.48. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Minyak dan Gas X,Y= 3



Gambar 4.49 menjelaskan matriks IPA pada operator PLB industri non-manufaktur lainnya (dua puluh tiga responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 10 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 10 item tersebut rendah. Adapun 10 item tersebut antara lain item nomor 14, 53, 56, 57, 75, 77, 80, 89, 90, dan 91 (lihat Tabel 4.10). Dalam matriks industri ini terdapat sejumlah 46 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang

bermakna bahwa 46 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 28 item, yang menjelaskan bahwa 28 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Berbeda dengan industri lain pada industri minyak dan gas terdapat 9 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang artinya 9 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga efektivitas item-item ini berlebihan.

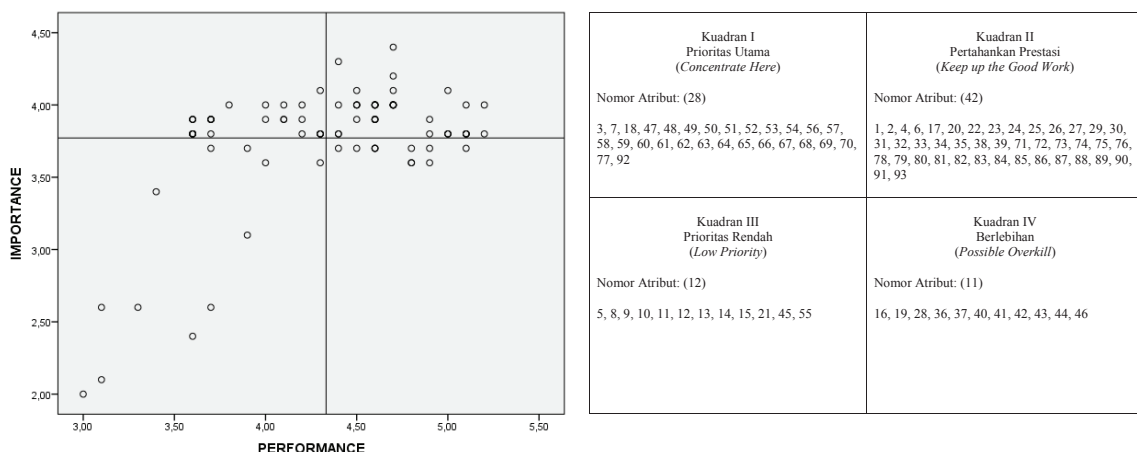
Gambar 4.49. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Non-Manufaktur Lainnya X,Y= Rata-rata



Gambar 4.50 mengilustrasikan matriks IPA pada klien PLB industri non-manufaktur lainnya (sepuluh responden) dengan nilai rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan berturut-turut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat sebanyak 28 item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 28 item tersebut rendah. Adapun 28 item tersebut antara lain item nomor 3, 7, 18, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, dan 92 (lihat Tabel 4.10). Terdapat sejumlah 42 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa

42 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini juga banyak item yang memasuki kuadran III (*low priority*) sejumlah 12 item, yang menjelaskan bahwa 12 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Berbeda dengan industri lain pada industri minyak dan gas terdapat 11 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang artinya 11 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga efektivitas item-item ini berlebihan.

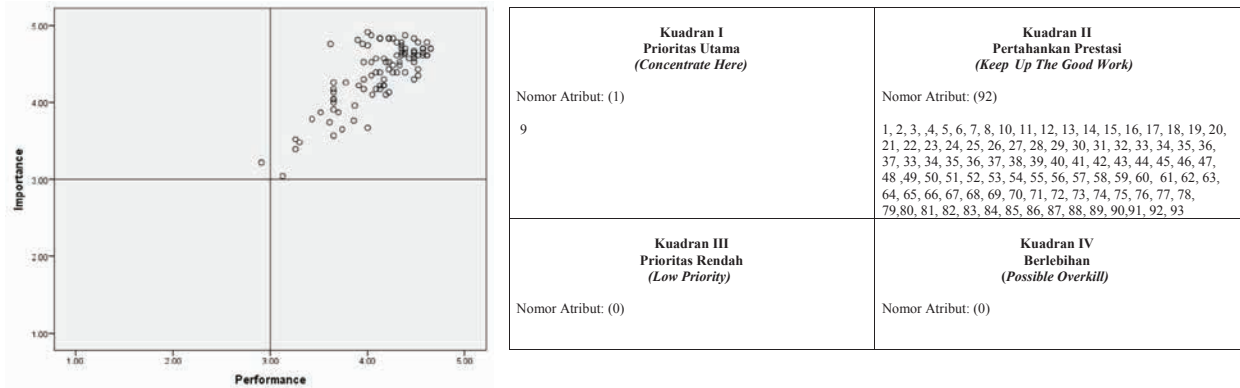
Gambar 4.50. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Non-Manufaktur Lainnya X,Y= Rata-rata



Gambar 4.51 mengilustrasikan matriks IPA pada operator PLB industri non-manufaktur lainnya (dua puluh tiga responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut terdapat 1 item yaitu item nomor 9 yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*) yang perlu menjadi prioritas utama karena memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerja 1 item tersebut rendah. Mayoritas

item yakni sejumlah 92 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) hal ini bermakna bahwa 92 item tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini tidak ada item yang memasuki kuadran III (*low priority*). Tidak ada item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*).

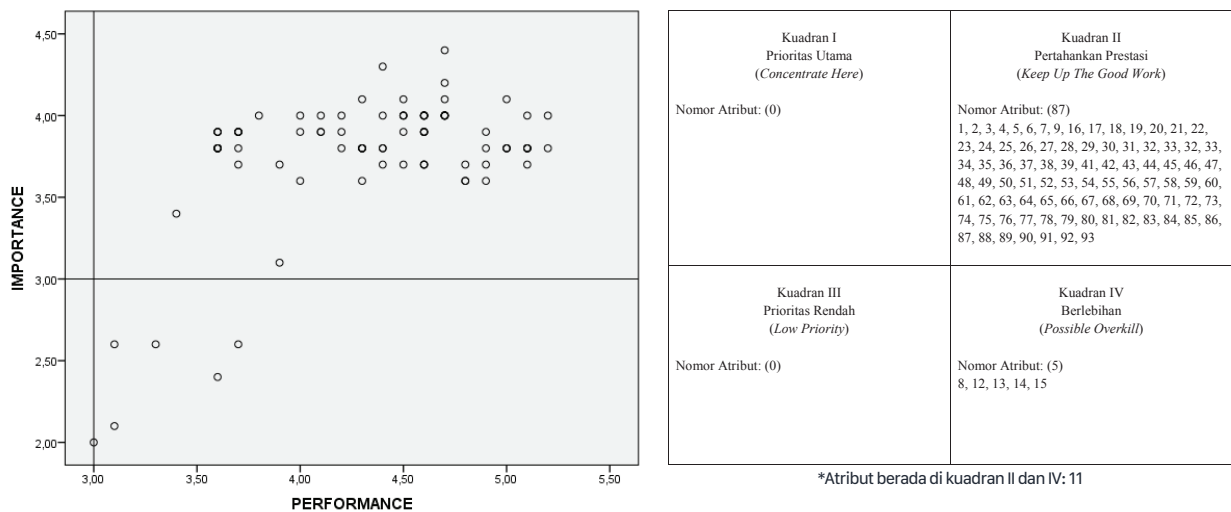
Gambar 4.51. Importance-Performance Analysis (IPA) Operator Industri Non-Manufaktur Lainnya X,Y= 3



Gambar 4.52 menjelaskan matriks IPA pada operator PLB industri non-manufaktur lainnya (sepuluh responden). Dengan nilai tiga (3) sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada matriks IPA tersebut tidak ada item yang masuk dalam kuadran I (*concentrate here*). Mayoritas item yakni sejumlah 87 item telah masuk pada kuadran II (*keep up the good work*) yang bermakna bahwa 87 item

tersebut memiliki nilai tingkat kepentingan yang tinggi dan nilai tingkat kinerja yang tinggi pula. Pada matriks industri ini tidak ada item yang memasuki kuadran III (*low priority*). Terdapat 5 item yang masuk dalam kuadran IV (*possible overkill*) yang artinya 5 item ini memiliki nilai tingkat kepentingan yang rendah namun nilai tingkat kinerjanya tinggi sehingga berlebihan.

Gambar 4.52. Importance-Performance Analysis (IPA) Klien Industri Non-Manufaktur Lainnya X,Y= 3



5. Peringkat Industri Berdasarkan *Importance-Performance Analysis*

IPA memisahkan item-item atas respon dari operator dan klien ke dalam 4 kuadran berdasarkan skor masing-masing item untuk tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) item-item tersebut.

6. Peringkat Industri Berdasarkan Skor Kinerja Operator

Peringkat industri berdasar skor kinerja operator terbagi atas dua respon, yakni respon operator itu sendiri dan respon klien. Peringkat ini didasarkan pada rata-rata skor kinerja 93 item pertanyaan pada masing-masing industri. Dari peringkat industri berdasarkan skor kinerja operator

yang direspon oleh operator dapat dilihat tingkat kepercayaan diri operator atas kinerjanya. Sedangkan dari peringkat industri berdasarkan skor kinerja operator yang direspon oleh klien dapat dilihat bagaimana klien menilai kinerja atas pelayanan operator.

a. Peringkat Industri Berdasarkan Skor Kinerja Operator Respon Operator

Menurut respon operator, peringkat industri berdasarkan skor rata-rata kinerja operator dapat dilihat pada Tabel 4.11 Peringkat paling tinggi diduduki oleh industri makanan, diikuti industri manufaktur lainnya pada posisi ke-dua, dan industri non-manufaktur lainnya pada posisi ke-tiga. Sebaliknya, 3 operator PLB yang tidak cukup percaya diri dengan kinerja mereka dibandingkan dengan

industri lainnya adalah industri garmen, elektronik, dan di posisi terakhir adalah industri tekstil. Namun demikian, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.11, jumlah responden yang mewakili setiap industri yang diperingkat terbilang rendah, sehingga skor pada industri ini bersifat indikatif alih-alih konklusif untuk mewakili respon industri secara keseluruhan.

Tabel 4.11. Peringkat Industri Berdasarkan Skor Kinerja Operator Respon Operator

Peringkat	Industri	Rata-Rata Kinerja	Jumlah Responden
1	Makanan	4,311827957	2
2	Manufaktur Lainnya	4,163978495	8
3	Non-Manufaktur lainnya	4,111934816	23
4	Metal dan Produk Metal	4,039784946	5
5	Mesin dan Peralatan	4,025537634	4
6	Transportasi dan Konstruksi	3,988383257	8
7	Minyak dan Gas	3,914874552	4
8	Kimia	3,788018433	7
9	Garmen	3,612903226	1
10	Elektronik	3,612903226	1
11	Tekstil	3,349462366	4

b. Peringkat Industri Berdasarkan Skor Kinerja Operator Respon Klien

Menurut respon klien, peringkat industri berdasarkan skor rata-rata kinerja operator dapat dilihat pada Tabel 4.12. Tabel 4.12 menjelaskan berdasarkan respon klien PLB, kinerja operator PLB yang paling tinggi diduduki oleh industri elektronik, diikuti industri garmen pada posisi kedua dan industri makanan pada posisi ketiga. Namun demikian jumlah responden pada industri elektronik, garmen, maupun makanan masing-masing hanya berjumlah 1 responden, sehingga peringkat ini

tidak dapat mewakili industri secara keseluruhan. Sebaliknya tiga industri yang kinerjanya dianggap rendah oleh klien adalah industri kimia, kemudian diikuti oleh industri tekstil, dan terakhir menempati posisi paling rendah adalah industri mesin dan peralatan. Namun secara keseluruhan klien menilai operator PLB dengan skor rata-rata di atas 3 yang mana angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum seluruh kinerja operator sudah cukup baik.

Tabel 4.12. Peringkat Industri Berdasarkan Skor Kinerja Operator Respon Klien

Peringkat	Industri	Rata-Rata Kinerja	Jumlah Responden
1	Elektronik	4,709677419	1
2	Garmen	4,548387097	1
3	Makanan	4,537634409	1
4	Transportasi dan konstruksi	4,419354839	1
5	Non-manufaktur lainnya	4,332258065	10
6	Minyak dan gas	3,827956989	1
7	Metal dan produk metal	3,793010753	4
8	Manufaktur lainnya	3,74500768	7
9	Kimia	3,64516129	4
10	Tekstil	3,416282642	7
11	Mesin dan peralatan	3,178763441	4

7. Peringkat Industri Berdasarkan Rata-rata Skor IPA

Peringkat industri berdasarkan skor rata-rata IPA merepresentasikan peringkat dari keefektifan PLB industri dilihat dari rata-rata skor IPA. Peringkat berdasarkan rata-rata skor IPA ini dilihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang klien dan sudut pandang operator. Kedua sudut pandang ini perlu disampaikan karena tidak ada formula yg tepat untuk menyatukan keduanya. Tabel 4.13 menjelaskan peringkat industri berdasarkan respon klien. Menurut klien dari 11 industri yang dinilai, PLB

industri yang paling efektif adalah industri elektronik, sedangkan PLB industri yang paling tidak efektif menurut klien adalah industri mesin dan peralatan. Namun demikian, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.13, jumlah responden yang mewakili setiap industri yang diperingkat terbilang rendah, sehingga skor pada industri ini bersifat indikatif alih-alih konklusif untuk mewakili respon industri secara keseluruhan.

Tabel 4.13. Peringkat Industri Berdasarkan Skor Rata-rata IPA Respon Klien

Peringkat	Industri	Rata-Rata Skor Kinerja	Rata-Rata Skor Kepentingan	Rata-Rata Skor IPA	Jumlah Responden
1	Elektronik	4,709677419	4,817204301	4,76344086	1
2	Garmen	4,548387097	4,870967742	4,709677419	1
3	Makanan	4,537634409	4,537634409	4,537634409	1
4	Transportasi dan konstruksi	4,419354839	4,419354839	4,419354839	1
5	Non-manufaktur lainnya	4,332258065	3,772043011	4,052150538	10
6	Minyak dan gas	3,827956989	4,247311828	4,037634409	1
7	Manufaktur lainnya	3,74500768	4,202764977	3,973886329	7
8	Metal dan produk metal	3,793010753	4,060483871	3,926747312	4
9	Kimia	3,64516129	4,034408602	3,839784946	4
10	Tekstil	3,416282642	4,213517665	3,814900154	7
11	Mesin dan peralatan	3,178763441	4,064516129	3,621639785	4

Tabel 4.14 menjelaskan peringkat industri berdasarkan respon operator. Menurut operator dari 11 industri yang dinilai, PLB industri yang paling efektif adalah industri makanan, sedangkan PLB industri yang paling tidak efektif menurut klien adalah industri tekstil.

Namun demikian, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.14, jumlah responden yang mewakili setiap industri yang diperingkat terbilang rendah, sehingga skor pada industri ini bersifat indikatif alih-alih konklusif untuk mewakili respon industri secara keseluruhan.

Tabel 4.14. Peringkat Industri Berdasarkan Skor Rata-rata IPA Respon Operator

Peringkat	Industri	Rata-Rata Skor Kinerja	Rata-Rata Skor Kepentingan	Rata-Rata Skor IPA	Jumlah Responden
1	Makanan	4,311827957	4,440860215	4,376344086	2
2	Non-Manufaktur lainnya	4,111934816	4,373383201	4,242659008	23
3	Transportasi dan Konstruksi	3,988383257	4,488383257	4,238383257	8
4	Manufaktur Lainnya	4,163978495	4,307795699	4,235887097	8
5	Minyak dan Gas	3,914874552	4,524193548	4,21953405	4
6	Mesin dan Peralatan	4,025537634	4,350806452	4,188172043	4
7	Metal dan Produk Metal	4,039784946	4,006451613	4,02311828	5
8	Kimia	3,788018433	4,023809524	3,905913978	7
9	Garmen	3,612903226	3,720430108	3,666666667	1
10	Elektronik	3,612903226	3,623655914	3,61827957	1
11	Tekstil	3,349462366	3,564516129	3,456989247	4

8. Peringkat Industri Berdasarkan Jumlah Item pada Kuadran IPA

Tabel 4.15 dan 4.16 menunjukkan peringkat industri berdasarkan banyaknya item dalam setiap kuadran. Tolok ukur peringkat berdasarkan kuadran matriks IPA ini didasarkan pada jumlah item pada kuadran II (*keep up the good work*). Dengan demikian, industri yang paling efektif adalah industri dengan jumlah item terbanyak pada kuadran II. Selanjutnya analisis kuadran IPA dalam penelitian ini juga dibedakan menjadi dua, yakni dengan nilai rata-rata skor IPA sebagai sumbu X dan Y, yang kedua

dengan nilai tengah (3) sebagai sumbu X dan Y.

Berdasarkan pada tolok ukur tersebut, pada nilai $X,Y=$ rata-rata PLB industri yang paling efektif adalah industri elektronik dan PLB industri paling tidak efektif adalah industri minyak dan gas. Sementara itu, pada nilai $X,Y=$ nilai tengah (3), PLB industri yang dinilai paling efektif adalah PLB industri transportasi dan konstruksi, sedangkan PLB industri paling tidak efektif adalah industri tekstil.

Tabel 4.15. Peringkat Berdasar Jumlah Item pada Kuadran IPA $X,Y=$ Rata-rata

Peringkat	Industri	Kuadran 1	Kuadran 2	Kuadran 3	Kuadran 4
1	Elektronik	0	54	7	0
2	Makanan	0	44	4	0
3	Tekstil	0	43	21	0
4	Metal dan Produk Metal	0	41	19	0
5	Garmen	0	40	2	0
6	Kimia	0	37	21	0
7	Manufaktur Lainnya	0	32	23	0
8	Non-Manufaktur lainnya	0	31	10	1
9	Mesin dan Peralatan	0	26	6	0
10	Transportasi dan Konstruksi	0	10	6	5
11	Minyak dan Gas	0	9	4	8

Tabel 4.16. Peringkat Berdasar Jumlah Item pada Kuadran IPA X,Y= 3

Peringkat	Industri	Kuadran 1	Kuadran 2	Kuadran 3	Kuadran 4
1	Transportasi dan Konstruksi	0	78	0	0
2	Makanan	0	75	1	0
3	Minyak dan Gas	0	75	0	0
4	Non-Manufaktur lainnya	0	73	0	0
5	Manufaktur Lainnya	0	73	0	0
6	Kimia	0	70	0	0
7	Elektronik	0	66	0	0
8	Metal dan Produk Metal	0	65	1	0
9	Garmen	0	65	0	0
10	Mesin dan Peralatan	0	62	2	0
11	Tekstil	0	59	3	0

9. Peringkat Industri Berdasarkan Jumlah Item *Overlap* dan *Missmatch*

Respon klien maupun operator pada 93 item kuesioner memiliki dua sifat, yakni *overlap* atau *missmatch*. Respon dikatakan *overlap* apabila respon kedua belah pihak baik klien maupun operator mengarahkan item pada kuadran yang sama. Sementara itu, apabila respon klien dan operator mengarahkan pada kuadran yang berbeda, maka respon tersebut dikatakan *missmatch*. Semakin banyak jumlah item dengan respon *overlap* pada sebuah industri, maka semakin selaras penilaian kinerja dan kepentingan antara klien dan operator. Pendekatan ini juga dapat berfungsi sebagai ukuran validitas dan reliabilitas penilaian kinerja PLB yang melibatkan dua pihak yang berbeda.

Tabel 4.17 menjelaskan peringkat industri berdasarkan jumlah item *overlap* dan *missmatch* dengan sumbu X,Y= rata-rata. Tabel 4.17 menunjukkan bahwa PLB industri yang paling efektif berdasarkan jumlah item *overlap* dan *missmatch* adalah industri tekstil, sedangkan PLB industri yang memiliki jumlah item *overlap* paling sedikit dan item *missmatch* terbanyak adalah industri

minyak dan gas. Sementara itu, Tabel 4.18 menunjukkan peringkat PLB industri berdasarkan jumlah item *overlap* dan *missmatch* dengan sumbu X,Y = 3. Dengan tolok ukur ini, PLB industri transportasi dan konstruksi adalah industri yg paling efektif sedangkan PLB industri tekstil adalah industri paling tidak efektif.

Walaupun terjadi perbedaan peringkat antara dua pendekatan pemeringkatan PLB industri-industri tersebut, perhatian utama sebaiknya dicurahkan pada peringkat PLB industri dengan X,Y=3 sebagai standar nilai tengah untuk pengukuran semua item untuk menilai tingkat kinerja maupun tingkat kepentingan layanan PLB. Peringkat PLB industri dengan X,Y = nilai rata-rata sulit untuk dijadikan dasar karena perbedaan nilai rata-rata tingkat kinerja dan tingkat kepentingan yang berbeda antar PLB industri yang dinilai. Dengan demikian, perbandingan kinerja antar industri lebih valid (*comparable*) dilakukan dengan data X,Y=3. Sebagai contoh, PLB untuk industri tekstil dan elektronik.

Tabel 4.17. Peringkat Industri Berdasar Jumlah Item *Overlap* dan *Missmatch* X,Y= Rata-rata

Peringkat	Industri	Jumlah Item <i>Overlap</i>	Jumlah Item <i>Missmatch</i>	<i>Overlap-Missmatch</i>
1	Tekstil	64	29	35
2	Elektronik	61	32	29
3	Metal dan Produk Metal	60	33	27
4	Kimia	59	34	25
5	Manufaktur Lainnya	56	37	19
6	Makanan	48	45	3
7	Non-Manufaktur Lainnya	46	47	-1
8	Garmen	42	51	-9
9	Mesin dan Peralatan	33	60	-27
10	Transportasi dan Kontruksi	31	62	-31
11	Minyak Dan Gas	22	71	-49

Tabel 4.18. Peringkat Industri Berdasar Jumlah Item *Overlap* dan *Missmatch* X,Y= 3

Peringkat	Industri	Jumlah Item <i>Overlap</i>	Jumlah Item <i>Missmatch</i>	<i>Overlap-Missmatch</i>
1	Transportasi dan Kontruksi	78	15	63
2	Makanan	76	17	59
3	Minyak dan Gas	75	18	57
4	Manufaktur Lainnya	73	20	53
5	Non-Manufaktur Lainnya	73	20	53
6	Kimia	70	23	47
7	Metal dan Produk Metal	66	27	39
8	Elektronik	66	27	39
9	Garmen	65	28	37
10	Mesin dan Peralatan	64	29	35
11	Tekstil	62	31	31

Berdasarkan hasil analisis *non-parametric* dengan uji Mann-Whitney U (lihat Gambar 4.53) menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara respon operator dan respon klien yang dapat dilihat dari nilai signifikansi yang diatas 0.05.

Gambar 4.53. Uji Mann-Whitney

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of AVI is the same across categories of GROUP	Independent Samples Mann-Whitney U Test	.141	Retain the null hyptothesis
2	The distribution of AVP is the same across categories of GROUP	Independent Samples Mann-Whitney U Test	.070	Retain the null hyptothesis

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

► Focus Group Discussion (FGD)

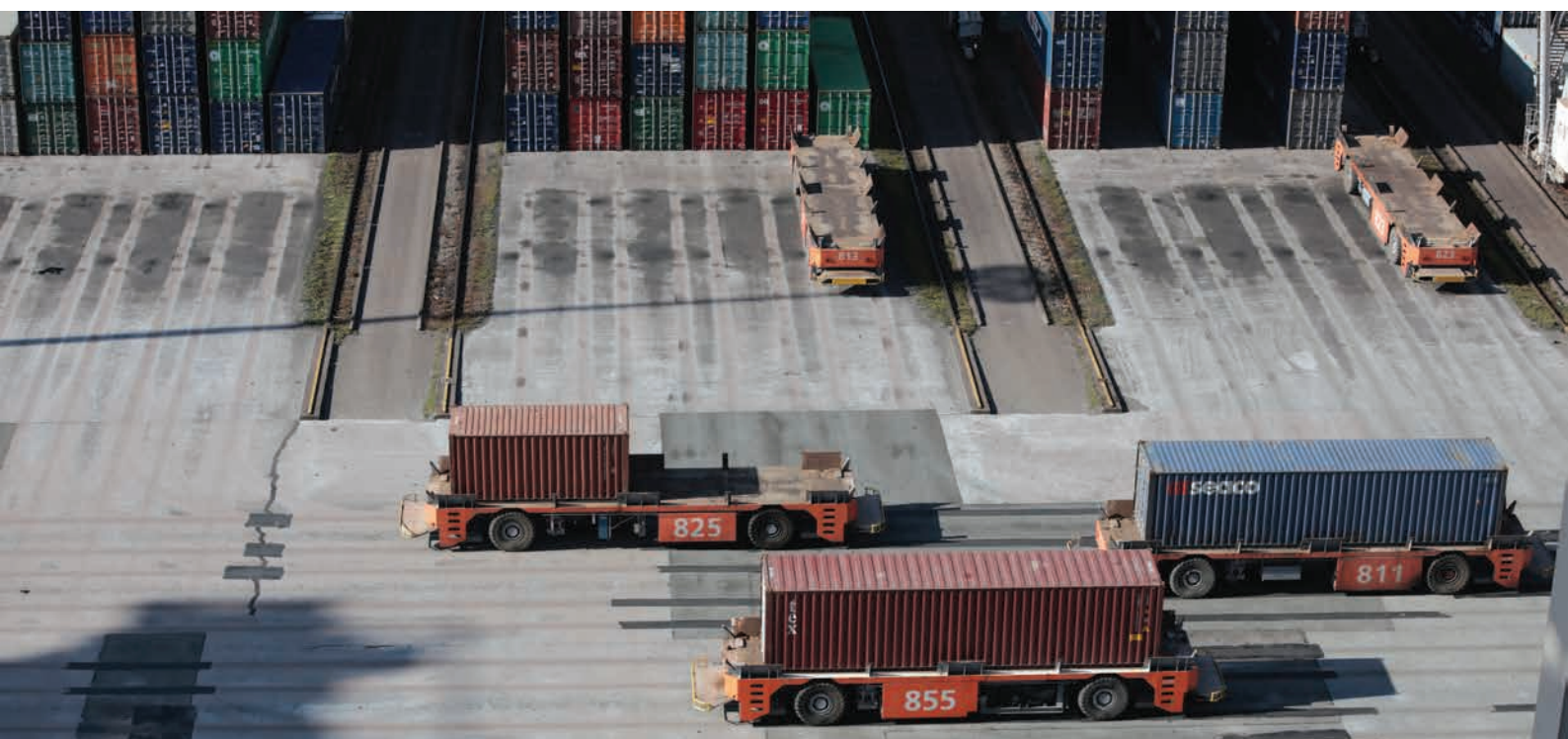
1. Hasil FGD

FGD sudah terlaksana sebanyak sepuluh pertemuan dengan tiga stakeholder utama, yaitu regulator, klien, dan operator PLB. Tabel di bawah ini menyajikan linimasa dan rangkuman pembahasan FGD secara terperinci.

Tabel 4.31. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

No	Hari, tanggal	Peserta	Rangkuman
1	Selasa, 8 September 2020	6 orang Pengurus PPLBI	Peserta membahas tujuan pendirian PLB dan PPLBI. Perbedaan PLB dengan fasilitas lainnya juga dibahas. Hambatan yang mereka alami juga disebutkan, salah satunya masalah koordinasi terkait insentif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan
2	Rabu, 16 September 2020	7 Operator PLB	Peserta membahas <i>feedback</i> dari kuesioner yang telah diberikan. Negara yang paling siap dengan konsep PLB. Motivasi setiap perusahaan bergabung dalam PLB. Isu permasalahan yang dialami operator PLB. Terakhir, peraturan yang kurang mendukung perkembangan PLB.
3	Kamis, 17 September 2020	Operator PLB	Peserta berdiskusi mengalami hambatan yang dialami oleh mereka, yaitu ketidaksinkronan antara kebijakan/peraturan bea dan cukai dengan kementerian lain. Inefisiensi lahan gudang karena PLB tersegmentasi untuk satu barang saja. Produsen memiliki PLB muncul isu <i>vested interest</i> .
4	Rabu, 23 September 2020	Badan Karantina Kementerian Pertanian	Badan Karantina Pertanian hanya menangani satu operator. Jumlah PLB yang terlalu banyak akan menjadi timpang dengan SDM di Badan Karantina Pertanian yang terbatas Sistem elektronik berupa sertifikat barang bersama Dirjen Bea Cukai sebagai insentif bagi PLB. <i>Joint inspection</i> Bea Cukai dan Karantina dengan INSW. Dan, peluang impor susu dari New Zealand.
5	Kamis, 24 September 2020	Dirjen Bea dan Cukai	Dirjen Bea Cukai mengawali dengan pembahasan latar belakang pendirian PLB dan tujuannya. Perbandingan efektivitas PLB dengan TPB, KB, Gudang Berikat, dan KITE. Evaluasi makro dan mikro untuk PLB. Komunikasi dan Koordinasi tiga instansi, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Isu pengawasan PLB yang ketat dibandingkan fasilitas lainnya.
6	Selasa, 06 Oktober 2020	Kementerian Perdagangan	Kemendag membahas mengenai komoditas impor yang memberikan manfaat PLB. Keunggulan Singapura dalam meningkatkan produktivitas pengiriman. Peraturan besi dan baja berlaku saat barang masuk PLB. Pengawasan di PLB lebih baik untuk menanggulangi barang ilegal. Kanalisasi komoditas untuk PLB seharusnya dilakukan. Kemendag hanya melakukan persetujuan impor dari masing-masing lembaga.

No	Hari, tanggal	Peserta	Rangkuman
7	Kamis, 08 Oktober 2020	KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok	Di pelabuhan Tanjung Priok, kegiatan yang dilakukan hanya clearance. Dokumen BC16 sebagai dokumen masuk dan Dokumen BC28 sebagai dokumen keluar. Proses bisnis pemberitahuan dan pemasukan barang itu disampaikan ke kantor pengawas dan bukan kantor pembokaran di kantor Tanjung Priok. Di Tanjung Priok, kegiatan yang dilakukan adalah bongkar dari kapal lalu turun ke lapangan penimbunan lalu langsung dibawa ke PLB bersangkutan.
8	Senin, 12 Oktober 2020	Otoritas Bandara Internasional Ngurah Rai	Angkasa Pura I menyediakan fasilitas sewa ruangan dan EMPU untuk pengiriman kargo. Pemeriksaan bea cukai ada di wilayah AP1. Keterlambatan laporan jaster jadi tantangan bagi operator. Pengiriman barang logistik menggunakan airline sesuai dengan tujuannya. AP 1 tidak menemui masalah koordinasi dengan kementerian lainnya. Bali sebagai wilayah pengangkutan kargo untuk layanan internasional.
9	Senin, 2 November 2020	Klien 1	Klien 1 memiliki dua tempat berikat, yaitu PLB dan KB. Sebelum konsep tempat berikat, klien 1 menggunakan <i>masterlist</i> dari BKPM. Dalam beberapa kasus, PLB masih membingungkan mengenai konsep dan keunggulannya oleh beberapa orang. Klien 1 memandang penghematan bea masuk bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi mereka. Biaya pergudangan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PLB.
10	Selasa, 3 November 2020	Klien 2	Skema PLB memberikan keuntungan dalam menekan <i>storage cost</i> dan kecepatan penyelesaian dokumen karantina. Dengan adanya PLB, klien 2 bisa bersaing secara harga bahan baku dengan China. Potensi PLB sebagai Hub jika penggunaannya tidak hanya dimanfaatkan untuk produksi saja. PLB yang digunakan hanya impor bahan baku.



2. Hasil Analisis FGD

Hasil *template analysis* mendapatkan empat tema utama selama pelaksanaan FGD yang merupakan hasil olahan dari pemberian kode dan pengkategorian kode sehingga menjadi sebuah tema besar. Berikut penjelasan lebih rinci tentang tema-tema tersebut:

Ketidaksinkronan Regulasi antar Kementerian

Tema ini sering disebutkan oleh peserta FGD terutama operator PLB. Ketidaksinkronan ini membuat proses bisnis PLB menjadi terhambat. Dalam suatu pembicaraan oleh peserta FGD, perusahaan bahkan ragu menggunakan PLB karena regulasi yang berbeda-beda. Adanya perputaran SDM di kementerian yang membuat interpretasi regulasi yang berbeda mengakibatkan operator menjadi sulit untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya. Ketidaksinkronan regulasi kementerian ini diakui bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai regulasi. Sosialisasi ini meliputi peraturan baru yang akan diberlakukan maupun peraturan lama yang memerlukan tinjauan dan persepsi yang sama. Berikut petikan hasil FGD terkait dengan tema tersebut:

"Keuntungannya masih belum terlalu saya nikmatin, apalagi kalau bapak ngomong perusahaan oil and gas itu kita juga terbentur dengan peraturan P30007. Multi-layer multi-regulation ya. Banyak yang kurang mau lah. Mereka lebih prefer impor biasa putus lepas daripada harus stock di Indonesia, gitu."

(Narasumber PLB 5)

"Saya tidak tahu bahasa yang pas apa yaitu dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan berarti undang-undang nomor 36, 36 yang terakhir tahun 2008. Karena ada beberapa pasal terkait dengan badan usaha tetap, nah, mungkin yang perlu dipertegas."

(Narasumber PLB 6)

"Harapan kami sebenarnya satu ya itu tadi lah regulasi apa namanya antar kementerian atau lembaga itu kelihatan apa namanya masih belum sinkron, seperti itu. Jadi apa namanya voice dari semua stakeholder yang ada dari semua... karena kami bikin PLB juga membuat itu juga dengan investasi pak ya."

(Narasumber PLB 5)

"Kami berusaha menghubungi stakeholder pemangku kebijakan terutama kemendag karena besi baja itu banyak yang badly hit, termasuk Z jadi kami sudah sewa tempat ketika regulasi dibuat begitu sudah jadi ternyata regulasinya di hold atau implementasi regulasinya ndak 100%."

(Narasumber PLB 1)

Keunggulan PLB

PLB sebagai sebuah konsep logistik yang menawarkan berbagai kemudahan dan insentif memiliki keunggulan dibandingkan dengan konsep lainnya. Sebagian Operator PLB mengakui bahwa kehadiran PLB bisa memberikan manfaat bagi mereka. Biaya logistik industri manufaktur yang turun dengan menggunakan PLB sebanyak empat kali disebutkan dalam FGD. Fleksibilitas pengeluaran dan pemasukan barang juga menjadi keunggulan PLB dibandingkan dengan konsep tempat berikat lainnya. Berikut petikan hasil FGD terkait dengan tema tersebut:

"Cost logistic ya cost logistic, pasti akan menekan cost logistic apabila barang itu tertahan di Pelabuhan atau barang itu hubnya ada di Singapura ya, itu pasti akan menurun."

(Narasumber PLB 3)

"Kalau secara keseluruhan ada 4 fleksibilitas pak. Pertama fleksibilitas pemasukan dan pengeluaran barang....Kemudian fleksibilitas yang kedua adalah fleksibilitas kepemilikan barang pak...fleksibilitas kebijakan fiskal pak. Karena di PLB itu untuk pajak dalam rangka impornya masih ditunda pak...fleksibilitas kegiatan pak di dalam PLB. Jadi di PLB itu ada 16 kegiatan sederhana. Jadi ruang lingkup PLB kemudian bisa dibilang cukup luas kegiatan tersebut pak."

(Narasumber PLB 6)

"Kita menggunakan importasinya melalui PLB. Jadi para UKM yang ada di... para IKM yang ada di Bali ya cukup lah juga bisa menikmati mungkin salah satu dari sisi penurunan biaya tidak kena demurrage salah satunya."

(Narasumber PLB 8)

"Proses deliverynya yang dulunya Singapur sebagai area transit itu, sampai dengan sekarang itu direct call pak artinya dari luar negeri mungkin dari India atau dari China itu langsung direct ke Indonesia."

(Narasumber PLB 7)

Konsep dan Tujuan PLB

FGD bersama operator PLB memberikan gambaran tema mengenai konsep dan tujuan PLB. Penguatan tema ini juga diangkat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konsep PLB seharusnya menjadi bisnis inti sebuah perusahaan logistik. Ada yang mengumpamakan sebagai supermarket untuk konsinyasi. PLB dibuat dengan menerapkan konsep pemilik tanah dan penyewa tanah. Hal itu disebutkan oleh salah satu peserta dari Dirjen Bea dan Cukai untuk menanggapi pertanyaan terkait aturan lahan satu hektar sebagai syarat pengoperasian PLB. Tujuan PLB juga disebutkan untuk mendekatkan barang-barang yang berada di Singapura dan Malaysia agar berada di Indonesia. Berikut petikan hasil FGD terkait dengan tema tersebut:

"Jadi intinya mendekatkan bahan baku ke industrinya dengan hal itu akan bisa menimbulkan biaya logistik yang akan bisa lebih berkurang karena bahan baku bisa dibutuhkan langsung oleh industri tanpa mereka mengimpor."

(Narasumber Klien 1)

"Kalau kita bicara Pusat Logistik Berikat harusnya itu sama seperti dalam kita bilang Pujasera Pak atau pusat penjualan mobil ya kan kebayang aja saya punya namanya pusat penjualan mobil Pak yang di WTA di satu gedung ditentukan hanya boleh jual saya boleh jual apa namanya mobil tipe tertentu ya kan." (Narasumber PLB 3)

"Kami sebagai penyelenggara logistik melihat bahwa pengelolaan... karena PLB ini adalah tempat penimbunan berikat, tempat penimbunan itu warehouse berarti memang core-nya perusahaan logistik, begitu pak."

(Narasumber PLB 1)

"PLB itu dibentuk ee karena ingin memberikan fasilitas logistik yang selama ini di luar negeri diambil oleh pelaku logistik luar negeri terutama di Singapura di Malaysia."

(Narasumber PLB 6)

Pengawasan PLB dalam Kegiatan Ekspor-Impor

Tema terakhir ini muncul karena adanya desas-desus PLB sebagai tempat penyelundupan barang. Baik operator maupun regulator PLB menekankan bahwa, PLB memiliki pengawasan yang kuat dan ketat untuk menjaga barang masuk dan keluar. Penggunaan e-seal, *warehouse management system*, dan akses CCTV menjadi cara untuk mengawasi barang yang ada. Risiko penyelundupan barang dengan PLB menjadi paling kecil jika dibandingkan dengan kawasan berikat lainnya. Operator PLB juga diakui sebagai mitra pengawasan Bea Cukai untuk setiap aktivitas pengelolaan barang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Berikut petikan hasil FGD terkait dengan tema tersebut:

"Tetapi untuk proses di warehousenya itu diwajibkan menggunakan teknologi, jadi sudah harus ada warehouse management system, dimana akses terhadap sistem itu bisa juga diakses oleh pihak bea cukai secara langsung."

(Narasumber Klien 1)

"Tadi ketika kita harus wajib penyelenggara bertanggung jawab barang yang ada di dalamnya. Kemudian, tadi Pak penyelenggara misalnya ada satu di tempat dia ada yang salah maka seluruh PLB penyelenggara dia itu akan tutup Pak makanya dia sangat hati-hati sehingga benar-bener menjaganya." (Narasumber Regulator 1)

"Barang sudah dibongkar semua kita bisa melihat dengan jelas ya ketika disitu juga ada CCTV, Bea Cukai bisa langsung masuk barang juga tidak bisa misalnya datang hari ini langsung keluar gitu loh Pak." (Narasumber Regulator 1)

"Kemudian penerapan e-seal itu, mungkin kalau sekarang sudah KB juga mulai menerapkan tapi kalau di awal itu PLB yang menerapkan terlebih dahulu electronic seal, pak."

(Narasumber PLB 6)



► Hasil Observasi Lapangan

Observasi telah dilaksanakan pada lima operator PLB yang berbeda, dengan tiga diantaranya berada di Jakarta dan dua yang lainnya berada di Surabaya. Atas permintaan operator PLB, satu dari tiga lokasi observasi yang direncanakan untuk dilaksanakan di Surabaya dipindah ke Jakarta sehingga total observasi yang dilaksanakan adalah tiga yang berlokasi di Jakarta dan dua terletak di Surabaya. Dari observasi yang telah

dilaksanakan, rata-rata proses wawancara memakan waktu sekitar satu hingga dua jam. Sedangkan observasi secara menyeluruh memakan waktu tiga hingga empat jam. Melalui observasi yang telah dilakukan, *insight* yang mendalam, peranan, serta gambaran akan operasional PLB dan skala industrinya telah dapat dipahami. Adapun tema-tema pembahasan dalam observasi sesuai hasil *template analysis* adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Pungli dan Penarikan Dana Informal

Tema ini diangkat untuk mengklarifikasi desas-desus penarikan dana informal dan pungli di dalam kegiatan kepabeanan. Ketika ditanyakan soal keberadaan pungli dan penarikan dana informal dalam PLB narasumber dari PLB 2 menjawab sebagai berikut:

“Ndak ada sih, ndak ada, nol, nah disini lah kaitannya, kita ini dengan bea cukai sudah diberi trust atau kepercayaan bahkan bea cukai ini sudah tidak mengawasi kita lagi nih, ya kan, semua diserahkan kepada PLB nih, sistem yang bekerja di PLB sekarang, bukan manpower yang bekerja ya, disitu sudah bisa mengurangi kontak kita dengan pihak terkait bea cukai itu yang sangat... eh, suatu kelebihan yang ada di PLB kan gitu.”

(Narasumber PLB 2)

Hal ini dapat diklasifikasikan karena PLB sudah memiliki sistem yang terintegrasi dengan bea cukai dan diberikan kemandirian oleh bea cukai untuk melakukan pengawasan, sebagaimana ditanggapi oleh narasumber dari PLB 2 yaitu:

2. Transparansi Kegiatan dalam PLB

Tema ini diangkat untuk membahas tingkat transparansi kegiatan kepabeanan yang dilaksanakan di dalam PLB dan untuk menjelaskan rincian perhitungan barang yang keluar dan masuk PLB. Jumlah perhitungan barang di dalam PLB menggunakan satuan terkecil “pieces” untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyalahgunaan seperti pernyataan narasumber dari PLB 3 sebagai berikut:

“Kalo di sistem ini per botol, ukuran pieces paling kecil. Ini kebijakan dari bea cukainya, karena kan, untuk menghitung pita cukainya nanti kan, makanya kita pakainya per botol gitu.”

(Narasumber PLB 3)

Perhitungan sediaan juga sudah terintegrasi ke dalam teknologi informasi yang terhubung langsung dengan bea cukai sehingga tingkat akurasi dan pelacakan keluar

“Justru kalau di PLB itu ndak kayak clearance pada umumnya karena tidak ada kontak person antara kita dan dengan adanya sistem yang terintegrasi, sekarang sudah pakai sistem by sistem itu malah, ndak ini, kalau bicara pungli sudah ndak ada.”

(Narasumber PLB 2)

Oleh karena itu, penggunaan PLB dapat membantu mempersingkat birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan kepabeanan yang ada, sebagaimana ditanggapi oleh narasumber dari PLB 4 berikut:

“Begini, saya akui kita kan bekerja di bawah pengawasan pembinaan supervisi bea cukai, saya akui memang bea cukai itu dari sisi birokrasi itu saya akui saya kasih jempol lah. Jadi kaitannya dengan PLB biaya tersebut sangat sangat minim.”

(Narasumber PLB 4)

Sehingga tak hanya PLB bebas dari pungli dan pungutan dana informal, namun PLB juga memiliki integritas yang tinggi.

dan masuk barang sangat ketat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan narasumber dari PLB 2 yaitu:

“Jadi di PLB itu sistemnya terbuka, kontainer harus di striping supaya transparansinya kelihatan, kita cek kita masukkan ke kontainer kita IT inventory-kan jenis barangnya, jumlahnya, itemnya disitulah sebenarnya kita bisa memberikan satu nilai plus ke temen temen kalau PLB itu kurang terbuka apa? Kita sudah seperti ini sistem inventory kita sudah terintegrasi dengan bea cukai jadi pertukarannya itu integrasi ya. Bea cukai ndak usah melacak tinggal buka aja karena kan sudah sama sama terintegrasikan, ndak perlu lacak, mereka buka sistem sudah seperti buka kita, sudah terintegrasi...”

(Narasumber PLB 2)

3. Manfaat Utilisasi PLB

Tema ini diangkat untuk menjelaskan manfaat yang didapatkan oleh klien dari utilisasi PLB. Selain biaya masuk ditanggihkan sampai dengan 3 tahun, PLB juga menawarkan pengeluaran produk secara parsial yang tentunya sangat bermanfaat bagi mitra PLB. Berikut pernyataan dari narasumber PLB 4 yang menyatakan bahwa PLB memiliki penanggihan biaya masuk:

“Yang pertama dia mendapat fasilitas penanggihan biaya masuk selama 3 tahun dan itu bisa diperpanjang lagi gitu kan. Yang kedua PLB ini kan bersifat mandiri, dalam artian peran bea cukai di PLB itu lebih minimum, tidak banyak petugas bea cukai di PLB, karena semuanya di serahkan ke penyelenggara PLB dalam hal ini kami. Kami ya ini ikut aturan main dari bea cukai.”

(Narasumber PLB 4)

Dengan *dwelling time* yang terminimalisir dan sistem yang terintegrasi secara daring dengan bea cukai, PLB dapat berjalan dengan mandiri dibawah pengawasan bea cukai. Berikut pernyataan dari narasumber PLB 2 terkait penurunan *dwelling time*:

“Kalau dengan plb, dwelling time sangat terasa sekali, sangat terasa. Karena apa, PLB itu hanya butuh waktu satu hari, ya to, bahkan kapal tiba saja itu barang sudah bisa kita masukkan PLB, maksimal dua hari, itu sudah paling maksimal itu.”

(Narasumber PLB 2)

4. Gambaran Proses dan Skala Operasional PLB

Topik ini diangkat untuk memberikan gambaran skala operasional yang ada dalam PLB. Baik dari proses pemasukan barang hingga keluar serta pengurusan dokumen kepabeanan. Regulasi yang berlaku (PERDIRJEN BC 01 Tahun 2016) menjelaskan bahwa PLB wajib memiliki luasan minimum 10.000 m², maka observasi lapangan berusaha menggali informasi akan efisiensi penggunaan luasan, skala pengeluaran dan pemasukan barang, serta kegiatan kegiatan yang berlangsung didalam PLB tersebut. PLB 3 menyatakan bahwa setiap bulan Mei mereka menerima 400 kontainer, namun regulator akan mengecek efisiensi dari jumlah barang yang masuk sehingga, ketika kuota tersebut dirasa kurang atau berlebih maka kuota

Sedangkan berikut ini cuplikan dari narasumber PLB 3 mengenai integrasi sistem PLB dengan bea cukai:

“Berubah pak, sekarang simple banget, simple sekali. Dulu misalnya pak kalau penanganan distribusi PLB itu harus ada presentasi, itu sekarang udah gaada lagi, sebelum covid pun udah gaperlu lagi. Saya rasa prosedur tetap sama, menghindari pertemuan fisik aja paling, sekarang, boleh dibilang kalua dulu kan walaupun online hardcopy disusunkan sekarang 100% gaperlu, kecuali kalua mau liat kayak ini kurang jelas copynya, minta di submit.”

(Narasumber PLB 3)

Selain itu, PLB juga membantu aliran kas klien dengan sistem pengeluaran secara parsial sebagaimana dijelaskan dalam cuplikan dari narasumber PLB 2 berikut:

“Justru kalau PLB itu kita bisa pembayaran parsial jadi kita bisa membantu customer kita untuk menjaga cash flow nya, stok barangnya, dengan parsial itu kan begitu, kita impor 5000-ton nih, kita keluarkan 500-ton dulu atau 100-ton dulu lah itu kan bisa membantu customer kita, importir kita, katakanlah barang itu gak harus dibayar 5000-ton dulu lah biaya masuknya, itulah kelebihan PLB bisa membayar dengan parsial.”

(Narasumber PLB 2)

tersebut akan disesuaikan berikut pernyataan dari PLB 4 terkait hal tersebut:

“Jadi nanti yang diijinkan dari pabean itu dalam tahun ini sekian ribu liter gitu nah nanti akhir tahun itu dilihat efisien atau tidak untuk kuota yang mereka kasih ke pihak importir. Kalo misalnya efisien atau sampe habis mungkin tahun berikutnya akan ditambah. Mereka pengajuan lagi atau ada penambahan lagi mungkin bisa diijinkan tapi kalo biasanya itu ada target ga sampai 50 % kuota ini ga sampai selesai nih, mungkin tahun depan kuota mereka akan dikurangin.”

(Narasumber PLB 4)

5. Kendala Operasional dalam PLB

Tema ini diangkat untuk melihat permasalahan yang terjadi di dalam PLB serta keluhan yang disampaikan oleh operator dalam kegiatan operasional. Keluhan keluhan yang direkam melalui *interview* dalam observasi menyangkut berbagai macam hal, mulai dari kendala operasional seperti barang yang tidak dapat dimasukkan kedalam Indonesia, kendala penempelan label berbahasa Indonesia yang belum jelas, dan kendala saat pengeluaran barang yang telah di perpanjang masa penyimpanannya. Berikut pernyataan dari narasumber PLB 4 terkait barang yang tidak dapat dimasukkan kedalam Indonesia:

“Ada beberapa importir kami yang terlanjur memasukkan barang dari eropa kecuali inggris. Ternyata dari kemendag ini ada kebijakan barang eropa ini di banned, sementara importir ini sudah terlanjur masukin, nah mau ga mau daripada barang ini tidak bisa digunakan, mereka jual lagi ke negara lain, filipina, hari ini mereka jual lagi ke Thailand. Jadi masuk tempat kami lalu di ekspor lagi ke negara lain. ya kalo sesuai aturan tidak bisa dialih fungsikan seperti itu dalam artian baik itu tidak diurus oleh importir dan berubah hak miliknya menjadi operator itu tidak ada ketentuannya yang mengatur hal tersebut sehingga jika tidak diurus maka ya endingnya dimusnahkan setelah batas waktu tertentu.”

(Narasumber PLB 4)

Sedangkan berikut ini pernyataan dari narasumber PLB 3 terkait ketidak jelasan penempelan label berbahasa Indonesia:

“Menurut regulator itu harusnya ditempel di Pelabuhan muat sebelum dimuat tetapi dalam peraturan tidak disebutkan jelas sehingga beberapa importir masukkan barang belum ada label Bahasa Indonesia nya dipasang disitu.”

(Narasumber PLB 3)

Dan yang terakhir adalah kendala yang dikeluhkan oleh PLB 5 terkait masalah pengeluaran barang yang telah diperpanjang masa penimbunannya:

“Jadi kemarin kan kita ada barang yang sudah 3 tahun tuh, jadi ketika ada barang yang sudah kita perpanjang itu keluar di sistemnya kena reject ... pas kita koordinasikan dengan tim IT nya bea cukai, nah perpanjangan itu ternyata dalam support teknisnya itu belum disupport oleh bea cukai.”

(Narasumber PLB 5)



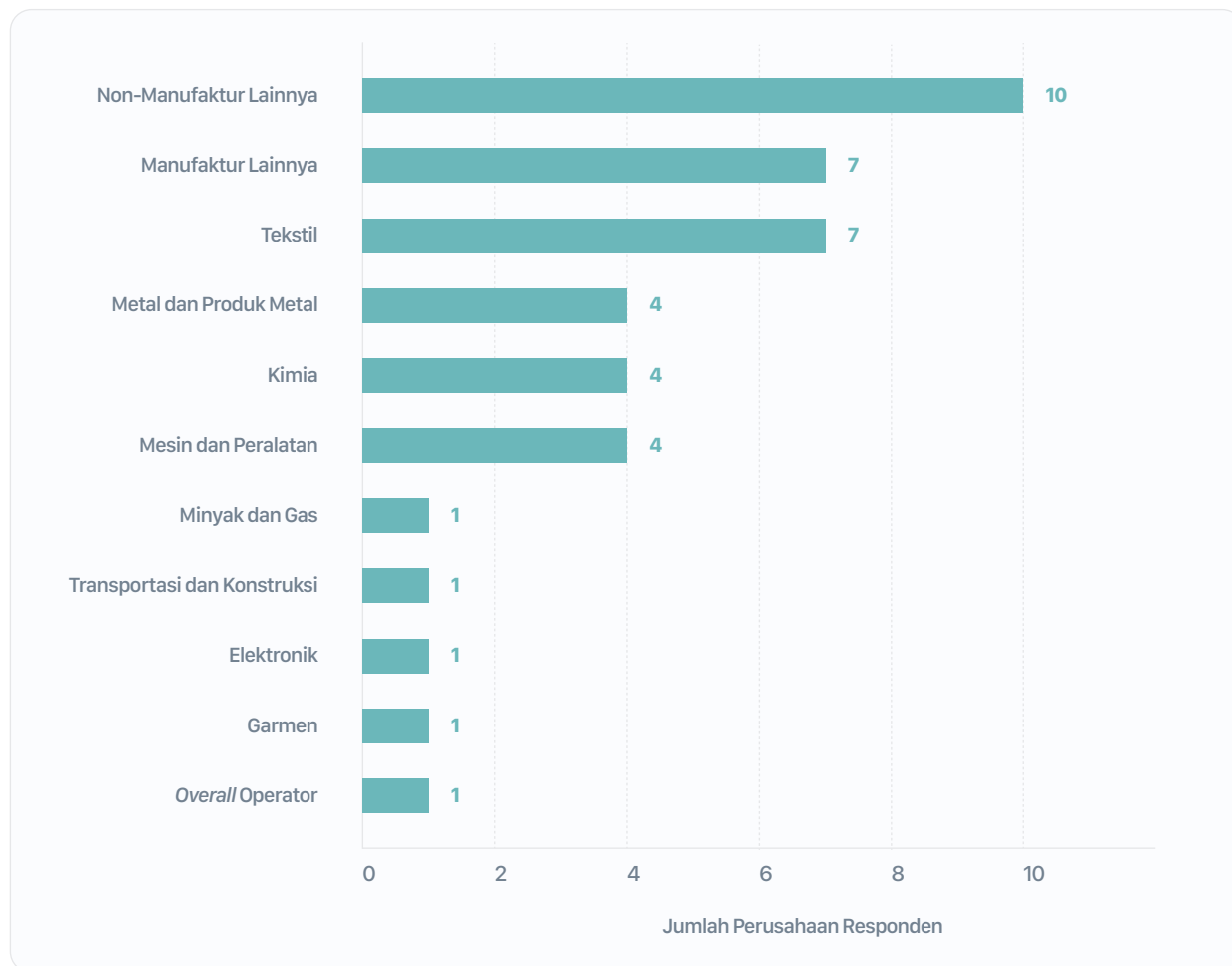
Tujuan Penelitian II: Evaluasi Kontribusi dan Dampak PLB Terhadap Perekonomian

► Dampak PLB terhadap Kinerja Industri di Indonesia

1. Hasil Survei Kuesioner

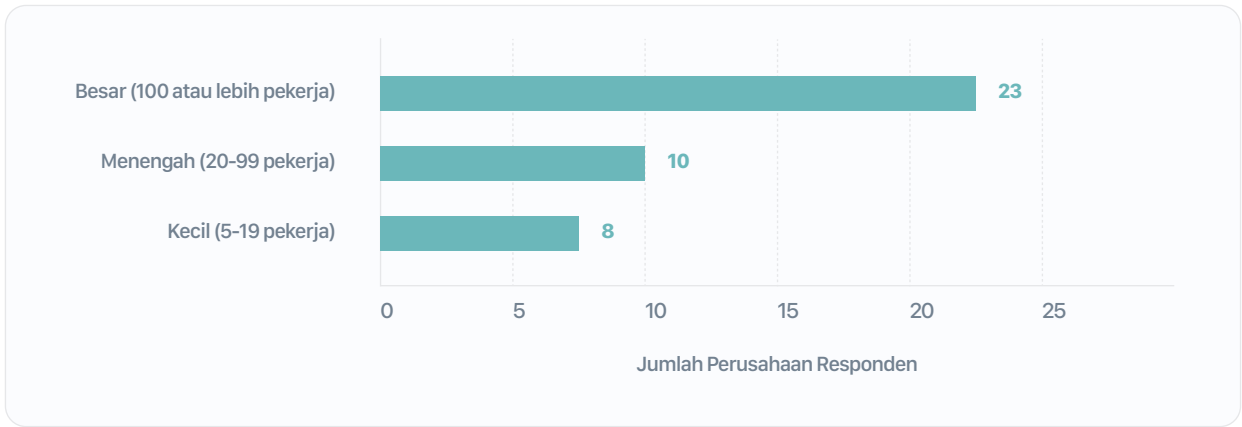
Untuk mengukur dampak PLB terhadap kinerja industri di Indonesia, pertama-tama penelitian ini menggunakan hasil survei kepada para pengguna PLB. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan perusahaan manufaktur seperti tekstil dan manufaktur

lainnya (lihat Gambar 4.5.1). Mereka juga sebagian besar merupakan perusahaan besar (lihat Gambar 4.5.2) yang mengimpor bahan baku dari luar negeri (lihat Gambar 4.5.3).



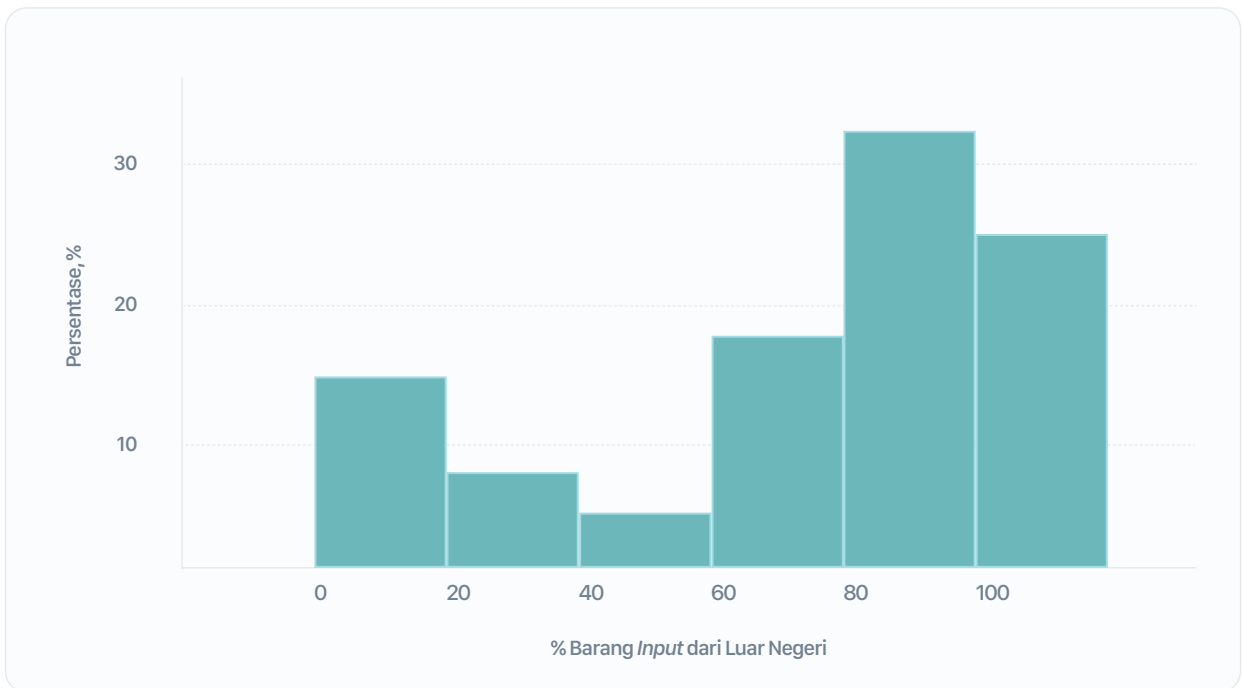
Gambar 4.5.1. Jenis Industri Responden

Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB



Gambar 4.5.2. Ukuran Perusahaan Responden

Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

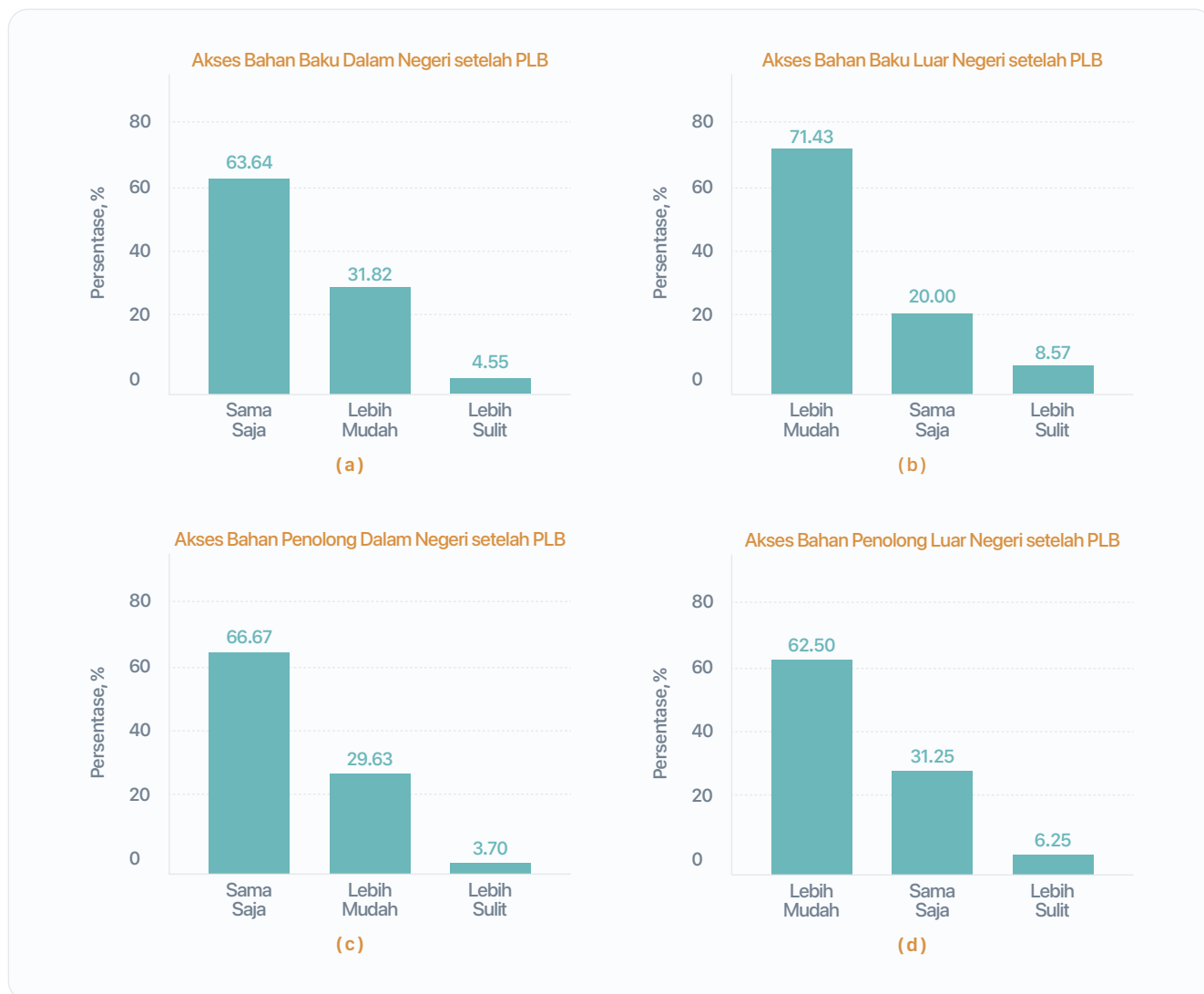


Gambar 4.5.3. Persentase Barang Input LN Responden

Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

Pada lembar survei, peneliti menanyakan perubahan yang dirasakan perusahaan responden setelah menggunakan PLB dari segi akses terhadap bahan baku dan bahan penolong, waktu memperoleh bahan baku dan penolong, biaya transportasi, biaya logistik, jumlah tenaga kerja, dan *output*. Hasil survei menemukan bahwa

sebagian besar klien merasa bahwa akses ke bahan baku dan penolong dari luar negeri lebih mudah setelah hadirnya PLB (lihat Gambar 4.5.4 (b) dan (d)). Sedangkan akses ke bahan baku dan penolong dari dalam negeri tidak berubah (lihat Gambar 4.5.4 (a) dan (c)).



Gambar 4.5.4. Dampak PLB pada Akses Bahan Baku dan Bahan Penolong

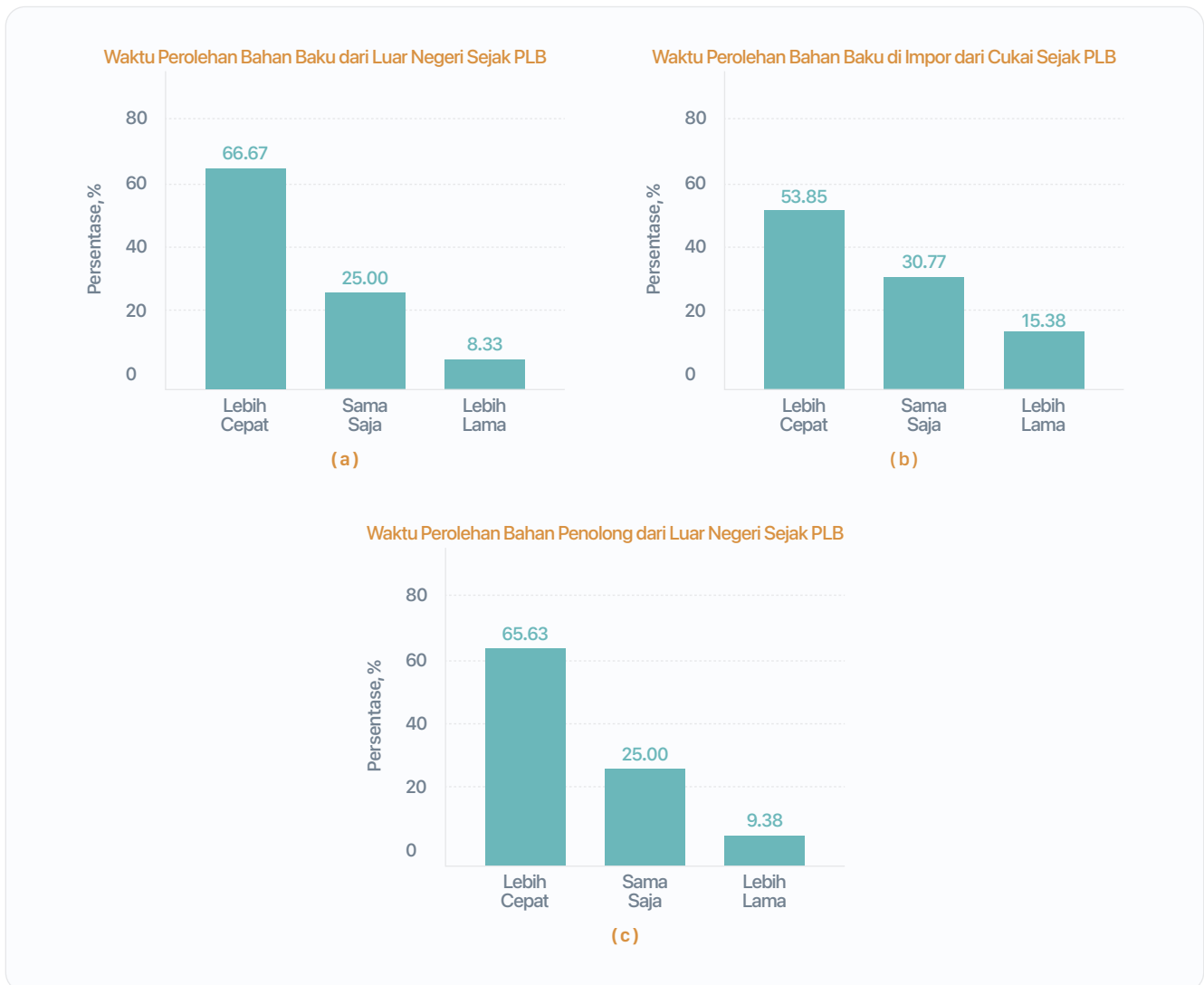
Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

Selain akses pada bahan baku dan penolong, mayoritas responden juga mengakui bahwa waktu perolehan bahan baku dan bahan penolong dari luar negeri menjadi lebih cepat sejak adanya PLB (lihat Gambar 4.5.5). Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu klien PLB pada sesi FGD sebagai berikut:

“Sebenarnya sampai tahun lalu kita masih menggunakan KITE pak, tapi semenjak ada PLB

kita stop menggunakan KITE karena proses juga lebih cepat pak di PLB. Kalau untuk KITE kan setelah saya lengkapi dokumen pak, setelah itu saya taro jaminan dulu, bikin custom bond, taro jaminan di bea cukai, dapat jaminan baru bisa proses custom pak, nah itu ada selisih waktu bisa 1-2 hari lagi pak.”

(Narasumber Klien 2)



Gambar 4.5.5. Dampak PLB pada Waktu Memperoleh Bahan Baku
 Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

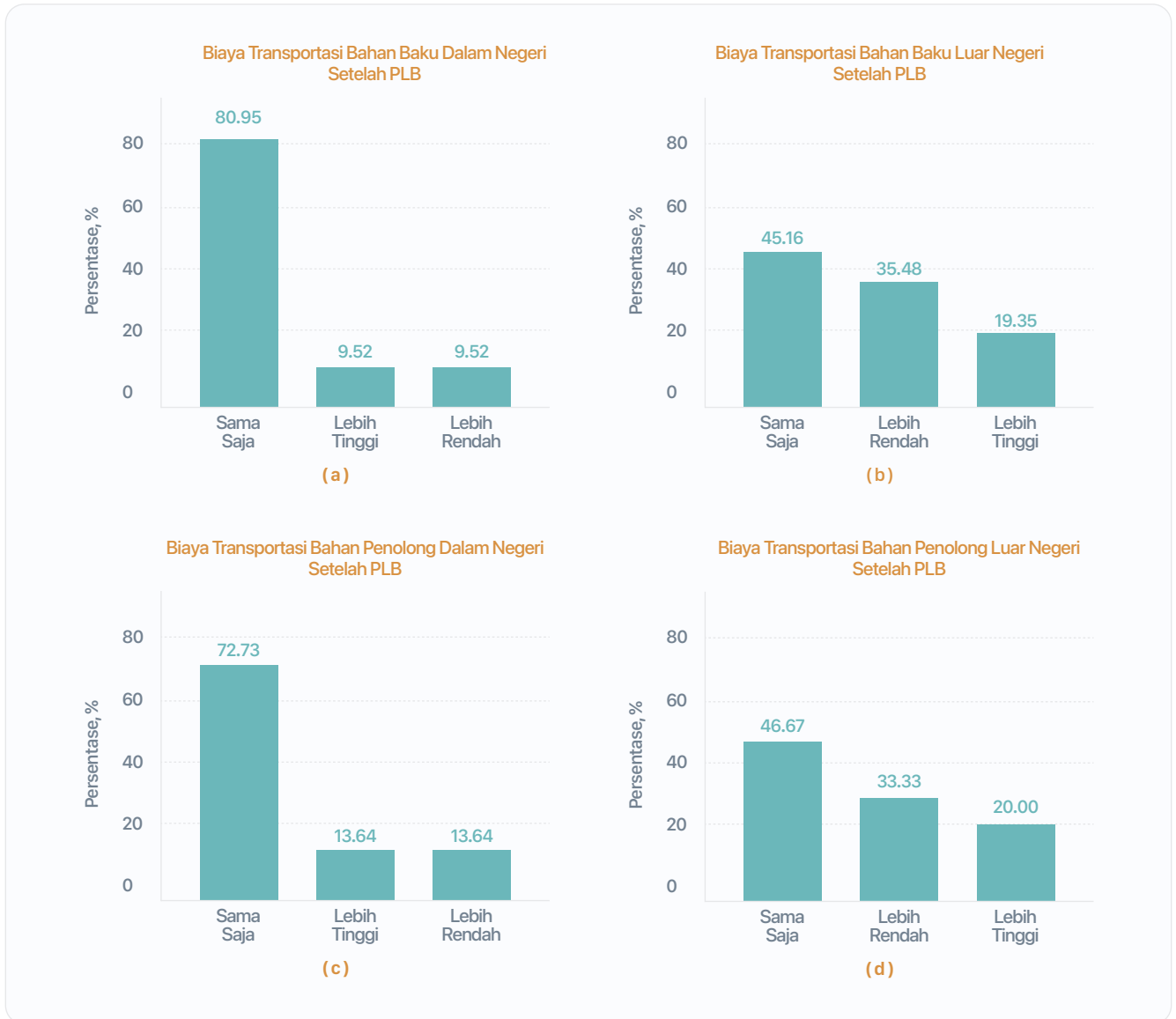
Ketepatan waktu pengiriman bahan baku dan penolong menjadi lebih tinggi setelah adanya PLB (lihat Gambar 4.5.6 (a) dan (b)). Akan tetapi terdapat 38% responden yang merasa jumlah formulir impor barang masih sama banyaknya setelah adanya PLB (lihat Gambar 4.5.6 (d)). Hal tersebut wajar terjadi dikarenakan sistem PLB yang belum sepenuhnya elektronik. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu PLB pada sesi FGD sebagai berikut:

“Kurang lebih itu, kalau kayak pelaporan sebagainya sih belum fully otomatis ya karena basically kami harus tetap ada ya platformnya sih, dengan internet ya diemailkan atau mereka juga bisa ambil tarik report juga sih kalau mereka mau. Baru begitu pak. Ya penggunaan CCTV itu wajib. Tapi belum teknologi yang kayak totally paperless gitu belum, karena bila ada kondisi tertentu ya kami tetap harus ada submit dokumen ke kantor bea cukai.” (Narasumber PLB 6)



Gambar 4.5.6. Dampak PLB pada Ketepatan Waktu Pengiriman Bahan Baku, Kualitas Pengiriman, dan Formulir Impor
 Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada biaya transportasi (lihat Gambar 4.5.7 (a) sampai (d)). Namun sekitar 35% menyatakan bahwa biaya transportasi bahan baku luar negeri lebih rendah setelah memanfaatkan PLB (lihat Gambar 4.5.7 (b)).



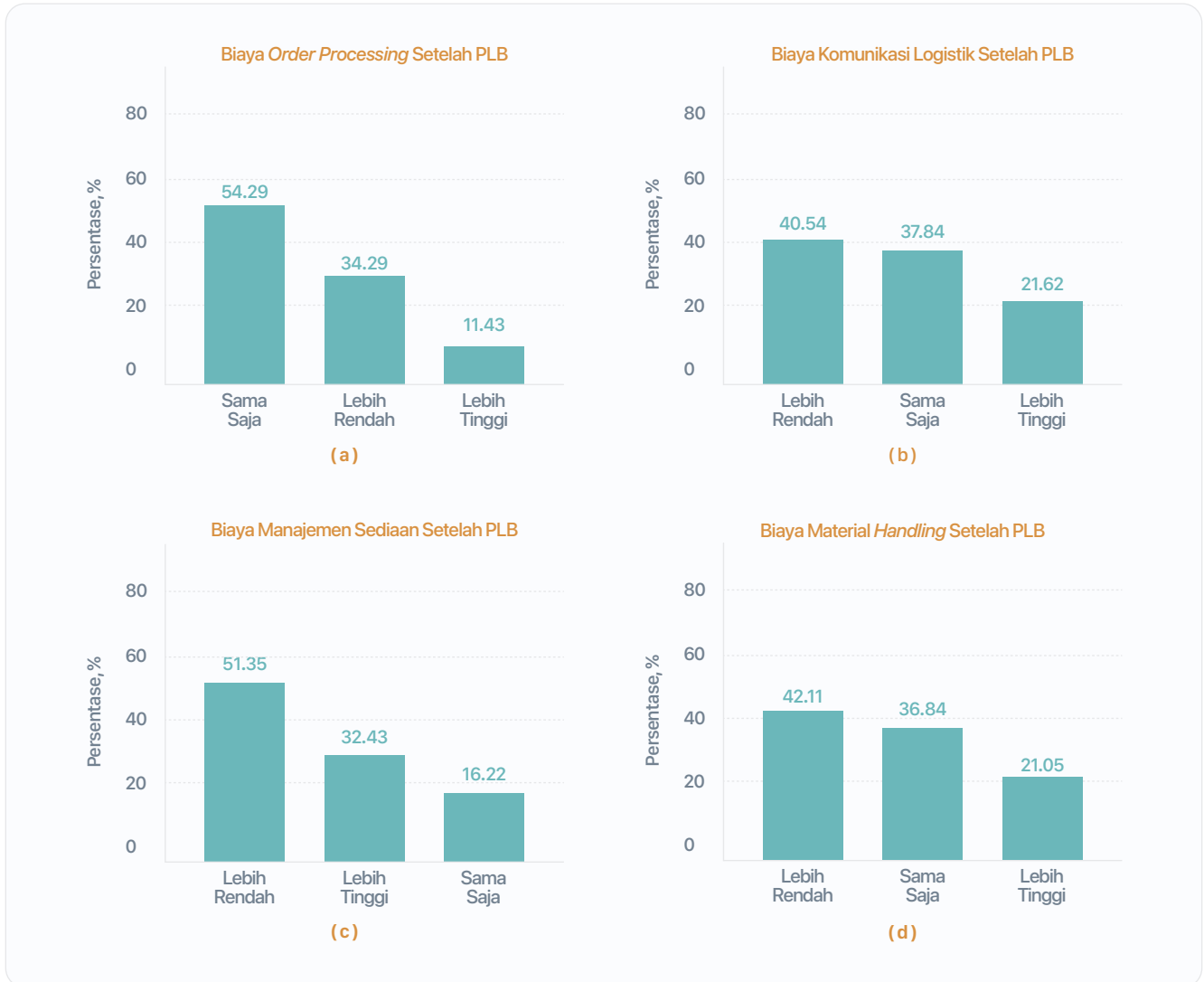
Gambar 4.5.7. Dampak PLB pada Biaya Transportasi Bahan Baku dan Penolong

Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

Dari segi biaya logistik, mayoritas responden menyatakan bahwa biaya komunikasi logistik, manajemen sediaan, dan biaya material handling lebih rendah setelah menggunakan PLB (lihat Gambar 4.5.8 (b) sampai (d)). Hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu klien PLB pada sesi FGD sebagai berikut:

“Kalau dulu belum pakai PLB itu kita untuk proses custom storing per container itu bisa 7 jutaan pak tapi sejak pakai PLB kita bisa 1 kontainer sekitar 5 jutaan.”

(Narasumber Klien 2)

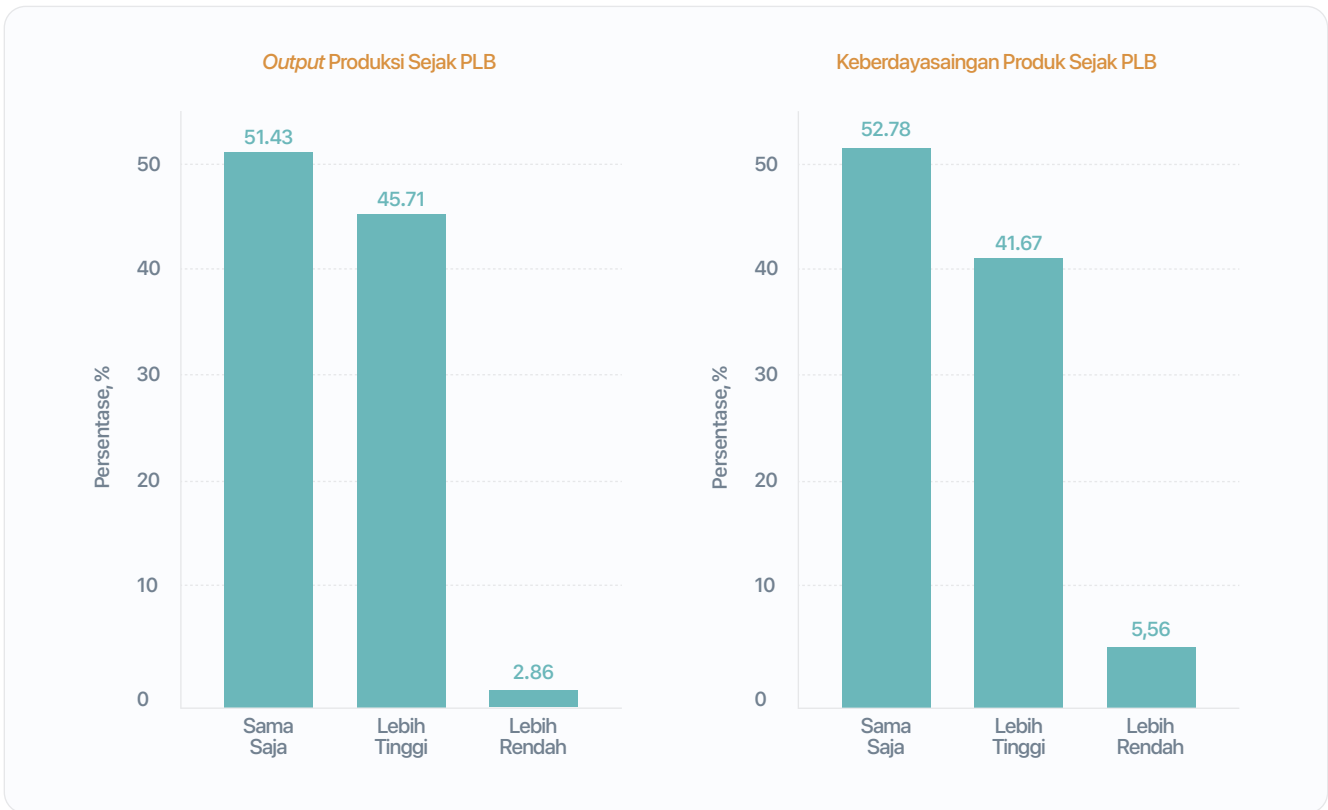


Gambar 4.5.8. Dampak PLB pada Komponen Biaya Logistik

Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

Hampir setengah dari klien PLB menyatakan bahwa *output* dan keberdayasaingan produk meningkat setelah adanya PLB (lihat Gambar 4.5.9). Hal tersebut serupa dengan pernyataan klien PLB pada sesi FGD sebagai berikut:

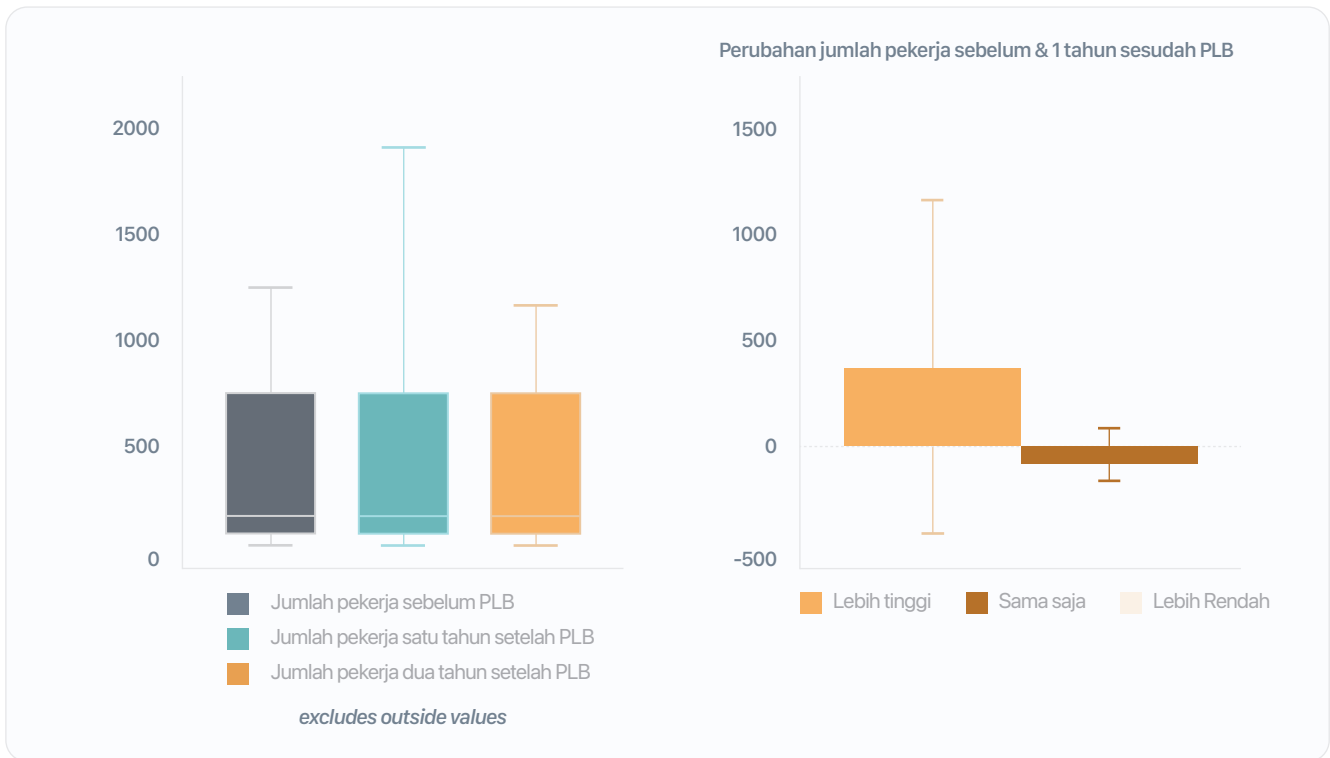
“Kalau efek langsung belum terasa sekali. Kalau dari segi cost dan biaya produksi itu dengan kompetitor kita dari China Pak ya kita sudah cukup terbantu agar enggak sampai loss gitu Pak. Karena komposisi otomatis biaya dari pelabuhan dan biaya produksi itu kalau lebih cepat kita bisa lebih cepat produksi bisa lebih ekspor itu lebih bagus Pak.”
 (Narasumber PLB 2)



Gambar 4.5.9. Dampak PLB pada *Output* dan Keberdayasaingan Produk
 Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

Dari sisi tenaga kerja, tidak ada perubahan jumlah pekerja yang signifikan dari perusahaan responden, bahkan diantara responden yang menyatakan *output* lebih tinggi sejak adanya PLB (lihat Gambar 4.5.10).

Hal tersebut wajar terjadi dikarenakan mayoritas responden adalah perusahaan besar yang memilih mekanisasi produksi, alih-alih menambah pekerja, ketika terjadi peningkatan *output*.



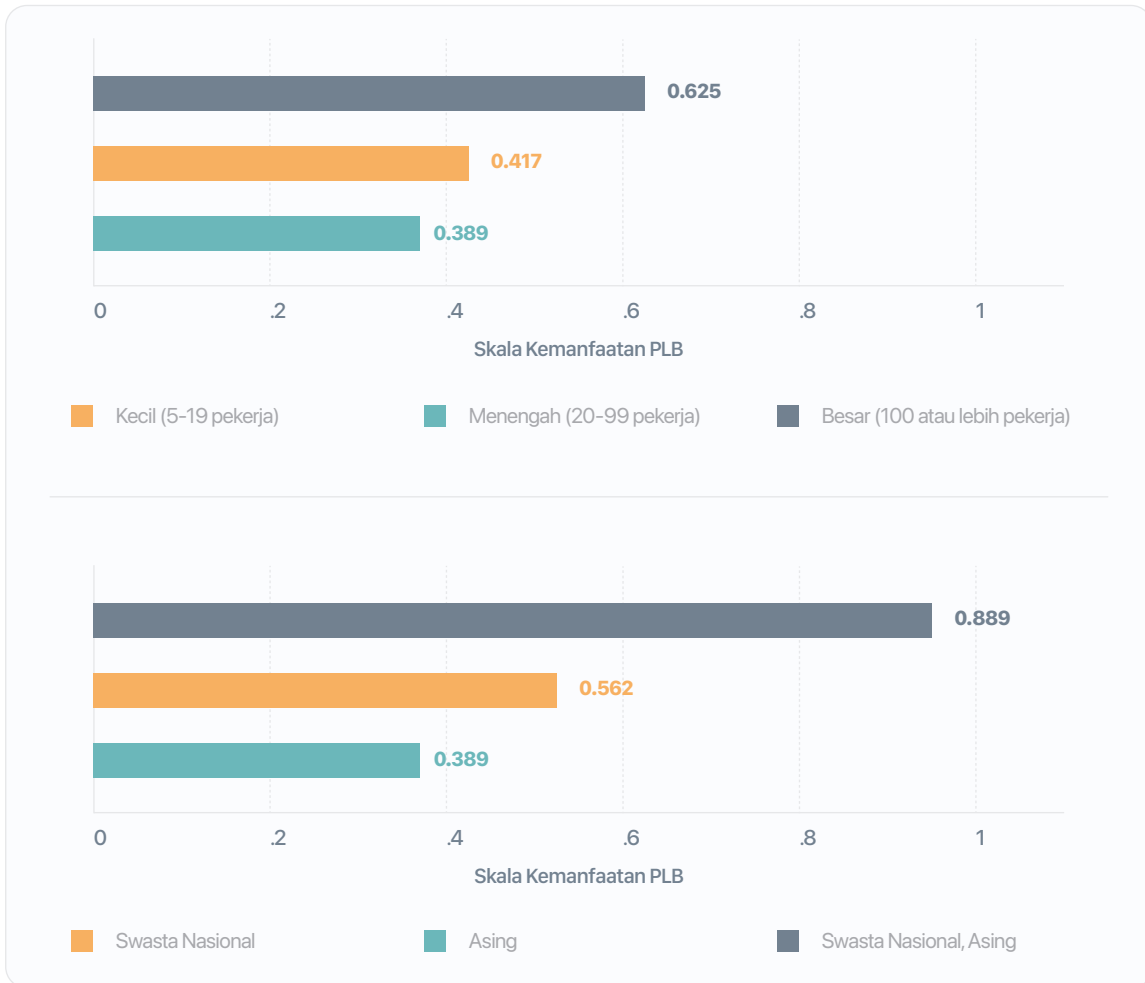
Gambar 4.5.10. Dampak PLB pada Tenaga Kerja

Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

2. Skala Kemanfaatan

Berdasarkan jawaban responden pada perubahan yang dirasakan setelah menggunakan PLB, penelitian menyusun skala kemanfaatan PLB. Skala kemanfaatan PLB tersebut disusun dari seluruh jawaban responden pada perubahan akses bahan baku, *output* produksi, dan biaya logistik. Skala kemanfaatan bernilai 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 semakin tinggi manfaat yang diperoleh. Hasilnya, perusahaan berukuran

besar dan perusahaan swasta nasional-asing memperoleh manfaat PLB yang lebih besar (Gambar 4.5.11). Hal yang menarik adalah industri skala kecil juga menerima manfaat yang cukup tinggi, baru kemudian diikuti oleh industri skala menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan PLB telah sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekspor-impor IKM di Indonesia.



Gambar 4.5.11. Skala Kemanfaatan PLB

Sumber: diolah dari hasil survei klien PLB

3. Dampak PLB terhadap Nilai Tambah Industri, Ekspor, dan Impor

Selain menggunakan survei, penelitian ini mengestimasi dampak PLB terhadap nilai tambah, ekspor, dan impor industri. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PLB berdampak positif pada nilai tambah industri dan ekspor, tetapi tidak pada impor. Hal tersebut dapat terjadi karena industri yang menggunakan PLB adalah industri yang mengimpor bahan baku untuk produksi lalu kemudian di ekspor. Industri yang menikmati PLB memiliki nilai

tambah yang lebih tinggi sebesar 23,4% (lihat Tabel 4.5.1). Sementara itu, industri yang menikmati PLB memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi sebesar 26,2% (lihat Tabel 4.5.2). Hasil ini sejalan dengan analisis dampak PLB pada arus barang keluar masuk yang menemukan bahwa pertumbuhan devisa ekspor industri yang menggunakan layanan PLB lebih tinggi dibandingkan industri yang tidak menggunakan layanan PLB (lihat Gambar 4.6.2).

Tabel 4.5.1. Estimasi Dampak PLB terhadap Nilai Tambah Industri, 2010-2018

	Model 1	Model 2
<i>Industry with PLB</i>	0.592*** (0.150)	2.976*** (0.0904)
= 1 jika tahun pertama menikmati PLB	0.349* (0.204)	0.234* (0.139)
<i>Observations</i>	207	207
<i>Adj. R-sq</i>	0.185	0.824
<i>Covariates</i>	N	Y
<i>Year Fixed Effects</i>	N	Y

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi di tingkat 10%, 5%, dan 1%. Estimasi *standard errors* menggunakan metode *cluster-robust* di tingkat kabupaten. Variabel kontrol meliputi pertumbuhan dana alokasi umum (DAU), pertumbuhan dana bagi hasil (DBH), pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK), pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan populasi, indikator *landlocked*, serta PDRB di tahun 2010

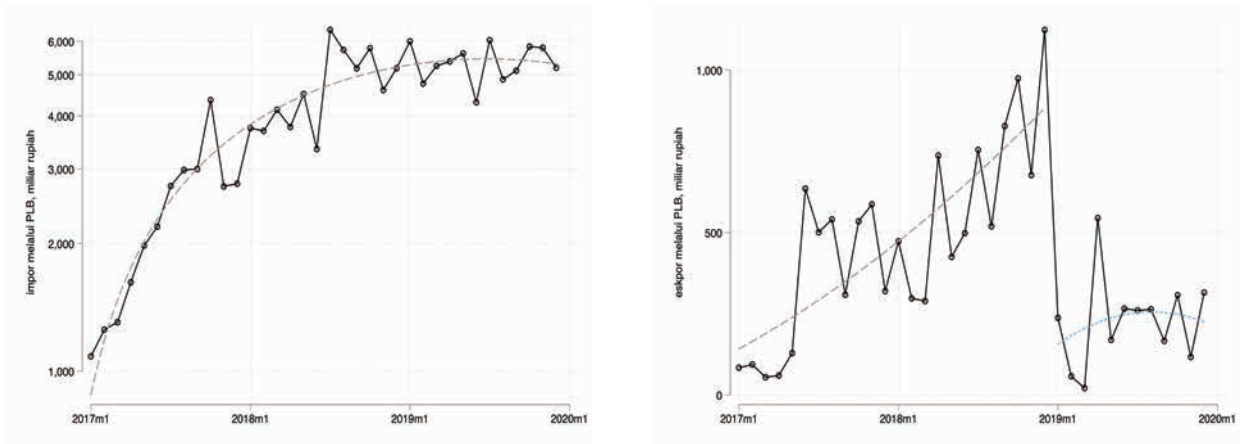
Tabel 4.5.2. Estimasi Dampak PLB terhadap Ekspor dan Impor, 2010-2018

	Ekspor	Ekspor	Impor	Impor
<i>Industry with PLB</i>	0.0783 (0.228)	0.607*** (0.0598)	0.260 (0.311)	-1.320*** (0.0401)
= 1 jika tahun pertama menikmati PLB	0.440 (0.351)	0.262** (0.117)	0.167 (0.520)	-0.0354 (0.0507)
<i>Observations</i>	162	162	162	162
<i>Adj. R-sq</i>	-0.0105	0.925	-0.0142	0.992
<i>Covariates</i>	N	Y	N	Y
<i>Year Fixed Effects</i>	N	Y	N	Y

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi di tingkat 10%, 5%, dan 1%. Estimasi *standard errors* menggunakan metode *cluster-robust* di tingkat kabupaten. Variabel kontrol meliputi pertumbuhan dana alokasi umum (DAU), pertumbuhan dana bagi hasil (DBH), pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK), pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan populasi, indikator *landlocked*, serta PDRB di tahun 2010

► Dampak PLB terhadap Arus Keluar dan Masuk Barang

1. Dampak PLB pada Impor dan Ekspor

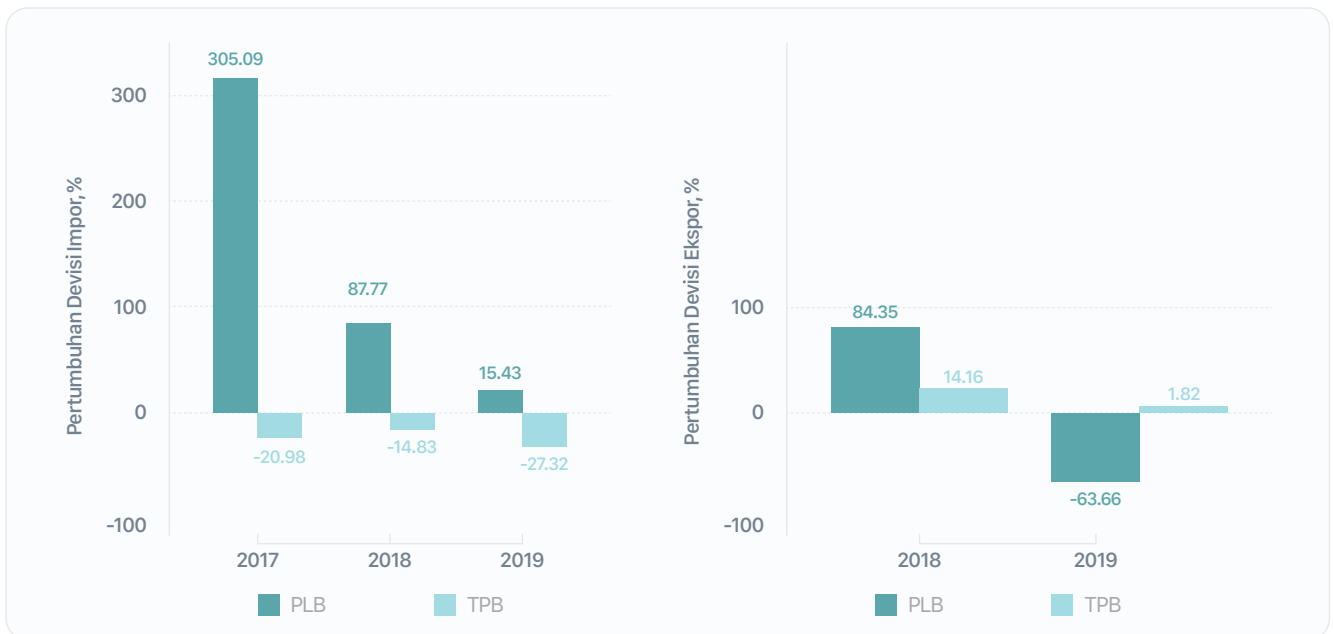


Gambar 4.6.1. Tren Impor dan Ekspor Melalui PLB

Sumber: diolah dari data DJBC

Dampak PLB terhadap arus keluar masuk barang dapat dilihat pada data impor dan ekspor. Secara umum, tren impor melalui PLB terus meningkat dari 2017 sampai dengan 2019, meskipun peningkatan tersebut

melandai sejak pertengahan 2018 (lihat Gambar 4.6.1). Tren ekspor juga mengalami peningkatan dari 2017 tetapi turun secara signifikan sejak awal 2019 karena perlambatan perdagangan internasional.

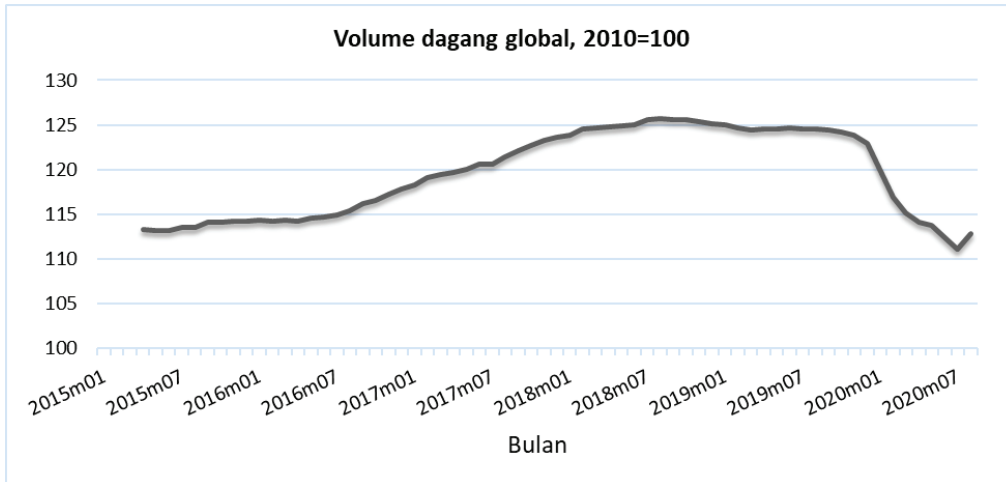


Gambar 4.6.2. Pertumbuhan Devisa Impor dan Ekspor

Sumber: diolah dari data DJBC

Jika membandingkan pertumbuhan devisa impor dan ekspor melalui PLB dengan tanpa PLB, pertumbuhan devisa impor melalui PLB dari tahun 2017 – 2019 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan devisa impor tanpa melalui PLB (lihat Gambar 4.6.2). Sementara itu,

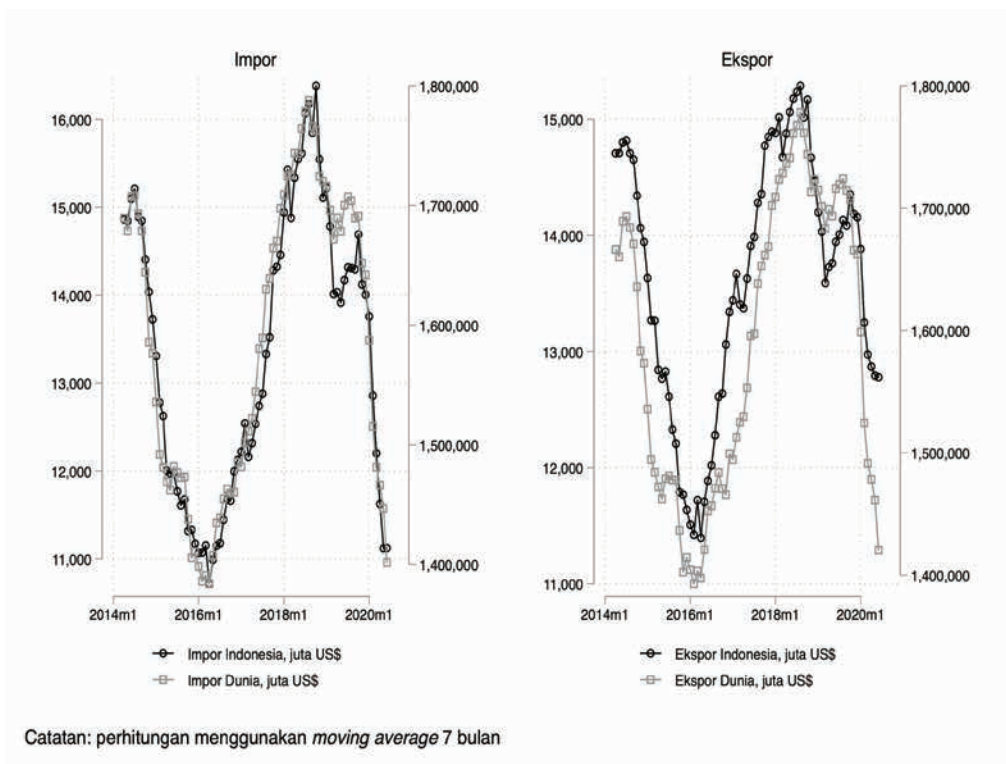
pertumbuhan devisa ekspor melalui PLB juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan devisa ekspor tanpa PLB pada tahun 2018, tetapi pertumbuhan tersebut menjadi negatif pada tahun 2019 seiring perlambatan tren perdagangan internasional (lihat Gambar 4.6.3).



Gambar 4.6.3. Volume Dagang Global

Turunnya tren perdagangan internasional juga berdampak kepada perdagangan Indonesia karena impor dan ekspor Indonesia dan dunia cukup terintegrasi. (lihat Gambar 4.6.4). Faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan global juga akan memengaruhi perdagangan

Indonesia. Isu perang dagang AS dan Tiongkok sejak 2019 adalah salah satu penjelaras utama turunnya impor dan ekspor Indonesia secara umum dan yang melalui PLB secara khusus.



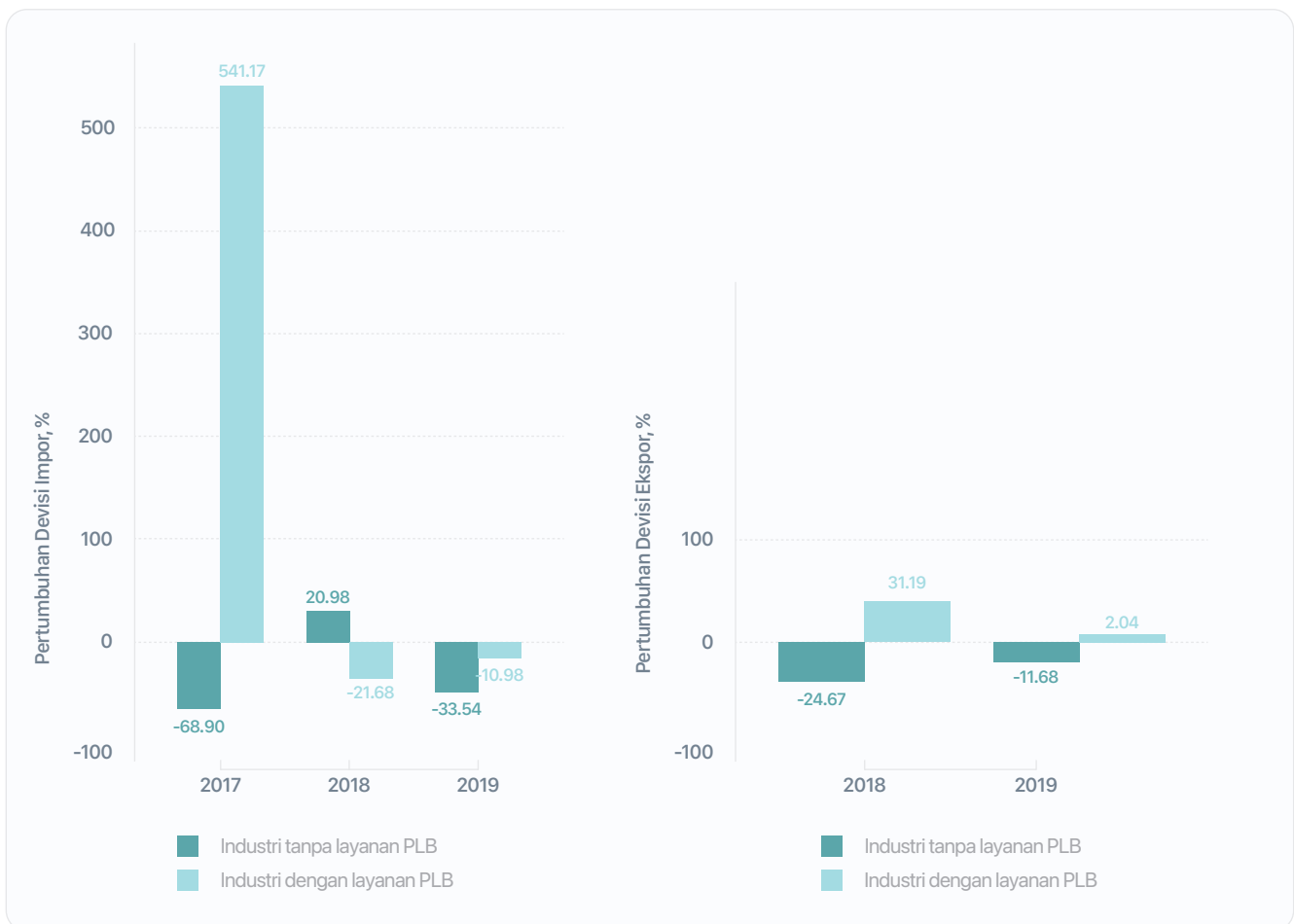
Catatan: perhitungan menggunakan *moving average* 7 bulan

Gambar 4.6.4. Perbandingan Ekspor-Impor Indonesia dengan Dunia

Sumber: diolah dari BPS dan CEIC

Penelitian ini juga melihat dampak PLB pada arus barang keluar masuk per industri dengan membandingkan pertumbuhan devisa impor dan ekspor industri yang memanfaatkan PLB dengan yang tidak memanfaatkan PLB. Hasilnya, pertumbuhan devisa impor industri yang mendapatkan layanan PLB hanya terjadi di tahun pertama PLB berdiri atau tahun 2017 (lihat Gambar 4.6.5). Pada tahun 2017 tersebut, pertumbuhannya dapat

mencapai lebih dari 100%. Pada tahun selanjutnya pertumbuhan devisa impor industri menurun bahkan bernilai negatif. Sementara itu, pertumbuhan devisa ekspor industri yang mendapatkan layanan PLB lebih tinggi dibandingkan industri yang tidak mendapatkan layanan PLB, meskipun juga mengalami perlambatan, salah satunya dikarenakan perlambatan tren perdagangan global.

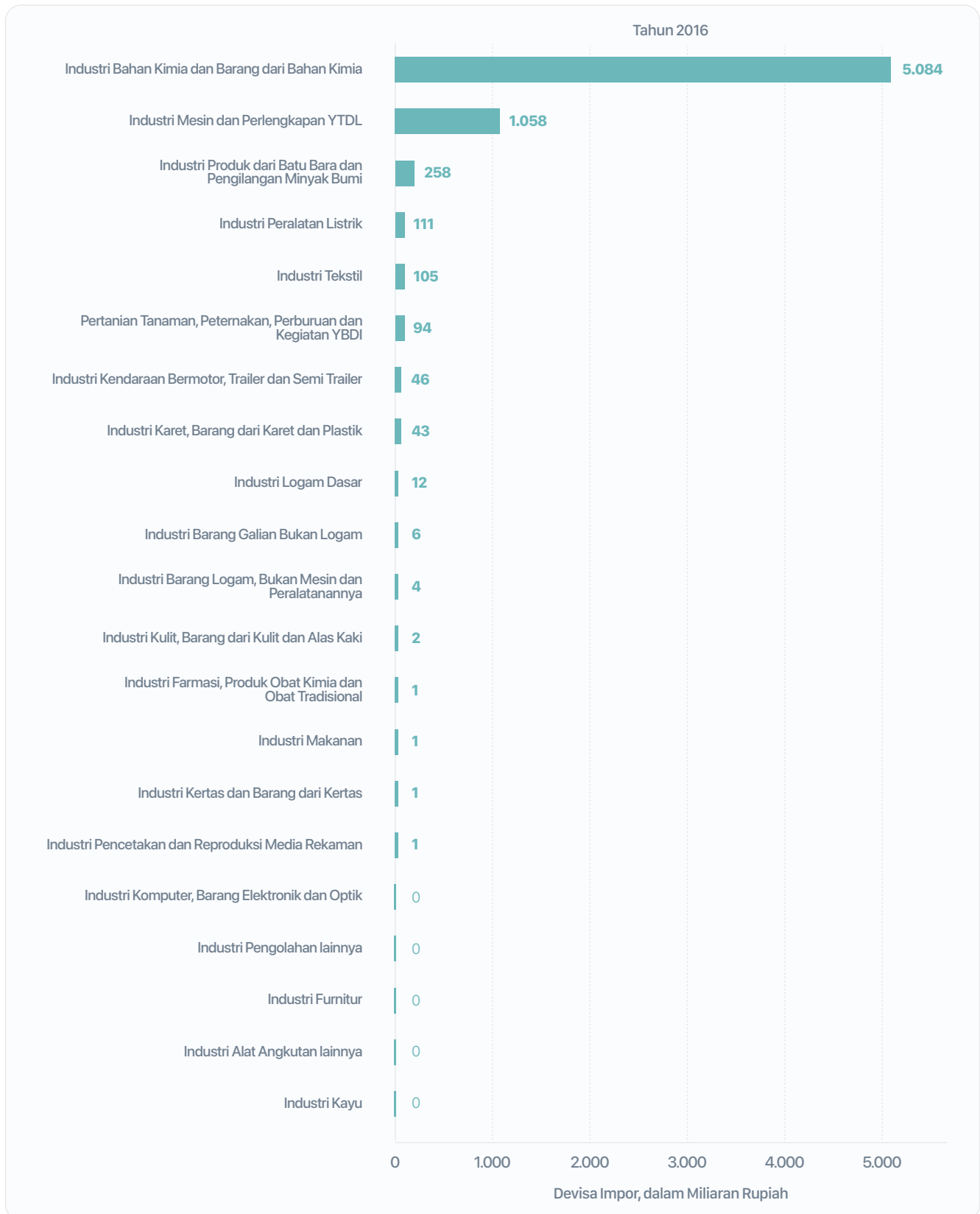


Gambar 4.6.5. Pertumbuhan Devisa Impor dan Ekspor Industri

Sumber: diolah dari data DJBC

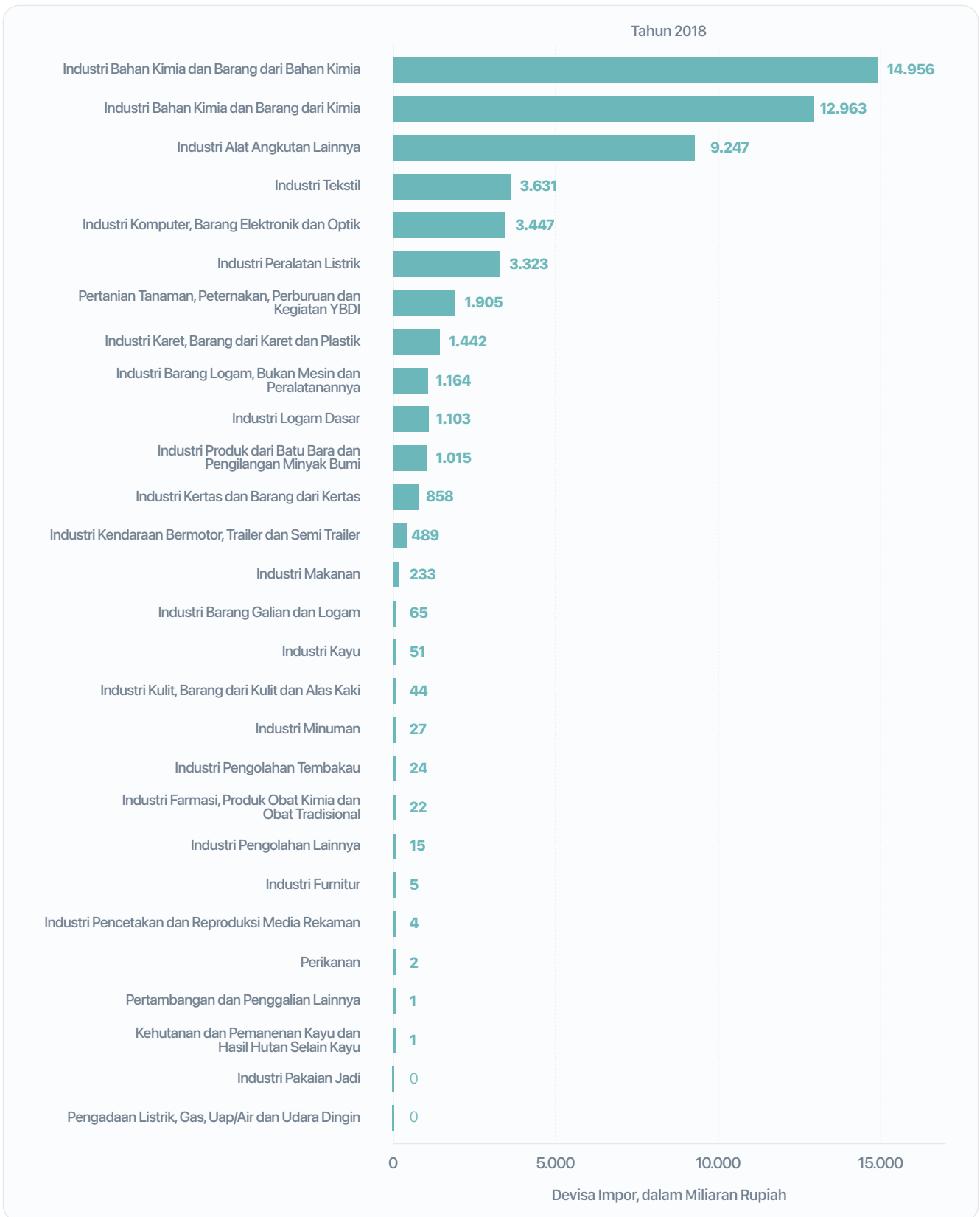
Jika dilihat per industri, industri bahan kimia dan industri mesin menduduki peringkat dua teratas sebagai industri dengan nilai devisa impor tertinggi pada tahun 2016 (lihat Gambar 4.6.6). Peringkat tersebut tidak banyak

berubah pada tahun-tahun berikutnya, dimana industri mesin, industri bahan kimia, dan industri alat angkutan adalah tiga besar industri dengan devisa impor terbesar melalui PLB pada tahun 2018 (lihat Gambar 4.6.7).



Gambar 4.6.6. Devisa Impor per Industri, 2016

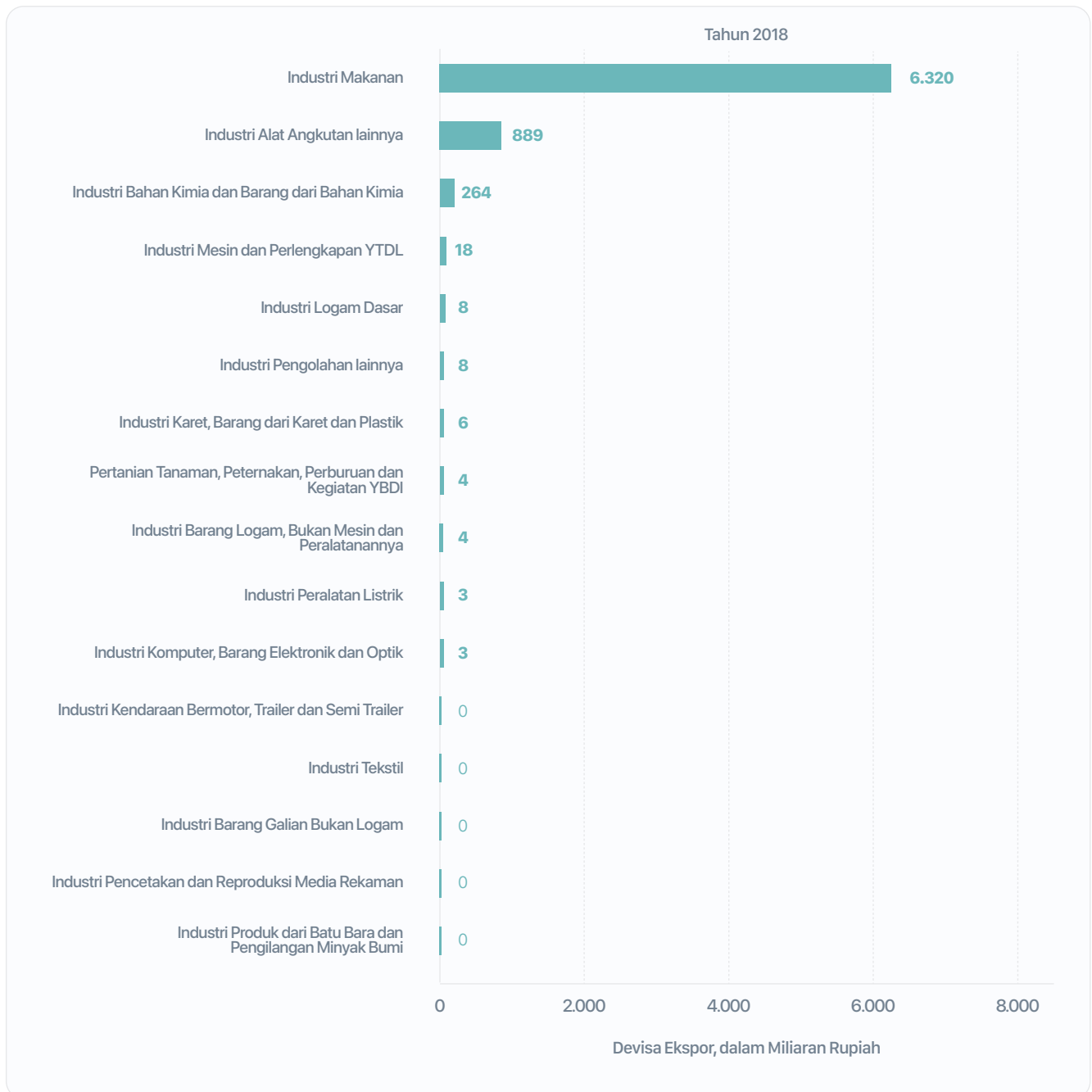
Sumber: diolah dari data DJBC



Gambar 4.6.7. Devisa Impor per Industri, 2018

Sumber: diolah dari data DJBC

Sedangkan untuk devisa ekspor, industri makanan, industri alat angkutan, serta industri bahan kimia dan turunannya adalah tiga besar industri dengan devisa ekspor melalui PLB tertinggi di tahun 2018 (lihat Gambar 4.6.8).



Gambar 4.6.8. Devisa Ekspor per Industri, 2018

Sumber: diolah dari data DJBC

► Dampak PLB terhadap Perekonomian Regional

1. Tanpa Kawasan Industri

Estimasi dampak PLB terhadap perekonomian regional ditunjukkan pada Tabel 4.71. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kabupaten dengan PLB memiliki pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi sebesar 2.7 – 3.1 poin

persentase dibandingkan dengan kabupaten tanpa PLB. Sebagai catatan, hasil di atas menjelaskan dampak di antara kabupaten dengan PLB, bukan kabupaten yang industrinya menggunakan layanan PLB.

Tabel 4.71. Hasil Estimasi Dampak PLB terhadap Perekonomian Regional

Dependen: Pertumbuhan PDRB per Kapita	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
1 jika terdapat PLB atau PDLB	-0.00818 (0.0127)	-0.00652 (0.0154)	0.0671*** (0.00536)	0.0583*** (0.00752)	0.0723*** (0.0101)
1 jika PLB/PDLB beroperasi	0.00370 (0.00705)	0.00269 (0.00737)	0.00509 (0.00744)	0.0271* (0.0155)	0.0310* (0.0181)
Lag pertumbuhan PDRB					-0.287*** (0.0155)
<i>Observations</i>	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020
<i>Adj. R-sq</i>	0.0670	0.0706	0.139	0.149	0.149
<i>F-stats</i>	2.365	4.731	.	.	.
<i>Covariates</i>	Y	Y	Y	Y	Y
<i>Province F.E.</i>	N	Y	Y	Y	Y
<i>District F.E.</i>	N	N	Y	Y	Y
<i>Year F.E.</i>	N	N	N	Y	Y
<i>Standard errors</i>	Cluster	Cluster	Cluster	Cluster	Cluster

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi di tingkat 10%, 5%, dan 1%. Estimasi *standard errors* menggunakan metode *cluster-robust* di tingkat kabupaten. Variabel kontrol meliputi pertumbuhan dana alokasi umum (DAU), pertumbuhan dana bagi hasil (DBH), pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK), pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan populasi, indikator *landlocked*, serta PDRB di tahun 2010.

2. Dengan Kawasan Industri

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi dampak PLB terhadap perekonomian kabupaten yang industrinya memanfaatkan PLB. Akan tetapi, dampak tersebut dapat diestimasi dengan menambahkan data kabupaten dengan Kawasan Industri (KI) karena sektor yang memanfaatkan PLB adalah sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan hasil analisis

sebelumnya dengan menambahkan data kabupaten dengan KI. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kabupaten dengan PLB dan KI memiliki pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi sebesar 3.3 poin persentase dibandingkan kabupaten tanpa PLB dan KI (lihat Tabel 4.7.2). Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil estimasi tanpa Kawasan Industri.

Tabel 4.7.2. Estimasi Dampak PLB, PDLB, dan/atau Kawasan Industri terhadap Perekonomian Regional

Dependen: Pertumbuhan PDRB per Kapita	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
1 jika terdapat PLB, PDLB, atau KI	-0.0105 (0.0129)	-0.0179 (0.0173)	0.0779*** (0.0115)	0.0664*** (0.0136)	0.0667*** (0.0188)
1 jika PLB/PDLB & KI beroperasi	0.00626 (0.00627)	0.00706 (0.00697)	0.00333 (0.00594)	0.0268 (0.0168)	0.0337* (0.0191)
L.pertumbuhan PDRB					-0.287*** (0.0462)
<i>Observations</i>	4020	4020	4020	4020	3526
<i>Adj. R-sq</i>	0.0676	0.0717	0.139	0.149	0.213
<i>F-stats</i>	2.083	3.509	.	.	.
<i>Covariates</i>	Y	Y	Y	Y	Y
<i>Province F.E.</i>	N	Y	Y	Y	Y
<i>District F.E.</i>	N	N	Y	Y	Y
<i>Year F.E.</i>	N	N	N	Y	Y
<i>Standard errors</i>	Cluster	Cluster	Cluster	Cluster	Cluster

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi di tingkat 10%, 5%, dan 1%. Estimasi *standard errors* menggunakan metode *cluster-robust* di tingkat kabupaten. Variabel kontrol meliputi pertumbuhan dana alokasi umum (DAU), pertumbuhan dana bagi hasil (DBH), pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK), pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan populasi, indikator *landlocked*, serta PDRB di tahun 2010.

3. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Studi Literatur

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh banyak pihak, diantaranya penelitian Hurdan Park (2012). Hur dan Park (2012) mengevaluasi dampak *Free Trade Agreement* (FTA) di 88 negara antara 1971 dan 2003. Penelitian tersebut tidak menemukan dampak signifikan dari FTA pada 10 tahun pertama peluncuran FTA. Akan tetapi, penelitian ini menemukan heterogenitas dampak antara negara yang menerapkan FTA. Terdapat negara dalam FTA yang menikmati dampak positif FTA, terdapat juga negara yang menerima dampak negatif FTA.

Studi lainnya yang meneliti dampak kebijakan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penelitian Manwa, Wijeweera, dan Kortt (2019). Manwa, Wijeweera, dan Kortt (2019) mengevaluasi dampak dari Southern African Customs Union (SACU) antara tahun 1980 dan 2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan seperti tarif dan nilai

tukar efektif tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, rasio perdagangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi Manwa, Wijeweera, dan Kortt (2019) sejalan dengan studi yang dilakukan oleh World Economic Forum, Bain & Company, dan Bank Dunia (2013). Studi tersebut menunjukkan bahwa mengurangi hambatan rantai pasokan dalam perdagangan dapat meningkatkan PDB global sekitar 5% dan perdagangan sekitar 15%. Dampak pengurangan hambatan rantai pasokan tersebut lebih besar dibandingkan dampak penghapusan tarif yang hanya dapat meningkatkan PDB global sebesar 0,7% dan ekspor sekitar 10%. Kedua studi tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa mengurangi hambatan rantai pasokan, seperti membangun PLB, berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

4. Dampak PLB terhadap Pertumbuhan Jangka Panjang

Hasil estimasi dampak PLB terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang yaitu tahun 2010 sampai 2018 ditunjukkan pada Tabel 4.7.3. Pada model 1 Tabel 4.7.3, peneliti membandingkan kabupaten dengan dan tanpa PLB. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kabupaten dengan PLB memiliki pertumbuhan jangka panjang lebih tinggi sebesar 14.2 poin persentase dibandingkan kabupaten tanpa PLB, atau setara 1.5 poin persentase per tahun.

Seperti pada hasil analisis sebelumnya, peneliti mengestimasi dampak PLB terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yang industrinya memanfaatkan PLB dengan menambahkan data kabupaten dengan

Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karena itu, pada model 2 Tabel 4.7.3, peneliti membandingkan kabupaten dengan dan tanpa PLB, Kawasan Industri (KI), atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hasil estimasi menunjukkan bahwa kabupaten dengan PLB, KI, dan KEK memiliki pertumbuhan jangka panjang lebih tinggi sebesar 15.9 poin persentase dibandingkan kabupaten tanpa PLB, KI, atau KEK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kabupaten dengan PLB memiliki pertumbuhan jangka panjang lebih tinggi sebesar 14.2 – 15.9 poin persentase dibandingkan kabupaten tanpa PLB.

Tabel 4.7.3. Estimasi Dampak PLB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

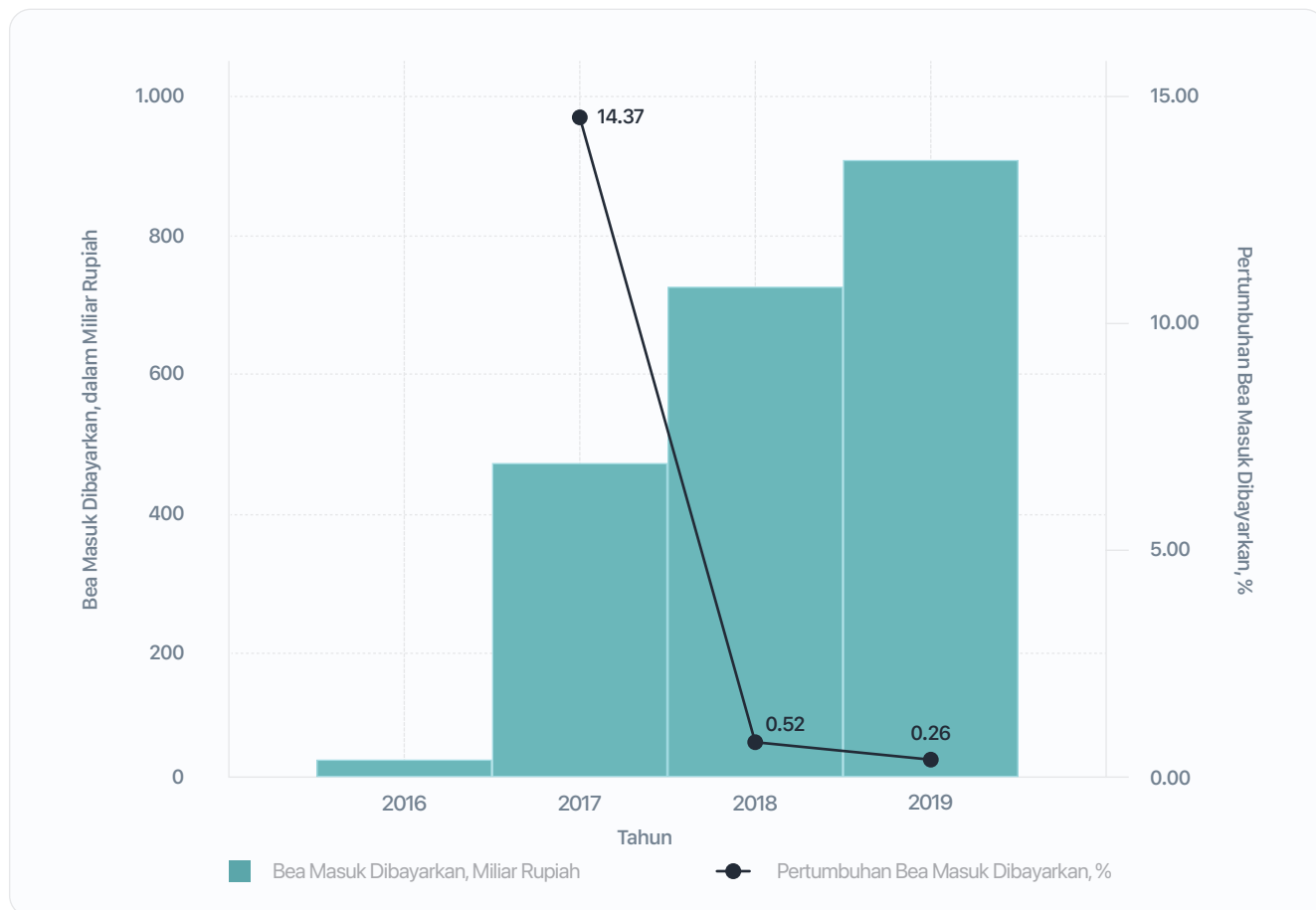
Dependen: Pertumbuhan ekonomi 2010-2018	Model 1	Model 2
1 jika terdapat PLB atau PDLB	0.142*** (0.0535)	
1 jika terdapat PLB, PDLB, KI, atau KEK		0.159*** (0.0437)
<i>Observations</i>	462	462
<i>Adj. R-sq</i>	0.375	0.396
<i>F-stats</i>	12.51	15.53
<i>Covariates</i>	Y	Y

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi di tingkat 10%, 5%, dan 1%. Estimasi *standard errors* menggunakan metode *cluster-robust* di tingkat kabupaten. Variabel kontrol meliputi pertumbuhan dana alokasi umum (DAU), pertumbuhan dana bagi hasil (DBH), pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK), pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan populasi, indikator *landlocked*, serta PDRB di tahun 2010

► Dampak PLB terhadap Fiskal

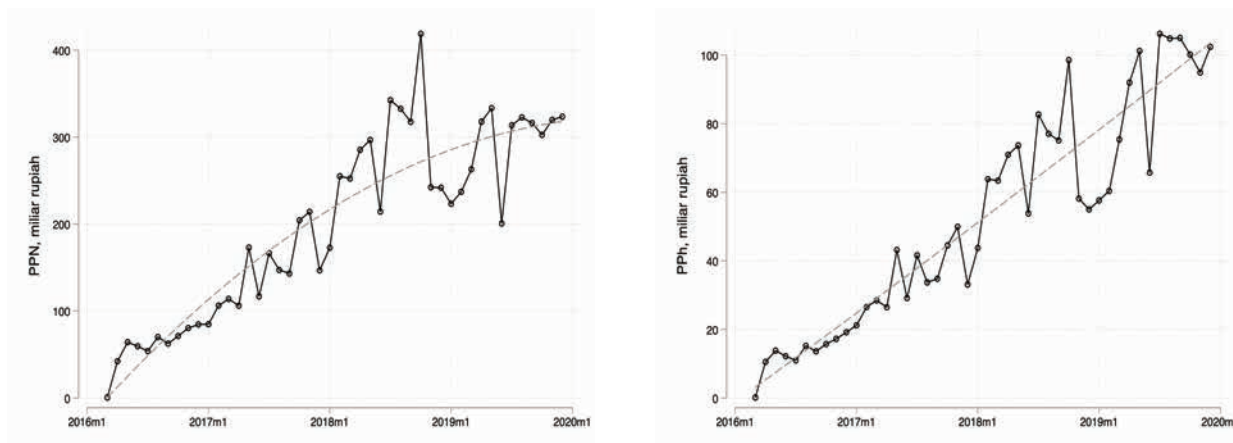
Dampak PLB terhadap fiskal dapat dilihat pada penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRi) yaitu bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPH). Penerimaan negara dari bea masuk yang dibayarkan mengalami tren positif dari tahun 2016 sampai 2019 (lihat Gambar 4.8.1). Penerimaan negara dari

PPN dan PPh yang dibayarkan dari arus barang keluar PLB juga mengalami tren positif (lihat Gambar 4.8.2). Namun demikian, tingkat pertumbuhan bea masuk yang dibayarkan tersebut melambat sejak 2018. Perlambatan ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perang dagang AS dan Tiongkok sejak 2018.



Gambar 4.8.1. Tren Penerimaan Bea Masuk dari Arus Keluar Barang PLB

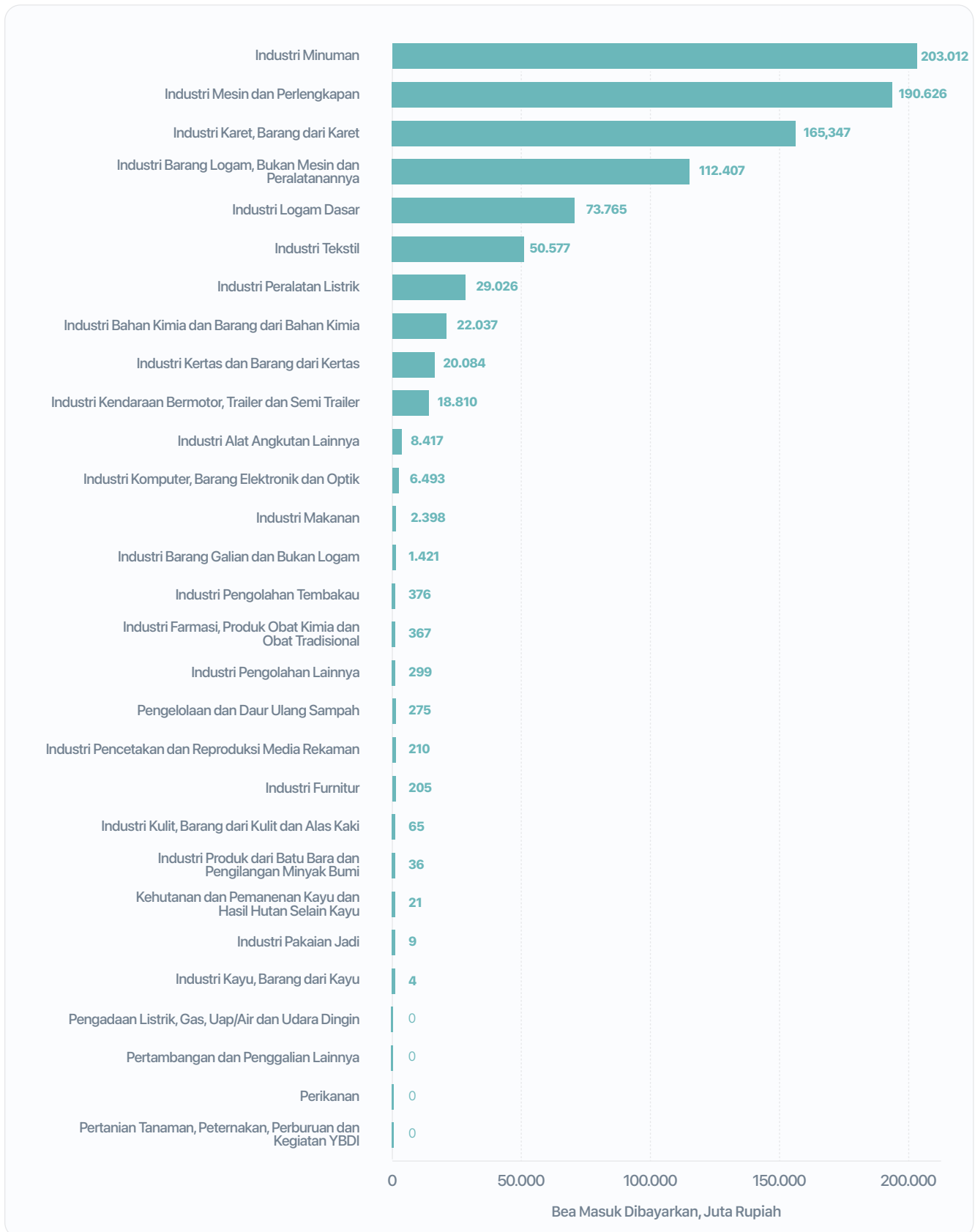
Sumber: diolah dari data DJBC



Gambar 4.8.2. Tren Penerimaan PPN dan PPh dari Arus Keluar Barang PLB

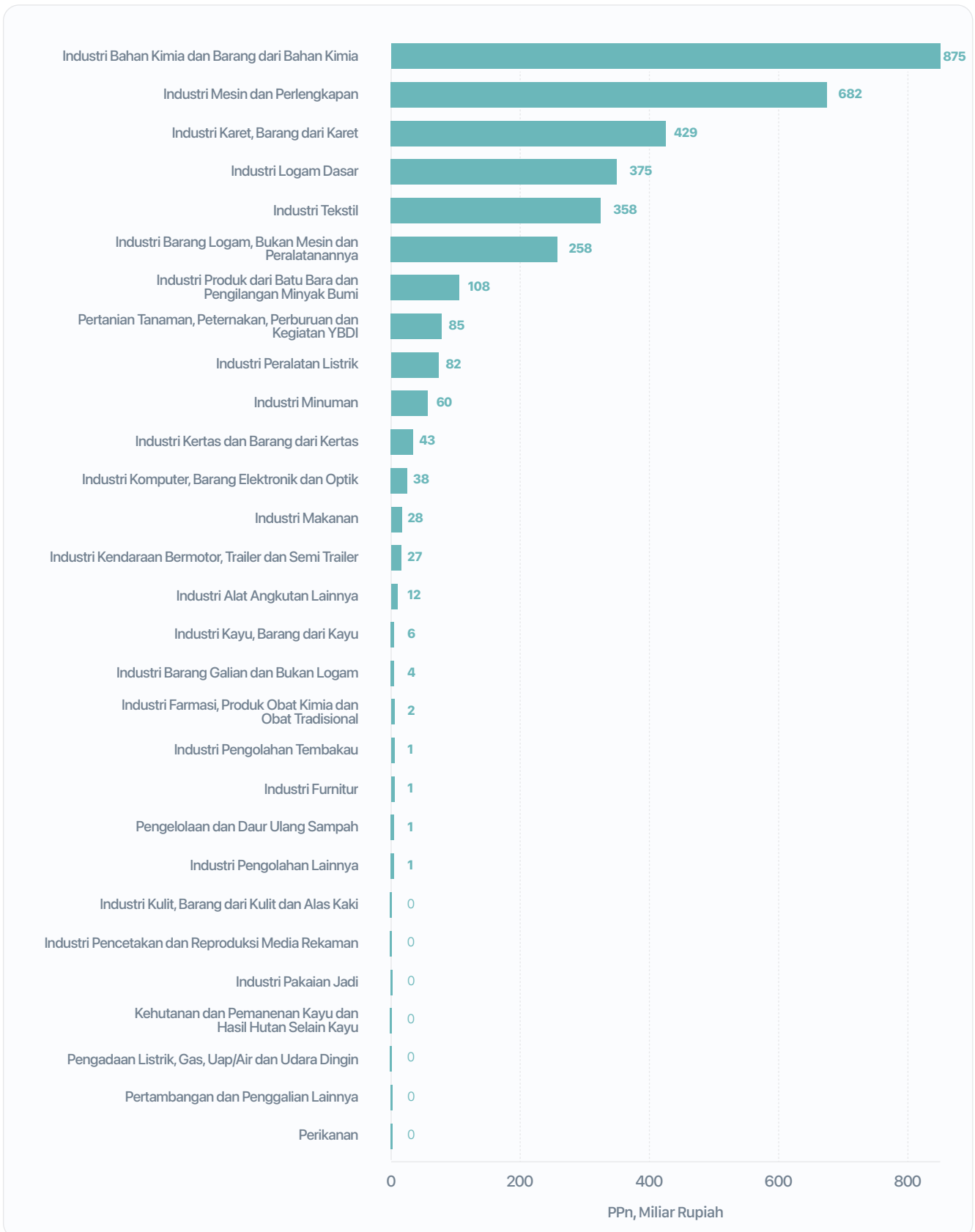
Sumber: diolah dari data DJBC

Industri dengan bea masuk tertinggi adalah industri minuman, mesin dan perlengkapan, serta karet dan turunannya (lihat Gambar 4.8.3). Industri dengan PPH dan PPN tertinggi adalah industri bahan kimia, karet dan turunannya, serta industri mesin dan perlengkapan (lihat Gambar 4.8.4)



Gambar 4.8.3. Penerimaan Bea Masuk Per Industri

Sumber: diolah dari data DJBC

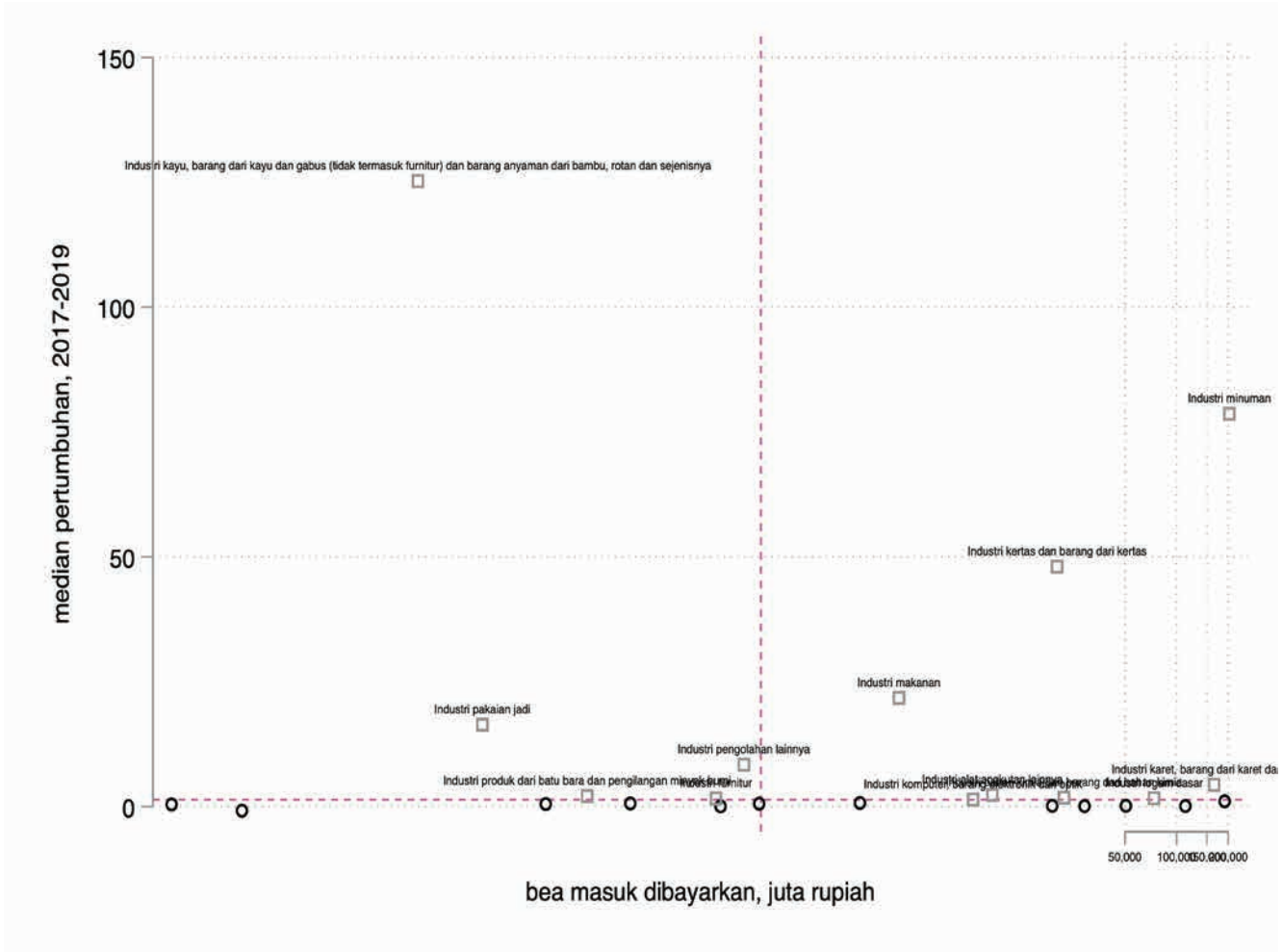


Gambar 4.8.4. Penerimaan PPN Per Industri

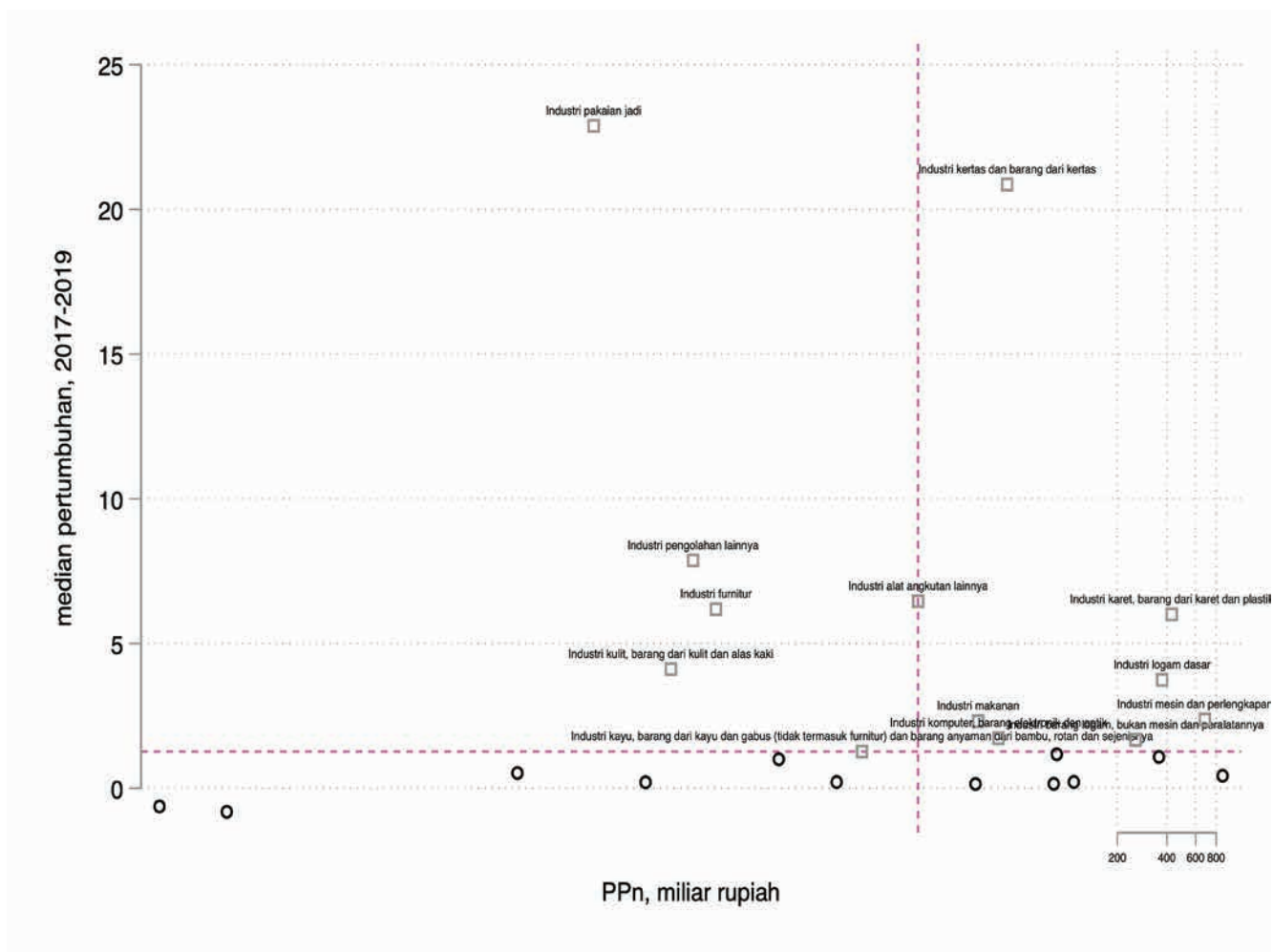
Sumber: diolah dari data DJBC

Industri yang membayarkan bea masuk dan yang memiliki tingkat pertumbuhan bea masuk relatif tinggi antara lain industri minuman dan makanan, kertas, karet, komputer dan elektronik, alat angkutan lain, dan bahan kimia dasar (lihat Gambar 4.8.5).

Sedangkan industri yang membayarkan PPN dan memiliki tingkat pertumbuhan PPN relatif tinggi antara lain industri makanan, karet, mesin, komputer dan elektronik, dan logam dasar (lihat Gambar 4.8.6).




Gambar 4.8.5. Matriks Pertumbuhan dan Penerimaan Bea Masuk
 Sumber: diolah dari data DJBC



Gambar 4.8.6. Matriks Pertumbuhan dan Penerimaan PPN

Sumber: diolah dari data DJBC



SHOWCASE INDUSTRI MANUFAKTUR & PERTAMBANGAN MIGAS

Showcase ini disusun berdasarkan data penelitian dan berbagai sumber pendukung lainnya. Industri manufaktur dan pertambangan migas dipilih karena beberapa alasan. Pertama, salah satu tujuan utama PLB adalah membantu mempermudah proses bisnis industri manufaktur dengan mempermudah akses serta mendekatkan bahan baku dan bahan penolong yang mendukung kegiatan operasional industri tersebut. Kedua, tingkat keterwakilan sampel untuk industri ini cukup besar. Ditambah lagi, kinerja industri manufaktur juga terbukti lebih baik jika dibandingkan dengan industri lainnya. Sementara itu, industri pertambangan minyak dan gas dipilih untuk merepresentasikan kasus di luar industri manufaktur. Menurut PPLBI, industri pertambangan minyak dan gas juga termasuk ke dalam industri yang berkontribusi cukup signifikan terhadap keberlangsungan PLB dan nilai transaksi keluar-masuk melalui sebagian PLB di Indonesia.

Berdasarkan hasil FGD, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran PLB sebagai program yang membantu rantai pasokan Indonesia memberikan dampak positif baik untuk operator dan klien di industri manufaktur.

Sebagai contoh, UKM dan IKM industri manufaktur (tekstil) merasakan manfaat yang diberikan PLB dengan adanya penurunan biaya demurrage dan pengemasan. Dibanding kawasan berikat dan melalui importasi, PLB bisa mengurangi biaya kelebihan waktu pengemasan hingga 20-30%. Berikut beberapa kutipan hasil FGD dengan klien PLB terkait dengan tema tersebut:

"Nah itulah yang benefit manfaat yang sudah bisa dirasakan, disamping itu juga bisa menekan costnya juga hampir kurang lebih 20-30% ya yang kami sempat juga diskusikan kepada para IKM, karena memang salah satunya itu di demurrage, salah satunya bisa mengurangi biaya."

(Narasumber PLB 9)

"Kita menggunakan importasinya melalui PLB. Jadi para UKM yang ada di... para IKM yang ada di Bali ya cukup lah juga bisa menikmati mungkin salah satu dari sisi penurunan biaya tidak kena demurrage salah satunya."

(Narasumber PLB 9)

Dengan adanya PLB, perusahaan-perusahaan manufaktur pengguna PLB juga terbantu dengan sistem manajemen sediaan yang lebih baik. PLB membawa sistem pengelolaan sediaan yang tidak diberikan oleh tempat berikat lainnya, seperti *IT Inventory*, penggunaan CCTV, dan E-Seal. Sistem ini bisa memberikan peningkatan pengawasan antara regulator, yaitu Dirjen Bea dan Cukai serta operator PLB. Aktivitas operasi PLB pun jadi lebih transparan dan terbuka sehingga mengurangi adanya barang ilegal yang masuk. Klien PLB bahkan mengakui bisa mengurangkan biaya sediaan hingga 2%-5% dengan menggunakan PLB. Teknologi pengelolaan persediaan juga memberikan manfaat dengan menekan biaya *tracking* dan *tracing*. Berikut beberapa kutipan hasil FGD dengan Klien PLB terkait dengan tema tersebut:

"Fungsi pengawasan dan sarana pengawasan di PLB itu cukup lengkap. CCTV kemudian juga kami masing-masing saya yakin memiliki mekanisme kontrol dan SOP sendiri-sendiri bagaimana mengamankan kami sebagai PLB atas barang masuk supaya agar tidak terjadi permasalahan."
(Narasumber Klien 1)

"Apakah ada improvementnya saya harus sampaikan untuk cost logistic cost, pelayanan, emm tracking tracing ya, emm sistem improvement atau sistem support itu itu kita harus akui ada benar kan gitu"
(Narasumber Klien 1)

"Pak hehe gitu import duty kan kalau untuk produk kami itu lima persen Pak ininya apa namanya import duty nya terus kemudian dengan adanya sistem manajemen apa inventory yang lebih bagus secara overall itu bisa me-reduce sekitar ya tadi itu sekitar dua sampai lima persen lah ya kalau di apa namanya di bisnis secara umum."
(Narasumber Klien 2)

Operator PLB dan klien PLB di industri manufaktur masing-masing mengakui adanya penurunan *dwelling time*. Waktu yang dibutuhkan sampai penarikan barang dari Pelabuhan ke PLB jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Fasilitas PLB barang jadi akan membantu pemilik barang untuk menekan biaya-biaya logistik. Dampak penurunan ini bisa menghemat *storage cost* dan biaya karantina yang langsung berada dilakukan di lokasi PLB. Berikut beberapa kutipan hasil FGD mengenai efisiensi *dwelling time* dengan menggunakan PLB:

"Dan ternyata ada dampak lainnya juga dalam hal efisiensi biaya karena objektif dari PLB itu adalah dwelling time. Kalau dulu kan rame masalah dwelling time di pelabuhan pak. Jadi kita melihat di pelabuhan itu kan per chargenya progresif pak gitu ya, di lini satu segala macam."
(Narasumber PLB 6)

"Kalau dwelling time kami sangat confident itu sudah terjadi untuk pengguna PLB. Pada hari yg sama kita bisa keluarkan barang dari pelabuhan jadi nanti ditimbun di PLB dan ada indikatornya."
(Narasumber Klien 1)

"Oh iya pak, kalau dari segi storagenya lebih murah pak, karena di Tanjung Priok itu kan hari pertama itu 4500 per container pak hari keduanya itu naik 100% kalau hari ketiganya itu sampai 900% pak. Iya storage cost sama biaya karantina pak, karena kalau sekarang kan karantinanya langsung di PLB."
(Narasumber Klien 1)

Fleksibilitas penimbunan barang memberikan keunggulan biaya. Klien baik di industri manufaktur dan industri minyak dan gas mengakui bahwa melalui penimbunan barang sampai 3 tahun memberikan fleksibilitas barang-barang industri. Klien industri manufaktur mendapatkan efisiensi di bagian rantai produksi terutama yang memiliki turnover bahan baku tinggi. Bagi klien industri migas, skema *re-export* memiliki komponen biaya yang mahal terutama pada kegiatan *drilling* dan *rig*. Hasil *rig* yang sudah selesai jadi tidak perlu di *re-export* ke luar negeri bisa disimpan di PLB. Secara logistik, hal ini memotong biaya besar dan pendapatan bisa lebih tinggi karena adanya efisiensi. Pengakuan klien PLB bisa memberikan keunggulan kompetitif di sisi produksi dibandingkan dengan negara lain. Berikut beberapa kutipan hasil FGD mengenai fleksibilitas penimbunan barang dengan menggunakan PLB:

"Semenjak adanya PLB nya ini, kita lebih cepat sih Pak dan bisa langsung proses mixing Pak kan kalau belum ada PLB itu semua kapas di kontainer dan masih di pelabuhan."
(Narasumber Klien 2)

"Kalau competitiveness pasti Pak karena kan otomatis dengan PLB ini biaya masuknya kan kita diini ya Pak ya menjadi ditanggihkan gitu Pak ya"

kecuali kita jual ke lokal nanti kita melalui BC 2.5 kena atau BC 2.8 emm apa namanya competitive pasti karena dari segi biaya masuk"

(Narasumber Klien 1)

"Banyak barang yang perlu dibawa keluar negeri jadi bisa kita simpan dulu ke PLB untuk menutup masterlistnya dan yang paling utama saat itu kegiatan drilling kan rignya besar dan mahal, setiap selesai kegiatan itu harus di re-export kalau ndak ke batam ke Singapore dan biaya logistiknya sudah besar sekali jadi berdasarkan hal tersebut kami mengajukan untuk membuka PLB perairan."

(Narasumber PLB 8)

Di sisi lain, hasil FGD menunjukkan beberapa isu terkait dengan industri manufaktur. Menurut para responden, status perpajakan badan usaha asing yang menjadi klien PLB belum mendapatkan kepastian hukum dan masih abu-abu. Pemerintah Indonesia pun tidak memberikan penegasan subjek pajak pendapatan. Hal tersebut disampaikan oleh operator PLB industri manufaktur (kimia). Bahkan, calon pengguna PLB dari luar negeri mengatakan ragu untuk menggunakan PLB karena regulasi yang belum pasti. Contoh yang diberikan adalah pada UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang belum menemui kecocokan dengan konsep PLB sebagai badan usaha. Klien dari Industri Manufaktur (Tekstil) mengatakan sosialisasi pajak ekspor masih belum maksimal walaupun saat ini sudah ada fakta kesuksesan ekspor melalui salah satu PLB di Indonesia. Berikut beberapa kutipan hasil FGD dengan operator dan klien PLB terkait dengan tema tersebut:

"Regulasi ya salah satu yang cukup emmm bukan bertentangan mungkin ya saya tidak tahu bahasa yang pas apa yaitu dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan berarti undang-undang nomor 36, 36 yang terakhir tahun 2008. Karena ada beberapa pasal terkait dengan badan usaha tetap, nah, mungkin yang perlu dipertegas adalah karena konsepnya PLB ini kan PLB tadi badan di luar pabean itu istilahnya bea cukai kan daerah pabean atau masih posisi di luar negeri."

(Narasumber PLB 7)

"Tapi ketika ke pajak, perpajakan internasional, pajak internasional bilang, "Ini bisnisnya dimana?" "Di Indonesia" "Customer X entitas mana?"

"Entitas luar" "Oh kalau gitu secara automatically saya kenakan sebagai PT ya," yang dimana ada corporate tax, segala macam. Nah mungkin nanti itu kita bisa deep dive ketika lebih spesifik. Sehingga Customer X bilang, "Wah, kalau saya udah bayar pajak di negara saya trus harus bayar pajak yang sama di Indonesia sama juga bohong dong, mendingan kembali aja ke PT X, saya gak jadi."

(Narasumber PLB 7)

"PDPLB waktu beli itu sudah PPN nya sudah 0 pada saat meluncurkan ini sudah tau bahwa pemerintah akan kalah cashflow terkait PPN tapi kan ini untuk mensupport ekspor ya pak, ekspor komoditas terutama nah yang ini kita sukses pak, di Lampung pak, di Lampung itu kita sukses, masalahnya adalah sosialisasi pak, sosialisasi terhadap eksportir terkait fasilitas PLB ini."

(Narasumber Klien 1)

Untuk menindaklanjuti temuan ini, peneliti berpartisipasi dalam FGD bersama dengan Direktorat Perpajakan Internasional pada tanggal 19 November 2020. Salah satu poin utama yang didapatkan dari FGD tersebut adalah pentingnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara-negara mitra ekspor dan impor di dunia. P3B bisa berbeda antar negara tergantung pada kebijakan perpajakan di negara yang menjalankan bisnis dengan pengusaha di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menyesuaikan dengan peraturan internasional maupun peraturan dalam negeri yang ada terkait dengan pemungutan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang berstatus badan usaha tetap di Indonesia. Direktorat Perpajakan Internasional juga menekankan bahwa perusahaan-perusahaan asing pengguna PLB yang berstatus badan usaha tetap yang merasa dirugikan karena adanya pemungutan pajak berganda dapat berkoordinasi dengan Direktorat Perpajakan Internasional untuk mendapatkan bantuan terkait proses pengajuan pengembalian pajak di negara asal. Adapun informasi lebih terperinci terkait dengan aturan perpajakan internasional serta badan usaha tetap dapat dilihat lebih lanjut dalam paparan yang disampaikan oleh Direktorat Perpajakan Internasional (dokumen akan dibagikan jika ada permintaan melalui tim peneliti atau PPLBI).

Selain regulasi pajak terhadap PLB, regulasi yang diatur oleh Badan Karantina dianggap menyulitkan klien PLB dari industri manufaktur (makanan) dalam pengurusan dokumen. Sebagai contoh, salah satu klien PLB menjelaskan bahwa lamanya penyetujuan dokumen *phytosanitary* justru menambah biaya mereka. Regulasi yang diatur oleh Kementerian Perdagangan juga berdampak bagi industri manufaktur (tekstil). Operator PLB menyebutkan adanya kerancuan mengenai jumlah volume yang boleh masuk atau tidak bahkan membuat IKM selaku klien dan PLB selaku operator bahkan merugi. IKM harus membeli bahan baku di pasar luar dengan harga yang lebih mahal akibat lamanya persetujuan impor tekstil. Berikut beberapa kutipan hasil FGD dengan operator dan klien PLB terkait dengan tema tersebut:

"Karantina, itu kan mereka butuh phytosanitarynya tetap asli pak. Nah tadi kan menyinggung namanya Afrika, ini bukan kita mengunderestimate mereka, faktanya kita sudah quotes pake template pake macam-macam buktine yo dokumennya sik kleru ae gitu kan. Begitu keliru kan otomatis revisi, revisi akhirnya dokumen aslinya telat juga datang ke kita, dokumen asli telat walaupun kita PLB, walaupun kita KB, gak bisa pak di tarik dari pelabuhan, ada extra cost."

(Narasumber Klien 1)

"Importir multi-tekstil dapat masuk PLB bila mana dijualnya ke IKM kita sudah ajukan tapi hingga saat ini tidak ada importir umum yang dikeluarkan kuota tekstilnya walaupun IKM nya sudah jelas sudah disurvei dari BC dan Perdagangan sampai sekarang ya IKM nya nganggur pak apalagi kena covid ini pak sudah banyak yang tutup"

(Narasumber PLB 3)

"Untuk IKM ini kan kasihan pak untuk tekstil kan sulit akhirnya mereka beli di pasar dan akhirnya mahal dibandingkan mereka beli langsung, memang untuk tekstil kan memang ada kasus

kasus yang merusak PLB dalam tanda petik ya, tetapi tidak bisa dipukul rata seperti itu."

(Narasumber PLB 3)

PLB sebagai sebuah program dengan penawaran insentif fiskal dan non fiskal memang menarik bagi industri manufaktur. Hanya saja, beberapa perusahaan justru ragu dan enggan menggunakan PLB karena adanya isu *trust*. Operator PLB Manufaktur menyampaikan bahwa terdapat perusahaan kapas terbesar di dunia yang menaruh barangnya di Malaysia yang sebenarnya berminat untuk menaruh barang di Indonesia melalui PLB, namun ragu untuk mengambil dan memindahkannya ke Indonesia. Keraguan perusahaan ini karena belum percayanya dengan operator PLB dan masalah resi gudang kapas yang belum diatur. Resi Gudang adalah pengakuan dari pemilik gudang bahwa jumlah barang yang disimpan sudah benar adanya dan mengakui kepemilikan atas barang tersebut. Berikut beberapa kutipan hasil FGD dengan klien PLB terkait tema tersebut:

"Kan barang masuk ke PLB itu walaupun masih ownershipnya atas nama mereka, kan consignment ya, tetapi jaminannya tu lho pak, mereka belum percaya, yang pertama satu, terhadap PLB operatornya. Yang kedua masalah aturan nih pak, kita punya resi gudang ya pak ya, tapi sayang sekali aturan resi gudang itu tidak mencakup kapas pak. Ini kan dari sisi trust juga gitu lho pak."

(Narasumber Klien 2)

"Di Indonesia ini, mereka orang asing itu pak kalau perkara di Indonesia paling enggan karena panjang dan gak pasti hasilnya. Itu yang problem pak. Walaupun kepemilikannya secara hukum adalah hasil kepemilikan mereka karena kita buat kontrak segala macam, tetapi secara legal aturannya pak resi gudang untuk kapas itu belum dicover dalam aturan permen terkait resi gudang."

(Narasumber Klien 2)

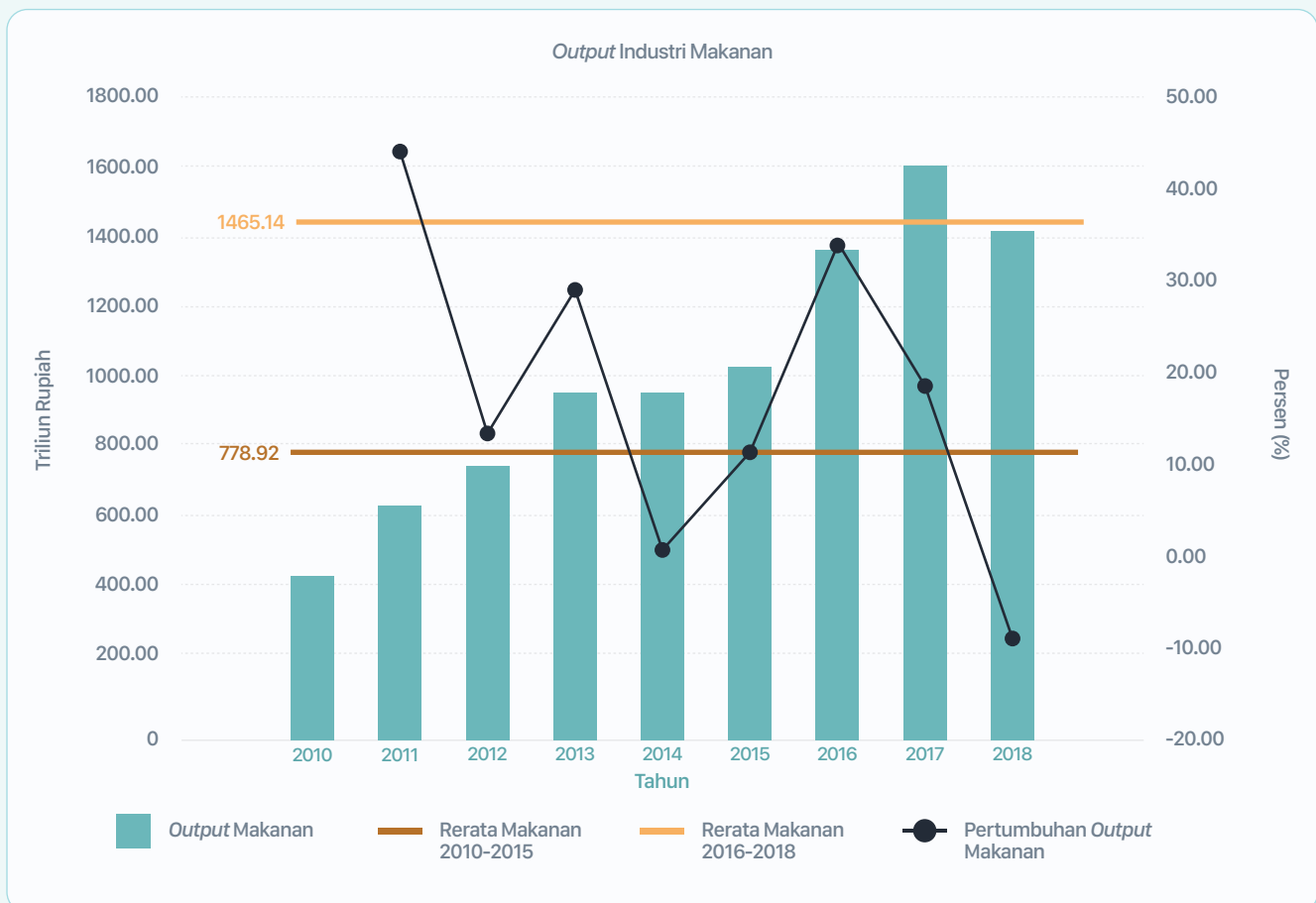
► Industri Manufaktur

1. Industri Makanan

Secara umum, berdasarkan hasil IPA, kinerja industri makanan dapat dikatakan konsisten. Berdasarkan analisis peringkat industri berdasarkan kinerja yang dinilai oleh klien (lihat Tabel 4.11), industri makanan menempati posisi 3 dari 11 industri. Sementara itu, pada analisis peringkat berdasarkan skor rata-rata IPA atas respon klien (lihat Tabel 4.12), industri makanan berada pada posisi 3 dari 11 industri. Pada analisis peringkat berdasarkan jumlah item pada kuadran matriks IPA (lihat Tabel 4.15), industri makanan menempati peringkat 2 dari 11 industri. Analisis peringkat berdasarkan jumlah respon yang *overlap* dan *missmatch* antara operator dan klien (lihat Tabel 4.16) juga menegaskan bahwa industri makanan berada pada peringkat 2 dari 11 industri. Secara umum, analisis matriks dan analisis peringkat industri makanan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PLB industri ini sudah baik, dengan melihat peringkat dari berbagai pendekatan, industri makanan cukup konsisten menempati posisi 2 dan 3 dari 11 industri sehingga dapat dikatakan bahwa PLB industri

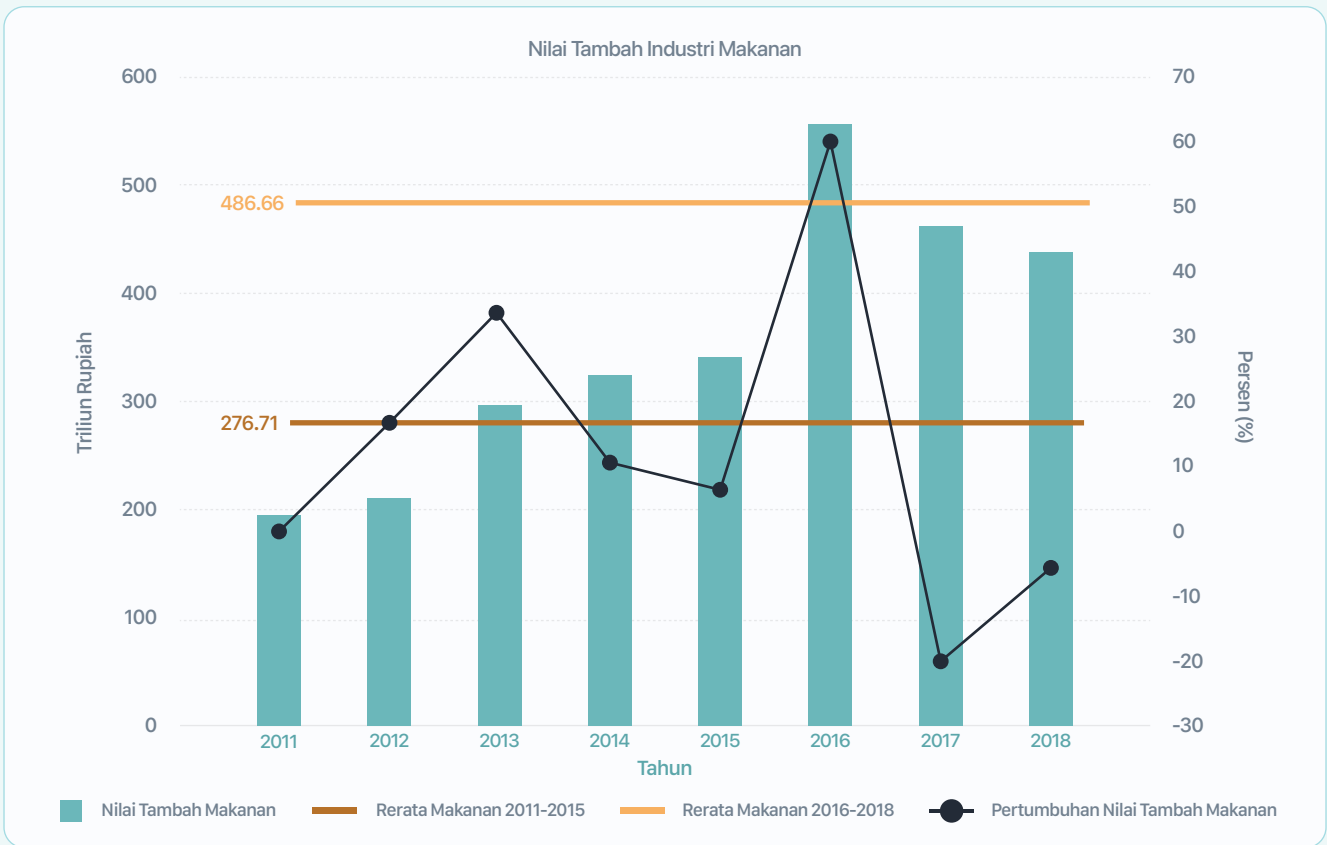
makanan sudah efektif dalam memberikan pelayanan kepada kliennya.

Sejalan dengan hasil IPA di atas, hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa kinerja industri makanan sudah cukup baik. Industri makanan mengalami peningkatan *output*, nilai tambah, dan jumlah pekerja yang cukup signifikan sejak tahun 2016. *Output* industri makanan sejak 2016 memiliki nilai rata-rata 1465.14 triliun rupiah, hampir dua kali lipat rata-rata *output* industri tahun-tahun sebelumnya yang berada di angka 778.92 triliun rupiah (lihat Gambar 4.10.1). *Output* industri makanan pada tahun 2016 memang mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 33.92%, tertinggi sejak tahun 2012. Hal tersebut sejalan dengan nilai tambah dan jumlah pekerja industri makanan yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi sejak tahun 2016 (lihat Gambar 4.10.2 dan 4.10.3). Nilai tambah industri makanan tumbuh 61,14% dan jumlah pekerja tumbuh 30,46%, tertinggi sejak 5 tahun terakhir.

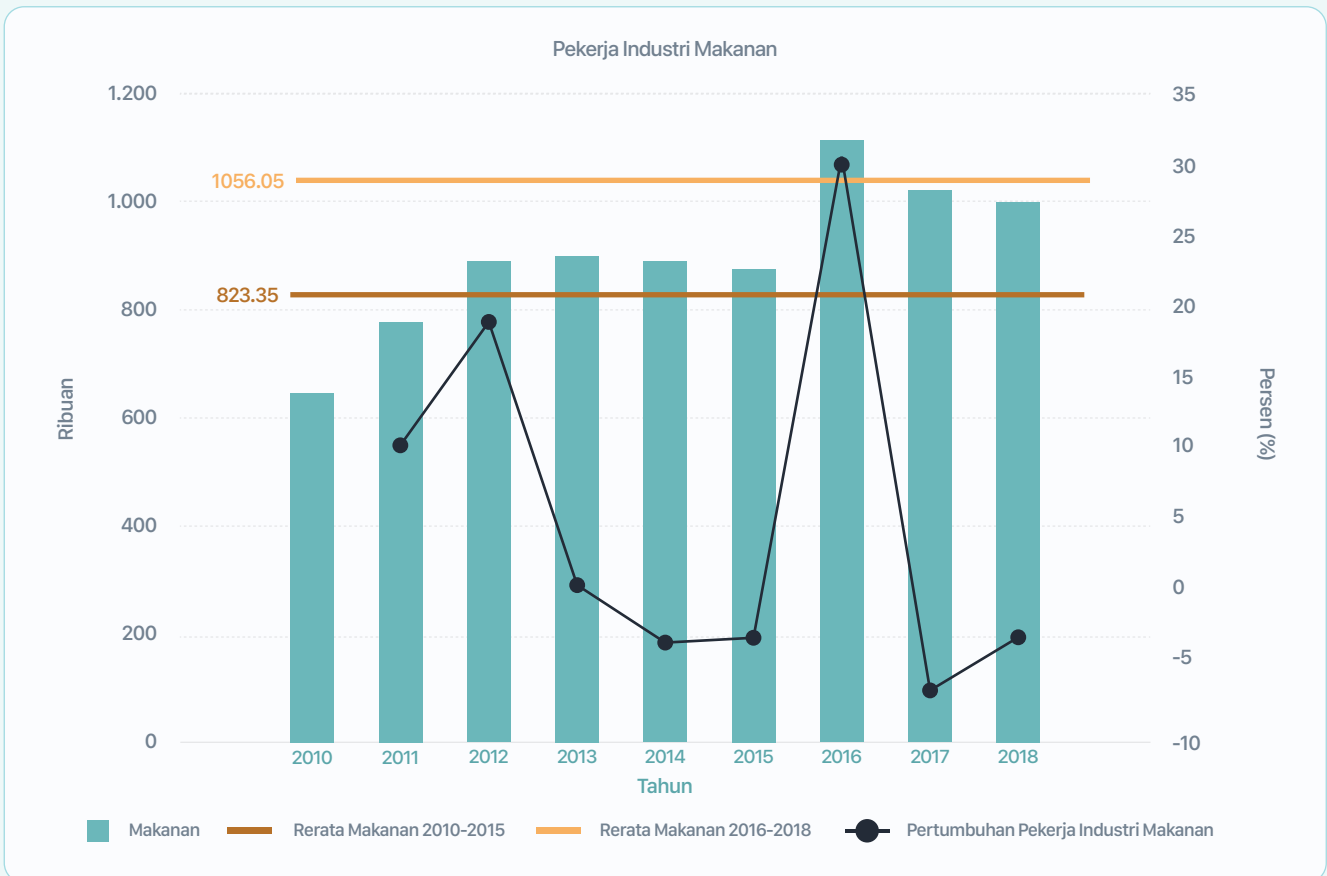


Gambar 4.10.1. Nilai dan Tingkat Pertumbuhan *Output* Industri Makanan Indonesia

Sumber: BPS



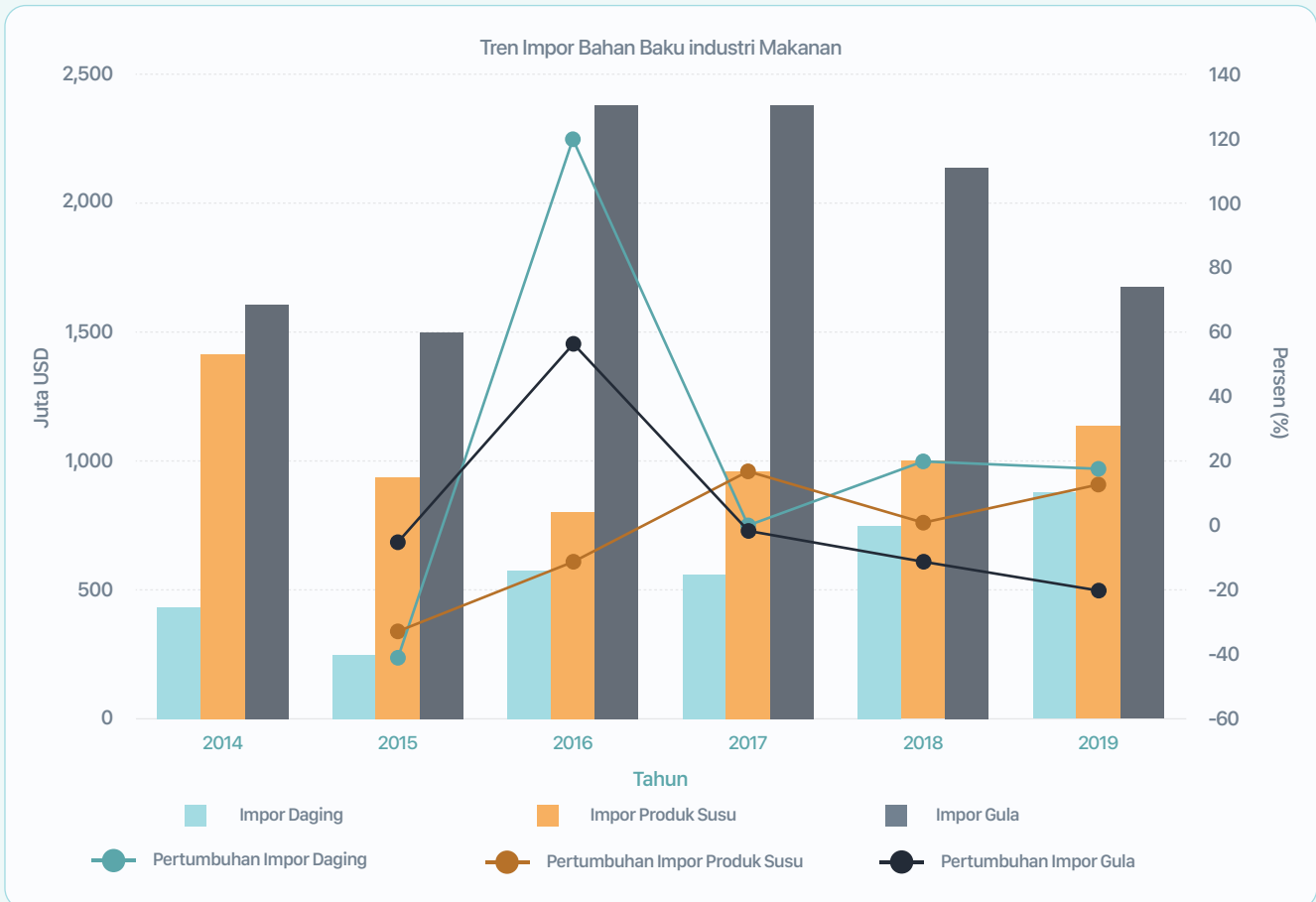
Gambar 4.10.2 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Makanan Indonesia
 Sumber: BPS



Gambar 4.10.3 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Pekerja Industri Makanan Indonesia
 Sumber: BPS

Peningkatan *output* industri makanan didorong oleh peningkatan ketersediaan bahan baku. Data impor bahan baku makanan seperti daging, susu, dan gula mengalami pertumbuhan tinggi dan positif pada 2016 (lihat Gambar 4.10.4), meskipun setelah tahun 2016 justru mengalami penurunan. PLB dapat menjadi salah satu penyebab peningkatan ketersediaan bahan baku industri makanan. Dalam industri makanan, PLB memberikan manfaat melalui pemotongan rantai pasokan dan penurunan *dwelling time*. Lokasi

penimbunan bahan baku lebih dekat dengan lokasi proses produksi dan bahan baku tersebut akan sampai dalam kondisi lebih segar dan dapat segera diproses sesampainya di tujuan (Budiaman, 2017). Menurut Kementerian Perindustrian (2016), PLB dapat mengurangi biaya logistik industri sebesar 5-7 %. Selain itu, PLB juga dapat membantu industri kecil dan menengah dalam negeri untuk berkembang lebih jauh karena PLB dapat menjual barang yang ditimbun dalam bentuk eceran (Kemenperin, 2016).



Gambar 4.10.4 Tren Impor Bahan Baku Industri Makanan

Sumber: BPS

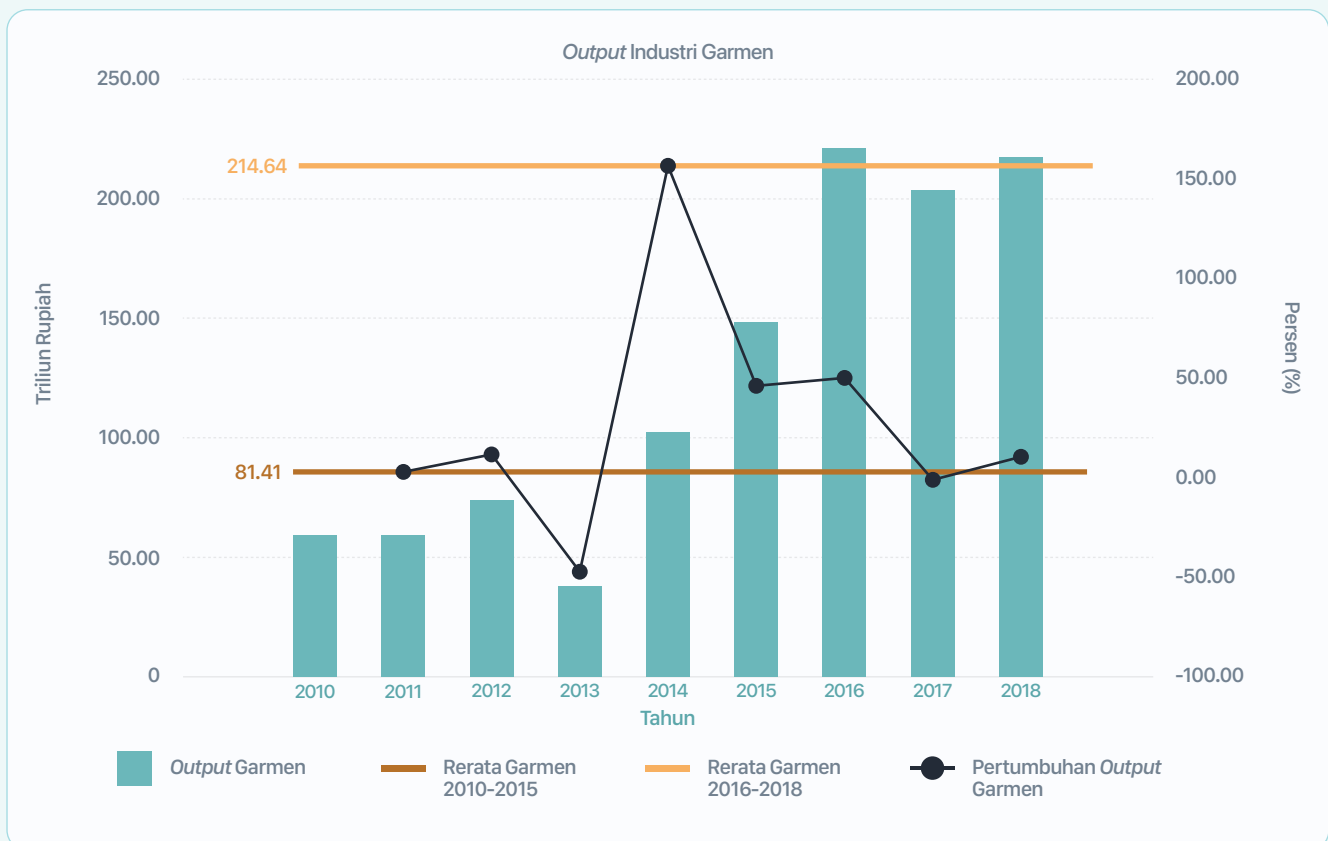
2. Industri Pakaian Jadi/Garmen

Analisis peringkat industri berdasarkan kinerja yang dinilai oleh klien (lihat Tabel 4.11), industri garmen menempati posisi ke-2 dari 11 industri. Sedangkan pada analisis peringkat berdasar skor rata-rata IPA atas respon klien (lihat Tabel 4.12), industri garmen juga berada pada posisi ke-2 dari 11 industri. Pada analisis peringkat berdasar jumlah item pada kuadran matriks IPA (lihat Tabel 4.15) industri garmen menempati peringkat 9 dari 11 industri. Kemudian berdasarkan analisis peringkat berdasarkan jumlah respon yang *overlap* dan *missmatch* antara operator dan klien (lihat Tabel 4.16) industri garmen berada pada peringkat 8 dari 11 industri.

Analisis matriks dan analisis peringkat industri garmen menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PLB industri ini sudah baik, dengan melihat peringkat berdasarkan skor kinerja dan skor rata-rata IPA industri garmen cukup konsisten menempati posisi ke-2 dari 11 industri sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja industri garmen sudah efektif dalam memberikan pelayanan kepada kliennya. Namun demikian pada peringkat berdasarkan jumlah item pada kuadran IPA dan jumlah respon *overlap missmatch*, industri garmen menempati posisi yang menurun, hal ini mengindikasikan bahwa

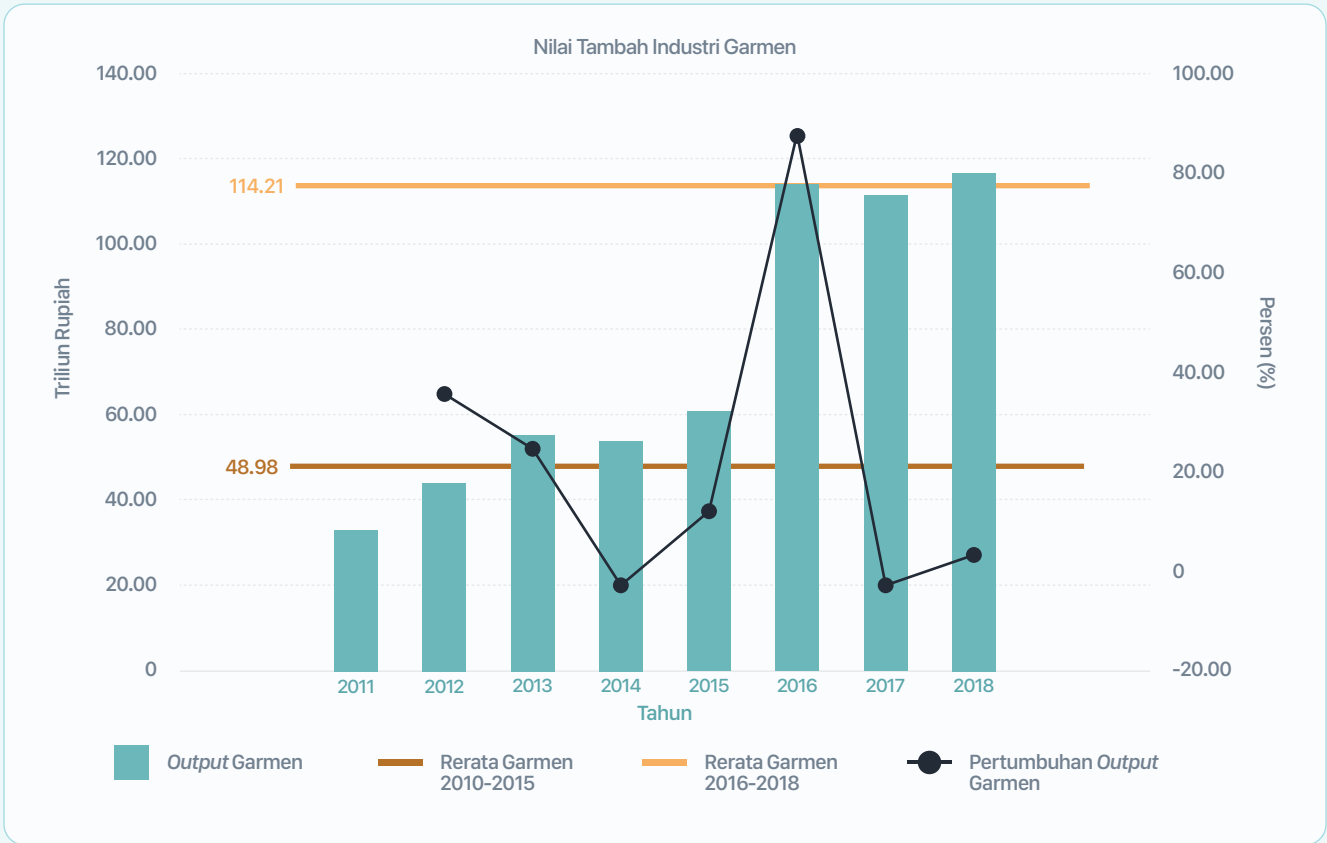
persepsi antara operator dan klien industri garmen masih belum sejalan.

Sejalan dengan hasil IPA di atas, hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa kinerja industri garmen sudah baik. Industri pakaian jadi atau garmen mengalami peningkatan *output*, nilai tambah, dan jumlah pekerja yang cukup signifikan sejak tahun 2016. Rata-rata *output* industri garmen sebelum tahun 2016 berada di angka 81.41 triliun rupiah, namun sejak tahun 2016 rata-rata *output* industri meningkat menjadi 214.64 triliun rupiah (lihat Gambar 4.10.5). Sejak tahun 2016 memang terjadi lonjakan *output* industri garmen meningkat dari hanya 147.74 triliun rupiah, menjadi 219.14, tumbuh 48,33%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Gambar 4.10.5). Hal tersebut sejalan dengan nilai tambah *output* dan jumlah pekerja industri garmen yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi sejak 2016 (lihat Gambar 4.10.6 dan 4.10.7). Nilai tambah industri mengalami pertumbuhan sangat besar pada 2016 mencapai 90,13 %, tertinggi dalam 5 tahun terakhir (lihat Gambar 4.10.6). Jumlah pekerja industri garmen mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 34,13%, tertinggi dalam 6 tahun terakhir (lihat Gambar 4.10.7).

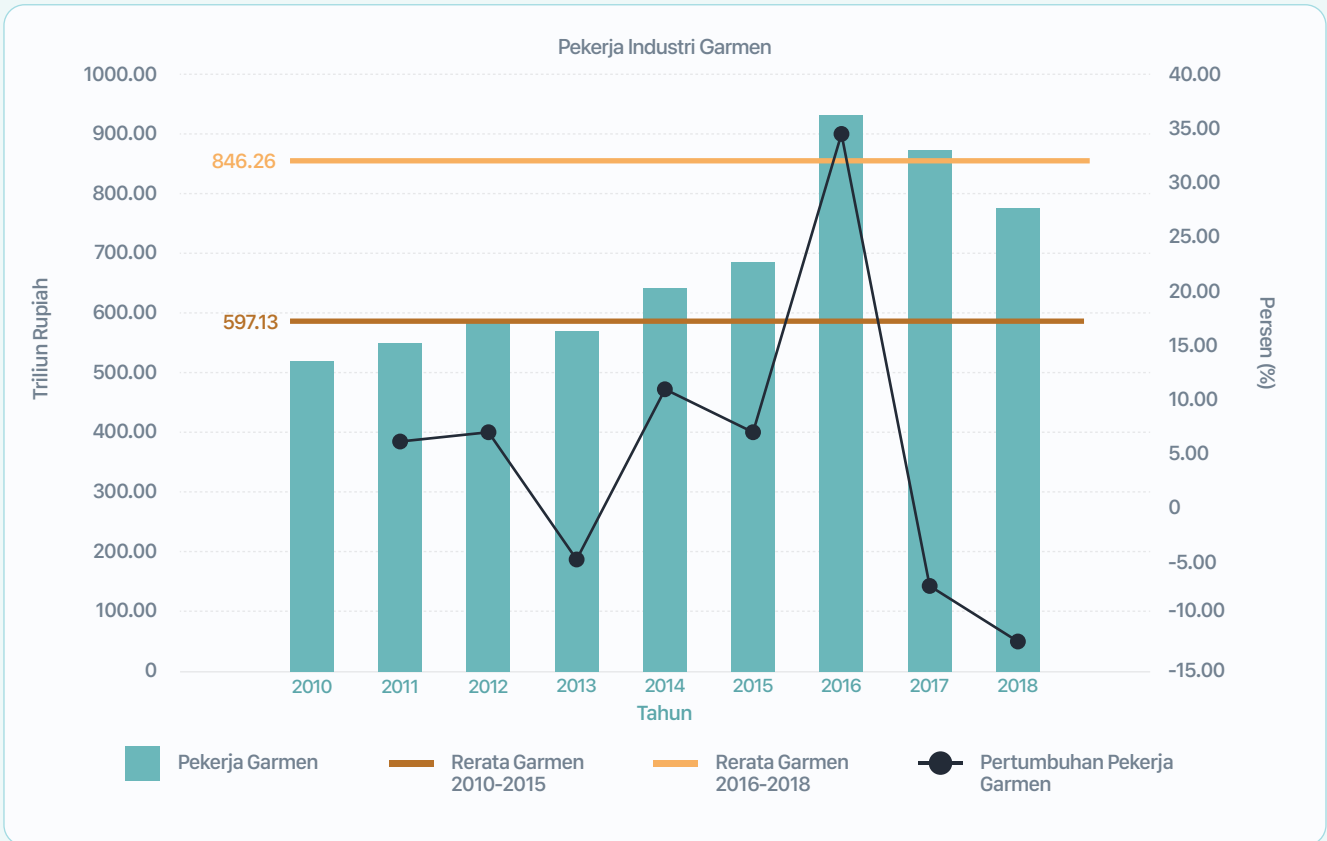


Gambar 4.10.5 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan *Output* Industri Garmen Indonesia

Sumber: BPS



Gambar 4.10.6 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Garmen Indonesia
 Sumber: BPS

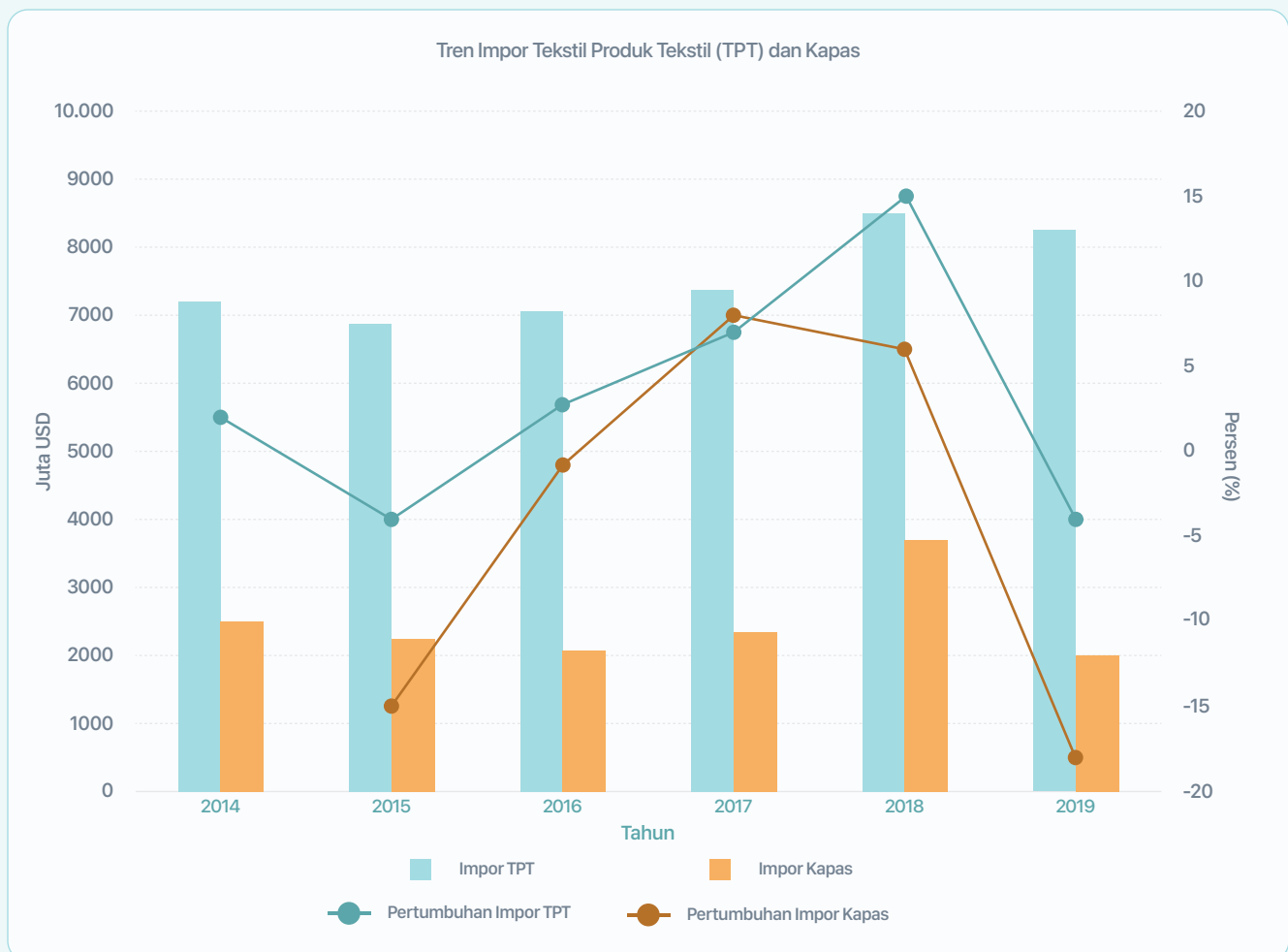


Gambar 4.10.7 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Pekerja Industri Garmen Indonesia
 Sumber: BPS

Peningkatan ketersediaan bahan baku garmen yang ditunjukkan dengan peningkatan impor bahan baku garmen seperti kapas menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri garmen dalam negeri. Menurut data dari Bank Indonesia, tren impor tekstil dan produk tekstil Indonesia mengalami tren peningkatan sejak 2016. Kapas yang merupakan salah satu bahan baku garmen di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dari -15% menjadi -1% pada tahun 2016 dan terus tumbuh positif pada tahun berikutnya (lihat Gambar 4.10.8).

Kehadiran PLB merupakan salah satu penyebab peningkatan ketersediaan bahan baku industri garmen. PLB memberikan manfaat yang sangat besar terhadap industri garmen seperti pemotongan rantai pasokan. Pemotongan rantai pasokan (*supply chain*) bahan baku industri garmen dapat membantu menekan biaya

logistik yang dibebankan dikarenakan meningkatnya efisiensi rute logistik yang ditempuh oleh bahan baku tersebut dalam perjalanan menuju tahapan produksi selanjutnya serta mendekatkan lokasi penimbunan bahan baku tersebut kepada lokasi produksi yang dituju (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, 2017; Amanda, 2019). Badan pengkajian dan pengembangan perdagangan (BPPP) menggunakan komoditi kapas sebagai contoh dari pemotongan rantai pasokan bahan baku tersebut dikarenakan bahan baku kapas yang akan diimpor ke Indonesia ditimbun di Malaysia sebelum adanya PLB (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, 2017). Maka dari itu, dengan adanya PLB, biaya untuk mendatangkan kapas sebagai bahan baku industri tekstil dan garmen dapat ditekan karena terpotongnya rantai pasokan yang mendekatkan bahan baku kepada lokasi produksi.



Gambar 4.10.8 Tren Impor Tekstil Produk Tekstil dan Kapas

Sumber: diolah dari Bank Indonesia dan BPS

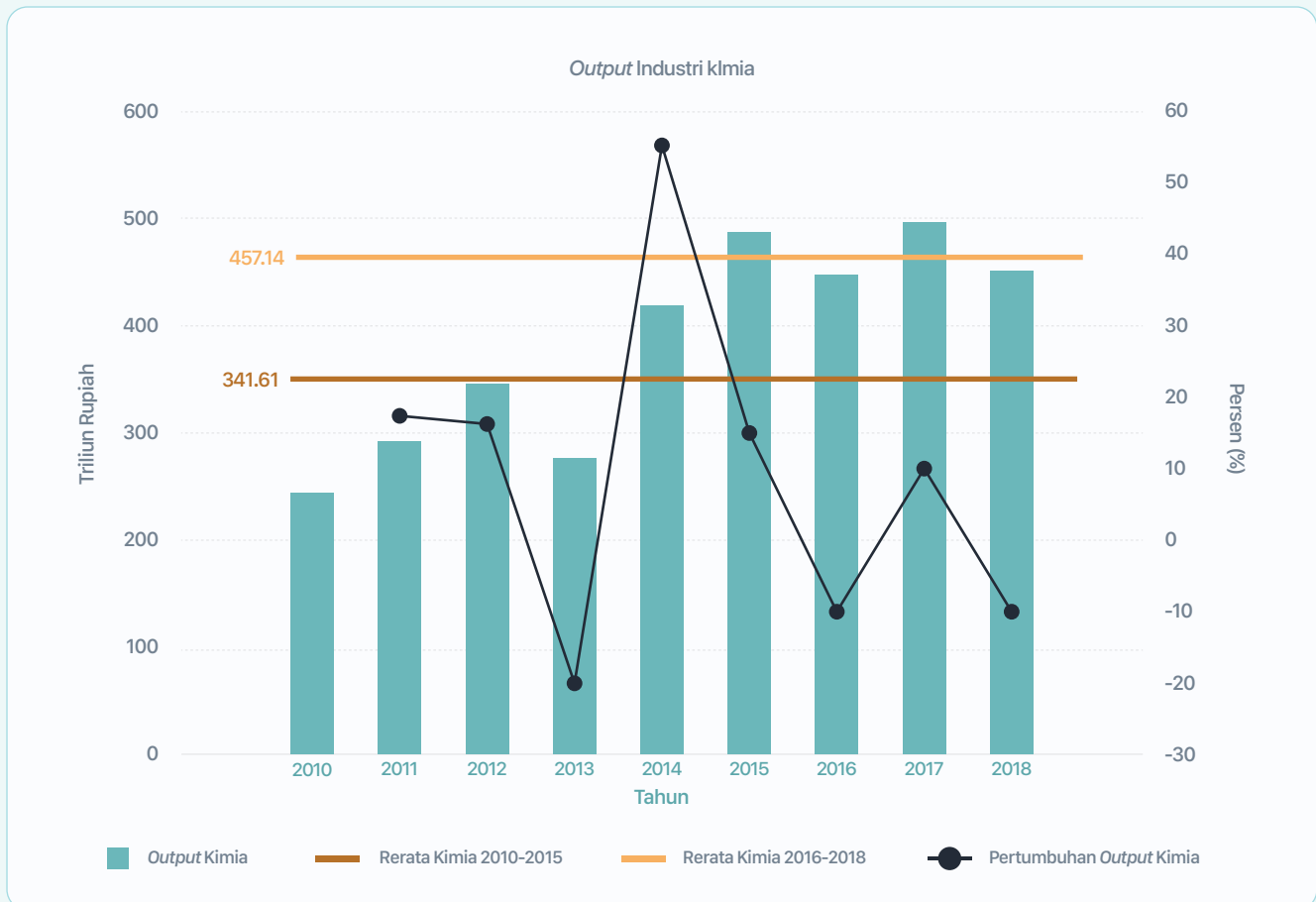
3. Industri Kimia

Analisis peringkat industri berdasarkan kinerja yang dinilai oleh klien (lihat Tabel 4.11) industri kimia menempati posisi 9 dari 11 industri. Sedangkan pada analisis peringkat berdasar skor rata-rata IPA atas respon klien (lihat Tabel 4.12), industri kimia berada pada posisi 9 dari 11 industri. Pada analisis peringkat berdasar jumlah item pada kuadran matriks IPA (lihat Tabel 4.15) industri kimia menempati peringkat 6 dari 11 industri. Dan berdasarkan analisis peringkat berdasarkan jumlah respon yang overlap dan mismatch antara operator dan klien (lihat Tabel 4.16) industri kimia berada pada peringkat 6 dari 11 industri.

Analisis matriks dan analisis peringkat industri kimia menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PLB industri ini kurang baik dibandingkan industri lain. Dengan melihat peringkat berdasarkan jumlah item pada kuadran

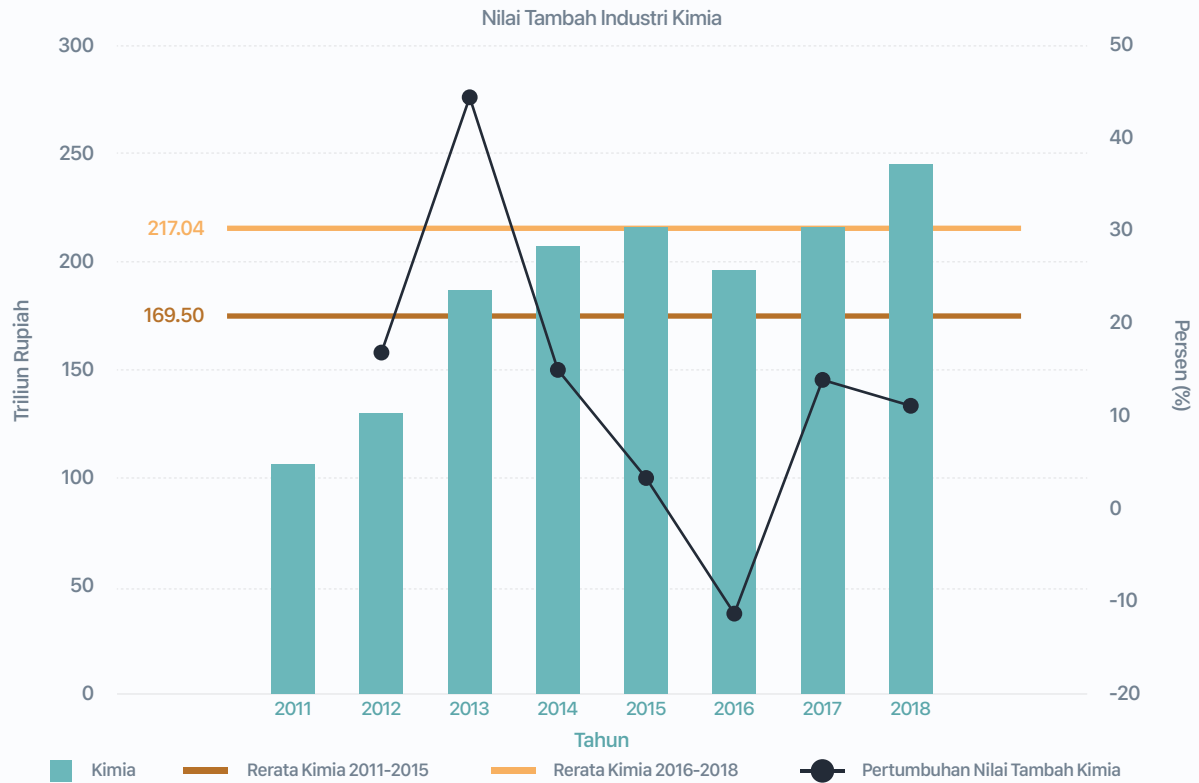
matriks IPA dan jumlah respon overlap dan mismatch, industri kimia menempati posisi 6 dari 11 industri yang artinya persepsi antara klien dan operator PLB cukup sejalan.

Sejalan dengan hasil IPA di atas, hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa kinerja industri kimia kurang baik. Industri kimia tidak mengalami peningkatan sebaik industri manufaktur. Rerata nilai *output*, nilai tambah, dan jumlah pekerja setelah tahun 2016 memang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat dari pertumbuhan *output* dan nilai tambah justru lebih rendah setelah tahun 2016. Pada tahun 2016, *output* industri kimia tumbuh negatif sebesar -9,48% (lihat Gambar 4.11.1). Nilai tambah juga tumbuh negatif sebesar -12,29% (lihat Gambar 4.11.2).



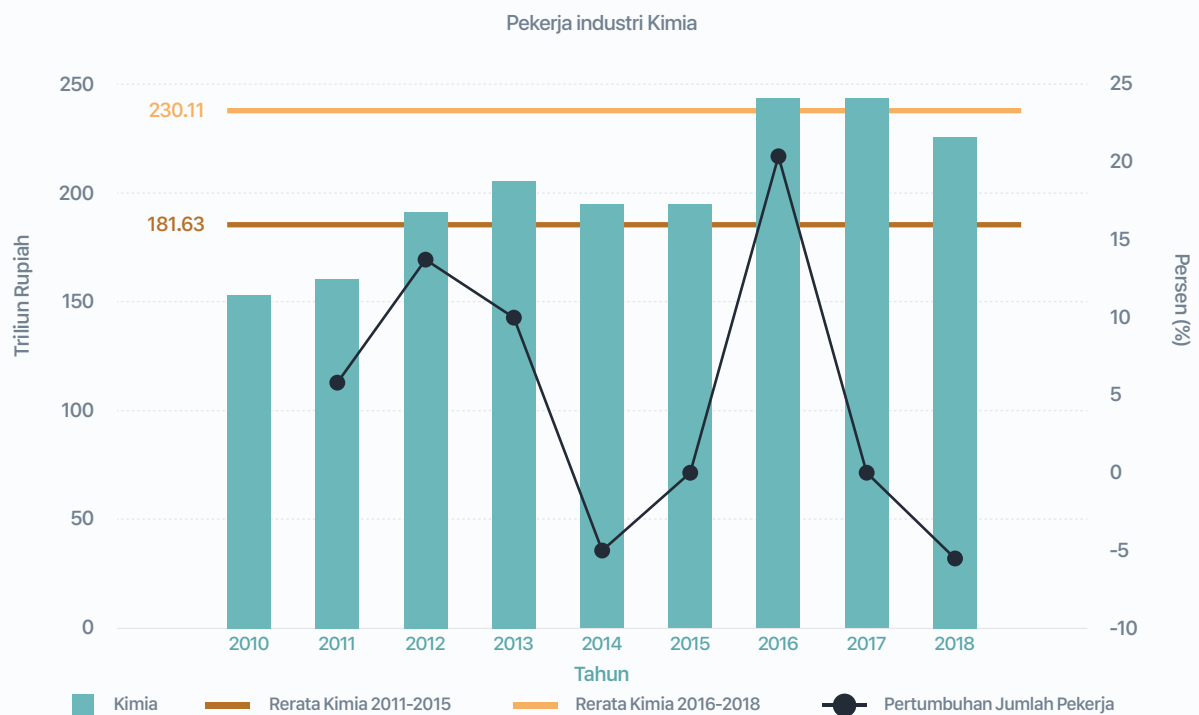
Gambar 4.11.1 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan *Output* Industri Kimia Indonesia

Sumber: BPS



Gambar 4.11.2 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Kimia Indonesia

Sumber: BPS



Gambar 4.11.3 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Pekerja Industri Kimia Indonesia

Sumber: BPS

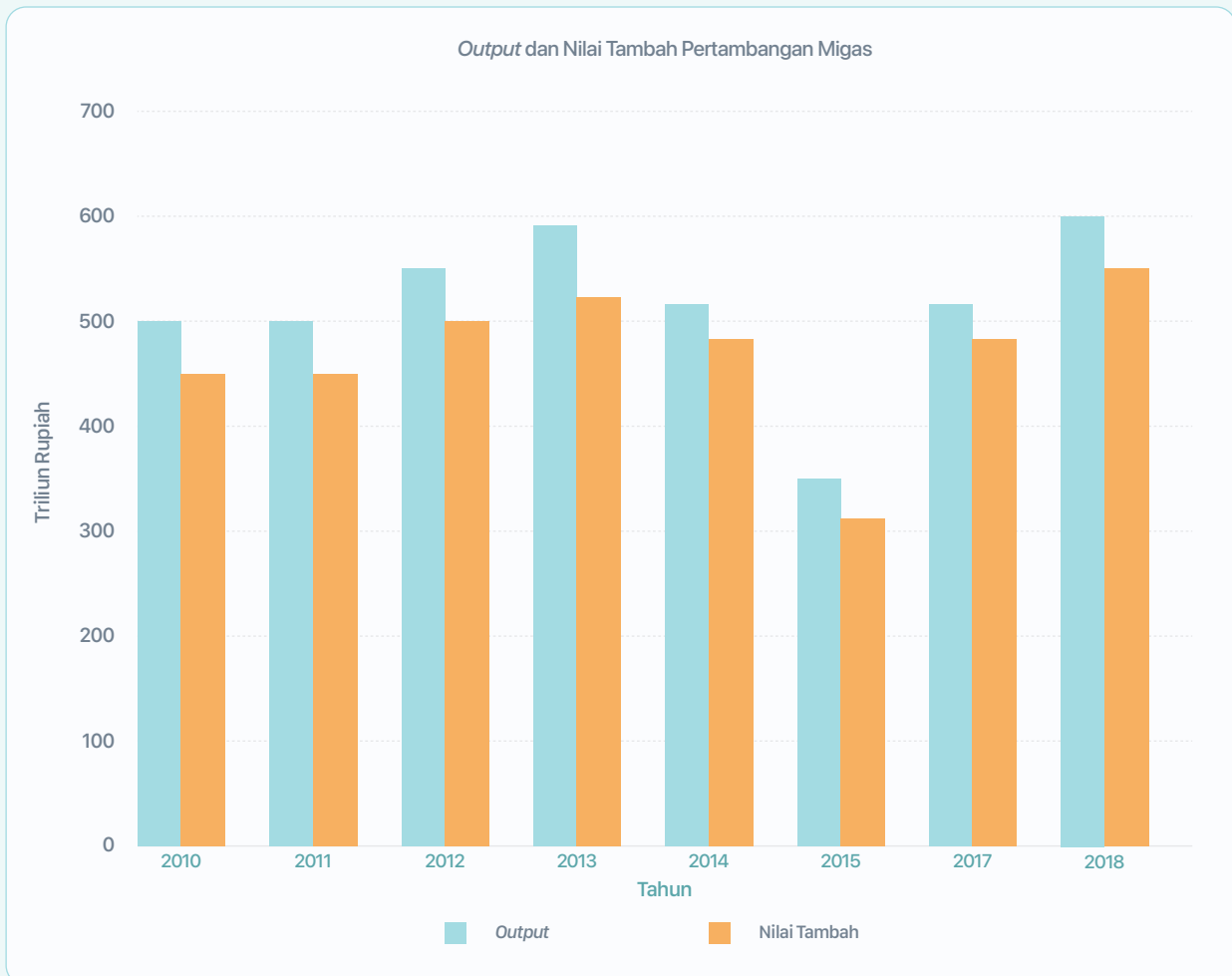
4. Pertambangan Migas

Analisis peringkat industri berdasarkan kinerja yang dinilai oleh klien (lihat Tabel 4.11) industri minyak dan gas menempati posisi 6 dari 11 industri. Sedangkan pada analisis peringkat berdasar skor rata-rata IPA atas respon klien (lihat Tabel 4.12), industri minyak dan gas berada pada posisi 6 dari 11 industri. Pada analisis peringkat berdasar jumlah item pada kuadran matriks IPA (lihat Tabel 4.15) industri minyak dan gas menempati peringkat 3 dari 11 industri. Kemudian, berdasarkan analisis peringkat berdasarkan jumlah respon yang *overlap* dan *missmatch* antara operator dan klien (lihat Tabel 4.16) industri minyak dan gas berada pada peringkat 3 dari 11 industri.

Analisis matriks dan analisis peringkat industri kimia menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PLB industri ini kurang baik dibandingkan industri lain. Dengan melihat

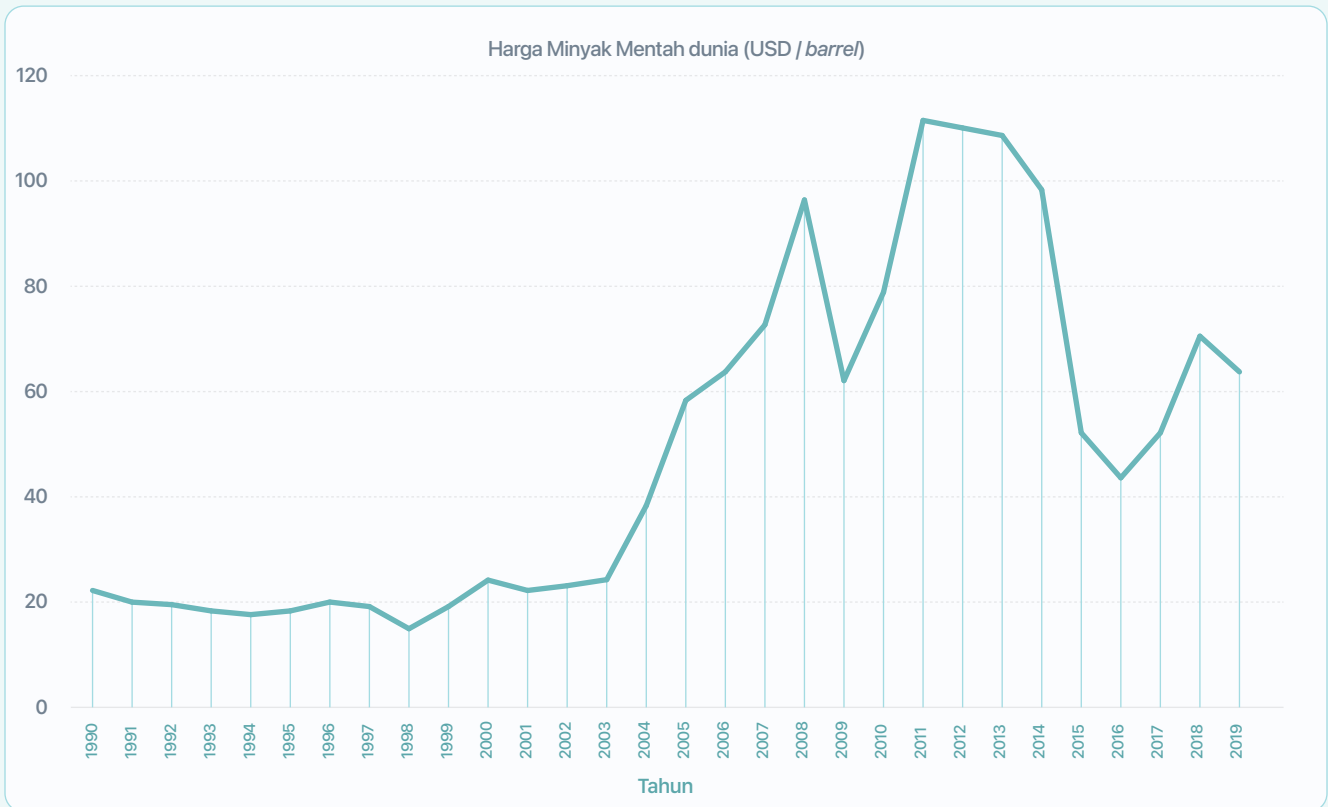
peringkat berdasarkan jumlah item pada kuadran matriks IPA dan jumlah respon *overlap* dan *missmatch*, industri minyak dan gas menempati posisi 3 dari 11 industri yang artinya persepsi antara klien dan operator PLB sudah sejalan.

Jika melihat data pertambangan migas secara umum, nilai *output* dan nilai tambah pertambangan migas di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 (lihat Gambar 4.12.1). Penyebab utamanya adalah jatuhnya harga minyak dunia yang cukup signifikan pada tahun tersebut dari 98,95 USD/barrel pada tahun 2014 menjadi 52,39 USD/barrel pada tahun 2015 (lihat Gambar 4.12.2). Setelah harga minyak mulai kembali naik, *output* dan nilai tambah pertambangan migas juga mengalami peningkatan.



Gambar 4.12.1 Output dan Nilai Tambah Pertambangan Migas Indonesia 2010-2018

Sumber: Statistik Pertambangan Migas BPS



Gambar 4.12.2 Harga Minyak Mentah Global

Sumber: BP Statistical Review of World Energy

Dari struktur tenaga kerja, jumlah pekerja tambang migas di Indonesia berkisar diangka 20 ribu dan didominasi oleh warga negara Indonesia (lihat Gambar 4.12.3). Sama seperti nilai *output* dan nilai tambah, jumlah pekerja migas mengalami tren penurunan sejak tahun 2010 kemudian meningkat kembali di tahun 2017.



Gambar 4.12.3 Jumlah Pekerja Pertambangan Migas Indonesia

Sumber: Statistik Pertambangan Migas BPS

Salah satu penyebab lain mengapa nilai tambah sektor pertambangan migas meningkat sejak tahun 2017 adalah kehadiran PLB. Kehadiran PLB untuk sektor pertambangan migas memiliki beberapa kelebihan. Pertama, PLB dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan barang operasi perminyakan seperti *rig* dengan lokasi pengeboran. Kedua, fasilitas penimbunan barang sampai 3 tahun dapat memberikan fleksibilitas untuk penimbunan barang operasi perminyakan. Skema *re-export* atau mengirim kembali barang operasi perminyakan setelah selesai digunakan ke luar negeri membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dengan adanya PLB, *rig* yang sudah selesai tidak perlu di *re-export* ke luar negeri dan bisa disimpan di PLB. Hal tersebut akan menghemat banyak biaya dan pendapatan menjadi lebih tinggi. Karena biaya pengeboran migas di Indonesia menggunakan skema *cost recovery* atau dibayar oleh pemerintah, maka penghematan ini juga akan mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk *cost recovery*. Berikut kutipan hasil FGD mengenai keunggulan PLB untuk sektor pertambangan migas:

“Kami mendirikan PLB untuk melayani Oil and Gas, karena seperti yang disampaikan pak H kegiatan mereka benar benar membutuhkan rantai pasokan yang sangat cepat, jadi barang barang mereka sangat dibutuhkan untuk kegiatan drilling dan supply mereka harus setiap saat terpenuhi. Secara logistik mereka memotong biaya itu dengan sangat besar, kedua juga di sisi

pendapatan kami dapat dan Indonesia lumayan karena biaya drilling ini kan cost recovery ya, semua biaya ke pemerintah juga ujung ujungnya.”
(Narasumber PLB 8)

“Dalam satu tahun Indonesia itu memiliki jumlah rig keluar masuk itu antara 16 sampai 25 dan rig itu kontrak. Setelah durasi itu selesai mereka harus keluar dari Indonesia karena mereka masuk menggunakan fasilitas masterlist. Harga mereka parkir di Singapore per hari itu di angka 12 juta dan itu mereka bisa parkir untuk nunggu next job itu 90 hari, 120 hari, kadang bisa berbulan-bulan tergantung perusahaan itu menang tender atau enggak. Jadi awalnya kita masuk seperti itu. Kemudian mimpinya adalah menggeser rig yang parkir di Singapore dan Malaysia untuk masuk ke Indonesia. Harapannya harga kita bisa lebih murah dan bisa dijadikan rig hub.”
(Narasumber PLB 2)

“Banyak barang yang perlu dibawa keluar negeri jadi bisa kita simpan dulu ke PLB untuk menutup masterlistnya dan yang paling utama saat itu kegiatan drilling kan rignya besar dan mahal, setiap selesai kegiatan itu harus di re-export kalau ndak ke batam ke singapore dan biaya logistiknya sudah besar sekali jadi berdasarkan hal tersebut kami mengajukan untuk membuka plb perairan.”
(Narasumber PLB 8)





BAB 5 KESIMPULAN & SARAN

127 – 130

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini telah memenuhi kedua tujuan penelitian yang ditetapkan di awal, yaitu mengevaluasi efektivitas proses bisnis PLB terhadap penyediaan pelayanan serta mengevaluasi kontribusi dan dampak PLB terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan penelitian pertama telah tercapai menggunakan menggunakan analisis *template analysis* terhadap data kualitatif yang dikumpulkan melalui FGD dan observasi dan *importance-performance analysis* (IPA) terhadap data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei. Sementara itu, tujuan penelitian kedua telah tercapai menggunakan metode ekonometrika terhadap data survei maupun data sekunder dari berbagai sumber yang valid dan terpercaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Secara umum proses bisnis PLB dinilai efektif dan **on the right track** dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan tujuannya. Hal ini dibuktikan oleh mayoritas item penilaian kepentingan dan kinerja yang telah masuk dalam kategori *keep up the good work*. Namun demikian, beberapa perbaikan dapat dilakukan ke depan

Saran

A. Berdasarkan hasil analisis IPA dapat dilihat bahwa manfaat PLB lebih dinikmati oleh industri besar daripada industri kecil dan menengah, yang ditunjukkan dengan jumlah item IPA yang lebih banyak masuk kuadran 2 pada industri besar dibandingkan IPA industri kecil (lihat Gambar 4.4 dan 4.5). Hal ini sejalan dengan temuan skala kemanfaatan hasil survei (lihat Gambar 4.5.1) yang menemukan bahwa perusahaan berukuran besar memperoleh manfaat PLB yang paling besar, kemudian diikuti oleh industri kecil. Meskipun dampak PLB lebih dirasakan oleh industri besar, industri kecil juga menikmati manfaat dengan adanya PLB.

terutama untuk beberapa aspek yang dinilai penting oleh klien namun kinerjanya masih rendah.

2. **PLB terbukti berkontribusi positif pada perekonomian Indonesia. PLB memberikan dampak meliputi akses bahan baku dan penolong yang lebih mudah, waktu yang lebih cepat untuk memperoleh bahan baku, penurunan biaya logistik, dan peningkatan output.** Kehadiran PLB juga meningkatkan nilai tambah dan ekspor industri yang menggunakan layanan PLB. Selain itu, PLB juga berkontribusi pada arus keluar-masuk barang. Devisa impor dan ekspor melalui PLB juga mengalami peningkatan sejak berdiri, meskipun mengalami perlambatan karena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kehadiran PLB memiliki dampak positif pada perekonomian regional yaitu peningkatan PDRB per kapita sekitar 2,7-3,1 poin persentase. Tren penerimaan pajak dalam rangka impor seperti bea masuk, PPN, dan PPh juga terus meningkat sejak berdirinya PLB.

B. Regulator dan operator PLB ke depan perlu bekerja sama meningkatkan kinerja atas beberapa item berikut yang secara dinilai klien masih kurang baik:

1. Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh pemasok (*supplier*) di luar daerah pabean.
2. Konsolidasi barang tujuan ekspor.
3. Penyediaan barang tujuan ekspor.
4. Maintenance pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (*painting*).
5. Pemberian label berbahasa Indonesia.
6. Pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas barang kena cukai.
7. Lelang barang modal asal luar daerah pabean.
8. Pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean.



C. Regulator dan operator PLB ke depan perlu bekerja sama meningkatkan kinerja PLB untuk memfasilitas industri kecil dan menengah. Berikut beberapa item yang sebaiknya menjadi fokus perbaikan ke depan:

1. Penarikan dana informal terkait kegiatan logistik.
2. Perpanjangan waktu penimbunan.
3. Pemasukan dan pengiriman produk ekspor sesuai jadwal.
4. Menyelesaikan kewajiban ekspor untuk impor sementara.
5. Pengemasan atau pengemasan Kembali.
6. Penyortiran.
7. Standarisasi/*Quality control*.
8. Penggabungan/*kitting*.
9. Pengemasan.
10. Penyetelan.
11. Konsolidasi barang tujuan ekspor.
12. Penyediaan barang tujuan ekspor.
13. Pengemasan dan atau pengemasan kembali.
14. *Maintenance* pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan.
15. *Pembauran/Blending*.
16. Pemberian label berbahasa Indonesia.
17. Pemasangan Kembali dan atau perbaikan.
18. Pemeriksaan dari Lembaga atau instansi terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/atau ekspor.
19. Kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan oleh direktur jenderal.
20. Evaluasi kompetensi dan kualitas jasa badan pengecekan standar dan kualitas.

D. Regulator perlu mengharmonisasikan peraturan-peraturan terkait PLB. Ketidaksinkronan regulasi antar kementerian dapat membuat proses bisnis PLB terhambat. Hal itu juga dapat menyebabkan klien potensial enggan dan ragu untuk menggunakan PLB di Indonesia. Munculnya isu ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan dari regulator pada operator dan klien PLB. Ke depan, regulator dapat membuka forum bersama untuk membahas aturan-aturan yang akan diimplementasikan. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu menyamakan persepsi mengenai konsep dan regulasi untuk kemudahan proses bisnis PLB ke depan.

E. Aspek lain yang ke depan perlu menjadi fokus perbaikan adalah layanan terkait kepemilikan barang dalam PLB serta fasilitas ekspor yang berpotensi memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat logistik di Asia Pasifik, khususnya penyediaan bahan baku atau bahan penolong impor bagi industri dalam negeri, regulasi terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi pemasok bahan baku dari luar negeri perlu dikaji lebih lanjut dan disosialisasikan dengan jelas. Hal ini penting untuk dilakukan karena sebagian operator dan pengguna PLB menilai bahwa status BUT dapat menyebabkan pemasok bahan baku dari luar negeri enggan untuk menggunakan PLB sebagai pusat pengumpulan dan penyimpanan barang.

Keterbatasan Penelitian

Secara umum, walaupun penelitian ini dapat terlaksana sesuai dengan linimasa yang telah disepakati, beberapa keterbatasan dan kendala berikut ini perlu menjadi catatan khusus:

A. Keterlambatan perolehan data

Beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terlambat didapatkan dari sebagian responden dan pemangku kepentingan. Hal itu berdampak pada waktu penyelesaian penelitian yang terbatas.

B. Rendahnya *survey response rate* terutama dari klien PLB

Hal ini terjadi karena para operator merasa enggan untuk merilis nama klien mereka salah satunya karena isu kerahasiaan data perusahaan pengguna PLB. Walaupun tidak mempengaruhi kecukupan sampel dalam penelitian ini, response rate yang rendah tersebut berpotensi untuk menghasilkan biased generalisation. Oleh karena itu, generalisasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati terutama analisis industri yang keterwakilan datanya masih rendah.

C. Observasi terhambat karena COVID-19

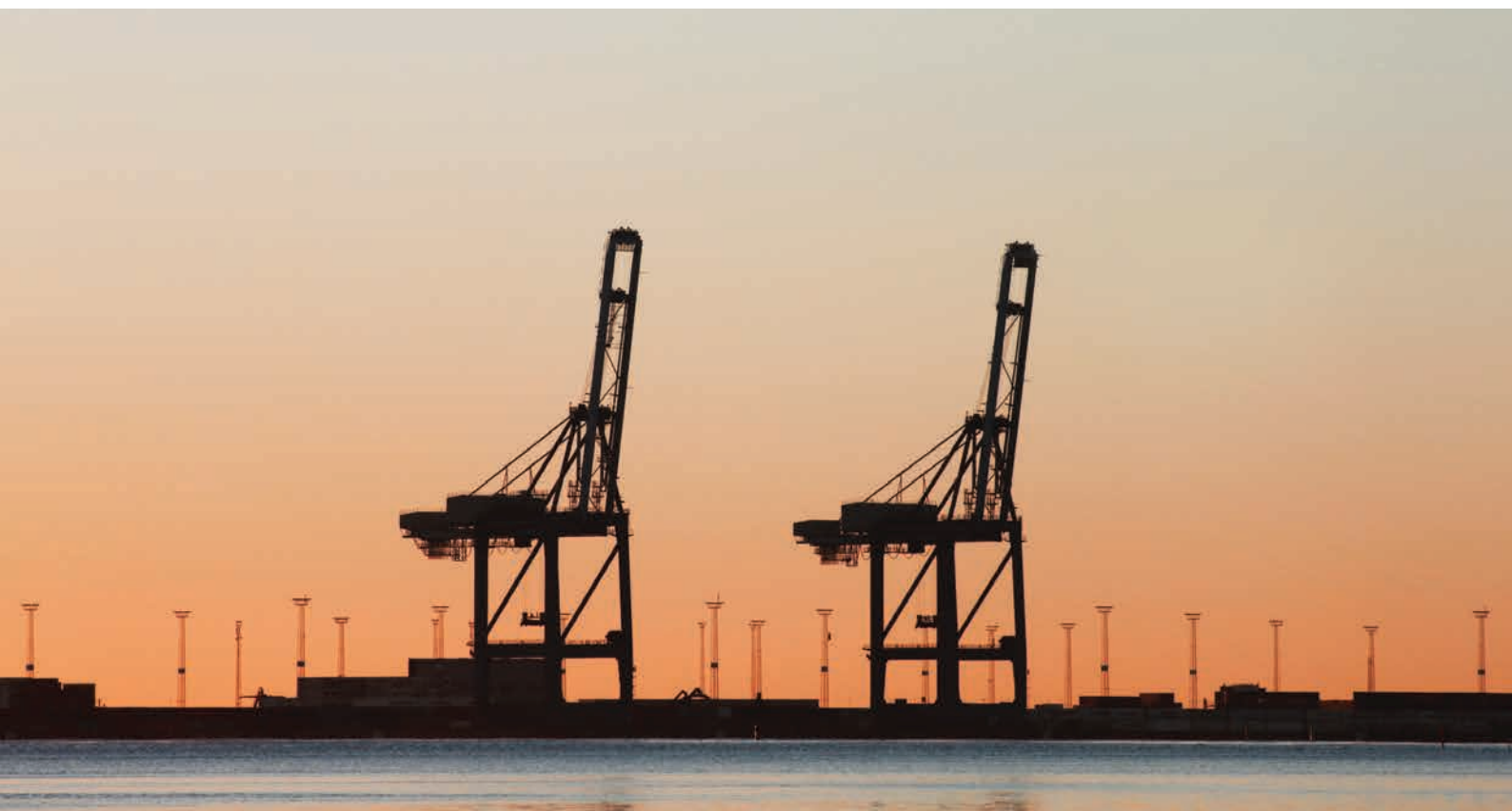
Penelitian ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi sehingga observasi dilaksanakan sesuai kondisi *new normal* dan prosedur kesehatan yang berlaku. Hal tersebut berdampak pada proses observasi terutama di daerah Jakarta yang yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

D. Tidak semua responden FGD yang dipilih memenuhi undangan

Berkurangnya responden FGD yang dapat memenuhi undangan berdampak pada kurang optimalnya jumlah variasi *insight* yang dapat diambil oleh para peneliti.

E. Tidak semua pengguna PLB yang dipilih bersedia untuk diwawancarai

Berkurangnya klien yang dapat diwawancarai berdampak pada jumlah data dan verifikasi penilaian hasil dari klien terhadap PLB. Sehingga para peneliti harus mengolah dengan keterbatasan data yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

2020. *Database PLB*. [Database] Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia.

Amanda, G., 2019. PLB Masih Jadi Andalan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil | Republika Online. [online] Republika Online. Available at: <<https://republika.co.id/berita/pv0x8t423/plb-masih-jadi-andalan-industri-tekstil-dan-produk-tekstil>> [Accessed 21 October 2020].

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, 2017. *PUSAT LOGISTIK BERIKAT, UPAYA MENEKAN BIAYA LOGISTIK NASIONAL*. [online] Available at: <http://b PPP.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Pusat_Logistik_Berikat_Upaya_Menekan_Biaya_Logistik_Nasional.pdf> [Accessed 21 October 2020].

Besley, T. and Burgess, R. (2004) "Can labor regulation hinder economic performance? Evidence from India," *Quarterly Journal of Economics*, 119(1), pp. 91–134. doi: 10.1162/003355304772839533.

Brooks, J. and King, N., 2014. Doing Template Analysis: Evaluating an End-of-Life Care Service. [online] Available at: <https://www.researchgate.net/publication/269333623_Doing_Template_Analysis_Evaluating_an_End_of_Life_Care_Service> [Accessed 23 September 2020].

Budiaman, A., 2017. *Evaluasi Manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB) Dalam Mendukung Daya Saing Industri Nasional*. [online] Available at: <<https://adoc.pub/evaluasi-manfaat-pusat-logistik-berikat-plb-dalam-mendukung-.html>> [Accessed 16 November 2020].

Camacho, David P. et al. (2020) "Applying importance–performance analysis to residents' perceptions of large sporting events," *Sport in Society*, 23(2), pp. 249–263.

CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL. PERATURAN PRESIDEN NO. 26 TAHUN 2012.

Cooper D.R, and Schindler, P.S. (2014) *Business Research Methods*. 12th Edition. New York, NY: McGraw–Hill Education

Easterly, W. (2004) "National Policies and Economic Growth: A Reappraisal," *NYU Development Research Working Paper No. 1*, pp. 1–70. doi: 10.2139/ssrn.507402.

Gertler, P. J. et al. (2016) *Impact Evaluation in Practice*. 2nd Edition. Washington, DC: Inter-American Development Bank and World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-0779-4.

Hair, J.F. et al. (2010) *Multivariate Data Analysis*. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.

Hair, J.F. et al. (2014) *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Thousand Oaks, CA: Sage

Hur, J. and Park, C. (2012) "Do Free Trade Agreements Increase Economic Growth of the Member Countries?," *World Development*. Elsevier Ltd, 40(7), pp. 1283–1294. doi: 10.1016/j.worlddev.2011.12.006.

Kemenperin.go.id. 2016. *Kemenperin: Pusat Logistik Berikat Tingkatkan Daya Saing Industri*. [online] Available at: <<https://www.kemenperin.go.id/artikel/16094/Pusat-Logistik-Berikat-Tingkatkan-Daya-Saing-Industri>> [Accessed 21 October 2020].

Kemenperin.go.id. 2016. *Kemenperin: Banyak Industri Mamin 100% Andalkan Bahan Baku Impor*. [online] available at: <<https://kemenperin.go.id/artikel/14324/Banyak-Industri-Mamin-100-Andalkan-Bahan-Baku-Impor>> [accessed 21 October 2020]

Kementerian Perindustrian. (2019) *Kemenperin Pacu Pertumbuhan IKM untuk Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional* [Online]. Available at: <https://kemenperin.go.id/artikel/21335/Kemenperin-Pacu-Pertumbuhan-IKM-untuk-Menjadi-Tulang-Punggung-Perekonomian-Nasional>. (Accessed: 13 September 2020)

- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F. and Shleifer, A. (2002) "Government ownership of banks," *Journal of Finance*, 57(1), pp. 265–301. doi: 10.1111/1540-6261.00422.
- Lee, J.-W. (1993) "International Trade and Economic Growth.," *IMF Staff papers*, 40(2), pp. 299–328.
- Levine, B. R. and Renelt, D. (1992) "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions," *The American Economic Review*, 82(4), pp. 942–963.
- Manwa, F., Wijeweera, A. and Kortt, M. A. (2019) "Trade and growth in SACU countries: A panel data analysis," *Economic Analysis and Policy*. Elsevier B.V., 63, pp. 107–118. doi: 10.1016/j.eap.2019.05.003.
- Ogunmokun, Oluwatobi A. et al (2020) "Propensity to trust and knowledge sharing behavior: An evaluation of importance performance analysis among Nigerian restaurant employees," *Tourism Management Perspectives*, 33.
- Pomeranz, D. (2017) "Impact Evaluation Methods in Public Economics: A Brief Introduction to Randomized Evaluations and Comparison with Other Methods," *Public Finance Review*, 45(1), pp. 10–43. doi: 10.1177/1091142115614392.
- Padlee, Siti F. et al. (2020) "Keep up the good work in research universities: An importance-performance analysis," *Australasian Marketing Journal*, 28, pp. 128–138
- PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018.
- PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2019.
- Rajan, R. G. and Zingales, L. (1998) "Financial Dependence and Growth," *The American Economic Review*, 88(3), pp. 559–586. Available at: <https://www.jstor.org/stable/116849>.
- Rodrik, D. (2012) "Why We Learn Nothing from Regressing Economic Growth on Policies," *Seoul Journal of Economics*, 25(2), pp. 137–151. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Rosenzweig, M. R. and Wolpin, K. I. (1986) "Evaluating the Effects of Optimally Distributed Public Programs: Child Health and Family Planning Interventions," *American Economic Review*, 76(3), pp. 470–482. doi: 10.2307/1813363.
- Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G. and Miller, R. I. (2004) "Determinants of long-term growth: A bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach," *American Economic Review*, 94(4), pp. 813–835. doi: 10.1257/0002828042002570.
- Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2016) *Research Methods for Business*. 7th edn. Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2016.
- TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2016.
- TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016.
- TENTANG GUDANG BERIKAT. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK.04/2019.

TENTANG KAWASAN BERIKAT. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2018.

TENTANG KITE IKM. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2017

TENTANG KITE. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2019

TENTANG KITE. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2019.

TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/PMK.04/2015.

World Bank. (2018) *Logistic Performance Index* [Online]. Available at: <https://lpi.worldbank.org/about>. (Accessed: 13 September 2020)World Economic Forum, Bain & Company and The World Bank (2013) *Enabling Trade Valuing Growth Opportunities*. Geneva, Switzerland

LAMPIRAN

No.	Dimensi	No.	Item	Fiskal	Non Fiskal	Operator	Regulator	Sumber
1.	Fasilitas Fiskal	1	[Penangguhan bea masuk]	✓			✓	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat
		2	[Pembebasan pajak impor (PPN, PPh, impor)]	✓			✓	
		3	[Pembebasan PPN atas pemasukan dalam negeri]	✓			✓	
		4	[Transparansi prosedur kepabeanan]		✓		✓	
		5	[Penarikan dana informal terkait kegiatan logistik]		✓			
		6	[Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan badan bea cukai/custom agencies]		✓	✓		
		7	[Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan broker bea cukai]		✓		✓	
2.	Jangka Waktu Penimbunan	8	[Jangka waktu penimbunan barang paling lama 3 (tiga) tahun]		✓		✓	
		9	[Perpanjangan waktu penimbunan]		✓		✓	
		10	[Karakteristik barang yang dapat ditimbun sesuai dengan peruntukan PLB]		✓		✓	
3.	Status Kepemilikan Barang	11	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh penyelenggaraan PLB]		✓	✓		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat
		12	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh pengusaha PLB]		✓	✓		
		13	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh PDPLB]		✓	✓		
		14	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh pemasok (supplier) di luar daerah pabean]		✓	✓		
		15	[Barang yang ditimbun dapat dimiliki oleh orang atau badan lainnya]		✓	✓		
4.	Fasilitas Pemasukan	16	[Dapat menimbun barang impor maupun ekspor]		✓	✓		
		17	[Pemasukan barang dari luar negeri dan dalam negeri]		✓	✓		
		18	[Penangguhan ketentuan pembatasan jumlah barang]		✓		✓	
		19	[Kewajiban pembongkaran (stripping) dari peti kemas]		✓	✓		
		20	[Pemasukan dan pengiriman produk impor sesuai jadwal]		✓	✓		
		21	[Pemasukan dan pengiriman produk ekspor sesuai jadwal]		✓	✓		
5.	Fleksibilitas Pengeluaran	22	[Fleksibilitas pengeluaran barang secara parsial]		✓	✓		

No.	Dimensi	No.	Item	Fiskal	Non Fiskal	Operator	Regulator	Sumber
		23	[Penaan pungutan pajak maupun bea masuk sesuai pengeluaran barang]	✓			✓	Logistics Performance Index Report 2018
6.	Infrastruktur	24	[Lokasi PLB dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya]		✓	✓		
		25	[Luas PLB memiliki batasan yang jelas]		✓	✓		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat
		26	[Memiliki tempat untuk pemeriksaan fisik atas barang impor dan/atau barang ekspor;]		✓	✓		
		27	[Memiliki tempat untuk melakukan penimbunan, pemuatan, pembongkaran, pemasukan, dan pengeluaran barang ke dan dari luar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean]		✓	✓		
		28	[Memiliki tempat atau area transit untuk barang]		✓	✓		
		29	[Memiliki tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan penimbunan barang]		✓	✓		
		30	[Memiliki sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)]		✓	✓		
		31	[Memiliki Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT-based inventory) dalam pengelolaan barang]		✓	✓		
		32	[Memiliki pencatatan secara realtime dan online;]		✓	✓		
		33	[Memiliki Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan online]		✓	✓		
		34	[Memiliki data rekaman CCTV paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;]		✓	✓		
		35	[Kualitas infrastruktur terkait transportasi]		✓	✓		
		36	[Penggunaan IT dalam proses administrasi kepabeanan]		✓	✓		Logistics Performance Index Report 2018
		37	[Kehandalan layanan administrasi berbasis IT]		✓	✓		FGD
		38	[Optimalisasi pemanfaatan lahan yang disyaratkan dalam aturan pendirian PLB.]		✓	✓		
		39	[Peraturan luas lahan minimal sebagai syarat pendirian PLB.]		✓		✓	
7.	Self-Managed Bonded	40	[Pengawasan mandiri untuk aktivitas pengelolaan barang]		✓	✓		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat

No.	Dimensi	No.	Item	Fiskal	Non Fiskal	Operator	Regulator	Sumber
		41	[Memiliki sistem Pengendalian Internal yang terhubung dengan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (<i>IT-based inventory</i>)]		✓	✓		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat
		42	[Monitoring aktivitas berdasarkan manajemen risiko]		✓	✓		
		43	[Pemberitahuan Pabean melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)]		✓	✓		
		44	[Pengemasan atau pengepakan kembali]		✓	✓		
		45	[Pembatasan jenis barang yang dapat ditampung dan dikelola oleh PLB.]		✓	✓		FGD
		46	[Pengelolaan PLB oleh perusahaan jasa logistik.]		✓		✓	
		47	[Fokus pada tujuan awal diinisiasinya program PLB.]		✓	✓		
8.	Penyelesaian Import Sementara	48	[Pemasukan barang <i>cost recovery</i> ke PLB]		✓	✓		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat
		49	[Menyelesaikan kewajiban ekspor untuk impor sementara]	✓		✓		
9.	Logistik Sederhana	50	[Pengemasan atau pengemasan kembali]		✓	✓		
		51	[Penyortiran]		✓	✓		
		52	[Standardisasi (<i>quality control</i>)]		✓	✓		
		53	[Penggabungan (<i>kitting</i>)]		✓	✓		
		54	[Pengepakan]		✓	✓		
		55	[Penyetelan]		✓	✓		
		56	[Konsolidasi barang tujuan ekspor]		✓	✓		
		57	[Penyediaan barang tujuan ekspor]		✓	✓		
		58	[Pemasangan kembali dan/ atau perbaikan]		✓	✓		
		59	[<i>Maintenance</i> pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (<i>painting</i>)]		✓	✓		
		60	[Pembauran (<i>blending</i>)]		✓	✓		
		61	[Pemberian label berbahasa Indonesia]		✓	✓		
		62	[Pemasangan kembali dan/atau perbaikan]		✓	✓		
		63	[Pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai]		✓	✓		
		64	[Lelang barang modal asal luar daerah pabean]		✓	✓		

No.	Dimensi	No.	Item	Fiskal	Non Fiskal	Operator	Regulator	Sumber
		65	[Pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean]		✓	✓		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat
		66	[Pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/ atau ekspor]		✓	✓		
		67	[Kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal]		✓	✓		
		68	[Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan operator gudang dan operator distribusi]		✓	✓		Logistic Performance Index Report 2018
		69	[Evaluasi kompetensi dan kualitas layanan <i>Freight Forwarder</i>]		✓	✓		
		70	[Evaluasikan kompetensi dan kualitas jasa badan pengecekan standar dan kualitas]		✓	✓		
10.	<i>Ease of Doing Business</i>	71	[Perbaikan prosedur perizinan kepabeanan dari PLB]		✓		✓	
		72	[Perbaikan prosedur perizinan dari Badan Bea Cukai]		✓		✓	
		73	[Perbaikan kualitas infrastruktur telekomunikasi/IT PLB]		✓	✓		
		74	[Perbaikan regulasi perusahaan mengenai kegiatan logistik dari PLB]		✓	✓		
		75	[Informasi berkala dan cukup mengenai pergantian regulasi pemerintah yang berlaku]		✓		✓	
		76	[Kemudahan dalam pengelolaan administrasi kepabeanan]		✓		✓	
		77	[Menjadi <i>hub</i> logistik di Asia Pasifik]		✓		✓	
		78	[Mempunyai layanan terstandar internasional]		✓	✓		
		79	[Penerapan teknologi pergudangan]		✓	✓		
		80	[Kemudahan penyimpanan barang berstatus entitas asing]		✓		✓	
		81	[Kemudahan pengelolaan logistik barang milik sendiri]		✓		✓	
		82	[Kemudahan pengelolaan logistik barang titipan]		✓		✓	
		83	[Kemudahan pengelolaan logistik barang konsinyasi]		✓		✓	
		84	[Transparansi laporan administrasi kepabeanan]		✓	✓		
		85	[Kemudahan proses perizinan untuk menjadi anggota PLB]		✓		✓	
		86	[Kemudahan pelayanan perizinan]		✓		✓	
		87	[kemudahan pelayanan kegiatan operasional]		✓	✓		

No.	Dimensi	No.	Item	Fiskal	Non Fiskal	Operator	Regulator	Sumber
		88	[kemudahan kepabeanan dan cukai lainnya]		✓		✓	FGD
		89	[Sinkronisasi antar peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan operasional PLB.]		✓		✓	
		90	[Sosialisasi peraturan-peraturan baru yang mengatur kegiatan operasional PLB.]		✓		✓	
		91	[Pemahaman yang menyeluruh dan sama antar pemangku kepentingan atas peraturan-peraturan terkait PLB.]		✓		✓	
		92	[Kerumitan proses pelengkapan dokumen ekspor/impor.]		✓		✓	
		93	[Penurunan <i>dwelling time</i> .]		✓	✓		



**Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada**

Gedung Pertamina Tower Lantai 2, Jl. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Phone: +62 274 548510 | Fax: +62 274 580765 | Email: info@p2ebfeb.ugm.com